

WALIKOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perubahan yang mendasar terkait dengan adanya perubahan kebijakan nasional yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan dan keuangan daerah serta terjadinya keadaan luar biasa wabah pandemic Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional, maka perlu dilakukannya perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 6 Nomor 2009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);

28. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018-2023.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Mengubah Lampiran sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan dasar untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama rentang waktu 5 (lima) tahun kepemimpinan Kepala Daerah.
- (2) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 01 Juli 2022

WALIKOTA JAMBI,



~~SYARIF FASHA~~

Diundangkan di Jambi

Pada tanggal 01 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



A. RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2022 NOMOR 41

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR : (1-12/2022)



**PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
DAN
WALIKOTA JAMBI
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI**

PADA HARI INI SELASA TANGGAL SEMBILAN BELAS BULAN APRIL TAHUN DUA RIBU DUA PULUH DUA BERTEMPAT DI RUANG SIDANG SWARNA BUMI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI BERDASARKAN BERITA ACARA NOMOR : PD.03.02/13/DPRD/2022 TENTANG HASIL RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA JAMBI DALAM RANGKA PENGESAHAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI.

ADAPUN 2 (DUA) RANPERDA SEBAGAIMANA DIMAKSUD ADALAH:

1. RANPERDA TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.
2. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA JAMBI TAHUN 2018-2023

TELAH DISETUJUI BERSAMA ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI DAN WALIKOTA JAMBI TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI.

DEMIKIAN PERSETUJUAN BERSAMA INI DIBUAT DAN DITANDA TANGANI UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA JAMBI

Ketua,

PUTRA ABSOR HASIBUAN, SH

WALIKOTA JAMBI

Dr. H. SYARIF FASHA, ME

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-6
1.3. Hubungan RPJMD Kota Jambi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-10
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-16
1.5. Sistematika Penulisan.....	I-17
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.2. Kondisi Kependudukan.....	II-9
2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-13
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-14
2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-14
2.2.2. Kesejahteraan Sosial.....	II-28
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-39
2.3.1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-39
2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-59
2.3.3. Layanan Urusan Pilihan.....	II-87
2.3.4. Urusan Penunjang.....	II-93
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-101
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-102
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-105
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	II-108
2.4.4. Fokus Kualitas Sumber Daya Manusia	II-110
2.4.5. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-113
2.4.6. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	II-116
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III-2
3.1.2. Neraca Daerah	III-12

3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-17
3.2.1.	Kebijakan Umum Pendapatan Daerah.....	III-17
3.2.2.	Kebijakan Umum Belanja Daerah	III-18
3.2.3.	Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah	III-19
3.2.4.	Proporsi Anggaran Pendapatan.....	III-19
3.2.5.	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-21
3.2.6.	Analisis Pembiayaan Daerah.....	III-23
3.3.	Kerangka Pendanaan.....	III-27
3.3.1.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-27
3.3.2.	Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-33
3.3.3.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah ...	III-35
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	
4.1.	Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.2.	Isu Strategis	IV-28
BAB V	VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN	
5.1.	Visi	V-1
5.2.	Misi	V-2
5.3.	Tujuan dan Sasaran.....	V-4
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	
6.1.	Strategi dan Arah Kebijakan.....	VI-1
6.1.1.	Strategi Pembangunan Daerah	VI-1
6.1.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	VI-5
6.2.	Program Pembangunan Daerah.....	VI-14
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah	VII-1
7.2.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan.....	VII-3
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
8.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	VIII-3
BAB IX	PENUTUP	
9.1.	Pedoman Transisi	IX-1
9.2.	Kaidah Pelaksanaan	IX-2

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
2.1.	Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Kelurahan	II-1
2.2.	Rata-rata Kelembaban Udara , Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Tahun 2020	II-4
2.3.	Penggunaan Lahan Di Kota Jambi.....	II-6
2.4.	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Jambi Tahun 2013-2020.....	II-9
2.5.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Jambi Tahun 2013-2020.....	II-10
2.6.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Jambi Tahun 2013-2020 Berdasarkan Kecamatan.....	II-13
2.7.	Komponen Pembentukan IPM Kota Jambi Tahun 2020	II-15
2.8.	Data Kemiskinan Kota Jambi 2013-2020.....	II-16
2.9.	Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2020 (Miliar Rupiah)	II-18
2.10.	Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Miliar Rupiah)	II-18
2.11.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013- 2020 (Persen)	II-20
2.12.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2013-2020 (Milyar Rupiah).....	II-23
2.13.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintahan Terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2013-2020 (Milyar Rupiah)....	II-24
2.14.	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2013-2020 (Milyar Rupiah).....	II-24
2.15.	Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2013-2020.....	II-26
2.16.	Angka Partisipasi Kasar SD /MI/ Paket A, SMP/MTS/Paket B dan SMA/SMK/Paket C di Kota Jambi Tahun 2013-2020.....	II-31
2.17.	Angka Kelulusan SD/MI di Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-32
2.18.	Angka Kelulusan SMP/MTS di Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-32

2.19.	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A, SMP/MTS/Paket B, SMA/SMK/Paket C di Kota Jambi Tahun 2013-2020.....	II-33
2.20.	Indikator Makro Kesehatan di Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-35
2.21.	Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Jambi Tahun 2013-2020.....	II-38
2.22.	Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya	II-39
2.23.	Jumlah Cabang Olahraga dan Gedung Olahraga.....	II-39
2.24.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk Kota Jambi Tahun 2013-2020.....	II-40
2.25.	Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-41
2.26.	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Jambi Tahun 2013-2020.....	II-43
2.27.	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Jambi Menurut Kecamatan Tahun 2020	II-43
2.28.	Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA Kota Jambi Tahun 2013-2020.....	II-44
2.29.	Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2013-2020	II-45
2.30.	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2013-2020	II-45
2.31.	Rasio Puskesmas/Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2013-2020.	II-46
2.32.	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2013-2020	II-46
2.33.	Kawasan Kumuh di Kota Jambi Berdasarkan SK Walikota.....	II-54
2.34.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Jambi Tahun 2020.....	II-57
2.35.	Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum di Kota Jambi Tahun 2013-2020.....	II-57
2.36.	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Kota Jambi Tahun 2020	II-66
2.37.	Indikator Urusan Pertanahan Kota Jambi 2013-2020	II-67
2.38.	Jumlah Pembuatan Sertifikat Tanah di Kota Jambi	II-68
2.39.	Indikator Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-69
2.40.	Persentase Penanganan Sampah Kota Jambi Tahun 2013-2020 ..	II-70
2.41.	Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-72
2.42.	Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat	II-72
2.43.	Pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-73

2.44.	Indikator Sarana dan Fasilitas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-74
2.45.	Pembangunan Urusan Perhubungan Tahun 2013-2020	II-76
2.46.	Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2020	II-77
2.47.	Jumlah Surat Kabar Nasional / Lokal di Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-78
2.48.	Indikator Urusan UMKM Kota Jambi Tahun 2013-2020.....	II-81
2.49.	Jumlah Investor dan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kota Jambi 2013-2020	II-82
2.50.	Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Jambi 2013-2020.....	II-82
2.51.	Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga	II-83
2.52.	Capaian Urusan Persandian Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-84
2.53.	Capaian Urusan Kebudayaan	II-85
2.54.	Capaian Urusan Perpustakaan	II-86
2.55.	Capaian Urusan Kearsipan	II-87
2.56.	Indikator Urusan Pariwisata Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-89
2.57.	Indikator Urusan Pertanian Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-89
2.58.	Indikator Urusan Perdagangan Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-91
2.59.	Indikator Pertumbuhan IKM Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-92
2.60.	Capaian Kesesuaian Perencanaan Program Kota Jambi Tahun 2013-2020.....	II-95
2.61.	Indikator Urusan Keuangan Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-96
2.62.	Indikator Urusan Kepegawaian dan Diklat Kota Jambi Tahun 2013-2020.....	II-98
2.63.	Indikator Urusan Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2020.....	II-99
2.64.	Indikator Urusan Pengawasan Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-101
2.65.	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga di Kota Jambi Tahun 2013-2020.....	II-103
2.66.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Jambi Tahun 2016-2020.....	II-106
2.67.	Persentase Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Listrik di Kota Jambi Tahun 2013-2020.....	II-107
2.68.	Lama Proses Perizinan di Kota Jambi Tahun 2020	II-108

2.69.	Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Jambi Tahun 2013-2020.....	II-109
2.70.	Jumlah Kasus Kejahatan di Kota Jambi Tahun 2014-2020.....	II-109
2.71.	Jumlah Demonstrasi di Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-110
2.72.	Perkembangan Ketenagakerjaan di Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-111
2.73.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-112
2.74.	Rasio Ketergantungan di Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-112
3.1.	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013-2017 Kota Jambi	III-3
3.2.	Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2017.....	III-11
3.3.	Analisis Rasio Keuangan Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2017....	III-12
3.4.	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2017	III-14
3.5.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Jambi Tahun 2013-2020	III-21
3.6.	Defisit Riil Anggaran Kota Jambi	III-23
3.7.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Jambi.....	III-23
3.8.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Jambi	III-24
3.9.	Defisit Riil Anggaran Kota Jambi Tahun 2013-2017	III-25
3.10.	Proyeksi RPJMD dan APBD Kota Jambi Tahun 2018 s/d Tahun 2020	III-30
3.11.	APBD Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 dan 2023	III-32
3.12.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019 – 2023	III-34
3.13.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Jambi Tahun 2019 – 2023.....	III-34
4.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi Tahun 2012-2018	IV-7
4.2.	Persentase Penanganan Sampah Kota Jambi	IV-8
4.3.	Indikator Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kota Jambi Tahun 2013 – 2017	IV-9
4.4.	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Kota Jambi Tahun 2017	IV-11

5.1.	Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi (Sebelum Perubahan)	V-7
5.2.	Visi, Misi, Tujuan Jangka Menengah Kota Jambi (Setelah Perubahan)	V-10
5.3.	Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi (Setelah Perubahan)	V-11
6.1.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Jambi	VI-3
6.2.	Arah Kebijakan.....	VI-6
6.3.	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif (Sebelum Perubahan)	VI-20
6.4.	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif (Setelah Perubahan)	VI-44
7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2018 – 2023 (Sebelum Perubahan).....	VII-2
7.2.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019 - 2023	VII-3
7.3.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Jambi Tahun 2019 - 2023.....	VII-3
7.4.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2018 -2023 (Sebelum Perubahan)	VII-5
7.5.	Indikasi Rencana Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2018 -2023 (Setelah Perubahan)	VII-23
7.6.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2018 -2023 (Setelah Perubahan)	VII-27
8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Jambi (Sebelum Perubahan)	VIII-5
8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Jambi (Setelah Perubahan)	VIII-6
8.3.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Jambi (Sebelum Perubahan)	VIII-7
8.4.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Jambi (Setelah Perubahan).....	VIII-20

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
1.1.	Tahapan Pembangunan dan Arahan Kebijakan RPJPD Kota Jambi 2005-2025	I-11
1.2.	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	I- 16
2.1.	Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Kota Jambi.....	II-2
2.2.	Peta Topografi Kota Jambi	II-3
2.3.	Struktur Geologi Kota Jambi.....	II-4
2.4.	Peta Penggunaan Lahan di Kota Jambi.....	II-7
2.5.	Peta Rawan Bencana Kota Jambi	II-8
2.6.	Perkembangan Demografi Kota Jambi 2013-2020	II-9
2.7.	Jumlah Penduduk Kota Jambi Berdasar Struktur Usia Tahun 2020	II-11
2.8.	Distribusi Penduduk Kota Jambi Tahun 2020	II-12
2.9.	Perkembangan IPM Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-15
2.10.	Perkembangan Kemiskinan Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-17
2.11.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi Tahun 2012-2020.	II-22
2.12.	Nilai Inflasi Rata-rata di Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-27
2.13.	Perkembangan Koefisien Gini di Kota Jambi Tahun 2013-2020 ...	II-28
2.14.	Perkembangan Angka Melek Huruf di Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-29
2.15.	Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-30
2.16.	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-30
2.17.	Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A, SMP/MTS/PAket B dan SMA/SMK/PAket C di Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-34

2.18.	Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Jambi Tahun 2013-2020 (dalam tahun)	II-35
2.19.	Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-36
2.20.	Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-37
2.21.	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Jambi Tahun 2013-2020 ..	II-38
2.22.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK di Kota Jambi Tahun 2013-2020.....	II-40
2.23.	Jumlah Sekolah SD/MI dan SMP/MTS menurut Kecamatan di Kota Jambi Tahun 2020.....	II-41
2.24.	Kondisi Ruang Kelas SD/MI Tahun 2020.....	II-42
2.25.	Kondisi Ruang Kelas SMP/MTs Tahun 2020	II-42
2.26.	Rasio Panjang Jalan yang Baik di Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-48
2.27.	Rasio Panjang Drainase yang Baik di Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-50
2.28.	Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-51
2.29.	Jumlah Pelanggan dan Cakupan Pelayanan Air Bersih di Kota Jambi Tahun 2013-2020.....	II-52
2.30.	Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal.....	II-53
2.31.	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	II-53
2.32.	Data Jumlah Rumah di Kota Jambi per Kecamatan Tahun 2020..	II-54
2.33.	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum yang Terpasang di Kota Jambi Tahun 2020.....	II-56
2.34.	Penanganan PMKS di Kota Jambi Tahun 2013-2020.....	II-59
2.35.	Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kota Jambi Tahun 2013-2020..	II-60
2.36.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-60
2.37.	Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2013-2020.....	II-61
2.38.	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-61
2.39.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota Jambi Tahun 2013-2020.....	II-62

2.40.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Jambi Tahun 2013-2018	II-63
2.41.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Jambi Tahun 2013-2018	II-63
2.42.	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-64
2.43.	Indikator Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-70
2.44.	Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2013-2020 Kota Jambi.....	II-79
2.45.	Persentase Koperasi Aktif di Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-80
2.46.	Produksi Perikanan di Kota Jambi Menurut Sumber Produksi Tahun 2013-2020 (dalam Ton)	II-88
2.47.	Indikator Urusan Perencanaan Kota Jambi Tahun 2013-2020.....	II-94
2.48.	Indikator Urusan Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-100
2.49.	Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga di Kota Jambi Tahun 2013-2018	II-104
2.50.	Sumber Air Bersih Rumah Tangga (RT) di Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-106
2.51.	Persentase Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih di Kota Jambi Tahun 2013-2020	II-107
3.1.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017	III-6
3.2.	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2017.	III-7
3.3.	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2013-2017	III-7
3.4.	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2013-2017	III-8
3.5.	Target dan Realisasi Belanja Tahun 2013-2017	III-9
3.6.	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2013-2017.	III-9
3.7.	Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2013-2017.....	III-10
3.8.	Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017	III-20
3.9.	Proporsi Agregat Realisasi Pendapatan Tahun 2013-2020	III-20
3.10.	Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2013-2020	III-21
3.11.	Proporsi Agregat Realisasi Belanja Tahun 2013-2020.....	III-22
6.1.	Arsitektur Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah.....	VI-14
6.2.	Ilustrasi Implementasi Janji/Program Prioritas Kepala Daerah.....	VI-15

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintah daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara. Kondisi yang ingin dicapai seperti itu, dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan, bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang visi dan misi, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan, maka RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kota Jambi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Tahun 2018-2023 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kota Jambi ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang memengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana peraturan yang berlaku (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017), RPJMD harus selaras dengan RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, maka untuk menselaraskan dengan perubahan kebijakan nasional dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (5), yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Secara teknis dan administrasi, perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 342 Ayat (1) dan Ayat (3) yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik social budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, maka yang menjadi dasar dilakukan perubahan adalah terjadinya perubahan yang mendasar adanya perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah, di antaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Corona Virus Disease (COVID-19), dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia dan termasuk Kota Jambi, memperlihatkan peningkatan dan penyebaran yang semakin meluas. Hal ini memberi dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor pembangunan karena upaya penanganan pandemi. Keadaan seperti ini mempengaruhi pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2020 dan 2021, sehingga dibutuhkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang sebagian besar disiapkan untuk

penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) yang sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah. Pergeseran anggaran telah dilakukan beberapa kali untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19. Oleh sebab itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2022, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak COVID-19 merupakan tambahan prioritas pembangunan Kota Jambi.

Memperhatikan perkembangan kondisi nasional dan Kota Jambi akibat pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah (IKU pemda), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (impact) dan tingkat hasil (outcome). Selain itu, perlu ditetapkan/diambil juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya.

Substansi RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU Perangkat Daerah dan target kinerjanya, dan indikator kinerja program.

Penyusunan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 merupakan Tahap IV (keempat) RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025 yang memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jambi, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah sebagai proses penyusunan rencana program karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam RPJMD;

2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki; dan
4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Penyusunan perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 dilakukan mutatis mutandis sebagaimana penyusunan RPJMD. Hal ini sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 344. Perubahan RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Perda tentang Perubahan RPJMD.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu:

1. RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 merupakan media untuk mengimplementasikan janji kepala daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD);
4. RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 merupakan alat atau instrument pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI);
5. RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala perangkat daerah selama 5 (lima) tahun;
6. RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan provinsi; dan
7. Pedoman arah kebijakan percepatan penanganan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19 di Kota Jambi.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan dokumen RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 6 Nomor 2009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Struktur Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
36. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 7).

1.3. Hubungan RPJMD Kota Jambi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Mengacu kepada sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan secara umum. RPJMD Kota Jambi adalah merupakan kesatuan dari seluruh dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi. Secara Hierearkis, RPJMD Kota Jambi periode 2018-2023, sangat berhubungan erat dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain:

1. Hubungan antara RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 dalam merumuskan Program Prioritas mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 yang mana dalam hal ini terdapat 7 Prioritas Nasional yang menjadi acuan, sebagai berikut :

Program Prioritas RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023	Program Prioritas RPJMN Tahun 2020-2024
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

2. RPJMD Kota Jambi dengan RPJPD Kota Jambi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi yang merupakan Rancangan Pembangunan Periode ke empat dari RPJPD Kota Jambi 2005-2025. Dalam RPJPD Kota Jambi, visi yang telah ditetapkan adalah **“Pusat Perdagangan Barang dan Jasa, yang Religus dan Berbudaya”**, dimana visi tersebut dituangkan dalam visi RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 yaitu **“Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak Dan Berbudaya dengan Mengedepankan**

Pelayanan Prima” yang dituangkan dalam 5 (lima) Misi yang saling terkait satu sama lainnya sebagaimana cita-cita nasional bangsa Indonesia sesuai UUD 1945 yaitu mewujudkan “Masyarakat Adil dan Makmur”.



Gambar 1.1.
Tahapan Pembangunan dan
Arahan Kebijakan RPJPD Kota Jambi 2005-2025

3. RPJMD Kota Jambi dengan RPJMD Provinsi Jambi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi periode 2016-2021 Berdasarkan kondisi riil Kota Jambi dilihat dari RPJMD Provinsi Jambi dan RPJMN adalah penerapan atau manifestasi dari seluruh program unggulan masing-masing RPJMD dituangkan dalam misi-misi terkait yang dapat dikerjakan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan oleh seluruh organisasi perangkat daerah. Terdapat 6 (enam) misi RPJMD Provinsi Jambi yaitu:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah dan desa yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif serta berorientasi pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan jaminan kepastian hukum.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri.
5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum, Pengelolaan energy dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

4. Hubungan RPJMD Kota Jambi dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi

Dalam perspektif perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Jambi, Kota Jambi merupakan bagian dari Kawasan Strategis Metropolitan Jambi dan Kawasan Strategis Muara Bulian-Jambi. Secara administratif lokasi Kawasan Strategis Metropolitan Jambi terdapat di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Kawasan Strategis Metropolitan Jambi merupakan kawasan yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan strategis, dengan sektor unggulan yaitu perdagangan, jasa dan industri. Kawasan Strategis Metropolitan Jambi ini berfungsi untuk mendorong upaya optimalisasi Kota Jambi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan mendukung pengembangan sektor perdagangan, jasa dan industri skala nasional di Provinsi Jambi.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Provinsi Jambi yang terkait dengan Kota Jambi antara lain:

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Barat, Tengah dan Timur, melalui salah satu strategi yaitu meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat pelayanan berupa pengembangan fasilitas bongkar muat termasuk di PKN;
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah, melalui beberapa strategi seperti meningkatkan dan mengembangkan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan;
3. Pengoptimalisasian pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui strategi antara lain mengembangkan sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan potensi yang ada, dan meningkatkan pemanfaatan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan;
4. Penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah, melalui strategi pemantapan PKN Kota Jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Jambi.

5. Hubungan RPJMD Kota Jambi dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Jambi

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) memberikan arahan pembangunan yang bersifat spasial dan berimplikasi pada keruangan. Sedangkan Rencana Pembangunan, memberi payung konseptual bagi pembangunan secara spasial sebagai perwujudan visi misi kepala daerah.

Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kota Jambi juga memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Jambi.

Sebagaimana diketahui, tujuan RTRW Kota Jambi adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan dan jasa. Adapun kebijakan dan strategi implementasi penataan ruang wilayah Kota Jambi terdiri atas:

- A. Kebijakan pemantapan peran dan fungsi kota sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan, dan Jasa Regional, melalui strategi:**
 - a) Menyediakan fasilitas perdagangan pusat koleksi dis tribusi dan jasa guna mendukung upaya pembangunan kawasan agropolitan Provinsi Jambi;
 - b) Memperkuat fungsi kompleks pemerintahan, perdagangan, dan jasa terpadu berskala regional.
- B. Kebijakan pemantapan peran dan fungsi kota sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan, dan Jasa Regional, melalui strategi:**
 - a) Memperkuat kemampuan Bandara Sultan Thaha sebagai pusat penyebaran tersier;
 - b) Meningkatkan kemampuan jaringan jalan arteri sebagai penunjang utama konektivitas regional;

- c) Mengembangkan simpul dan jaringan transportasi kereta api yang terpadu dengan moda transportasi lainnya;
 - d) Menguatkan kemampuan DAS Batanghari sebagai jaringan transportasi regional berbasis alam.
- C. Kebijakan pembentukan struktur ruang kota yang optimal dan peningkatan kemampuan infrastruktur perkotaan, melalui strategi:**
- a) Mengembangkan pusat–pusat pelayanan kota dengan berbasis suatu fungsi utama yang didukung oleh kemampuan bagian wilayah kota;
 - b) Mempercepat penguatan kemampuan dan fungsi jaringan jalan kota;
 - c) Mendorong pengembangan moda transportasi massal yang terkoneksi dengan pusat–pusat kegiatan;
 - d) Mempercepat pemerataan akses pergerakan penumpang dan barang dari Selatan–Utara kota;
 - e) Meningkatkan kemampuan utilitas perkotaan meliputi listrik, minyak, gas, persampahan dan air bersih;
 - f) Mendorong pengembangan prasarana permukiman ramah lingkungan.
- D. Kebijakan peningkatan kegiatan ekonomi perkotaan yang diakomodasi dalam pola ruang internal kota yang produktif dan berbasis ekologi melalui strategi:**
- a) Mengembangkan kegiatan jasa, perdagangan dan industri untuk mendukung kegiatan ekonomi primer dan sekunder regional, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan terutama di kawasan Metropolitan Jambi;
 - b) Mendorong pengembangan kegiatan pariwisata dan jasa kreatif berbasis potensi lingkungan hidup dan budaya;
 - c) Mendorong pengembangan kegiatan industri maupun ekonomi beresiko tinggi dengan berbasis mitigasi bencana dan pencemaran;
 - d) Mempermudah akses investasi dan peran serta dunia usaha maupun masyarakat dalam menggerakkan kegiatan ekonomi produktif dalam skala kawasan ataupun komunitas.
- E. Kebijakan penyelenggaraan pemanfaatan ruang kota yang berkelanjutan (*social and environmentally sustainable*) melalui strategi:**
- a) Memeratakan akses penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum;

- b) Mendorong pengembangan kegiatan berbasis kearifan lokal dan budaya penduduk Jambi;
- c) Memastikan penyelenggaraan pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana;
- d) Mempercepat pemenuhan standar penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan secara merata.

F. Kebijakan pembentukan ruang–ruang perkotaan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui strategi:

- a) Menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan sosial lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum;
- b) Memperkuat aksesibilitas ruang terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan dan sosial lainnya secara merata di seluruh wilayah kota;
- c) Mengadakan ruang-ruang publik (hijau dan non hijau) serta ruang rekreasi untuk memungkinkan masyarakat berinteraksi.

G. Kebijakan penguatan aspek pengawasan dan pengendalian di dalam penyelenggaraan penataan ruang kota melalui strategi:

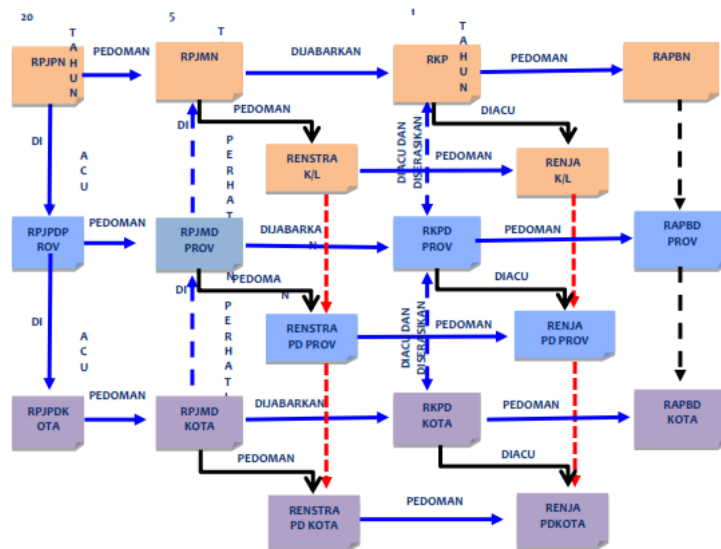
- a) Memastikan keterkaitan implementasi kebijakan penataan ruang dan substansi rencana umum tata ruang (melalui produk RTRW) ke dalam berbagai produk rencana rinci tata ruang;
- b) Memperkuat penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pengendalian tata ruang;
- c) Memperkuat koordinasi pihak–pihak yang merupakan *leading sector* penataan ruang kota;
- d) Mewujudkan mekanisme insentif–disinsentif dan mekanisme sanksi yang berkeadilan dalam penyelenggaraan penataan ruang kota.

6. RPJMD Kota Jambi dengan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kota Jambi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 sangat terkait dengan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kota Jambi Tahun 2018-2023, hubungan ini tergambar dalam sebuah gambar yang dilingkupi oleh Rancangan Pembangunan Nasional diikuti oleh Rencana Kerja Provinsi Jambi atau level diatas Rencana Kerja Pemerintah Kota Jambi. Hubungan Rencana Strategis yang dijabarkan dari

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam RPJMD periode 2018-2023 sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi periode 2005-2025. RPJMD periode 2018-2023 sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi periode 2005-2025 akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah setiap Tahunnya.

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



Gambar 1.2.
Hubungan RPJMD dengan
Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018–2023 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah sampai dengan Tahun 2023, yang memuat visi, misi Kepala Daerah, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan.

Tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018–2023 adalah:

1. Menjabarkan dan menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
2. Memberikan gambaran tentang keuangan daerah dan pendanaan pembangunan daerah jangka menengah;
3. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran;

4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Jambi;
5. Memberikan instrumen dan indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018–2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari 9 bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Jambi secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang disajikan diantaranya aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas riil atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Bab ini menyajikan mengenai kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

BAB ini memuat berbagai permasalahan pembangunan yang diuraikan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) Tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kota Jambi untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarnya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB ini memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Bab ini juga menyajikan program pembangunan daerah yang dirumuskan dari masing-masing strategi untuk selanjutnya dijabarkan dalam program prioritas atau program operasional pada perangkat daerah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target dan Perangkat Daerah pelaksana berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB ini berisikan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan

BAB X PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi-

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Letak Geografis dan Kondisi Administrasi Kota

Kota Jambi sebagai pusat wilayah dan Ibukota Provinsi Jambi, secara geografis terletak pada koordinat 01°32'45" sampai dengan 01°41'41" Lintang Selatan dan 103°31'29" sampai dengan 103°40'6" Bujur Timur. Secara administrasi wilayah Kota Jambi berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi

Luas keseluruhan wilayah administrasi Kota Jambi menurut Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1986 seluas 205,38 KM² atau sekitar 0,38% dari luas wilayah Provinsi Jambi dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 seluas 175,53 KM². Secara administratif Kota Jambi terbagi atas 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

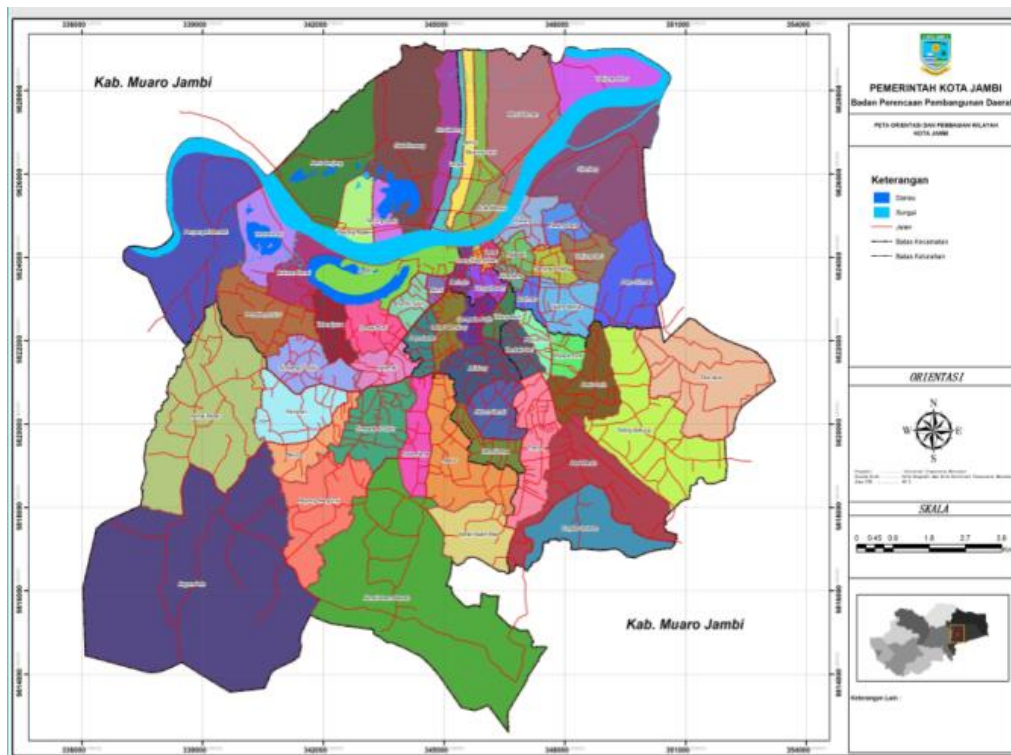
Tabel 2.1.

Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Jumlah Kelurahan
1.	Telanaipura	19,20	10,93%	6
2.	Kotabaru	26,26	14,96%	5
3.	Jambi Timur	14,32	8,15%	9
4.	Jambi Selatan	7,51	4,27%	5
5.	Jelutung	7,63	4,34%	7
6.	Pasar Jambi	1,67	0,95%	4
7.	Danau Sipin	7,27	4,14%	5
8.	Danau Teluk	15,20	8,65%	5
9.	Pelayangan	12,77	10,12%	6
10.	Alam Barajo	39,87	22,71%	5
11.	Paal Merah	23,77	13,54%	5
Jumlah		175,53	100	62

Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2018 (data diolah)

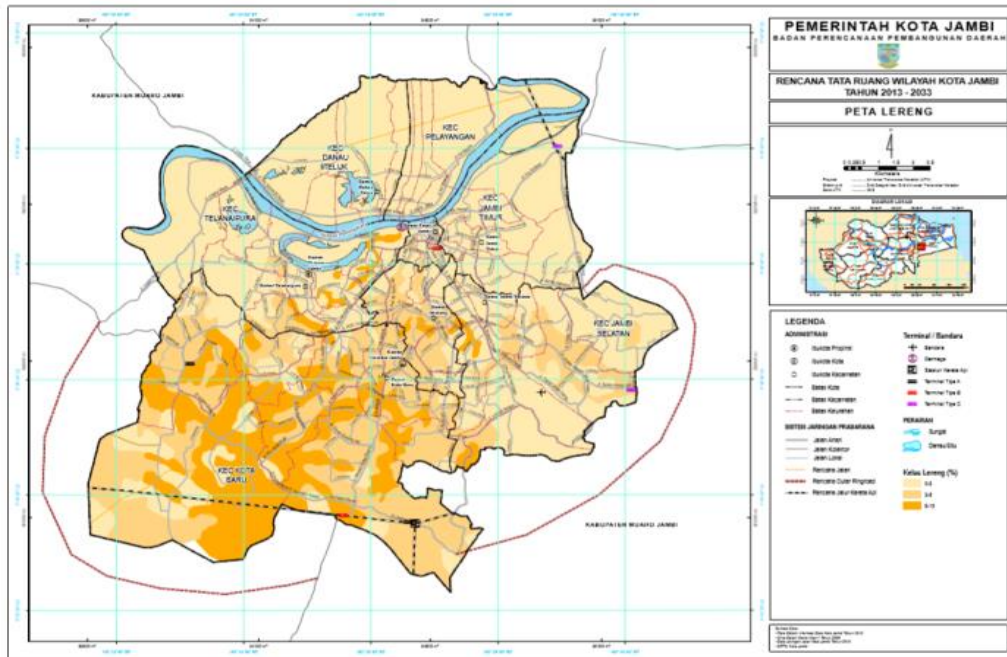
Untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan batas administrasi dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 2.1.
Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Kota Jambi

2.1.1.2. Topografi

Secara umum berdasarkan bentang alamnya, Kota Jambi berada pada ketinggian antara 10 sampai dengan 60 meter dari permukaan laut (mdpl) dan sebagian besar wilayah Kecamatan seperti: Pasar Jambi, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0 – 10 meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi Timur dan Kota Baru sebagian besar berada pada ketinggian 10 – 40 meter dari permukaan laut.



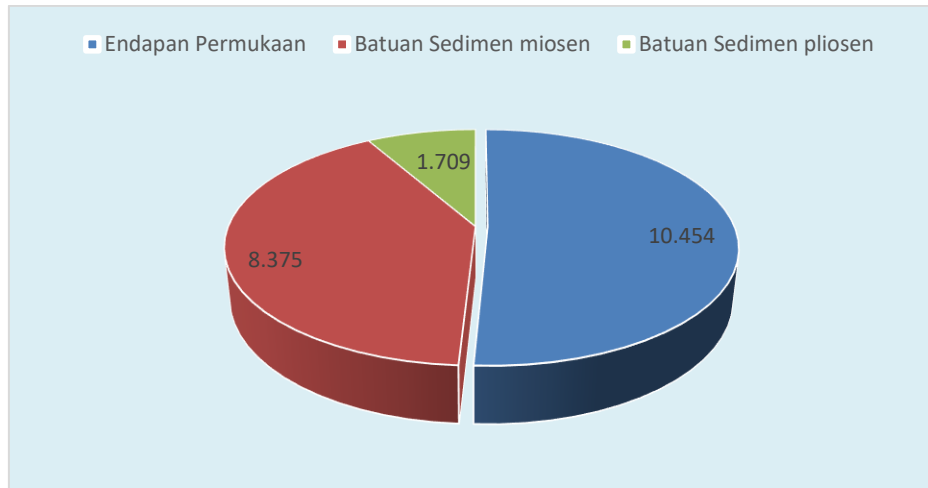
Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2018 (data diolah)

Gambar 2.2.
Peta Topografi Kota Jambi

2.1.1.3. Geologi

Dilihat dari struktur batuan, pada umumnya wilayah Kota Jambi terbentuk dari struktur batuan endapan permukaan, batuan sedimen umur miosen dan batuan sedimen umur pliosen. Struktur batuan endapan permukaan pada umumnya tersebar di sebelah utara Sungai Batanghari, meliputi Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan. Sedangkan batuan sedimen umur miosen tersebar di sebelah barat wilayah Kota Jambi meliputi Kecamatan Kota Baru.

Berdasarkan luasannya, jenis batuan endapan permukaan menempati areal seluas 10.454 hektar mencapai 50,90% dari total wilayah Kota Jambi, batuan sedimen umur miosen seluas 8.375 hektar (40,78%) dan batuan sedimen umur pliosen seluas 1.709 hektar (8,32%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Data Pokok Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2013

Gambar 2.3.
Struktur Geologi Kota Jambi

2.1.1.4. Klimatologi

Pada Tahun 2020 umumnya wilayah Kota Jambi dan sekitarnya beriklim tropis dengan dipengaruhi oleh dua musim, yaitu Musim Barat dan Musim Timur. Pada saat musim barat angin bertiup ke arah barat yang biasanya terjadi pada April–Oktober, sementara musim Timur angin bertiup ke arah Timur dan Selatan yang berlangsung pada Oktober–April. Musim kemarau umumnya terjadi pada Mei sampai September dan musim hujan terjadi pada Oktober sampai April.

Selama tahun 2020 kelembaban udara rata-rata terendah 79% pada bulan Agustus, sedangkan tertinggi sebesar 85% pada bulan Mei. Curah hujan paling tinggi selama tahun 2020 terjadi pada bulan Oktober yaitu 368,1 mm³ dan paling rendah terjadi pada bulan Februari yaitu 86,1 mm³. Sedangkan hari hujan paling banyak terjadi pada bulan Januari dan Mei sebanyak 22 hari, dan hari hujan paling sedikit sebanyak 7 hari terjadi pada bulan Agustus. Rata-rata kelembaban udara menurut bulan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Rata-rata kelembaban udara, Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Tahun 2020

Bulan	Kelembaban Udara (%)			Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan (hari)
	Maks	Min	Rata-rata		
Januari	97	57	83	152,2	22
Februari	97	54	81	86,1	12
Maret	98	55	81	231,8	20
April	97	52	82	205,3	21

Bulan	Kelembaban Udara (%)			Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan (hari)
	Maks	Min	Rata-rata		
Mei	98	62	85	219,8	22
Juni	97	56	84	94,7	15
Juli	97	54	84	198,3	15
Agustus	96	50	79	95,9	7
September	98	54	82	182,2	19
Oktober	96	55	82	368,1	20
November	97	52	83	264,9	20
Desember	97	52	81	324,4	16

Sumber : BPS Kota Jambi, 2020

2.1.1.5. Hidrologi dan Hidrogeologi

Kota Jambi dibelah oleh Sungai Batanghari sehingga membentuk morfologi kota terbelah dengan 2 (dua) bagian besar yaitu bagian Selatan dan bagian Utara. Bagian selatan merupakan bagian terbesar wilayah Kota Jambi. Pada wilayah ini sedikitnya terdapat 5 (lima) buah anak Sungai Batanghari, yaitu:

1. Sungai Kenali Besar

Sungai ini melewati Kecamatan Kotabaru dan Kecamatan Telanaipura, kemudian masuk kedalam Danau Kenali terus ke Danau Sipin dan akhirnya bermuara ke Sungai Batanghari.

2. Sungai Kambang

Daerah pengaliran Sungai Kambang meliputi sebagian Kelurahan Simpang III Sipin di Kecamatan Kota Baru dan Kelurahan Simpang IV Sipin.

3. Sungai Asam

Daerah pengaliran Sungai Asam meliputi Kecamatan Kota Baru (yaitu meliputi sebagian Kelurahan Kenali Asam Bawah, sebagian Kelurahan Kenali Asam Atas, Kelurahan Sukakarya, Kelurahan Simpang III Sipin dan Kelurahan Paal Lima), Kecamatan Jelutung (yaitu meliputi Kelurahan Jelutung, Kelurahan Lebak Bandung dan Kelurahan Cempaka Putih), Kecamatan Pasar Jambi (meliputi Kelurahan Beringin dan Kelurahan Orang Kayo Hitam).

4. Sungai Tembuku

Daerah pengaliran Sungai Tembuku meliputi sebagian Kecamatan Thehok, Kelurahan Tambak Sari, sebagian Kelurahan Kebon Handil, Kelurahan Jelutung, sebagian Kelurahan Cempaka Putih, Kelurahan Talang Jauh, sebagian Kelurahan Sulanjana, Kelurahan Rajawali dan Kelurahan Kasang.

5. Sungai Selincah

Daerah pengaliran Sungai Selincah meliputi Kelurahan Talang Bakung dan Kelurahan Sijenjang.

Sungai Batanghari selain berfungsi hidrologis juga berfungsi sebagai prasarana transportasi dan penunjang kegiatan ekonomi masyarakat serta sebagai sumber air baku untuk air minum. Sedangkan danau yang ada di Kota Jambi antara lain adalah Danau Sipin, Danau Teluk, Danau Penyengat dan Danau Kambang.

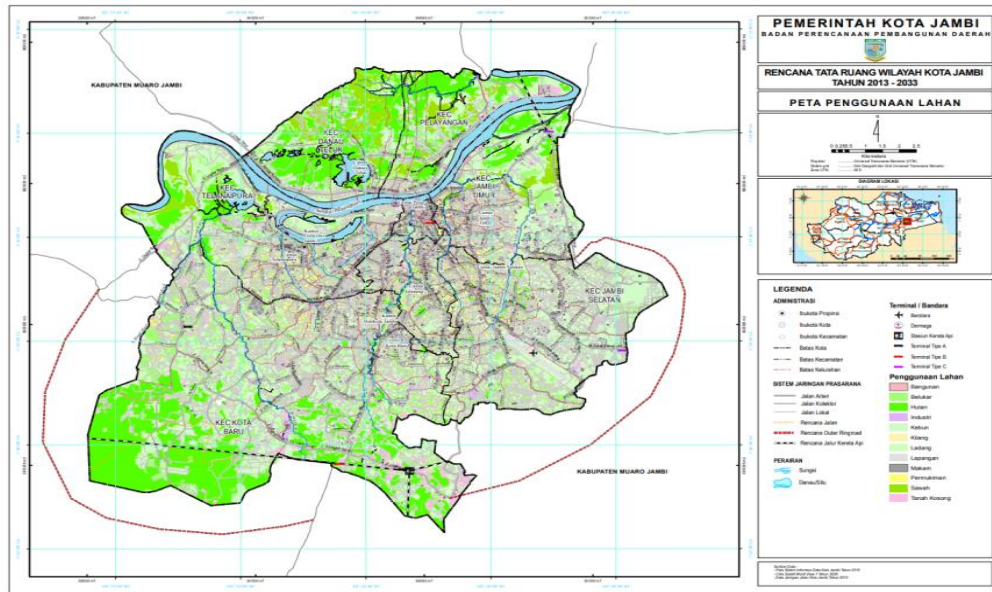
2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Hasil pengolahan citra satelit Kota Jambi Tahun 2018 yang memperhatikan kemajuan pembangunan Tahun 2020 dengan skala peta 1:5.000 menunjukkan persentase tertinggi pada penggunaan tanah campuran sebesar 26,62%, Pekarangan sebesar 23,73% dan Bangunan 17,39%. Secara rinci penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.3.
Penggunaan Lahan Di Kota Jambi

Penggunaan Lahan	Luas	
	Hektar	%
Badan Air	1.108,59	6,53
Bangunan	2.952,50	17,39
Hutan Kota, Jalur Hijau dan Taman Kota	4,92	0,03
Hutan Rawa/Gambut	129,11	0,76
Hutan Rimba	21,46	0,13
Jalan	686,45	4,04
Padang Golf	12,79	0,08
Pasir/Bukit Pasir Darat	9,58	0,06
Pekarangan	4.030,24	23,73
Perkebunan/Kebun	568,50	3,35
Permukaan/Lapangan diperkeras	91,49	0,54
Rumput	575,14	3,39
Sawah	333,46	1,96
Semak Belukar	674,34	3,97
Tanah Kosong	616,47	3,63
Tanah Campuran	4.521,72	26,62
Tegalan/Ladang	646,07	3,80
Utilitas	1,32	0,01
Jumlah	16.984,15	100

Sumber: Peta Citra Satelit 2013, 2018 (data diolah)



Gambar 2.4.
Peta Penggunaan Lahan di Kota Jambi

2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 – 2033 Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 membagi kawasan rawan bencana di Kota Jambi menjadi kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran.

Kawasan rawan bencana banjir adalah meliputi Kecamatan Telanaipura; Kecamatan Pasar Jambi; Kecamatan Jambi Timur; Kecamatan Danau Teluk; dan Kecamatan Pelayangan. Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana banjir dilakukan melalui:

- Kerjasama dengan daerah lain yang juga dialiri oleh DAS Batanghari untuk penyelamatan ekosistem sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Pembatasan pengembangan kegiatan budidaya di sekitar DAS Batanghari
- Melaksanakan peninjauan kembali atas perizinan kegiatan – kegiatan budidaya dengan prioritas pada lokasi – lokasi yang berada di sekitar sistem DAS Batanghari yang telah dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

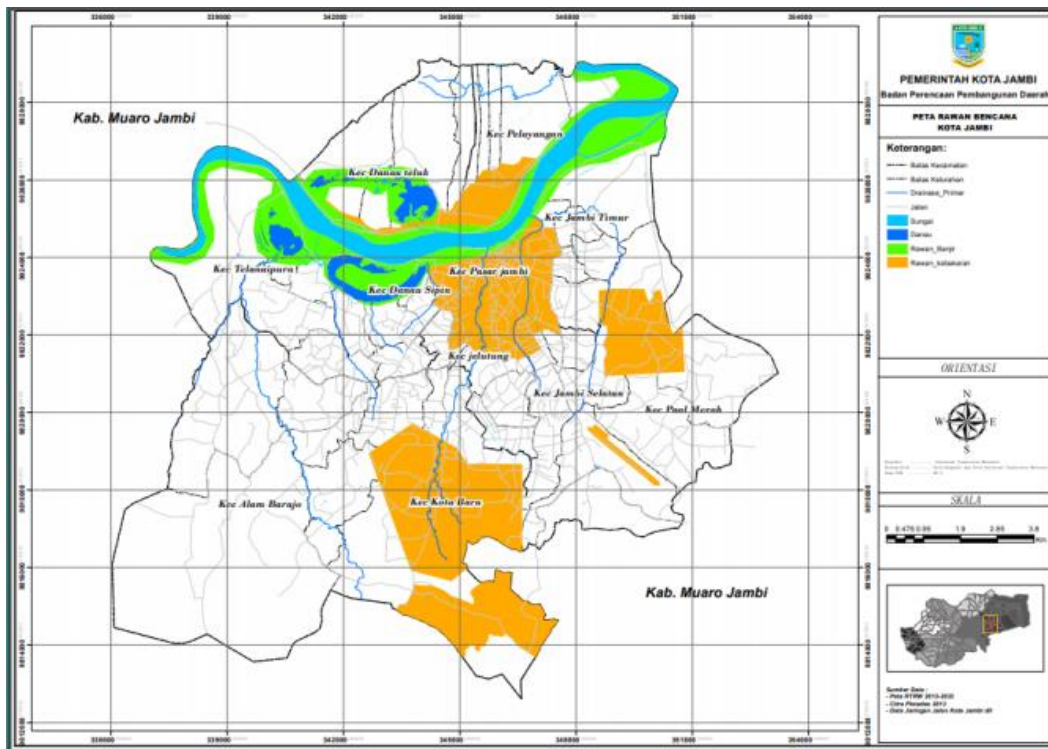
Sedangkan Kawasan rawan bencana kebakaran di Kota Jambi, meliputi:

- Kecamatan Danau Teluk;
- Kecamatan Pelayangan

- c. Kecamatan Telanaipura
- d. Kecamatan Pasar Jambi
- e. Kecamatan Jambi Timur
- f. Kecamatan Jelutung

Adapun rencana pengelolaan kawasan rawan bencana kebakaran dilakukan melalui:

- a. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran di setiap kecamatan;
- b. Peningkatan aksesibilitas armada pemadam kebakaran pada lokasi – lokasi rawan bencana;
- c. Pengaturan jarak bangunan dan kepadatan bangunan



Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2017

Gambar 2.5.
Peta Rawan Bencana Kota Jambi

2.1.2. Kondisi Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

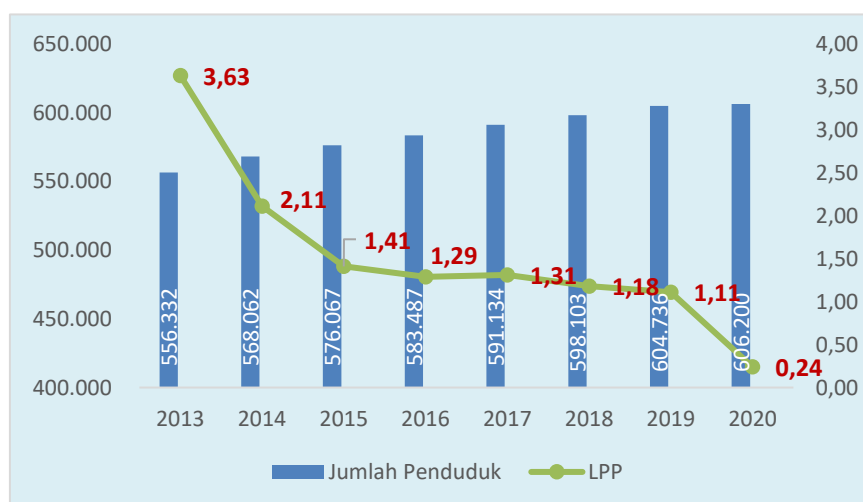
Setiap Tahun jumlah penduduk di Kota Jambi terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 jumlah penduduk Kota Jambi adalah 556.332 jiwa, dan terus meningkat menjadi 606.200 jiwa pada tahun 2020. Adapun pertumbuhan penduduknya setiap Tahun selama kurun waktu 2013-2020 berkisar antara 0,24% sampai dengan 3,63% pertahunnya, dengan angka pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,54%. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah dan pertumbuhan penduduk di Kota Jambi dari Tahun 2013-2020.

Tabel 2.4.
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Jambi Tahun 2013-2020

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan (%)
2013	556.332	3,63
2014	568.062	2,11
2015	576.067	1,41
2016	583.487	1,29
2017	591.134	1,31
2018	598.103	1,18
2019	604.736	1,11
2020	606.200	0,24
		1,54

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021 (data diolah)

Perkembangan jumlah penduduk pada kurun waktu Tahun 2013-2020 mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan setiap tahunnya atau terjadi pertumbuhan negatif, seperti ditunjukkan dalam gambar berikut ini.



Sumber: BPS, Kota Jambi Dalam Angka, 2021 (data diolah)

Gambar 2.6.
Perkembangan Demografi Kota Jambi 2013 – 2020

Penduduk Kota Jambi Tahun 2020 sebanyak 606.200 jiwa yang terdiri atas 305.407 jiwa penduduk laki-laki dan 300.793 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2019. Pada Tahun 2020 penduduk Kota Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 0,24 persen dengan rasio jenis kelamin 100,96.

2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia

Berdasarkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin diketahui bahwa Kota Jambi memiliki jumlah penduduk dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan (*sex ratio*) relatif konstan setiap Tahunnya, yaitu berkisar antara 100,96 sampai dengan 101,53 untuk kurun waktu Tahun 2013 - 2020. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan di Kota Jambi terdapat 101 penduduk laki-laki. Tabel berikut memperlihatkan jumlah penduduk di Kota Jambi menurut jenis kelamin

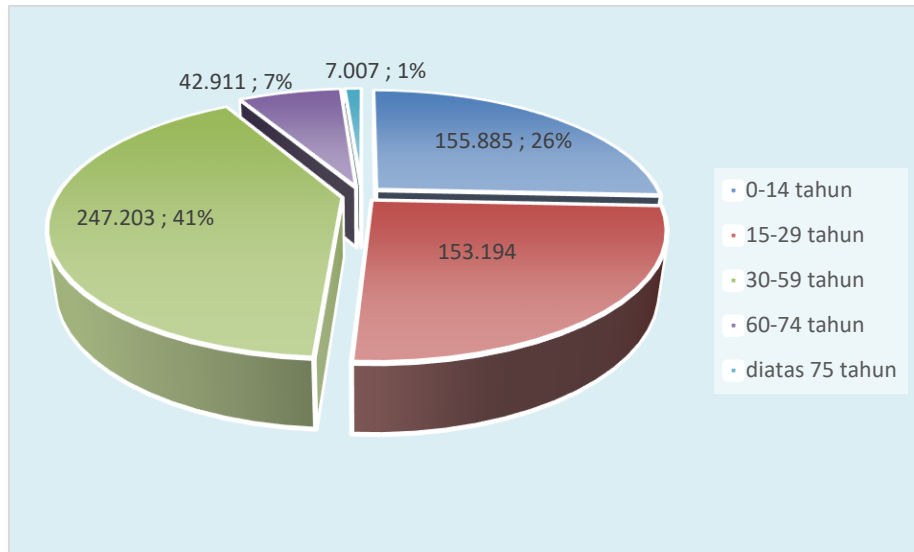
Tabel 2.5.

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Tahun	Jenis Kelamin				Laki + Perempuan	Sex Ratio
	Laki-Laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%		
2013	286.289	50,29	283.042	49,71	569.331	101,00
2014	285.492	50,26	282.570	49,74	568.062	101,01
2015	289.713	50,29	286.354	49,71	576.067	101,17
2016	293.217	50,25	290.270	49,75	583.487	101,03
2017	297.036	50,25	294.098	49,75	591.134	101,15
2018	300.566	50,25	297.537	49,75	598.103	101,02
2019	303.818	50,24	300.918	49,76	604.736	100,96
2020	305.407	50,38	300.793	49,62	606.200	101,53

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021 (data diolah)

Penduduk usia produktif merupakan suatu modal dalam pelaksanaan pembangunan di segala sektor, dengan harapan produktivitas dan efektivitas yang terjadi didukung pula dengan sarana dan prasarana pembangunan, dimana manusia merupakan tujuan dan pelaksana pembangunan. Pada tahun 2020 jumlah usia produktif di Kota Jambi sebesar 247.203 jiwa atau sebesar 41 % dibandingkan total penduduk. Jumlah penduduk Tahun 2020 berdasarkan Struktur Usia dapat dilihat pada gambar berikut.

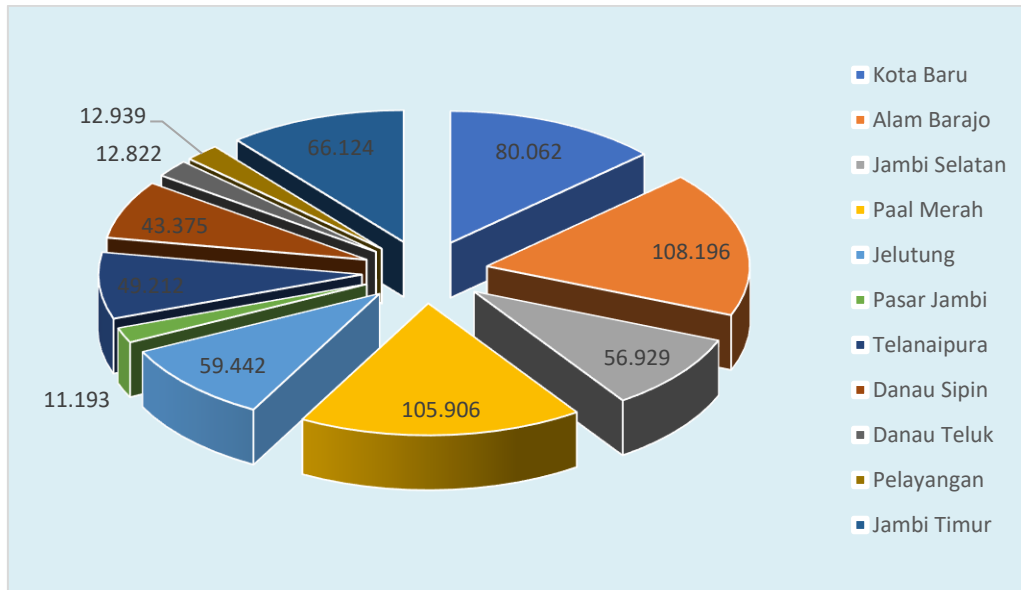


Sumber: BPS, Kota Jambi Dalam Angka, 2021 (data diolah)

Gambar 2.7.

Jumlah Penduduk Kota Jambi berdasar Struktur Usia Tahun 2020

Dari distribusi atau sebaran penduduknya di 11 kecamatan di Kota Jambi, Distribusi atau sebaran penduduk tertinggi pada tahun 2020 berada di Kecamatan Alam Barajo, Paal Merah dan Kota Baru. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Alam Barajo dengan penduduk sebanyak 108.196 jiwa atau sekitar 17,85 persen dari total penduduk Kota Jambi, diikuti oleh Kecamatan Paal Merah sebanyak 105.906 jiwa atau 17,47 persen dan Kecamatan Kotabaru sebanyak 80.062 jiwa atau sekitar 13,21 persen. Sementara itu kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Pasar Jambi yaitu sebanyak 11.193 jiwa, atau 1,85 persen dari total penduduk Kota Jambi. Distribusi penduduk kota Jambi Tahun 2020 terlihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, Kota Jambi Dalam Angka, 2021 (data diolah)

Gambar 2.8.
Distribusi penduduk kota Jambi Tahun 2020

Tingginya jumlah penduduk di Kecamatan Alam Barajo, Paal Merah dan Kota Baru dikarenakan ketiga kecamatan ini memang mempunyai wilayah yang lebih luas dibandingkan wilayah kecamatan lainnya. Jumlah penduduk tertinggi bukan berarti kepadatan penduduk di Kecamatan Alam Barajo, Paal Merah dan Kota Baru juga tinggi. Kepadatan penduduk di Kota Jambi Tahun 2020 mencapai 3.384 jiwa/km² dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Jelutung sebesar 7.505 Jiwa/Km² dan terendah di Kecamatan Pelayangan sebesar 187 jiwa/Km².

Berdasarkan kepadatannya pada tahun 2020, sebagian besar penduduk Kota Jambi terkonsentrasi di 3 (tiga) kecamatan. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduknya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Jelutung 7.905 Jiwa/Km², Kecamatan Danau Sipin 5.504 jiwa/km² dan Kecamatan Jambi Selatan 4.898 jiwa/km². Sedangkan 8 (delapan) kecamatan lainnya memiliki kepadatan penduduk yang berkisar antara 817 Jiwa/Km² hingga 4.148 Jiwa/Km². Hal ini berarti terdapat ketimpangan sangat besar sebaran penduduk di 3 (tiga) kecamatan kawasan pusat kota dan 8 kecamatan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Jambi Tahun 2013-2020
berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kotabaru	26,26	2.798	2.655	2.729	2.799	2.870	2.131	2.994	2.217
2.	Alam Barajo	39,87	2.056	2.254	2.317	2.377	2.492	2.386	2.542	2.597
3.	Jambi Selatan	7,51	8.320	7.953	8.053	8.139	8.245	5.464	8.376	4.898
4.	Paal Merah	23,77	3.517	3.667	3.709	3.744	3.873	3.341	3.844	3.904
5.	Jelutung	7,64	8.365	8.124	8.181	8.234	7.989	8.055	8.405	7.905
6.	Pasar Jambi	1,68	7.885	7.513	7.496	7.474	7.174	3.109	7.420	2.784
7.	Telanaipura	19,2	2.250	2.553	2.578	2.603	2.688	2.264	2.680	2.186
8.	Danau Sipin	7,28	5.960	6.432	6.496	6.557	6.630	6.179	6.752	5.504
9.	Danau Teluk	15,21	786	786	789	791	791	772	799	817
10.	Pelayangan	12,78	1.030	1.037	1.046	1.054	1.055	896	1.080	846
11.	Jambi Timur	14,33	4.602	4.596	4.616	4.634	4.658	4.255	4.692	4.148
Kota Jambi		175,53	3.169	3.236	3.282	3.324	3.384	3.532	4.508	3.437

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan perkembangan dan karakteristik wilayah Kota Jambi, teridentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perdagangan jasa, perumahan permukiman, industri dan lain-lain. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi 2013-2033 yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013, pengembangan struktur ruang Kota Jambi memiliki 3 (tiga) fokus kebijakan yaitu :

- a) perwujudan pusat – pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa utama dengan skala pelayanan lokal dan nasional dengan prinsip berkelanjutan
- b) peningkatan aksesibilitas perkotaan; dan
- c) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan secara komprehensif.

Sedangkan kebijakan pengembangan pola ruang meliputi:

- a) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung, meliputi :
 - peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung; dan
 - peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional diseluruh wilayah kota; dan

- b) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi :
- pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
 - pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien;
 - Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; dan
 - Pengembangan kawasan strategis cagar budaya

Selain itu terdapat potensi pengembangan wilayah yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan strategis sebagai berikut:

- a) kawasan strategis dari perspektif ekonomi, pada kawasan perdagangan dan jasa di BWK I Kecamatan Pasar Jambi, sebagian Kecamatan Jambi Timur dan sebagian Kecamatan Jelutung;
- b) kawasan strategis dari perspektif sosial budaya, pada kawasan Jambi Kota Seberang, Kecamatan Pelayangan dan Kecamatan Danau Teluk

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada Tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan Tahunan Human Development Report (HDR).

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah atau sedang menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Untuk melihat komponen pembentuk IPM Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Komponen Pembentuk IPM Kota Jambi Tahun 2020

NO	URAIAN	2020
1	UHH (Tahun)	72,65
2	HLS (Tahun)	15,1
3	RLS (Tahun)	10,92
4	Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (Rp 000)	12.056
	IPM	78,37

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2021

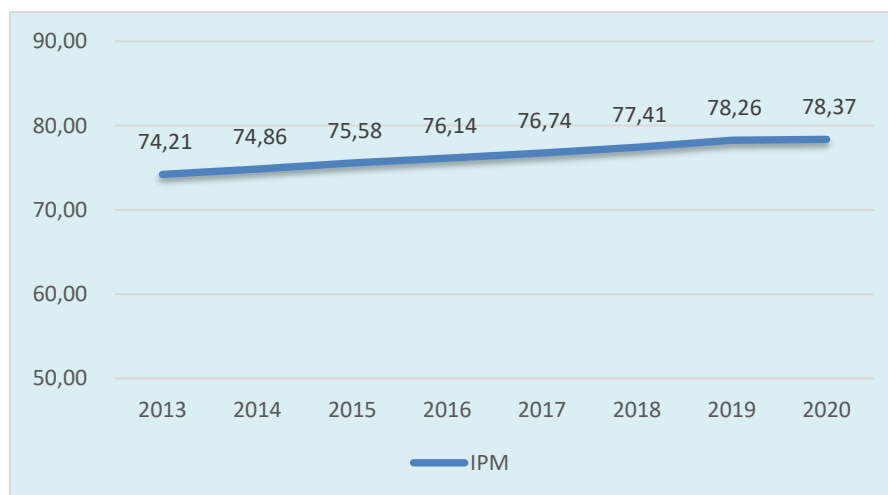
Keterangan :

UHH : Umur Harapan Hidup saat lahir

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

Capaian IPM Kota Jambi Tahun 2013-2020 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Gambar 2.9.

Perkembangan IPM Kota Jambi Tahun 2013-2020

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kota Jambi terus mengalami kenaikan, pada Tahun 2013 Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,21 poin meningkat menjadi 78,37 poin pada Tahun 2020 atau mengalami

kenaikan 4,16 poin. Peningkatan indeks pembangunan manusia menandakan harapan untuk hidup, baik dari dimensi kesehatan, harapan hidup, sekolah maupun hidup layak semakin panjang.

2. Kemiskinan

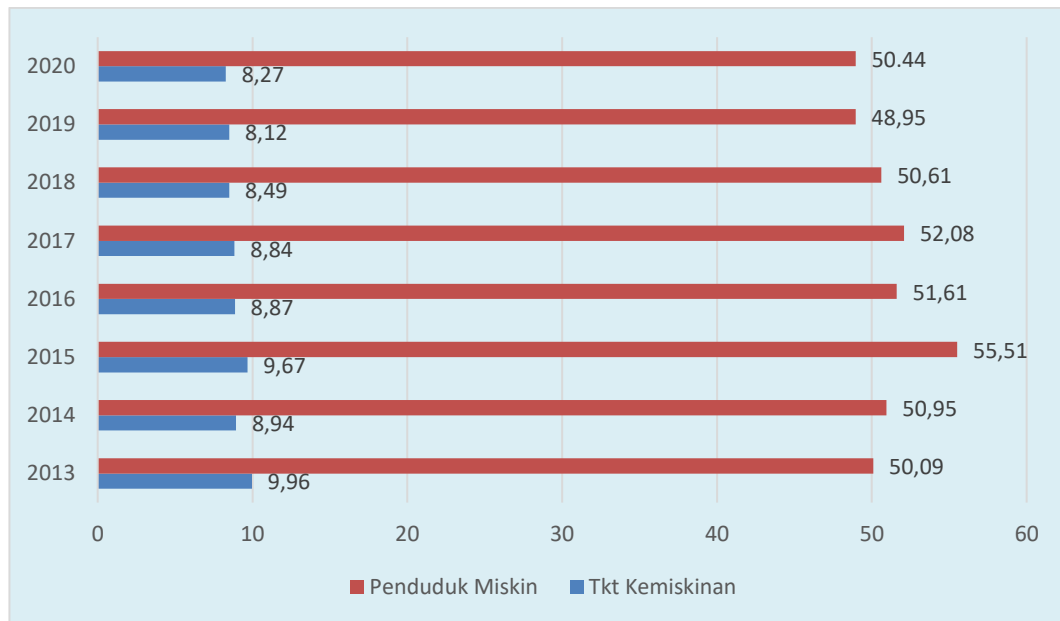
Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (2.100 kilo kalori) dan bukan makanan. Konsep yang dipakai oleh pemerintah (BPS) dan juga beberapa negara lain dalam menentukan kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Penduduk dikatakan miskin jika penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum akan makanan (2.100 kkal/kapita/hari) dan bukan makanan.

Tabel 2.8.
Data Kemiskinan Kota Jambi 2013-2020

Indikator	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Kemiskinan (%) (P0)	9,96	8,94	9,67	8,87	8,84	8,49	8,12	8,27
Penduduk Miskin (orang)	50.090	50.950	55.510	51.610	52.080	50.610	48.950	50.440
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	346.099	359.686	372.600	397.088	413.722	466.854	488.034	529.090
Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,23	0,98	1,36	1,59	1,13	1,26	1,52	1,47
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,26	0,20	0,25	0,43	0,27	0,28	0,42	Db

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kemiskinan di Kota Jambi masih berada pada angka yang masih tinggi yaitu 8,27 % pada Tahun 2020. Dengan tingkat kemiskinan 8,27% tentunya menjadi permasalahan dan isu strategis yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan kedepan. Namun demikian jika dilihat dari Tahun 2013 tingkat kemiskinan berada pada 9,96%, laju penurunan tingkat kemiskinan sudah menunjukkan hasil yang positif, walaupun belum menunjukkan angka yang cukup signifikan penurunannya. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Gambar 2.10.
Perkembangan Kemiskinan Kota Jambi Tahun 2013-2020

3. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada Tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada Tahun yang dijadikan Tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat besarnya nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari masing-masing lapangan usaha (kategorial) maupun dari sisi penggunaan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha mengalami peningkatan dari Rp.16.583,95 milyar pada Tahun 2013 menjadi Rp. 29.815,12 milyar pada Tahun 2020. Begitu pula dengan PDRB Kota Jambi atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha Tahun 2013 meningkat dari Rp. 13.939,74 milyar menjadi Rp. 29.815,12 milyar pada Tahun 2020. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.10. dan tabel 2.11.

Tabel 2.9.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013–2020 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	222,96	259,50	285,98	310,93	318,35	342,17	341,08	344,91	
B Pertambangan dan Penggalian	934,93	945,87	541,71	519,83	407,74	579,55	548,01	368,32	
C Industri Pengolahan	1.988,89	2.254,42	2.467,77	2.655,30	2.830,67	2.981,19	3.112,50	3.195,60	
D Pengadaan Listrik dan Gas	24,08	30,78	38,21	47,92	55,56	61,40	67,04	69,02	
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	47,19	51,11	56,36	62,06	66,78	71,41	83,91	81,73	
F Konstruksi	1.685,21	1.830,53	1.929,78	2.090,38	2.308,87	2.554,04	2.801,84	2.796,98	
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.121,00	5.021,86	5.999,14	7.233,21	7.952,23	8.877,83	9.549,01	9.496,73	
H Transportasi dan Pergudangan	1.963,93	2.162,10	2.535,82	3.072,60	3.329,32	3.549,56	3.685,95	2.588,22	
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	357,05	439,12	484,23	558,39	631,99	682,67	735,07	683,77	
J Informasi dan Komunikasi	721,77	788,72	941,74	1.115,13	1.205,59	1.333,28	1.436,66	1.559,39	
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.090,06	1.179,77	1.251,24	1.465,86	1.536,12	1.596,56	1.678,38	1.815,00	
L Real Estate	437,89	480,60	527,00	586,66	634,74	715,29	785,76	792,09	
M,N Jasa Perusahaan	497,99	554,29	633,41	729,19	792,13	860,37	922,46	894,50	
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.208,89	1.597,56	2.021,31	2.152,99	2.263,90	2.503,89	2.632,52	2.696,63	
P Jasa Pendidikan	813,56	830,90	956,33	1.091,38	1.190,86	1.289,00	1.398,84	1.458,19	
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	346,36	419,77	473,04	544,57	587,99	635,72	703,37	767.502,8	
R,S, T,U Jasa Lainnya	122,20	130,62	150,39	169,12	181,46	199,92	210,60	206.542,5	
PDRB	16.583,95	18.977,51	21.293,45	24.405,53	26.294,31	28.797,41	30.636,17	29.815,12	

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

* Angka Sementara

**Angka Perbaikan

Tabel 2.10.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013–2017 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	167,00	176,10	180,64	183,86	187,68	342,17	341,08	344,91	
B Pertambangan dan Penggalian	760,24	766,19	526,09	509,00	418,28	579,55	548,01	368.315,5	
C Industri Pengolahan	1.751,32	1.866,51	1.962,94	2.045,89	2.124,29	2.981,20	3.112,50	3.195,60	
D Pengadaan Listrik dan Gas	23,52	27,64	29,45	31,18	31,73	61,40	67,04	69.018,1	

Lapangan Usaha	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	38,82	40,08	41,27	42,99	43,96	71,41	83,91	81.727,6
F Konstruksi	1.421,24	1.479,15	1.516,11	1.578,66	1.703,57	2.554,04	2.801,84	2.796,98
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.318,51	3.763,51	4.219,92	4.544,46	4.784,48	8.877,83	9.549,01	9.496,73
H Transportasi dan Pergudangan	1.744,40	1.887,58	1.995,12	2.242,84	2.398,29	3.549,56	3.685,95	2.588,22
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	280,18	336,43	350,23	379,07	415,17	682,67	735,07	683,77
J Informasi dan Komunikasi	683,71	709,84	776,30	843,49	900,36	1.333,28	1.436,66	1.559,39
K Jasa Keuangan dan Asuransi	889,81	919,66	936,67	1.050,08	1.085,94	1.596,56	1.678,38	1.815,00
L Real Estate	377,29	392,46	402,01	421,73	444,99	715,29	785,76	792,09
M,N Jasa Perusahaan	394,13	418,40	446,93	476,18	504,52	860,37	922.463,7	894,50
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	996,42	1.142,18	1.215,55	1.251,81	1.282,75	2.503,89	2.632,52	2.696,63
P Jasa Pendidikan	665,36	674,12	725,60	771,53	805,60	1.289,00	1.398,84	1.458,20
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	315,47	364,42	401,89	430,57	457,50	635,72	703,37	767,50
R,S,T,U Jasa Lainnya	112,32	115,97	125,23	133,10	139,24	199,92	210,60	206,54
PDRB	13.939,74	15.080,23	15.851,95	16.936,44	17.728,34	28.797,41	30.636,17	29.815,12

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

* Angka Sementara

**Angka Perbaikan

Berdasarkan Tabel 2.10 dan 2.11 terlihat bahwa secara agregat seluruh lapangan usaha atau kategori pembentuk perekonomian regional Kota Jambi mengalami peningkatan, kecuali kategori usaha pertambangan dan penggalian (sekunder). Kondisi ini menggambarkan tren peningkatan total output barang dan jasa yang dihasilkan di Kota Jambi dibandingkan Tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB sejalan dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja (Tabel 2.55), sedangkan peningkatan tingkat partisipasi tenaga kerja, membuktikan terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yang tersedia, sehingga secara makro perekonomian Kota Jambi tumbuh secara berkualitas.

4. Struktur Perekonomian

Dari besaran PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam membentuk struktur ekonomi

suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang dominan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi wilayah bersangkutan. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.11.
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2013-2020 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,34	1,37	1,34	1,27	1,21	1,19	1,11	1,16
B Pertambangan dan Penggalian	5,64	4,98	2,54	2,13	1,55	2,01	1,78	1,24
C Industri Pengolahan	11,99	11,88	11,59	10,88	10,77	10,33	10,09	10,72
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,16	0,18	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25	0,25	0,27	0,27
F Konstruksi	10,16	9,65	9,06	8,57	8,78	8,85	9,08	9,38
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,85	26,46	28,17	29,64	30,24	30,83	31,48	31,85
H Transportasi dan Pergudangan	11,84	11,39	11,91	12,59	12,66	12,37	12,02	8,68
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,15	2,31	2,27	2,29	2,40	2,37	2,38	2,29
J Informasi dan Komunikasi	4,35	4,16	4,42	4,57	4,58	4,62	4,66	4,66
K Jasa Keuangan dan Asuransi	6,57	6,22	5,88	6,01	5,84	5,48	5,34	6,09
L Real Estate	2,64	2,53	2,47	2,40	2,41	2,48	2,55	2,66
M,N Jasa Perusahaan						2,98	3,02	3,00
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,29	8,42	9,49	4,47	4,53	8,68	8,53	9,04
P Jasa Pendidikan	4,91	4,38	4,49	4,47	4,53	4,47	4,53	4,89
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,09	2,21	2,22	2,23	2,24	2,20	2,28	2,57
R,S, T,U Jasa Lainnya	0,74	0,69	0,71	0,69	0,69	0,69	0,68	0,69
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

* Angka Sementara

**Angka Perbaikan

Dari tabel 2.11, selama Tahun 2013-2020 kategori yang paling besar kontribusinya adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 31,85%, Industri Pengolahan sebesar 10,72%, konstruksi sebesar 9,38%. Berdasarkan kelompok kategori, maka kategori-kategori yang produksinya

bukan dalam bentuk fisik (Tersier) berkontribusi dominan dalam penciptaan nilai tambah di Kota Jambi, disusul kategori-kategori yang mengolah bahan baku menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya (Sekunder). Sedangkan kategori-kategori yang tidak mengolah bahan baku, yang hanya mendayagunakan sumber-sumber alam (Primer) kontribusinya semakin kecil. Pergeseran kontribusi kategorial mengindikasikan dominasi perekonomian Kota Jambi akan menuju pada struktur ekonomi yang berbasis pada perdagangan dan jasa skala regional, sehingga pembangunan sektor ekonomi mesti diarahkan untuk memfasilitasi terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama di Propinsi Jambi dan sekitarnya.

5. Pertumbuhan Ekonomi

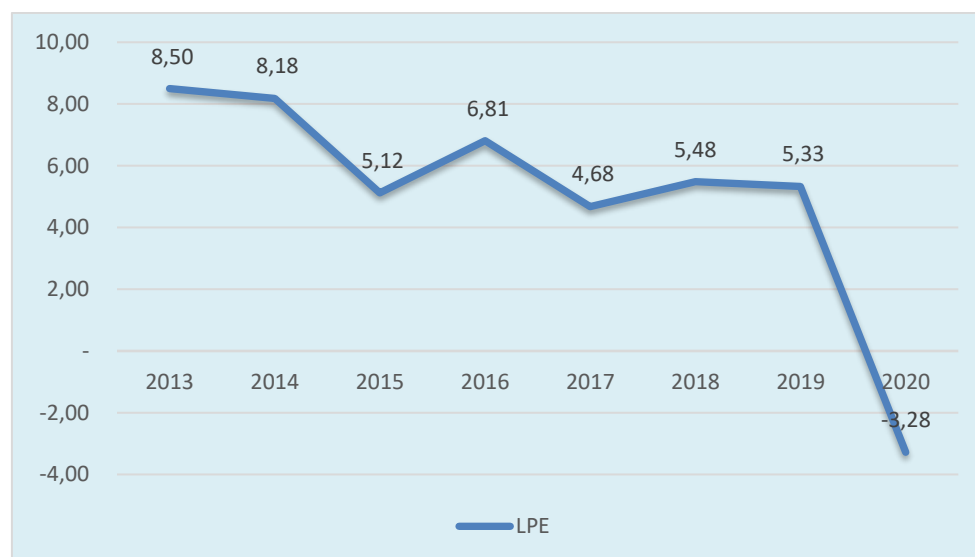
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, pertumbuhan ekonomi diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam rentang Tahun 2013-2020, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi berfluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh sentimen ekonomi global maupun nasional dan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 8,50%.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berdampak signifikan pada banyak aspek kehidupan, tidak hanya kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 mendapat tekanan cukup kuat, terutama pada semester I 2020, sejalan dampak perlambatan ekonomi dunia akibat Covid-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memitigasi penyebaran Covid-19. Sinergi kebijakan antarotoritas melalui berbagai langkah penguatan segera dan luar biasa untuk mengatasi dampak Covid-19, mampu mendorong perbaikan ekonomi secara bertahap pada semester II 2020 dengan stabilitas yang terjaga. Ke depan, prospek perekonomian Indonesia diperkirakan membaik pada 2021 didorong berlanjutnya sinergi kebijakan antarotoritas dan kembali pada lintasan meningkat dalam jangka menengah. Optimisme pemulihan ekonomi tersebut didukung berbagai upaya untuk mendorong percepatan transformasi struktural, termasuk akselerasi ekonomi dan keuangan digital, reformasi pasar uang, serta penguatan UMKM, dalam mendukung upaya menuju Indonesia Maju.

Sebagai ibukota Provinsi Jambi dan juga kota perdagangan dan jasa, keadaan ini juga berdampak signifikan pada kondisi perekonomian Kota Jambi. Ekonomi Kota Jambi tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,28 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam diantaranya Transportasi dan Pergudangan sebesar 22,60 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

sebesar 6,59 persen; Jasa Perusahaan sebesar 5,58 persen; Jasa Lainnya sebesar 3,48 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,23 persen. Pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di sepanjang tahun 2020 menyebabkan pembatasan kegiatan seperti sekolah, bekerja serta mobilitas yang mengakibatkan turunnya aktivitas ekonomi di Kota Jambi, seperti sektor transportasi terutama angkutan udara, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum seperti perhotelan, restoran, pariwisata.

Namun secara rata-rata, laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dalam kurun waktu 8 Tahun terakhir berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Jambi.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2021 (data diolah)

Gambar 2.11.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi Tahun 2012-2020

6. PDRB Menurut Penggunaan

Dilihat dari PDRB menurut Penggunaan, komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar kedua setelah ekspor atas barang dan jasa yang tersedia. Dari data menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Jambi sebagian masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Data berikut menunjukkan bahwa pada periode Tahun 2013-2020 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (Atas Dasar Harga Berlaku) maupun secara riil (Atas Dasar Harga Konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan

nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.12.

Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2013-2020 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB									
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	16.583,95	18.977,51	21.293,45	24.405,53	26.294,31	28.797,41	30.636,17	29.815,12
2.	Atas Dasar Harga Konstan	13.939,74	15.080,23	15.851,95	16.936,44	17.728,34	18.667,87	19.561,13	18.918,89
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA									
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	10.710,25	12.086,27	13.123,57	14.189,01	15.682,34	16.415,75	17.584,80	17.679,42
2.	Atas Dasar Harga Konstan	9.122,70	9.598,45	10.072,15	10.526,96	11.071,36	11.483,38	12.061,84	12.020,30
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB (persen)									
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	64,58	63,69	61,63	58,14	59,64	56,88	57,08	59,30
2.	Atas Dasar Harga Konstan	65,44	63,65	63,54	62,16	62,45	62,51	61,66	63,54

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah memiliki kecenderungan meningkat, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada

Tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 4.287,97 miliar rupiah dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 6.463,41. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing Tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Tabel 2.13.

Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah terhadap PDRB Kota Jambi
Tahun 2013-2020 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB									
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	16.583,95	18.977,51	21.293,45	24.405,53	26.294,31	28.797,41	30.636,17	29.815,12
2.	Atas Dasar Harga Konstan	13.939,74	15.080,23	15.851,95	16.936,44	17.728,34	18.667,87	19.561,13	18.918,89
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH									
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	4.287,97	4.702,83	5.000,77	5.154,58	5.274,12	6.165,09	6.626,44	6.463,41
2.	Atas Dasar Harga Konstan	3.357,06	3.411,11	3.424,91	3.311,91	3.399,45	3.915,40	4.210,23	4.038,76
Persentase Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB (persen)									
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	25,86	24,78	23,49	21,12	20,06	21,36	21,48	21,68
2.	Atas Dasar Harga Konstan	24,08	22,62	21,61	19,55	19,18	20,97	21,52	21,35

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Kota Jambi memiliki potensi menarik investasi atau menurut istilah PDRB disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Berdasar Tabel 2.15, PMTB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 4.677,71 milyar pada Tahun 2013 menjadi Rp.4,6378 milyar pada Tahun 2017. Pertumbuhan investasi/PMTB didorong meningkatnya investasi kategori bangunan, seiring meningkatnya kegiatan pembangunan kategori swasta dan pemerintah khususnya pembangunan infrastruktur.

Tabel 2.14.

Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap PDRB Kota Jambi
Tahun 2013-2020 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB									
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	16.583,95	18.977,51	21.293,45	24.405,53	26.294,31	28.797,41	30.636,17	29.815,12
2.	Atas Dasar Harga Konstan	13.939,74	15.080,23	15.851,95	16.936,44	17.728,34	18.667,87	19.561,13	18.918,89

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pembentukan Modal Tetap Bruto									
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	4.677,71	4.993,04	5.123,10	5.611,09	6.247,44	6.292,62	6.855,91	6.862,88
2.	Atas Dasar Harga Konstan	4.006,63	4.033,81	4.014,60	4.223,48	4.678,80	4.383,19	4.797,22	4.781,20
Persentase PMTB thd PDRB (persen)									
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	28,21	26,31	24,06	22,99	23,76	21,80	22,22	23,02
2.	Atas Dasar Harga Konstan	28,74	26,75	25,33	24,94	26,39	24,23	24,52	25,27

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

7. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Jambi atas dasar harga berlaku Tahun 2013 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 PDRB per kapita tercatat sebesar 29,13 juta rupiah naik menjadi 49,18 juta rupiah pada Tahun 2020. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun peningkatan PDRB perkapita ini, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Jambi karena masih tergantung pada faktor inflasi.

Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat bisa digunakan PDRB perkapita atas dasar harga konstan. Tahun 2013 sebesar Rp. 24,48 juta rupiah menjadi sebesar Rp. 31,21 juta rupiah pada Tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.16.

Tabel 2.15.
Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2013-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB (miliar rupiah)									
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	16.583,95	18.977,51	21.293,45	24.405,53	26.294,31	28.797,41	30.636,17	29.815,12
2.	Atas Dasar Harga Konstan	13.939,74	15.080,23	15.851,95	16.936,44	17.728,34	18.667,87	19.561,13	18.918,89
PDRB per Kapita (ribu rupiah)									
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	29.128,83	33.407,46	39.963,50	41.827,03	44.481,13	48.369	51.024	49.183
2.	Atas Dasar Harga Konstan	24.484,41	26.546,80	27.517,55	29.026,25	29.990,39	31.201	32.503	31.208
Pertumbuhan PDRB per Kapita (persen)									
	Atas Dasar Harga Konstan	6,21	8,42	3,66	6,48	4,68	5,30	4,79	-3,28

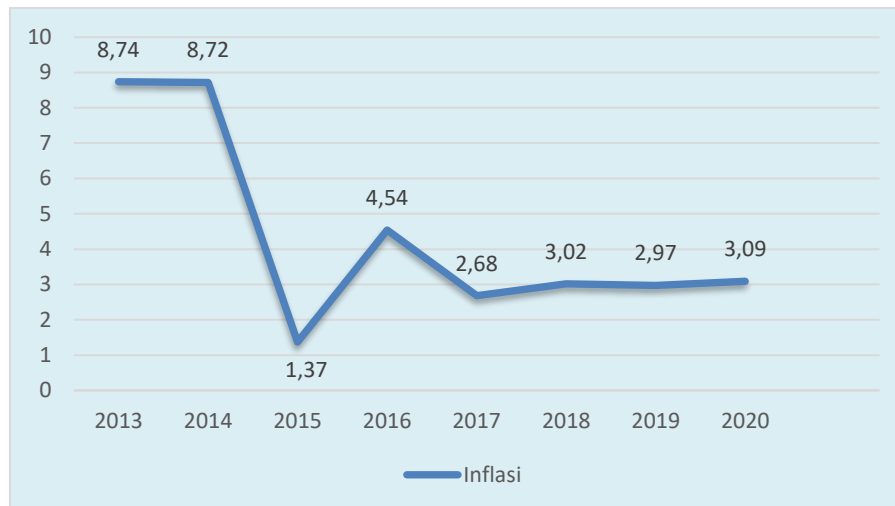
Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

8. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Laju inflasi Kota Jambi selama 8 Tahun terakhir mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam hal *administered price* terutama kenaikan BBM dan tarif dasar listrik pada Tahun 2013 dan 2014. Pada Tahun 2015, terjadi penurunan laju inflasi yang terimplikasi dari penurunan aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh kebakaran lahan dan kabut asap. Pada tahun 2020 inflasi mengalami kenaikan dikarenakan adanya pandemi Covid yang melanda dunia dan Indonesia Pada Tahun 2020, inflasi Kota Jambi sebesar 3,09%. Inflasi di Kota Jambi pada tahun 2020 terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 5 (lima) kelompok pengeluaran yaitu kelompok yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,33 persen; kelompok transportasi sebesar 0,46 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,04; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen dan kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen

Laju inflasi dalam kurun waktu 8 Tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



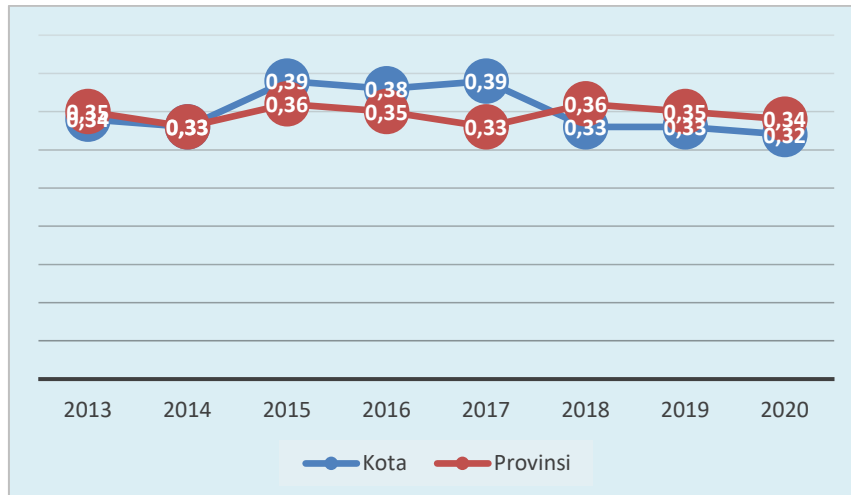
Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Gambar 2.12.
Nilai Inflasi rata-rata di Kota Jambi Tahun 2013-2020

9. Indeks Gini

Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini. Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal (*uniform*) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Kesenjangan tersebut diilustrasikan dalam bentuk Kurva Lorenz. Apabila kedua garis distribusi tersebut berimpit, berarti pemerataan pendapatannya sempurna, sedangkan apabila daerah antara kedua garis distribusi tersebut sangat lebar maka pemerataan pendapatannya sangat timpang. Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius.

Koefisien Gini di Kota Jambi berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) Kota Jambi Tahun 2020 mencapai 0,32 yang berarti pemerataan pendapatannya kategori sedang dan angka ini lebih rendah dari Koefisien Gini Provinsi sebesar 0,34. Keadaan ini mengindikasikan bahwa arah dan kebijakan pembangunan ekonomi Kota Jambi telah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Peningkatan pendapatan yang diterima golongan atas lebih besar daripada yang diterima golongan bawah.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Gambar 2.13.
Perkembangan Koefisien Gini di Kota Jambi Tahun 2013-2020

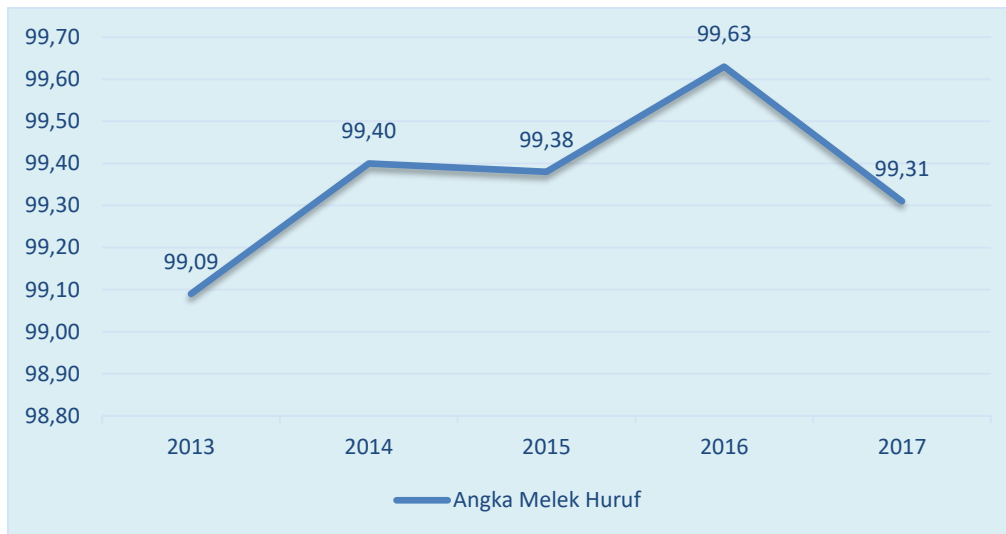
2.2.2. Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Parameter pembangunan pendidikan dapat dilihat dari tinggi rendahnya derajat pendidikan masyarakat dengan indikator antara lain tingginya angka melek huruf (AMH) dan tingginya angka rata-rata lama sekolah (RLS). Untuk mendapatkan angka yang tinggi pada kedua indikator tersebut tentu dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan ruang kelas/rombongan belajar (rombel) yang mencukupi, banyaknya guru yang mengajar telah mencukupi untuk semua murid serta kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan.

Adapun perkembangan angka melek huruf di Kota Jambi dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2021

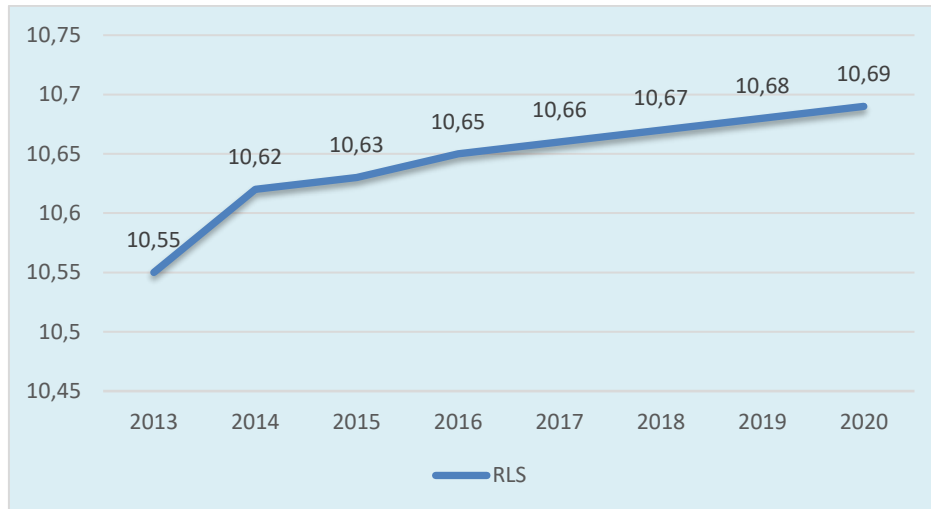
Gambar 2.14.

Perkembangan Angka Melek Huruf di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Melek huruf dapat disebut juga dengan melek aksara yaitu kemampuan membaca dan menulis, jadi angka melek huruf penduduk usia 15 Tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 Tahun ke atas, dimana pada data tersebut angka melek huruf untuk Penduduk diatas 15 Tahun sudah sangat baik tinggal 0.01 yang menjadi PR kita.

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Komponen yang diperhitungkan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari dimensi pendidikan adalah angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Peningkatan angka RLS dari 10,55 Tahun 2013 menjadi 10,92 pada Tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Jambi periode pembangunan delapan tahun yang lalu. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Jambi dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



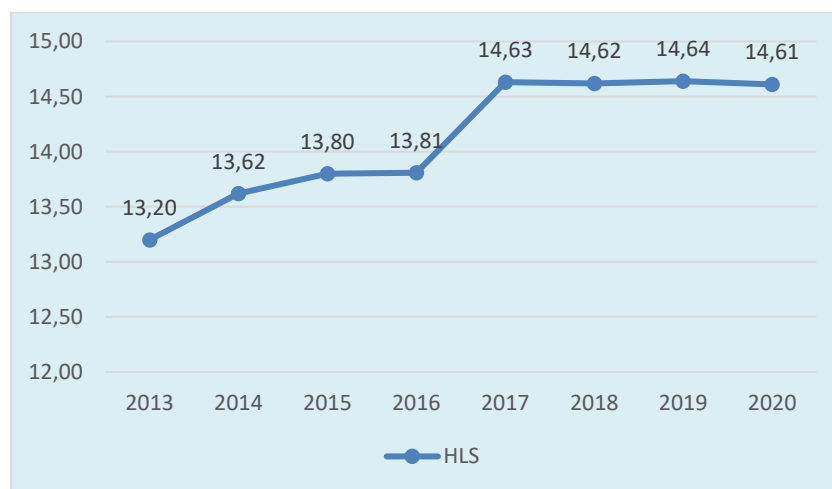
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

Gambar 2.15.

Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Jambi Tahun 2013-2020

3. Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang biasa digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan dan deskripsi harapan peningkatan kualitas pendidikan pada masa yang akan datang. Tren positif HLS Kota Jambi dari 13,20 poin menjadi 15,10 poin pada Tahun 2020 menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan sektor pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan cenderung akan terus meningkat seiring dengan perkembangan angka harapan lama sekolah. Gambaran perkembangan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Jambi dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

Gambar 2.16.

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Jambi Tahun 2013-2020

4. Angka Partisipasi Kasar

Perkembangan angka partisipasi kasar (APK) di Kota Jambi dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16.
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A, SMP/MTS/Paket B dan SMA/SMK/Paket C di Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI/Paket A									
1	Jumlah Siswa di Jenjang SD	64.398	70.520	71.011	71.197	73.485	73.521	57.383	59.616
2	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	62.992	64.793	65.228	65.393	66.234	66.234	58.097	57.799
3	APK SD/MI, Paket A	102,23	108,84	108,87	108,88	110,95	111,00	101,00	103,14
SMP/MTS/Paket B									
1	Jumlah Siswa di Jenjang SMP	24.634	24.634	34.894	35.962	34.985	34.992	26.900	29.817
2	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun	22.633	22.633	31.614	32.574	31.236	31.236	30.754	30.737
3	APK SMP/MTS, Paket B	108,84	108,84	110,38	110,40	112,00	112,02	112,04	97,01
SMA/SMK/Paket C									
1	Jumlah Siswa di Jenjang SMA	28.955	28.955	35.015	33.710	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi
2	Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun	32.201	32.201	38.532	35.984	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi
3	APK SMA/SMK, Paket C	89,92	89,92	90,87	93,68	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

Persentase angka partisipasi kasar merupakan indikator pendidikan yang mengukur tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK adalah jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk usia jenjang tertentu. Persentase APK di Kota Jambi terhitung cukup tinggi bahkan melebihi 100% untuk tingkat SD dan tingkat SMP. APK yang tinggi menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

Secara umum, pada tingkat SD/MI capaian APK dari Tahun 2013 sampai 2020 mengalami peningkatan dan berada pada angka di atas 100%. Di Tahun 2013 APK Kota Jambi mencapai 102,23% meningkat di Tahun 2020 menjadi 103,14%. Pada tingkat SMP, APK di tingkat SMP sudah mencapai lebih dari 100% dan cenderung meningkat, di tahun 2013 APK Kota Jambi mencapai 108,84% namun menurun di tahun 2020 menjadi 97,01%.

Pada tingkat SMA, APK tingkat SMA belum mencapai 100%, tertinggi baru mencapai 93,68% di Tahun 2016. Namun angka capaiannya mengalami kenaikan setiap Tahunnya. Melihat angka capaian APK Kota Jambi di tiap tingkatan yang mendekati atau bahkan melebihi angka 100%, hal ini dapat disampaikan bahwa tingkat partisipasi penduduk usia sekolah di Kota Jambi termasuk tinggi.

5. Angka Pendidikan yang ditamatkan

Persentase pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas SDM di suatu wilayah. Angka pendidikan yang ditamatkan adalah perbandingan jumlah penduduk yang mencapai jumlah pendidikan tingkat tertentu pada Tahun bersangkutan dengan total jumlah penduduk pada Tahun bersangkutan.

Adapun angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Jambi dari Tahun 2013 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17.
Angka Kelulusan SD/MI di Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SD	10.695	9.842	11.164	11.164	11.074	11.308	11.308	10.485
2.	Jumlah Siswa SD	10.695	9.842	11.164	11.164	11.074	11.308	11.308	10.485
3.	Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

Tabel 2.18.
Angka Kelulusan SMP/MTS di Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SMP/MTS	7.383	10.551	13.448	13.448	13.343	13.380	11.235	11.425
2.	Jumlah Siswa SMP/MTS	7.465	10.551	13.448	13.448	13.343	13.380	11.235	11.425
3.	Angka Kelulusan SMP/MTS	98,90	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

Persentase tingkat kelulusan SD/MI dan SMP/MTS di Kota Jambi cenderung stabil. Hal ini dikarenakan minat belajar penduduk di Kota Jambi mulai tingkat SD/MI dengan tingkat SMP/MTS masih terbilang tinggi. Selain itu jumlah sekolah untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTS tersebar di wilayah Kelurahan sehingga memudahkan murid untuk bersekolah.

6. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur seberapa banyak anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu. APM didefinisikan sebagai jumlah siswa/penduduk kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat daya serap partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar pada tabel berikut:

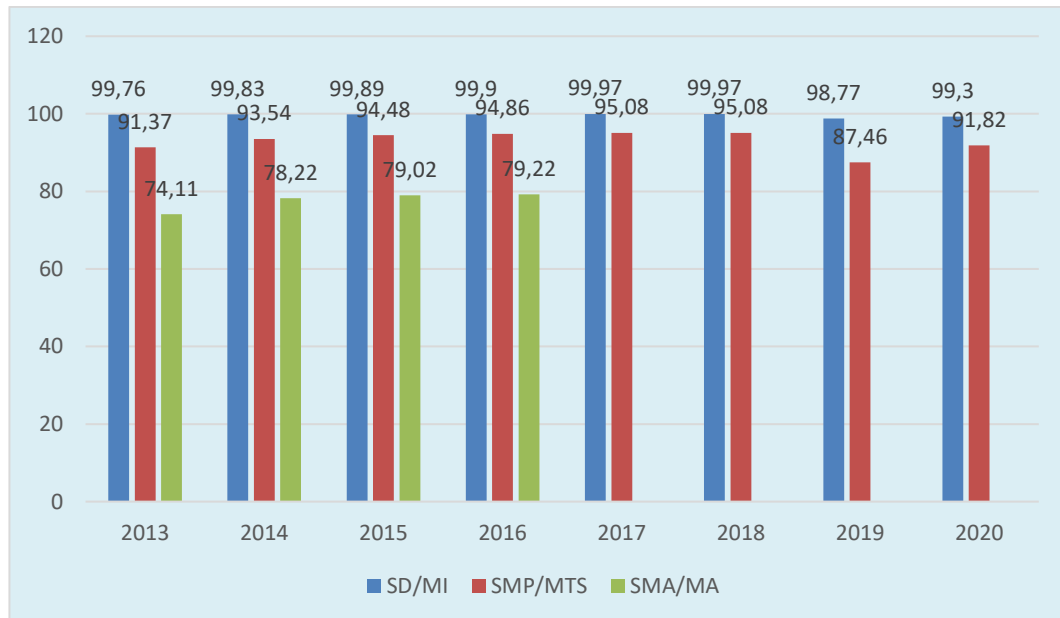
Tabel 2.19.
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A, SMP/MTS/Paket B dan SMA/SMK/Paket C di Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI/Paket A									
1	Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun	60.847	64.684	65.154	65.325	66.212	66.212	57.383	58.211
2	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	62.992	64.793	65.228	65.393	66.234	66.234	58.097	57.799
3	APM SD/MI, Paket A	99,76%	99,83%	99,89%	99,90%	99,97%	99,97%	98,77%	99,30%
SMP/MTS/Paket B									
1	Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun	20.679	29.573	30.775	29.989	29.698	26.698	26.900	28.225
2	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun	22.633	31.614	32.574	31.614	31.236	31.236	30.754	30.737
3	APM SMP/MTS, Paket B	91,37%	93,54%	94,48%	94,86%	95,08%	95,08%	87,46%	91,82%
SMA/SMK/Paket C									
1	Jumlah Siswa Usia 16-18 Tahun	23.865	30.140	28.436	28.162	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi
2	Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun	32.201	38.532	35.984	36.550	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi
3	APM SMA/SMK, Paket C	74,11%	78,22%	79,02%	79,22%	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

Tabel di atas menunjukkan APM Kota Jambi yang meningkat setiap Tahunnya di setiap tingkatan. Untuk tingkat SD/MI, pada Tahun 2013-2020 hampir seluruh anak usia

sekolah bersekolah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya APM tingkat SD/MI yang berada pada 99,30%. Anak usia sekolah tingkat SMP/MTs, angka APM yang dicapai cukup tinggi di kisaran 91,82%. Sementara itu untuk capaian angka APM di tingkat SMA/MA/SMK, masih dapat dikatakan cukup tinggi dengan angka yang berkisar antara 74,11 sampai 79,22%. Ini bisa dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

Gambar 2.17.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A, SMP/MTS/Paket B dan SMA/SMK/Paket C di Kota Jambi Tahun 2013-2020

2.2.2.2. Kesehatan

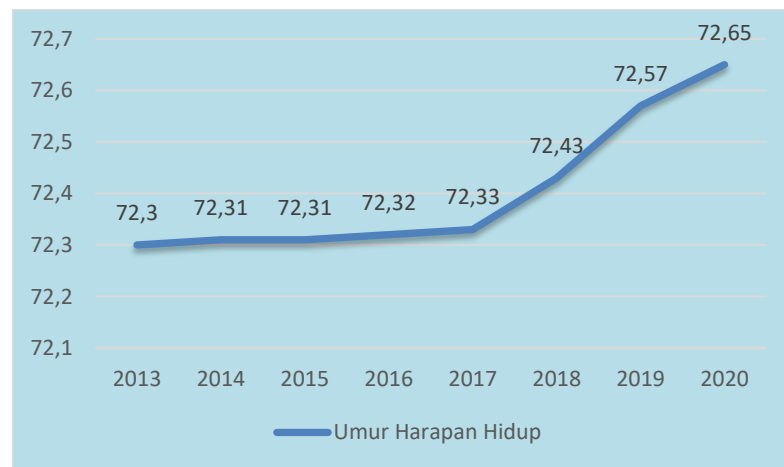
Gambaran umum indikator makro kesehatan Kota Jambi dalam kurun waktu 2013 – 2020 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.20.
Indikator Makro Kesehatan di Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Umur Harapan Hidup	72,30	72,31	72,31	72,32	72,33	72,43	72,57	72,65
2	Angka Kematian Ibu	4	9	7	3	4	2	5	3
3	Angka Kematian Bayi	27	9	9	9	12	7	7	7
4	Jumlah Kelahiran Hidup	13.592	13.079	12.745	10.430	13.039	10.205	10.104	10.489

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2021

Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari lamanya umur harapan hidup (UHH) yang mampu dicapai. Semakin lama usia harapan hidup yang dicapai maka semakin tinggi derajat kesehatannya. Umur Harapan Hidup (UHH) menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Umur Harapan Hidup di Kota Jambi selama kurun waktu tahun 2013 hingga 2020 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2021

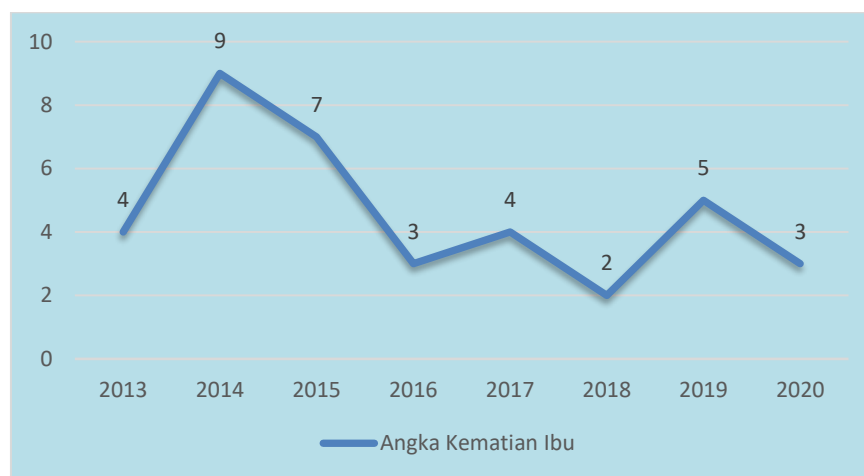
Gambar 2.18
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Jambi
Tahun 2013-2020 (dalam tahun)

Pada gambar terlihat selama periode 2013-2020, Umur Harapan Hidup di Kota Jambi mengalami peningkatan, pada tahun 2013 umur harapan hidup di Kota Jambi sebesar 72,30 meningkat menjadi 72,65 pada tahun 2020, Hal ini berarti bahwa dari

tahun 2013 sampai tahun 2020, rata-rata penduduk Kota Jambi dapat bertahan hidup hingga usia 72 tahun.

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Perkembangan AKI di Kota Jambi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2021

Gambar 2.19
Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Jambi
Tahun 2013-2020

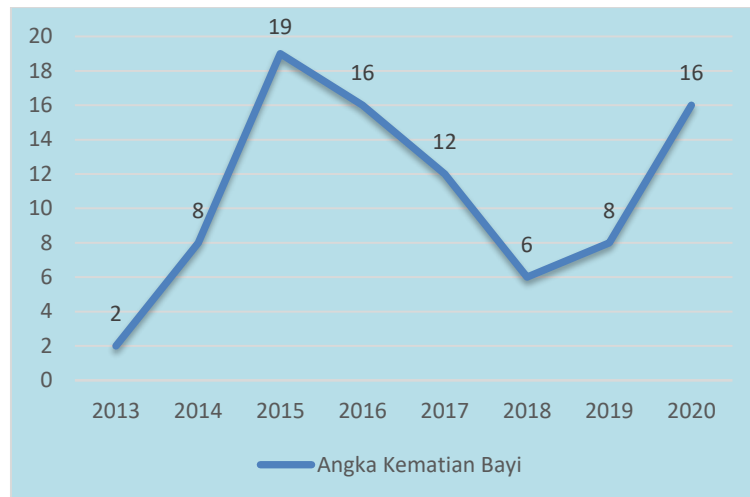
Berdasarkan gambar tersebut, AKI di Kota Jambi selama rentang tahun 2013-2020 berfluktuasi, dengan AKI tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 9 dan yang terendah pada tahun 2018 sebesar 2. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan angka kematian ibu (AKI) di Kota Jambi mengalami perbaikan dengan kecenderungan menurunnya AKI seperti pada tahun 2020 menjadi 3.

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat.

Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Jambi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2021

Gambar 2.19
Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Jambi
Tahun 2013-2020

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa AKB di Kota Jambi selama rentang tahun 2013-2020 mengalami fluktuasi dengan AKB terendah pada tahun 2013, sebesar 2 jiwa dan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 19 jiwa. Setelah itu mengalami penurunan hingga tahun 2018, AKB Kota Jambi menunjukkan perkembangan negatif dengan meningkatnya AKB di Kota Jambi hingga tahun 2020, diantara 1.000 kelahiran hidup ada 16 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun. Dengan meningkatnya angka kematian bayi di Kota Jambi secara umum menggambarkan adanya penurunan kualitas kesehatan masyarakat Kota Jambi selama periode 2013-2015 dan 2018-2020

Indikasi peningkatan angka kematian berbanding terbalik dengan penurunan jumlah balita gizi buruk dengan PBGB dan angka stunting (kondisi anak gagal tumbuh, baik fisik maupun otaknya akibat kekurangan gizi) pada balita dan anak di wilayah Kota Jambi. Dimana Jumlah balita gizi buruk semakin menurun dari 0.03% Tahun 2013 turun

menjadi 0.01 Tahun 2020. Sedangkan Angka Stunting mengalami penurunan dari 26,2 di tahun 2018 menjadi 17,4 di tahun 2020.

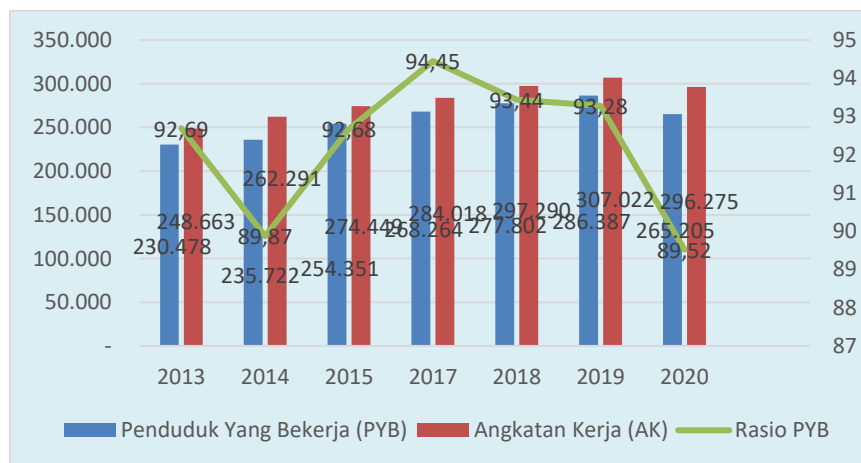
Tabel 2.21.
Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Balita Gizi Buruk	18	10	11	5	6	4	4	4
2	Jumlah Balita	59.462	56.670	58.012	52.933	72.942	47.805	45.853	34.919
3	Rasio PBGB (%)	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0,01	0,01
4	Angka Stunting	dta	dta	dta	dta	dta	26,2	18,62	17,4

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2021

2.2.2.3. Ketenagakerjaan

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari rasio penduduk yang bekerja. Kesempatan kerja sebagai hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja (PYB) di Kota Jambi dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun cukup berarti dari 92,69% menjadi 89,92%. Secara lengkap ditunjukkan pada tabel berikut:



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2021

*** BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

Gambar 2.18.
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Jambi Tahun 2013-2020

2.2.2.4. Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang keberadaannya harus dipertahankan masyarakat dan pemerintah daerah.

Tabel 2.22.
Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya

Uraian	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Grup Kesenian (unit)	185	185	185	185	185	185	185	185
Jumlah Gedung Kesenian (unit)	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pariwisata & Budaya Kota Jambi, 2021

Sementara itu aktivitas kesehatan masyarakat dalam menjaga kebugaran tubuhnya dan bersosialisasi, salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya klub olahraga. Dari Tahun 2013 sampai dengan 2020, jumlah klub olahraga mengalami penambahan dari hanya 28 cabang olahraga menjadi 32 cabang olahraga, dengan jumlah gedung hanya 2 unit, artinya ketersediaan gedung olahraga masih kurang di Kota Jambi.

Tabel 2.23.
Jumlah Cabang Olahraga dan Gedung Olahraga

Uraian	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Cabang Olahraga (unit)	28	28	28	28	28	30	32	32
Jumlah Gedung Olahraga (unit)	2	2	2	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga Kota Jambi, 2021

2.3. Aspek Pelayanan Umum

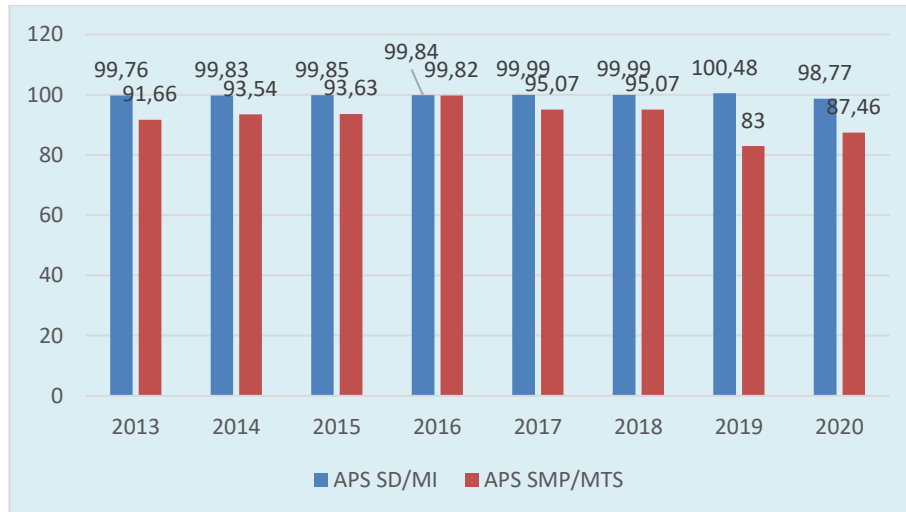
2.3.1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7-12; 13-15 dan 16-18 Tahun yang sedang bersekolah dibagi seluruh jumlah anak usia SD (7-12); usia SMP (13-15) dan usia SMA (16-18). Realisasi APS yang dicapai pada Tahun 2020 untuk usia SD/MI sebesar 98,77%, artinya dari seluruh penduduk usia 7-12 Tahun yang masih bersekolah sebesar 98,77 persen, sisanya 1,23% ada yang tidak/belum sekolah dan yang sudah tidak bersekolah lagi (putus sekolah). Sementara

itu, angka partisipasi sekolah penduduk usia SMP/MTs sebesar 97,46%. Angka Partisipasi Sekolah di masing-masing tingkatan dari Tahun 2013-2020 relatif mengalami kenaikan. Hal ini menandakan minat masyarakat untuk sekolah di Kota Jambi semakin tinggi.



Gambar 2.19.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK di Kota Jambi Tahun 2013-2020

APS pada tingkatan SMP/MTs cenderung lebih rendah dibandingkan SD/MI kondisi ini mengindikasikan adanya kemungkinan anak usia sekolah yang tidak melanjutkan ke sekolah menengah ataupun bekerja setelah tamat SD/MI.

Tabel 2.24.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI								
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	62.847	64.684	67.552	62.444	66.212	66.212	61.106	57.383
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun	62.992	64.793	67.651	62.544	66.234	66.234	58.300	58.097
1.3.	APS SD/MI	99,76	99,83	99,85	99,84	99,99	99,99	100,48	98,77
2	SMP/MTs								
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	28.369	29.573	30.357	27.918	29.698	29.698	26.651	26.900
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	30.948	31.614	32..420	27.968	31.236	31.236	30.795	30.754
2.3.	APS SMP/MTs	91,66	93,54	93,63	99,82	95,07	95,07	83,00	87,46

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

2. Ketersediaan Sekolah

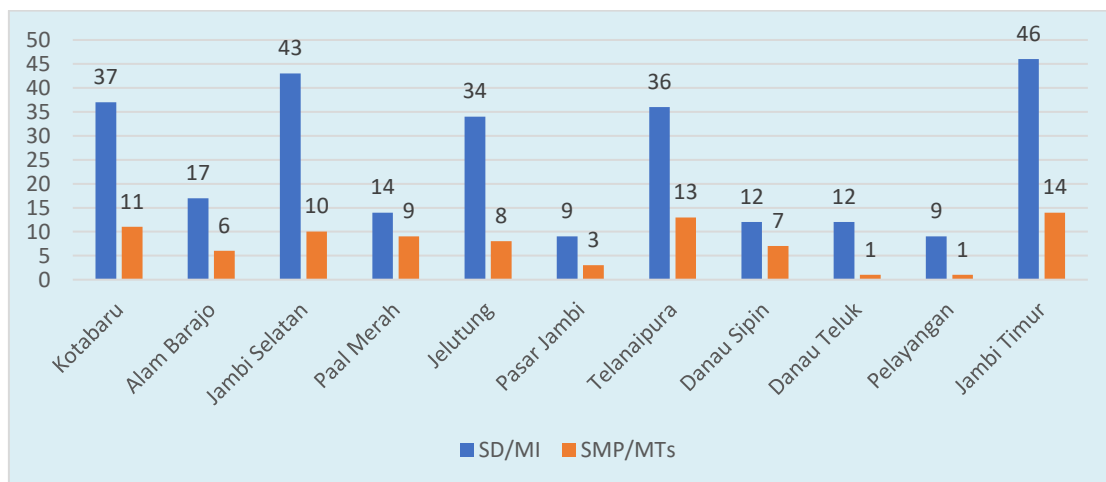
Tabel 2.31. menunjukkan perkembangan jumlah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Jambi Tahun 2013-2020. Secara umum, sampai dengan Tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah gedung sekolah di setiap tingkat/jenjang pendidikan.

Tabel 2.25.
Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. SD/MI									
1.1.	Jumlah Sekolah	247	256	258	263	263	2.602	2.625	2.632
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun	62.992	64.793	67.651	62.544	66.234	58.300	58.097	57.799
1.3.	Rasio	39.21	39.51	38.13	42.05	39.70	0,044	0,045	0,045
2. SMP/MTS									
2.1.	Jumlah sekolah	97	96	96	103	107	1.131	1.135	1.236
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	30.948	31.614	32.420	27.968	31.236	30.795	26.900	30.737
2.3.	Rasio	31.34	30.36	29.61	36.82	34.25	0,037	0.042	0.040

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

Sebaran gedung sekolah perkecamatan dapat terlihat pada grafik di bawah, untuk tingkat SD dan SMP sebaran sekolah antar kecamatan cukup merata dimana jumlah sekolah terbanyak ada di kecamatan Jambi Timur. Baik SD/MI maupun SMP/MTS. Persebaran ini belum menggambarkan ketersediaan sarana pendidikan, rasio guru-murid dan rasio kelas-murid.

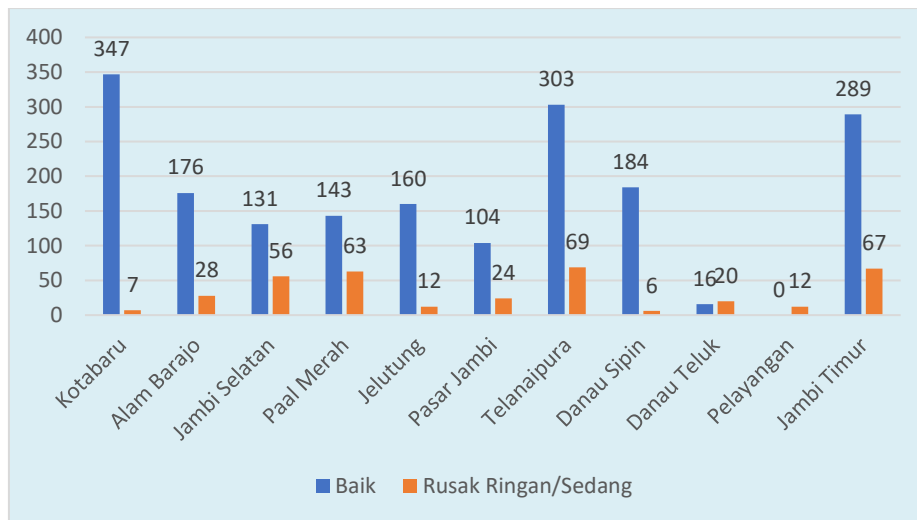


Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

Gambar 2.20.

Jumlah Sekolah SD/MI dan SMP/MTS menurut Kecamatan di Kota Jambi Tahun 2020

Adapun kondisi ruang kelas SD/MI di Kota Jambi berdasarkan tingkat kerusakan setiap kecamatan dapat dilihat pada grafik berikut:

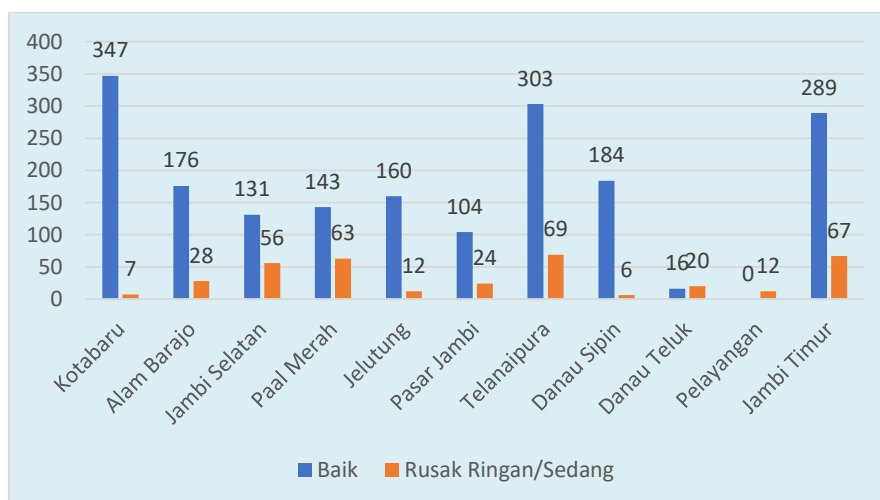


Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

Gambar 2.21.

Kondisi Ruang Kelas SD/MI Tahun 2020

Banyaknya ruang kelas SD/MI yang rusak ringan sampai rusak berat membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah agar kualitas pendidikan dasar dan menengah lebih baik pada masa yang akan datang. Kebijakan yang sama juga dibutuhkan pada sekolah tingkat SMP/MTS yang kondisinya hampir sama seperti ditunjukkan pada grafik berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2020

Gambar 2.22.

Kondisi Ruang Kelas SMP/MTs Tahun 2020

3. Rasio Guru-Murid

Salah satu penunjang peningkatan angka indikator rata-rata lama sekolah adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan ruang kelas/rombongan belajar (rombel) yang mencukupi untuk semua penduduk usia sekolah, juga banyaknya guru yang mengajar mencukupi untuk semua murid. Selain jumlah guru yang mencukupi, kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu Pendidikan.

Tabel 2.26.
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Jambi
Tahun 2013-2020

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI								
1.1.	Jumlah Guru	3.267	3.561	3.477	3.354	3.607	3.206	3.184	3.232
1.2.	Jumlah Murid	65.732	69.870	69.958	69.973	66.212	62.336	60.976	59.616
1.3.	Rasio	0,049	0,050	0,049	0,047	0,054	0,051	0,052	0,067
2	SMP/MTs								
2.1.	Jumlah Guru	2.228	2.269	2.295	2.273	1.777	1.557	1.558	1.621
2.2.	Jumlah Murid	24.835	34.710	34.838	34.928	29.698	26.350	26.442	29.817
2.3.	Rasio	0,089	0,065	0,065	0,065	0,059	0,059	0,058	0,061

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

Berdasarkan Tabel dapat dijelaskan bahwa rasio kecukupan guru dan murid untuk tingkatan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Jambi sudah sangat baik. Rasio SD/MI pada tahun 2020 sebesar 0,067 dan SMP/MTs sebesar 0,061 jauh lebih tinggi dibandingkan standar rasio ideal guru dan murid yakni 1:28. Gambaran jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar menurut kecamatan Tahun 2020 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.27.
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Jambi
Menurut Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	2	3	4	(5=3/4)	6	7	(8=6/7)
1	Kec. Alam Barajo	285	6.684	0,043	158	2.592	0,061
2	Kec. Danau Sipin	177	2.258	0,078	97	3.154	0,031
3	Kec. Danau Teluk	58	1.095	0,053	26	326	0,080
4	Kec. Jambi Selatan	485	9.815	0,049	153	2.388	0,064
5	Kec. Jambi Timur	442	8.284	0,053	238	4.574	0,052
6	Kec. Jelutung	415	6.311	0,066	144	2.083	0,069
7	Kec. Kota Baru	325	8.933	0,036	285	5.549	0,051
8	Kec. Paal Merah	102	4.727	0,022	156	2.232	0,070

9	Kec. Pasar Jambi	101	1.086	0,093	85	1.828	0,047
10	Kec. Pelayangan	141	1.099	0,128	45	74	0,608
11	Kec. Telanai Pura	701	9.327	0,075	235	5.072	0,046
Jumlah		3.232	59.616	0,697	158	2.592	0,061

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

4. Angka Kelulusan

Angka kelulusan untuk masing-masing jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28.
Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA
Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2019	2020
SD/MI/Paket A									
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SD	10,695	9,842	11,164	11,164	11.074	11.308	11.438	11.425
2	Jumlah Siswa SD	10,695	9,842	11,164	11,164	11.074	11.308	11.438	11.425
3	Angka Kelulusan SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
SMP/MTS/Paket B									
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SMP/MTS	7,383	10,551	13,448	13,448	13.343	13.308	11.235	11.425
2	Jumlah Siswa SMP/MTS	7,465	10,551	13,448	13,448	13.343	13.308	11.235	11.425
3	Angka Kelulusan SMP/MTS	98.90%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
SMA/SMK/Paket C									
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SMA/SMK	8,674	9,918	10,533	10,533	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi
2	Jumlah Siswa SMA/SMK	8,680	9,922	10,533	10,533	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi
3	Angka Kelulusan SMA/SMK	99.93%	99.96%	100.00%	100.00%	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

Angka kelulusan siswa SD/MI mencapai 100% sedangkan angka kelulusan SMP/MTS dari tahun 2014 mencapai 100 %. Angka kelulusan yang tinggi ini harus juga diiringi dengan kualitas lulusan. sehingga kebijakan pembangunan sektor pendidikan dasar dan menengah di Kota Jambi pada masa yang akan datang adalah optimalisasi sumber daya yang ada sehingga kualitas lulusan menjadi semakin berdaya saing di skala nasional dan global.

2.3.1.2. Urusan Kesehatan

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya adalah layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain: (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat, bidang dan apoteker; dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan.

Data capaian pelayanan umum urusan kesehatan dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2017 secara umum mengalami tren yang terus meningkat. Secara lengkap data capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29.
Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2013-2020

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu	453	459	460	460	460	460	460	467
2	Jumlah Balita	59.462	56.670	58.012	52.933	72.942	47.805	45.853	34.919
3	Rasio RPPB (%)	7,62	8,10	7,93	8,69	6,31	9,62	10,03	13,37

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2021

Tabel 2.30.
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2013-2020

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Sakit	17	17	14	14	17	17	17	17
2	Jumlah Penduduk	556.332	568.062	576.067	583.487	591.134	609.620	616.355	618.814
3	Rasio RSPP (%)	0,0031	0,0030	0,0024	0,0024	0,0029	0,0028	0,0028	0,0027

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2021

Puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Secara lengkap mengenai rasio puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk di Kota Jambi selama 2013-2020 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.31.

Rasio Puskesmas/Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2013-2020

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	58	58	58	59	59	58	58	58
2	Jumlah Penduduk	556.332	568.062	576.067	583.487	591.134	609.620	616.355	618.814
3	Rasio P5 (%)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,009	0,009

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2021

Ketersediaan dokter di kota Jambi terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 252 orang menjadi 398 orang pada tahun 2020. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.32.

Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2013-2020

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Dokter	252	258	255	255	259	326	868	398
2	Jumlah Penduduk	556.332	568.062	576.067	583.487	591.134	609.620	616.355	618.814
3	Rasio DPP (%)	0,045	0,045	0,044	0,043	0,043	0,053	0,014	0,064

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2021

Pada tahun 2020, jumlah rumah sakit di Kota Jambi sebanyak 17 unit, puskesmas ini sebanyak 20 unit terdiri dari puskesmas perawatan 4 unit dan puskesmas pembantu 39 unit. Pemberi layanan kesehatan, terdiri dari dokter umum sebanyak 55 orang, dokter spesialis 55 orang, dokter gigi 26 orang, bidan 303 orang, dan perawat sebanyak 203 orang. Upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan secara rawat jalan bagi masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan ringan dan pelayanan rawat inap bagi masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan hingga berat. Sebagian besar sarana pelayanan puskesmas dipersiapkan untuk pelayanan kesehatan

dasar terutama pelayanan rawat jalan, sedangkan rumah sakit disamping memberikan pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani kunjungan rawat jalan.

Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Jambi telah menambah Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit H. Abdurrahman Sayoeti di Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi. Selain itu semua puskesmas yaitu sebanyak 20 Puskesmas di Kota Jambi Sudah terakreditasi yang memiliki mutu pelayanan, SDM dan sarana prasarana yang baik yang sesuai dengan standarisasi akreditasi.

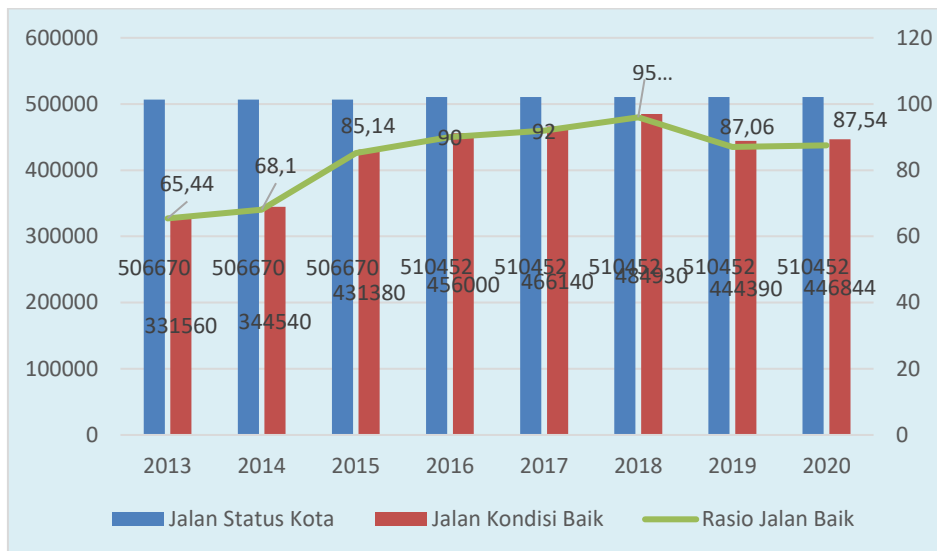
Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Manap yang merupakan satu-dari 2 (dua) rumah sakit milik Pemerintah Kota Jambi yang melayani pasien umum, pasien yang menggunakan jaminan kesehatan, Jamsostek, Trimitra dan BPJS. Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Manap merupakan Rumah Sakit Rujukan Regional Wilayah Timur untuk Rumah Sakit yang memiliki Type C meliputi Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjabtim.

2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pemerintah kabupaten/ kota mencakup sub urusan berikut: Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha. Pembangunan infrastruktur wilayah yang menjadi fokus kegiatan pekerjaan umum pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari penataan ruang. Dimana infrastruktur diharapkan menjadi trigger bagi tumbuh kembangnya pusat-pusat kegiatan baru yang bersinergi dan lebih lanjut berimplikasi pada akselerasi pembangunan dan perekonomian daerah.

Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur jalan, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta

pengikat wilayah. Pada kawasan perkotaan seperti Kota Jambi, ketersediaan infrastruktur jalan menjadi salah satu yang mendapat perhatian khusus. Hal ini tentunya tidak lepas dari pesatnya pertumbuhan perkotaan yang mengakibatkan daya tampung jalan semakin berkurang dan membutuhkan operasional cost yang mumpuni untuk memastikan kualitasnya dalam kondisi baik. Kondisi status jalan kota dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, 2021

Gambar 2.23.

Rasio Panjang Jalan yang Baik di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Dari gambar diatas dapat dilihat dalam delapan tahun terakhir rasio jaringan panjang jalan kondisi baik di Kota Jambi setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Kondisi awal panjang jalan di Kota Jambi relatif baik dan setiap tahunnya ditargetkan terus mengalami perbaikan. Namun demikian, guna menjawab persoalan perkotaan khususnya dalam mengurai titik kemacetan, kondisi panjang jalan yang baik saja tidaklah cukup, untuk itu Pemerintah Kota Jambi juga dituntut terus melakukan peningkatan lebar ruas jalan guna mengimbangi laju pertumbuhan kendaraan yang beredar di Kota Jambi. Sebagai wujud nyata dalam perencanaan berbasis spasial, Pemerintah Kota Jambi telah melakukan inventarisir jalan kota berbasis GIS dan berdasarkan tata ruang. Disamping upaya peningkatan status jalan lingkungan menuju kawasan pemukiman yang diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat khususnya terkait pengembangan kawasan perkotaan

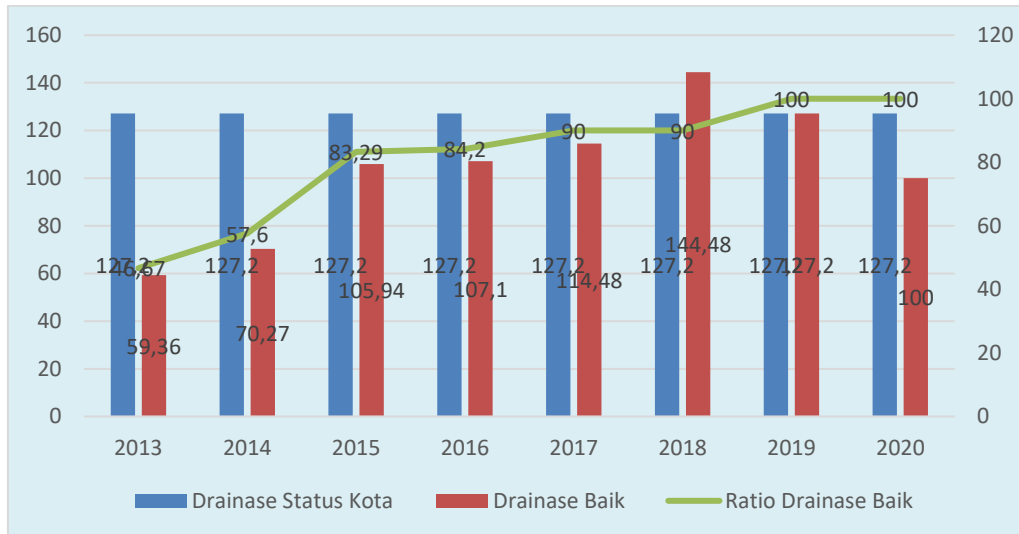
Sedangkan untuk transportasi udara di Kota Jambi dilayani oleh Bandar Udara Sultan Thaha Saifudin dan transportasi sungai di Kota Jambi terbatas bagi kapal motor yang tidak terlalu besar, mengingat kondisi sedimentasi yang berpengaruh pada kedalaman Sungai Batanghari. Untuk memasok kebutuhan bahan pangan untuk Kota

Jambi di lakukan bongkar muat di Dermaga Angso Duo baru. Untuk keperluan Bongkar Muat kapal yang besar pelayanannya dilakukan melalui Pelabuhan Talang Duku yang berada di Kabupaten Muaro Jambi. Pada aspek infrastruktur sumber daya air, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai. Potensi sumber daya air di Kota Jambi yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik.

Sungai Batanghari yang melintasi Kota Jambi merupakan bagian dari Sub DAS Batanghari hilir yang masih berada dalam kesatuan DAS Batanghari. Sub DAS Batanghari hilir memiliki luas 861.904 Ha, panjang sungai 2.287,33 Km, dan keliling Sub DAS 630.693,80 Km. Sedangkan panjang sungai Batanghari yang melintasi Kota Jambi yaitu \pm 18 Km. Posisinya yang termasuk bagian hilir dari DAS Batanghari membuat sungai Batanghari yang berada di Kota Jambi juga mendapatkan imbas dari kondisi lingkungan di hulunya. Sedimentasi DAS Batanghari saat ini semakin parah, penyebabnya diduga adalah usaha pertambangan, penebangan liar, perkebunan (sawit), dan adanya industri pengolahan kayu (sawmill/penggergajian kayu) di sepanjang DAS Batanghari baik legal maupun illegal, serta kegiatan permukiman yang berada di sepanjang sungai.

Berdasarkan analisis status mutunya pada stasiun pemantauan kualitas air Sungai Batanghari telah tercemar berat dan untuk beberapa parameter tidak memenuhi kriteria mutu air kelas I dan II. Penggunaan air sungai Batanghari sebagai sumber Baku Air Minum perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut sesuai dengan kondisinya sehingga memenuhi syarat untuk baku mutu air minum. Namun demikian Pemerintah Kota Jambi juga terus berupaya menggali potensi sumber air baku yang baru seperti halnya rencana pembangunan embung pada lokasi yang memungkinkan.

Untuk meminimalisir akses negatif seperti banjir dan peningkatan tingkat pencemaran, dinilai perlu dilakukan peningkatan jaringan drainase Kota Jambi. Dimana sesuai SK Walikota Jambi Nomor 464 Tahun 2016 total panjang drainase Kota Jambi adalah 127,2 Km dengan capaian realisasi panjang drainase dalam kondisi baik dalam tabel berikut.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, 2021

Gambar 2.24.

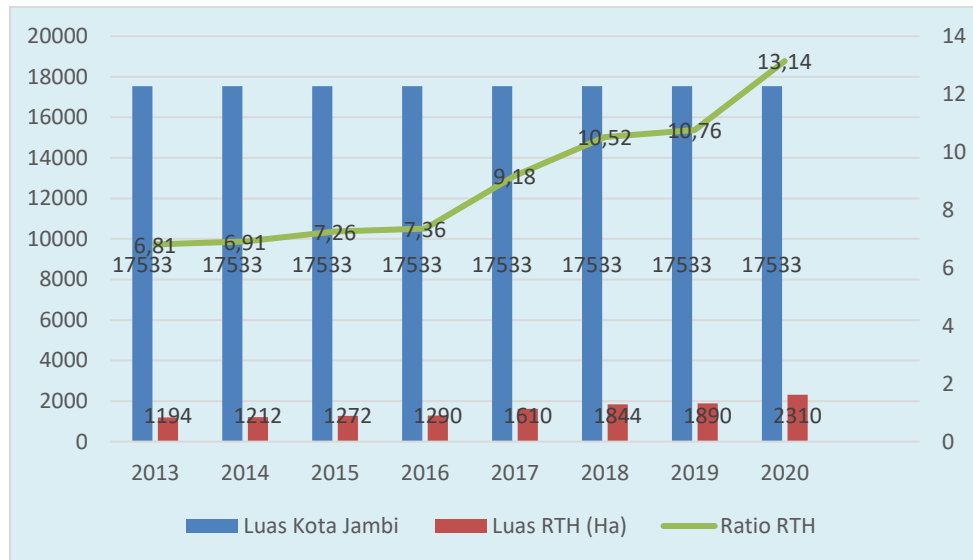
Rasio Panjang Drainase yang Baik di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Dari gambar diatas dapat dilihat dalam tiga tahun terakhir rasio panjang Drainase yang baik di Kota Jambi tidak mengalami peningkatan dari sisi kuantitatif hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Jambi belum melakukan updating data drainase sehingga belum tercantum dalam SK Walikota Jambi.

Terkait dengan urusan penataan ruang dimana rasio ketaatan terhadap RTRW ditargetkan sebesar 100% setiap Tahunnya. Target capaian ini di wujudkan dengan cara tertib pemberian perizinan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang terdiri dari rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan dan rencana kawasan strategis. Untuk indikator rasio ketaatan terhadap RTRW ditargetkan mencapai angka 100% setiap Tahunnya belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini terlihat masih adanya pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam RTRW, sebagai contoh pembuatan bangunan yang menyalahi ketentuan GSB (Garis Sepadan Bangunan), kemudian pemasangan papan merek reklame yang tidak memenuhi standar pemasangan yang telah ditetapkan.

Fakta dari adanya beberapa pelanggaran yang masih ditemukan tersebut, ketaatan terhadap tata ruang juga menuntut lebih optimalnya fungsi pengawasan dari instansi teknis, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Jambi diminta untuk lebih profesional dan proaktif terkait ketertiban administrasi

rekomendasi perizinan serta pengawasan. Selain terkait ketaatan terhadap rencana tata ruang tersebut, pemenuhan rasio RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota Jambi sesuai amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi. Capaian target tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut.

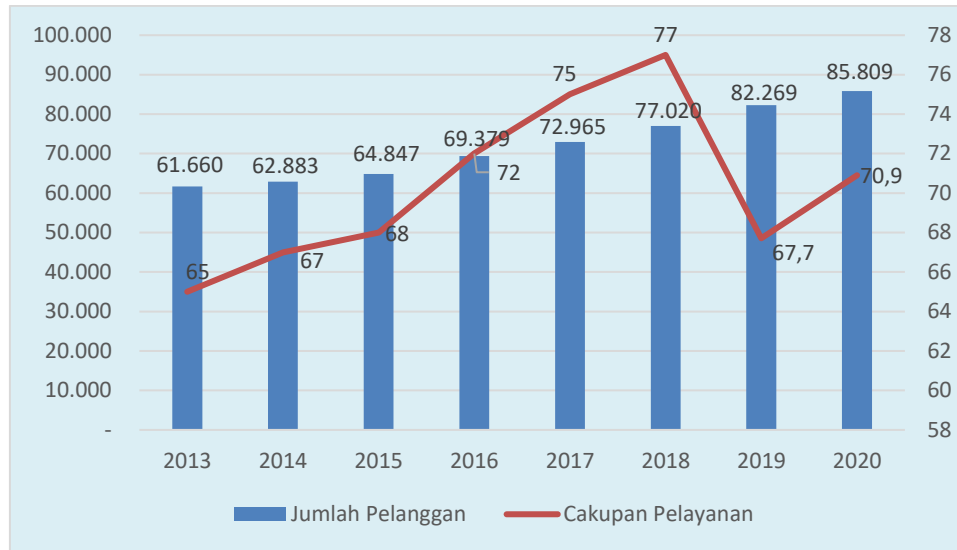


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan DLH Kota Jambi, 2021

Gambar 2.25.
Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Tingginya harga dan terbatasnya lahan merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Jambi dalam mencapai target RTH tersebut. Sebagaimana tergambar pada gambar diatas rasio RTH di Kota Jambi pada Tahun 2013 sebesar 6,81% atau seluas 1.194 hektar. Salah satu upaya yang dilakukan Kota Jambi adalah dengan melakukan pendataan lebih valid dan terdigitasi dengan baik dan terus melaksanakan “land banking” setiap Tahunnya. Setelah dilakukan pendataan aset dan ruang hijau dengan digitasi, perbaikan data luasan rasio RTH Kota Jambi di Tahun 2020 telah mencapai 13,14% atau seluas 2.309,60 Ha. Penambahan luasan RTH ini secara signifikan didapatkan dari data ruang hijau aset Provinsi Jambi, vegetasi taman pada median dan bahu jalan (pedestrian), serta data luasan pekarangan rumah hunian dan gedung non hunian.

Peningkatan pelayanan dasar khususnya yang terkait dengan cakupan pelayanan jaringan air minum masih terus mengalami peningkatan, hal ini dapat terlihat dari data saat ini cakupan pelayanan sebesar 70,9 % yang artinya masih ada 29,1% lagi yang belum terlayani fasilitas air bersih khususnya dengan jaringan perpipaan.



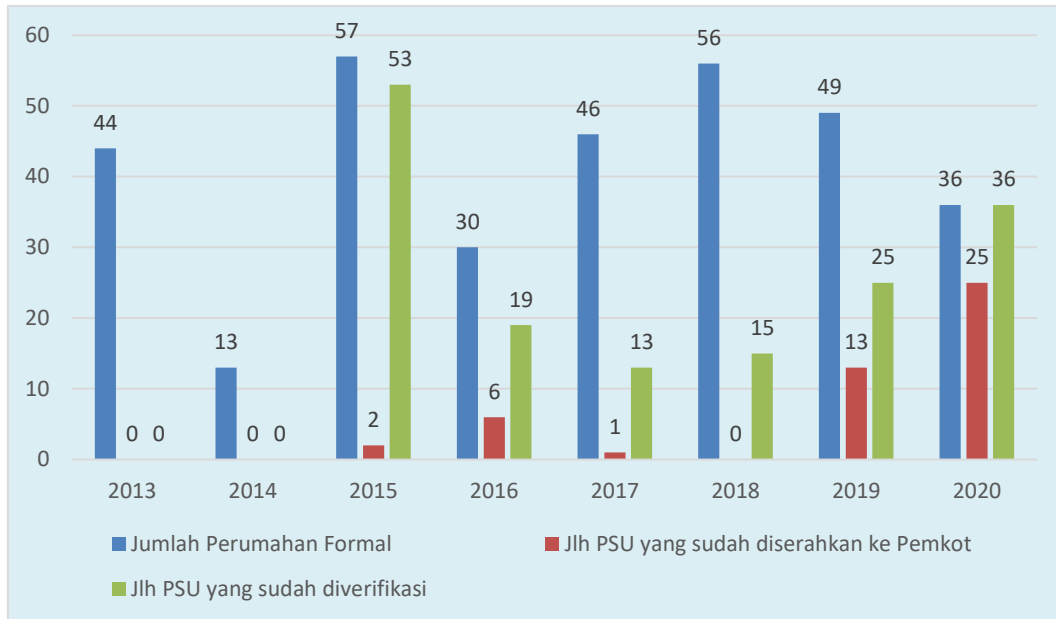
Sumber: PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, 2021

Gambar 2.26.
Jumlah Pelanggan dan Cakupan Pelayanan Air Bersih di Kota Jambi Tahun 2013-2020

2.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan Perumahan dan Permukiman untuk pemerintah kabupaten/ kota mencakup sub urusan berikut: 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

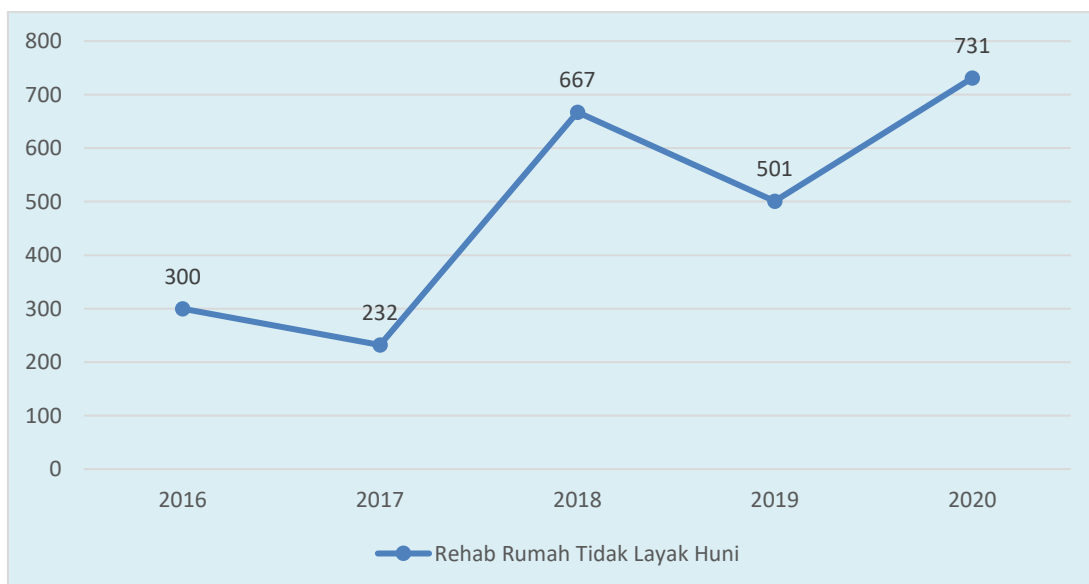
Pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman salah satunya adalah serah terima aset Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal dalam lima Tahun terakhir serah terima PSU perumahan formal belum menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan hal ini sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2021`

Gambar 2.27.
Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal

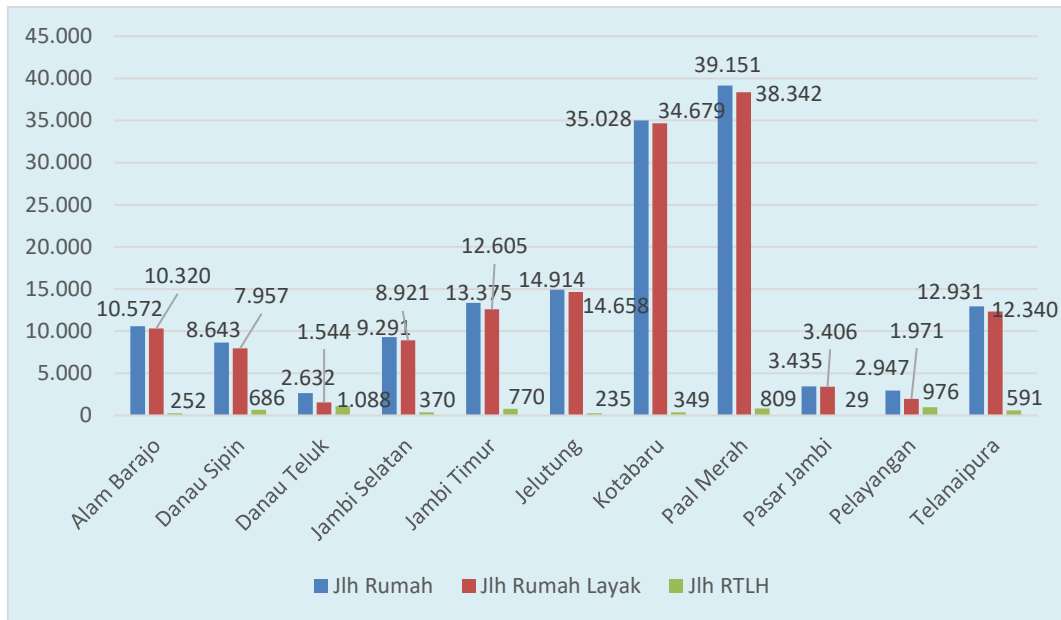
Selain terkait dengan perumahan formal ada kegiatan peningkatan kualitas rumah layak huni yang belum tertangani seluruhnya, konsistensi Pemerintah Kota Jambi dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat dilihat dalam tabel berikut:



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2021

Gambar 2.28.
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan data yang disampaikan pada tahun 2020 jumlah RTLH sebanyak 6.155 unit atau hanya sekitar 4,03 % dibandingkan jumlah rumah yang ada di kota Jambi. RTLH terbanyak berada di kecamatan Danau Teluk sebesar 1.088 unit, sedangkan yang terendah di kecamatan Pasar Jambi sebesar 29 unit yang bisa dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2021

Gambar 2.29.

Data Jumlah Rumah di Kota Jambi per Kecamatan Tahun 2020

Prioritas lain dalam pelaksanaan urusan perumahan dan permukiman adalah penanganan kawasan kumuh. Target nasional penanganan wilayah kumuh di Kota Jambi telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Jambi pada Tahun 2016 terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) lokasi dengan luas total 986,57 hektar. Intervensi penanganan terhadap lokasi kawasan kumuh tersebut dilakukan dengan integrasi program antara pemerintah baik Kota, Provinsi maupun Pusat dan swasta, berhasil mengurangi luas kawasan kumuh dari 986,57 hektar. Dan pada tahun 2020 hasil Updating yang dilakukan, sisa luasan kawasan kumuh menjadi 188,97 hektar dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.33.

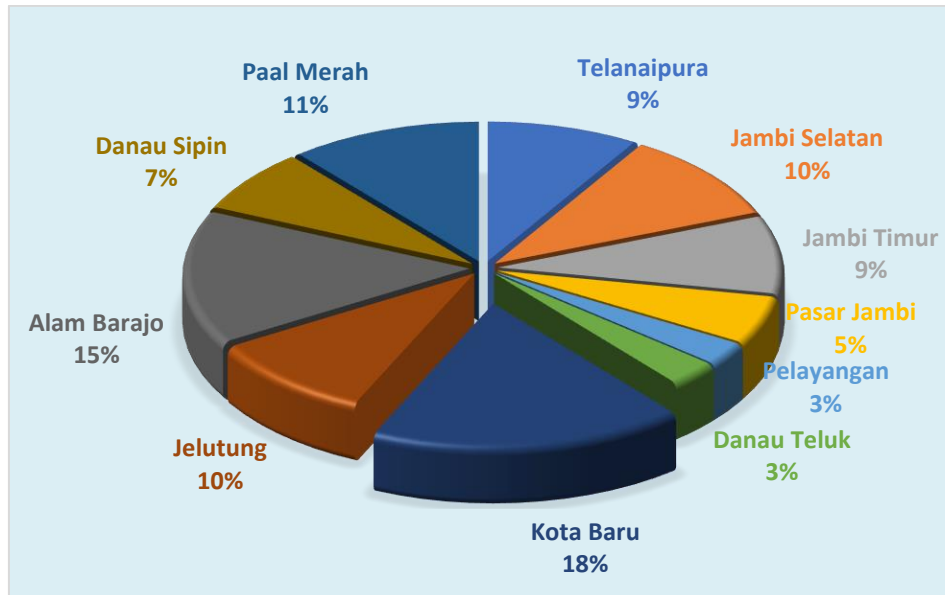
Kawasan Kumuh di Kota Jambi Berdasarkan SK Walikota

No	Nama Kawasan	Kriteria Kekumuhan	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Sisa Luas (Ha)
1.	Kawasan Kumuh Orang Kayo Hitam	Kumuh Ringan	10,06	0,00
2.	Kawasan Kumuh Beringin	Kumuh Ringan	23,02	2,45
3.	Kawasan Kumuh Cempaka Putih-Sei. Asam	Kumuh Ringan	45,41	0,00
4.	Kawasan Kumuh Lebak Bandung	Kumuh Ringan	3,71	0,00
5.	Kawasan Kumuh Talang Jauh	Kumuh Ringan	18,01	0,00

No	Nama Kawasan	Kriteria Kekumuhan	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Sisa Luas (Ha)
6.	Kawasan Kumuh Pakuan Baru	Kumuh Ringan	13,93	0,00
7.	Kawasan Kumuh Payo Lebar	Kumuh Ringan	3,41	0,94
8.	Kawasan Kumuh Jelutung	Kumuh Ringan	27,03	0,00
9.	Kawasan Kumuh Kebun Handil	Kumuh Ringan	9,89	3,24
10.	Kawasan Kumuh Handil Jaya	Kumuh Ringan	4,12	0,00
11.	Kawasan Kumuh Suka Karya	Kumuh Ringan	3,41	0,00
12.	Kawasan Kumuh Kenali Asam Atas	Kumuh Ringan	2,60	2,60
13.	Kawasan Kumuh Legok	Kumuh Ringan	147,34	95,02
14.	Kawasan Kumuh Murni	Kumuh Ringan	14,04	0,00
15.	Kawasan Kumuh Solok Sipin	Kumuh Ringan	1,61	0,00
16.	Kawasan Kumuh Sejinjang	Kumuh Ringan	64,19	0,00
17.	Kawasan Kumuh Kasang	Kumuh Ringan	36,28	3,04
18.	Kawasan Kumuh Rajawali	Kumuh Ringan	29,41	19,71
19.	Kawasan Kumuh Kasang Jaya	Kumuh Ringan	9,97	9,97
20.	Kawasan Kumuh Tanjung Sari	Kumuh Ringan	51,72	6,97
21.	Kawasan Kumuh Tanjung Pinang	Kumuh Ringan	53,98	5,54
22.	Kawasan Kumuh Sulanjana – Budiman	Kumuh Ringan	55,13	0,00
23.	Kawasan Kumuh Payo Selincah	Kumuh Ringan	8,79	8,79
24.	Kawasan Kumuh Penyengat Rendah	Kumuh Ringan	41,13	0,00
25.	Kawasan Kumuh Teluk Kenali	Kumuh Ringan	14,16	0,00
26.	Kawasan Kumuh Buluran Kenali	Kumuh Ringan	18,09	0,00
27.	Kawasan Kumuh Pematang Sulur	Kumuh Ringan	36,16	0,00
28.	Kawasan Kumuh Telanaipura	Kumuh Ringan	2,55	0,00
29.	Kawasan Kumuh Rawasari	Kumuh Ringan	7,29	7,29
30.	Kawasan Kumuh Kenali Besar	Kumuh Ringan	13,64	13,64
31.	Kawasan Kumuh Bagan Pete	Kumuh Ringan	6,97	6,97
32.	Kawasan Kumuh Jelmu	Kumuh Ringan	12,14	0,00
33.	Kawasan Kumuh Mudung Laut	Kumuh Ringan	31,10	0,00
34.	Kawasan Kumuh Tengah	Kumuh Ringan	14,26	0,00
35.	Kawasan Kumuh Tanjung Johor	Kumuh Ringan	2,80	2,80
36.	Kawasan Kumuh Tanjung Pasir – Tanjung Raden – Pasir Panjang	Kumuh Ringan	70,54	0
37.	Kawasan Kumuh Arab Melayu	Kumuh Ringan	23,91	0
38.	Kawasan Kumuh Ulu Gedong – Olak Kemang	Kumuh Ringan	54,78	0
TOTAL			986,57	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2021

Selain menangani urusan perumahan serta penanganan kawasan kumuh, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga menangani Penerangan Lampu Jalan Umum, dimana saat ini jumlah titik lampu jalan yang telah terpasang sampai dengan di Kota Jambi baik pada jalan primer maupun jalan lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2021

Gambar 2.30.

Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum yang Terpasang di Kota Jambi Tahun 2020

Dari total sebanyak 18.793 titik lampu jalan yang terpasang diantaranya telah menggunakan lampu hemat energy (LED) kapasitas 150 watt sebanyak 1.690 titik dan kapasitas 60 watt sebanyak 1.559 titik, 40 Watt Sebanyak 623 Titik, 90 Watt Sebanyak 609 Titik, dan 180 Watt Sebanyak 58 Titik. Untuk jumlah pemukiman umum yang ada di Kota Jambi yang juga merupakan tanggung jawab urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sampai dengan tahun 2020 sebanyak 95 lokasi dengan luas sekitar 926.368 M².

2.3.1.5. Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan kewenangan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah.

Sampai tahun 2020, jumlah personil Satpol PP 350 orang. Apabila jumlah ideal anggota Satpol PP adalah 1 : 1500, dengan jumlah penduduk ±606.200 jiwa, maka seharusnya jumlah personil Satpol PP Kota Jambi adalah 500an orang. Selanjutnya jumlah Pos Siskamling sampai tahun 2020 adalah 186 buah yang tersebar di 62 kelurahan, sehingga Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan sebanyak 3 (tiga).

Tabel 2.34.

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Jambi Tahun 2020

Uraian	Tahun 2020	
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	350 orang 606.200 jiwa	0.06
Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan	186	3

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya yang tercantum pada pasal 3, menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Berkaitan dengan peraturan tersebut petugas Satpol PP Kota Jambi telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan perda dan penegakan K3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.35.

Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum Di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pelanggaran Perda	Tad	tad	20	24	tad	20	25	31
Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	Tad	tad	20	24	tad	20	25	31
Persentase Penyelesaian Penegakan Perda (%)	Tad	tad	100	100	tad	100	100	100
Jumlah Pelanggaran K3	102	377	552	703	tad	621	579	109
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	102	377	552	703	tad	621	579	109
Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	100	100	100	100	tad	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 2021

Penanggulangan ketentraman dan ketertiban serta pendekatan yang dilakukan di Kota Jambi sesuai dengan jenis gangguannya, artinya jika terjadi demonstrasi atau kerusuhan di berbagai tempat di Kota Jambi, baik kantor pemerintah maupun di tempat-tempat lain, maka personil Satpol PP akan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan demonstrasi tersebut. Jika terjadi kekacauan atau anarkisme maka personil Satpol PP akan bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Kendala lain yang juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi, yaitu menyangkut Pedagang Kaki Lima. Pertumbuhan pedagang kaki lima di Kota Jambi sangat pesat, hal tersebut menunjukkan makin menggeliatnya roda perekonomian di Kota Jambi. Namun disatu sisi pertumbuhan pedagang kaki lima menyumbangkan kesembrawutan dan kemacetan, oleh karena itu Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki lima yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 dan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Pelaksanaannya. Namun, dalam pelaksanaannya masih di jumpai pedagang-pedagang yang tidak mematuhi aturan, untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan razia-razia dan penertiban pedagang kaki lima termasuk area parkir di Kota Jambi.

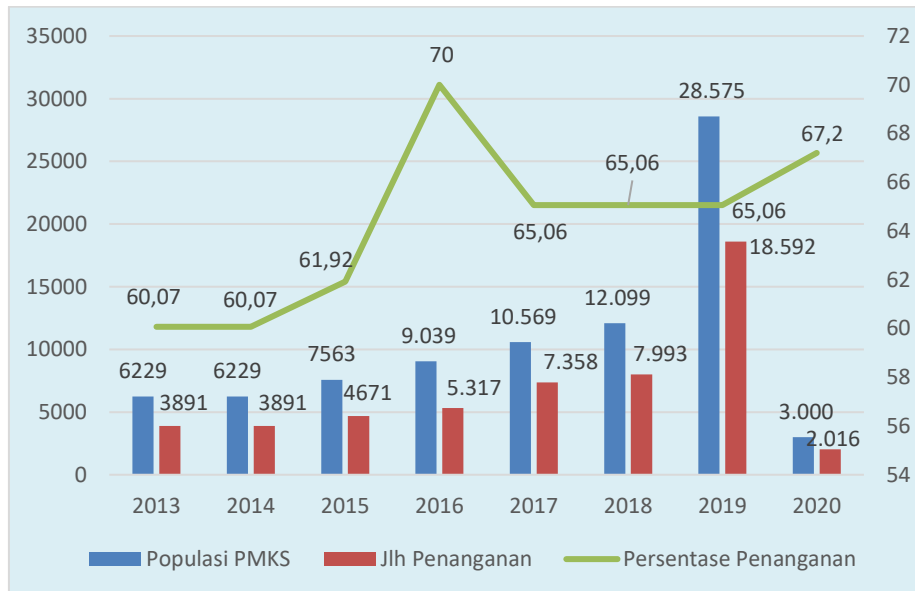
2.3.1.6. Urusan Sosial

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia akan berpengaruh pada pelayanan sosial dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Kota Jambi, berdasarkan hasil data Dinas Sosial jumlah penduduk lanjut usia (lansia) pada Tahun 2020 sebanyak 2.824 orang lansia potensial dan 1.852 lansia miskin, untuk tahun 2020 Dinas Sosial Memberikan bantuan terdiri dari 185 orang mendapat bantuan APBN. Data tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa penduduk lansia seluruhnya terlantar, namun sebagian besar masih memiliki anak tetapi keluarga miskin, sehingga di data sebagai lansia terlantar, keberadaan sarana sosial khususnya panti jompo memiliki peran dalam memelihara keberadaan PMKS khususnya pada lansia. Terbatasnya jumlah panti jompo menyebabkan belum maksimalnya melindungi dan memelihara lansia di Kota Jambi dimana saat ini Kota Jambi baru memiliki 1 buah panti jompo.

Sesuai dengan amanat UU nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya melalui jaminan sosial dan perlindungan sosial. Jaminan sosial bertujuan menjamin PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Sementara itu perlindungan sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar keberlangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal. Tahun 2020 ditetapkan sebanyak 2.016 orang PMKS memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar, untuk mencapai target tersebut dilaksanakan kegiatan peningkatan dan pembinaan pelayanan PMKS yang didalamnya terdiri dari rangkaian sub kegiatan pelayanan pemberdayaan lanjut usia.

Disamping itu selain memberikan bantuan kebutuhan dasar Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini dinas sosial juga memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti pelatihan kuliner dan bantuan bagi kelompok usaha bersama (KUBE), dll, sesuai dengan ketrampilan masing-masing. Berdasarkan data jumlah populasi PMKS meningkat dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2013 sebesar 6.229 orang menjadi 28.575 orang pada tahun 2019 namun menurun lagi di tahun 2020 menjadi 3.000 orang, sementara jumlah PMKS yang ditangani hanya sebesar 60% dari Tahun 2013 hingga 2020. Kenaikan terjadi pada

Tahun 2016 dan 2017 yang mencapai 70%. Salah satu tidak tercapainya target penanganan ialah keterbatasan anggaran dan tinggi partisipasi masyarakat PMKS yang ingin mendapatkan kegiatan tersebut.



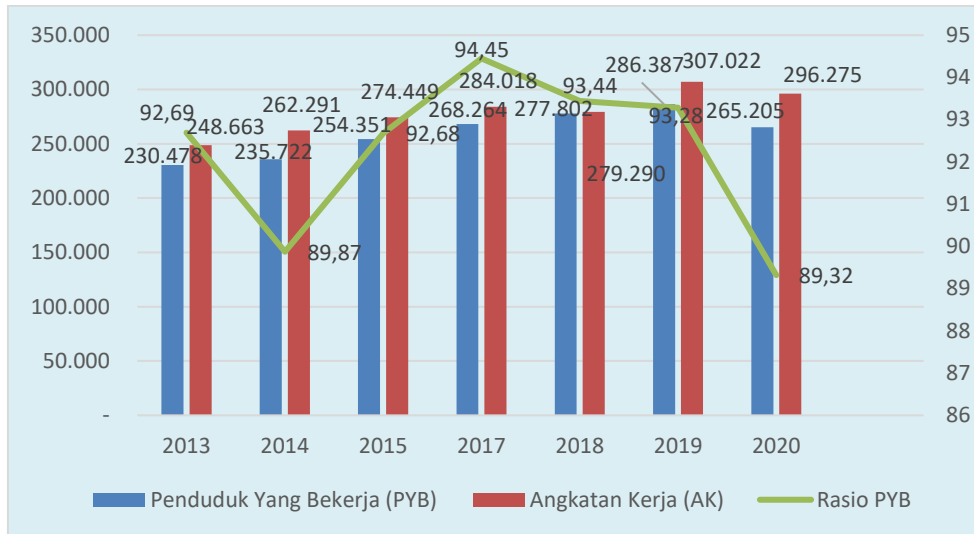
Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi, 2021

Gambar 2.31.
Penanganan PMKS di Kota Jambi Tahun 2013-2020

2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

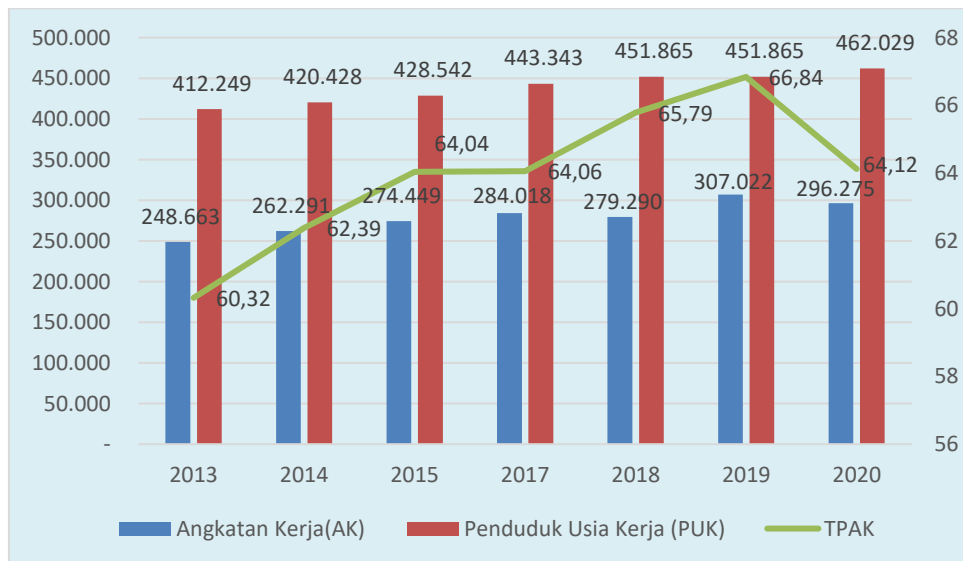
Urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diamanatkan oleh UU 23 Tahun 2014. Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan ketenagakerjaan antara lain terkait dengan pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial. Pelayanan urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dari kurun waktu 2013-2016 dan pada Tahun 2017 seiring dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja. Berikut capaian pelayanan urusan tenaga kerja sebagaimana tabel berikut.



Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2020
 * BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

Gambar 2.32.

Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kota Jambi Tahun 2013-2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan data yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah, adapun kondisi di Kota Jambi dapat di lihat pada gambar sebagai berikut



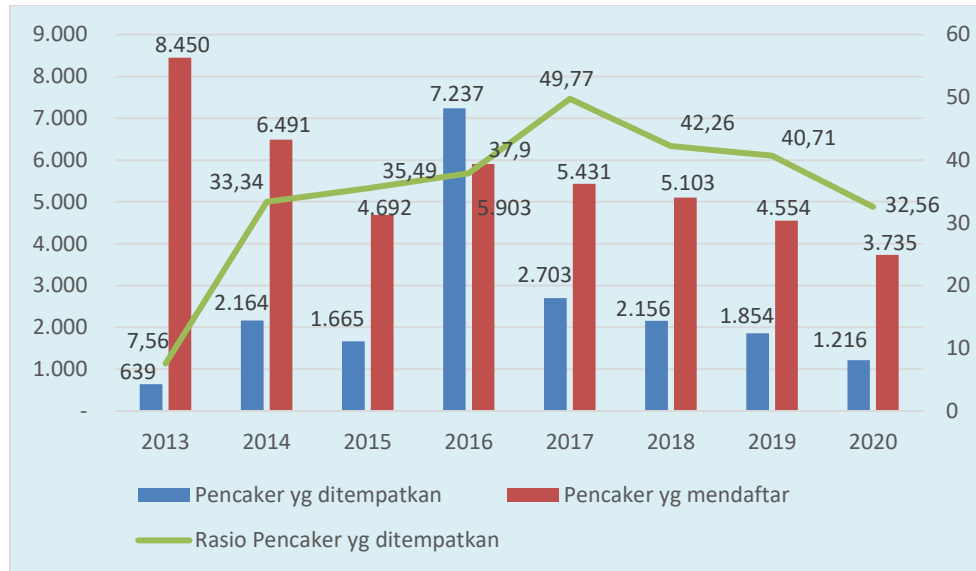
Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2021
 * BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

Gambar 2.33.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk

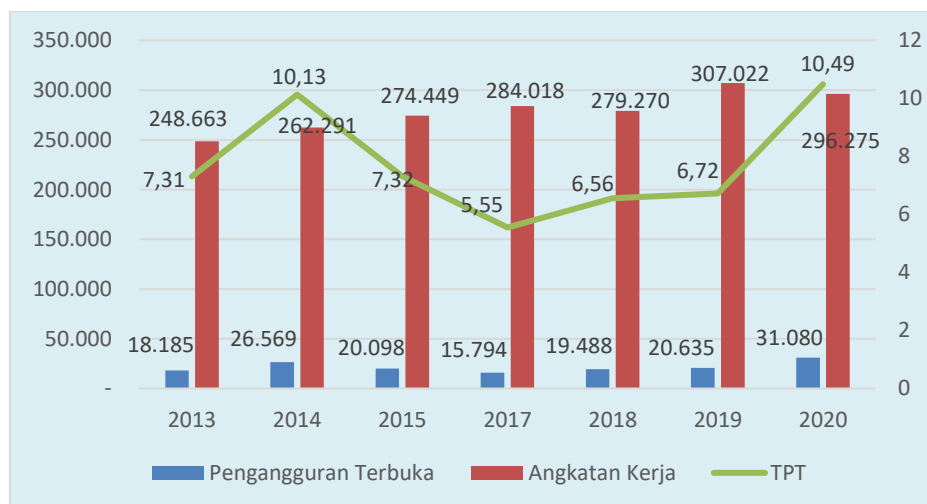
memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Seperti pada Tahun 2020 di kota Jambi sebesar 64,12% artinya dari 100 penduduk usia 15 Tahun keatas sebanyak 64 orang tersedia untuk memproduksi pada periode tertentu. Adapun kondisi pencari kerja yang mendaftar di Kota Jambi dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2021

Gambar 2.34.
Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2013-2020

Dari data tersebut di Kota Jambi jumlah pencari kerja yang ditempatkan berfluktuasi dari Tahun ke Tahun, Untuk tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan Pandemi Covid sehingga lapangan pekerjaan yang tersedia hanya sedikit. Karena hal ini terjadi peningkatan angka pengangguran di Kota Jambi. Kondisi pengangguran terbuka di Kota Jambi dapat disajikan pada gambar berikut :



Perubahan RPJMD Kota Jambi 2018-2023

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2021

* BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

Gambar 2.35.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Jambi Tahun 2013-2020

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Di Kota Jambi kondisi pada Tahun 2020 sekitar 10,49 %, artinya dari 100 penduduk usia 15 Tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 10 orang merupakan pengangguran.

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas hidup perempuan dilaksanakan diberbagai bidang pembangunan, Akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan diperlukan dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender. Indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya persentase partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah, berdasarkan data kepegawaian Kota Jambi Tahun 2013 – 2020 persentase rata-rata perempuan yang bekerja di pemerintahan tidak mengalami peningkatan disebabkan salah satunya belum adanya penerimaan pegawai baru di pemerintahan kota Jambi dan bertambahnya jumlah pegawai negeri perempuan di Kota Jambi yang pensiun, hal ini terlihat pada gambar berikut :



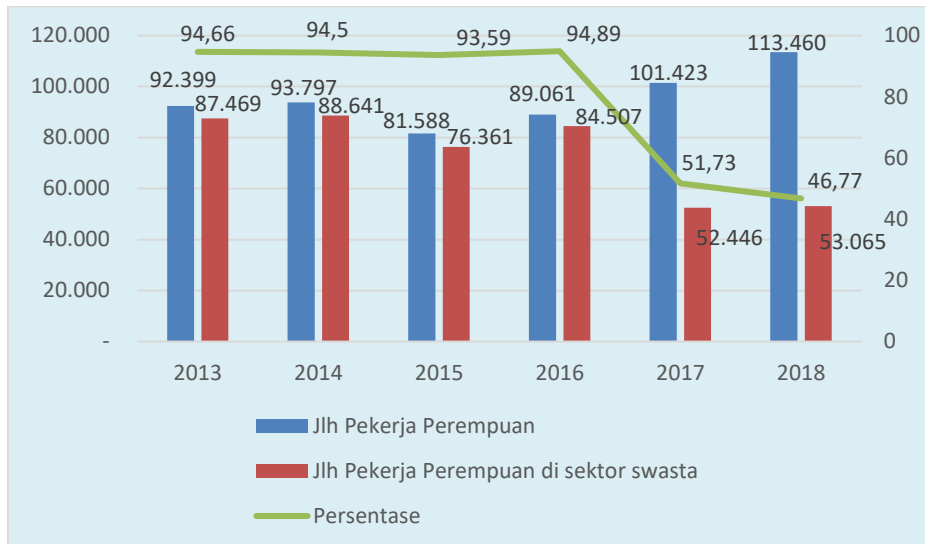
Sumber: BKPSDMD Kota Jambi, 2021

Gambar 2.36.

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Selain perempuan bekerja di lembaga pemerintah terdapat juga pekerja perempuan yang bekerja di sektor swasta, bila dilihat dari kurun waktu delapan tahun terakhir pekerja perempuan sektor swasta yang mendominasi.

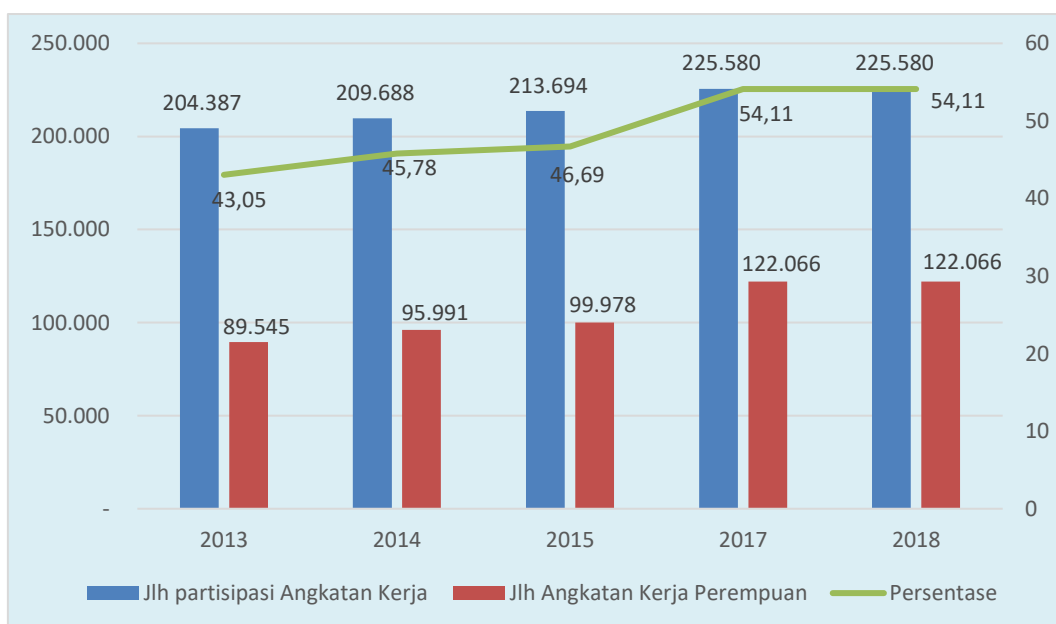


Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2021

Gambar 2.37.

Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Jambi Tahun 2013-2018

Partisipasi angkatan kerja perempuan berdasarkan data survey angkatan kerja nasional (sakernas) Tahun 2013-2020, persentase rata-rata perempuan yang bekerja mengalami peningkatan dari 43,05% menjadi 46,69% atau 45,17% setiap Tahunnya.

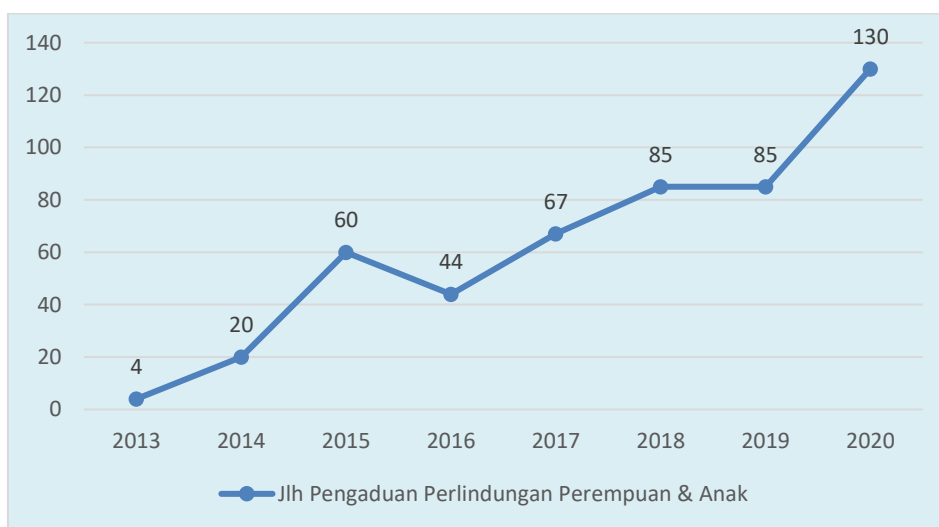


Sumber: BPS Prov. Jambi, 2021

Gambar 2.38.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Jambi Tahun 2013-2018

Partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor privat maupun sektor publik menunjukkan level partisipasi yang cukup tinggi. Sehingga dibutuhkan kebijakan dan program yang fokus pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja perempuan agar dapat menopang ekonomi keluarga secara mandiri, namun tetap mampu mengelola rumah tangga secara baik untuk masa depan keluarga dan anak-anak.



Sumber: DPMPPA Kota Jambi, 2021

Gambar 2.39.

Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah pribadi dan bisa menimbulkan aib keluarga, sehingga banyak warga yang tidak berani melaporkan permasalahan tersebut. Kekerasan ini terjadi mayoritas karena masalah ekonomi keluarga, serta usia pernikahan dini yang menyebabkan secara mental masih cukup labil. Seiring dengan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan penanganan korban kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, masyarakat sudah berani untuk melaporkannya bila terjadi tindak kekerasan baik yang dari korban maupun dari warga setempat kejadian.

Kesadaran masyarakat khususnya perempuan di Kota Jambi untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (Perempuan dan Anak-anak) mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini terlihat dari pada Tahun 2013 terjadi pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak sebanyak 4 kasus, namun pada tahun 2015 mencapai 60 kasus, pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 36,4% atau 16 kasus.

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak-anak dari tindakan kekerasan dari Tahun 2013-2016 berfluktuasi, yaitu sebanyak 4 kasus (tahun 2013), 20 kasus (tahun 2014), 60 kasus (tahun 2015) dan pada tahun 2016 sebanyak 44 kasus, namun dari fluktuasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak semua pengaduan dapat diselesaikan 100%.

2.3.2.3. Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu : (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari Tahun ke Tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan.

Pangan strategis merupakan pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, jenis pangan strategis ditetapkan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk pangan tersebut tinggi, memiliki pengaruh tingkat inflasi dan memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia. Adapun jenis pangan strategis antara lain: beras, tepung terigu, kacang kedelai, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar, cabe, bawang merah, gula dan minyak goreng.

Kecukupan ketersediaan pangan strategis di Kota Jambi sudah cukup memadai secara kemandirian, situasi kemandirian pangan di Kota Jambi Tahun 2020 adalah dari

segi ketersediaan Energi Kota Jambi terpenuhi sebesar 2.198 kkal/kap/hari (101,7% AKE) dari angka kecukupan energi yang seharusnya dipenuhi sebesar 2.400 kkal/kap/hari; dari segi ketersediaan Protein Kota Jambi terpenuhi sebesar 300,5 gr/kap/hari dari angka kecukupan protein yang seharusnya dipenuhi sebesar 63 gr/kap/hari; dari segi ketersediaan Lemak Kota Jambi terpenuhi sebesar 218,9 gr/kap/hari dari angka kecukupan lemak yang seharusnya dipenuhi sebesar 24,7 gr/kap/hari, dan skor PPH 5.

Berkaitan dengan informasi pasokan yang belum ada sehingga menyulitkan dalam penentuan jumlah besaran ekspor dan impor pangan yang keluar masuk Kota Jambi. Untuk mengetahui jumlah pangan yang masuk dan keluar digunakan estimasi ekspor dan impor dengan standar defiasi eror yang kecil. Data estimasi ekspor impor yang dimaksud merupakan hasil estimasi dari data konsumsi pangan yang bersumber dari data Susenas. Penghitungan estimasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan menggunakan data pangan yang dikonsumsi namun tidak dapat diproduksi secara mandiri oleh daerah sehingga pangan tersebut di asumsikan di impor dari luar daerah dan sebaliknya apabila konsumsi terhadap jenis pangan tertentu lebih rendah dari produksinya maka over supply diasumsikan sebagai ekspor.

Berkaitan dengan kualitas/keamanan pangan segar, pemerintah Kota Jambi secara rutin melakukan pengecekan sampel bahan pangan segar agar dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat, namun belum dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat.

Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi atau gizi salah serta penyakit. Tercapainya pencapaian penganeekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Implementasi indikator kuantitatif tersebut disebut skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama.

Tabel 2.37.
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Kota Jambi Tahun 2020

Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram /Kapita/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kkal /Kapita	%	%AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
Padi-padian	271,5	1.141,3	51,9	53,1	0,5	26,0	26,5	25,0	25,0
Umbi-umbian	42,2	97,6	4,4	4,5	0,5	2,2	2,3	2,5	2,3
Pangan Hewani	35,0	300,5	13,7	14,0	2,0	27,3	28,0	24,0	24,0
Minyak dan Lemak	24,7	218,9	10,0	10,2	0,5	5,0	5,1	5,0	5,0
Buah/Biji Berminyak	82,2	27,9	1,3	1,3	0,5	0,6	0,6	1,0	0,6
Kacang-kacangan	21	73,2	3,3	3,4	2,0	6,7	6,8	10,0	6,8
Gula	30,9	107,3	4,9	5,0	0,5	2,4	2,5	2,5	2,5
Sayur dan Buah	317,3	108,7	4,9	5,1	5,0	24,7	25,3	30,0	25,3
Lain-lain	42,4	122,6	5,6	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2021

Berdasarkan hasil analisis konsumsi Tahun 2020, PPH Kota Jambi sudah mendekati nilai optimal, yaitu telah mencapai 91,50 dimana nilainya telah berada di atas nilai skor PPH ideal minimal 90, hal ini berarti telah beragamnya konsumsi pangan oleh masyarakat Kota Jambi dimana skornya telah melebihi skor ideal 1 selain konsumsi Buah/Biji berminyak dengan skor 0,6, berarti kurangnya konsumsi Buah/Biji berminyak.

2.3.2.4. Pertanahan

Kewenangan urusan pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan amanat Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan yang meliputi 9 sub bidang yaitu 1) pemberian izin lokasi; 2) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3) penyelesaian sengketa tanah garapan; 4). penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; 6) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 7) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 8) pemberian izin membuka tanah dan 9) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya kewenangan pemerintah Kota Jambi terkait pelayanan pertanahan masih belum optimal, hal ini dikarenakan kewenangan pelayanan pertanahan masih di lakukan oleh BPN. Indikator lain dari penyelenggaraan pemerintahan di urusan pertanahan adalah penyelesaian izin lokasi. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya (Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015

tentang izin lokasi). Pemberian izin lokasi ini mendukung upaya peningkatan ekonomi di wilayah Kota Jambi, karena dengan semakin banyaknya izin lokasi yang dikeluarkan berarti semakin banyak penanaman modal di Kota Jambi.

Tabel 2.38.
Indikator Urusan Pertanahan Kota Jambi 2013-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota	Jumlah	595	606	608	614	614	614	614	614
2.	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota telah bersertifikat	Jumlah	291	293	295	295	295	295	295	295
3.	Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota telah bersertifikat	%	49	48	49	48	48	48	48	48

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Jambi dan DPKAD Kota Jambi, 2021

Selain itu dapat di informasikan jumlah yang mengajukan pembuatan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi selama periode dari Tahun 2013 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.39.
Jumlah Pembuatan Sertifikat Tanah di Kota Jambi

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Hak Milik	7.755	6.304	6.008	5.743	8.927	1.401	2.365	2.180
2.	Hak Guna Bangunan	1.296	540	906	890	1.817	341	720	1.560
3.	Hak Pakai	16	17	24	35	26	4	4	51
4.	Hipotek	5.532	5.526	5.198	4.929	4.037			

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi, 2021

Perbandingan jumlah sertifikat dengan jumlah bangunan bisa menjadi tolok ukur kinerja dalam pembangunan di sektor kepemilikan properti penduduk Kota Jambi dari 3.791 unit bangunan rumah di Kota Jambi, hanya terdapat 2.180 sertifikat Hak Milik, 1.560 kavling lahan HGB dan 51 kategori Hak Pakai. Kondisi demikian menggambarkan masih lemahnya status kepemilikan lahan di Kota Jambi, sehingga untuk menjamin Hak Kepemilikan Properti masyarakat perlu kebijakan yang mendorong upaya sertifikasi lahan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah agar properti yang mereka punyai memiliki nilai ekonomi untuk kesejahteraan yang lebih baik.

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran/ kerusakan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap

izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.

Di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Pemerintah Kota Jambi menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran air dan udara, pelaksanaan AMDAL, UKL dan UPL, pengawasan terhadap jenis usaha dan menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup. Pengawasan dan pengendalian terhadap status mutu air di Kota Jambi ditetapkan pada 8Sub-das dan 3 danau. Berdasarkan hasil analisis laborat terhadap sample air sungai yang diobservasi/diuji dan dilakukan penghitungan Indeks Pencemaran, secara umum menunjukkan indikasi tercemar ringan sampai sedang. Hasil pemantauan Tahun 2017 Faktor pembatas (tekanan) ditunjukkan oleh parameter yang melampaui Baku Mutu, meliputi: DO, Sulfida sbg (H₂S) dan Detergent (MBAS).

Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kota Jambi tercapai kinerja 100% pada Tahun 2020, yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang berpotensi pada permasalahan lingkungan berada dalam pengawasan pemerintah. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) sebagai bagian dari pengawasan dan pengendalian pada usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL. Pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL trend-nya setiap Tahun meningkat namun capaiannya masih termasuk rendah. Pada Tahun 2020 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL tercapai sebesar 59%.

Tabel 2.40.

Indikator Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pemantauan status mutu air (sungai)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Pemantauan kualitas air	Titik	22	22	22	22	24	24	24	29
3.	Pemantauan kualitas udara	Titik	4	4	4	5	5	5	9	9
4.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Jumlah Dok	-	0	1	6	0	20	7	2
5.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL	Jumlah Dok	-	8	37	44	17	36	18	59
6.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti									
7.	Ketersediaan Laboratorium Penelitian Lingkungan	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2021

Penanganan sampah selama 5 Tahun terakhir mengalami peningkatan dengan asumsi volume timbulan sampah sebesar 2,5 lt/orang/hari. Volume sampah yang masuk ke TPA Talang Gulo sama dengan volume sampah terangkut, rata-rata pada Tahun 2017 sebesar 163 Ton/hari.

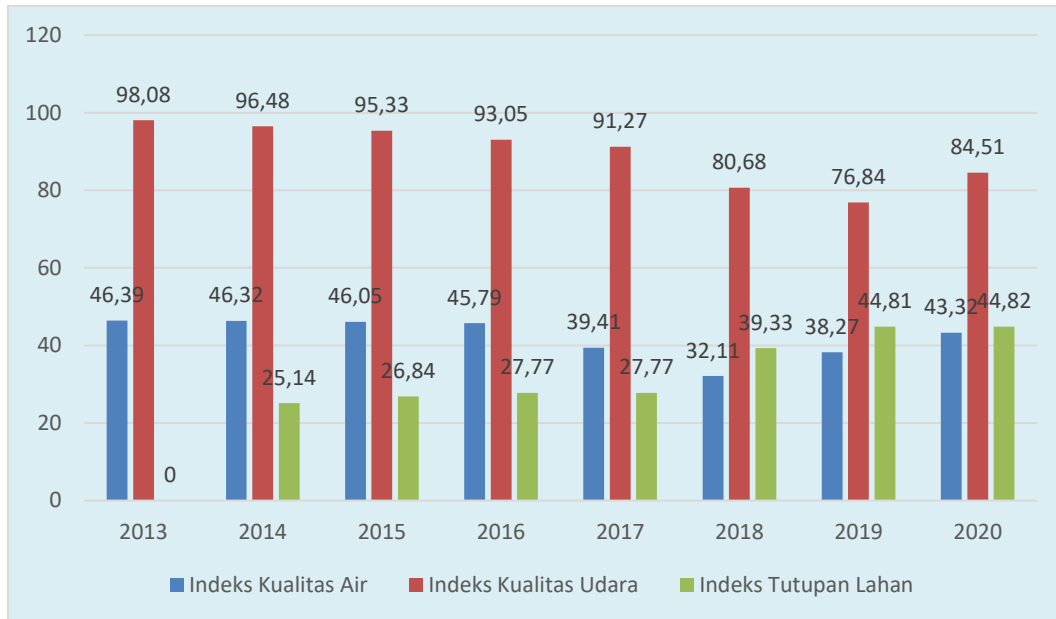
Tabel 2.41.

Persentase Penanganan Sampah Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Sampah yang ditangani	332.150	370.475	378.670	406.397	410.260	438.520	454.148	459.891
2.	Volume Produksi Sampah	545.857	571.444	578.475	555.627	560.037	566.594	574.072	581.326
3.	Persentase Penanganan Sampah (%)	60,85	64,83	65,46	73,14	73,26	77,35	79,11	79,77
4.	Jumlah TPS	335	366	402	443	455	445	445	445
5.	Jumlah Daya Tampung TPS (m ³ /hari)	n/a	836	906	994	1.018	1.018	1.018	1.018
6.	Jumlah Penduduk	556.332	568.062	576.067	583.487	591.134	597.043	604.923	611.353
7.	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0,17

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2021

Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Jambi rata-rata selama 8 Tahun terakhir berada di nilai 45-64 dengan kategori sedikit memenuhi (kualitas air sering buruk dan tidak memenuhi standar). Parameter pencemar yang tertinggi untuk air adalah E. Choli yang berasal dari limbah domestik. Sedangkan kriteria Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Jambi rata-rata selama 5 Tahun masih Sangat Baik, dengan indeks di atas 82.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2021

Gambar 2.40.

Indikator Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kota Jambi Tahun 2013-2020 Indeks Tutupan Lahan (ITL) Kota Jambi pada Tahun 2020 sebesar 44,82, sehingga dapat dihitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Jambi pada Tahun 2014 dan 2020 adalah sebagai berikut :

$$\text{IKLH} = (\text{IKA} \times 30\%) + (\text{IKU} \times 30\%) + (\text{ITL} \times 40\%)$$

$$\text{IKLH 2014} = (46,32 \times 30\%) + (96,48 \times 30\%) + (25,14 \times 40\%) = 52,89$$

$$\text{IKLH 2017} = (43,32 \times 30\%) + (84,51 \times 30\%) + (44,82 \times 40\%) = 56,28$$

IKLH Kota Jambi mengalami peningkatan indeks dari Tahun 2014 ke Tahun 2020 yaitu 52,89 menjadi 56,28 (kategori cukup).

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan kependudukan dan catatan sipil meliputi empat sub urusan yaitu sub urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Profil Kependudukan. Dalam menjalankan urusan tersebut, perangkat daerah yang membidangi urusan ini menjalankan Program Penataan Administrasi Kependudukan. Program ini diimplementasikan untuk melayani penduduk dalam memperoleh KTP Elektronik (KTP-el), pelayanan penerbitan akta kelahiran, pelayanan penerbitan akta kematian, pencatatan perkawinan non muslim, dan pelayanan kartu keluarga. Hingga Tahun 2020, jumlah penduduk yang sudah terlayani pembuatan KTP-el sebanyak 443.049 orang. Jika disandingkan dengan penduduk

dewasa sebagaimana data pada tabel, maka capaian penduduk ber KTP-el telah mencapai 98,74%. Kondisi ini meningkat dibandingkan Tahun 2013 yang hanya sebesar 74,55%.

Tahun 2020 bayi lahir 1 Tahun yang berakte kelahiran sebanyak 7.998 bayi dengan jumlah bayi lahir 8.286. Kondisi ini berfluktuasi setiap tahunnya karena kepemilikan akte sangat tergantung kepada orang tua yang secara aktif mendaftarkan bayi lahirnya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2013, dimana bayi lahir 1 Tahun yang berakte 9.191 bayi sedangkan bayi lahirnya 10.004. Dengan demikian, semua bayi yang lahir belum memperoleh akte kelahiran. Data capaian pelayanan umum urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil Tahun 2013-2020 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.42.
Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akte kelahiran di Tahun bersangkutan	Jiwa	9.191	9.116	8.327	8.287	183.991	229.944	254.387	7.998
2.	Jumlah kelahiran di Tahun bersangkutan	Jiwa	10.004	9.887	9.017	8.935	610.854	614.329	616.359	8.286
3.	Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	401.560	411.483	418.231	438.234	581.230	446.304	437.164	444.205
4.	Jumlah penduduk yang ber KTP	Jiwa	299.371	301.113	301.122	308.077	348.022	427.041	218.832	443.049
5.	Persentase Penduduk ber KTP	%	74,55	73,18	72,00	70,30	59,88	95,68	50,06	98,74
5.	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasangan	259.092	263.684	266.605	273.263	336.393	281.998	286.265	287.910
6.	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Pasangan	72.857	73.639	74.241	78.811	94.961	90.755	123.449	152.370

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, 2021

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Jambi dapat dilihat dari data capaian berikut.

Tabel 2.43.
Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	62	62	62	62	62	62	62	62
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	70	70	70	70	73	73	73	73

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (buah)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	PKK aktif	70	70	70	70	73	73	73	73
5.	Posyandu aktif	460	460	460	460	460	460	460	460
6.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)								
	Penerima Manfaat dari Program Bangkit Berdaya: (kelompok)								
	a. Bidang Infrastruktur	0	22	202	324	310	310	310	310
	b. Bidang Ekonomi	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Bidang Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: BPPMPA Kota Jambi dan BPS Kota Jambi, 2021

Rata-rata kelompok LPM di tingkat kelurahan telah terbina 100% dan kelompok binaan PKK di 62 kelurahan dan 11 kecamatan pada Tahun 2020 telah tercapai 100%. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) belum dapat teridentifikasi secara menyeluruh dan harus dilakukan koordinasi data dan Informasi kepada OPD terkait. Untuk penerimaan manfaat program Bangkit Berdaya dalam kelompok Usaha Ekonomi dan Sosial masih perlu dilakukan koordinasi data & informasi dengan OPD terkait serta sektor swasta.

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Lingkup kewenangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah meliputi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pelaksanaan KIE pengendalian penduduk baik yang bersifat medis maupun kearifan lokal, distribusi peralatan dan perlengkapan kontrasepsi, pendayagunaan PKB/PLKB, serta pembinaan keluarga sejahtera.

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan, karena penduduk dapat menjadi modal namun juga dapat menjadi masalah bagi pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu penduduk harus dikendalikan salahsatunya melalui program keluarga berencana. Pelaksanaan urusan penendalian penduduk dan keluarga berencana dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2020 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.44.

Pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,08	2,06	2,04	2,05	2,05	2,06	2,30	2,40
2.	Rasio akseptor KB	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3.	Cakupan peserta KB aktif (%)	78,96	78,11	74,34	71,27	42,25	73,50	61,06	61,06
4.	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	25.275	23.627	91.431	tad	8.651	67.513	66.948	66.833
5.	Angka Pemakaian Kontrasepsi bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun	77,1	76,06	72,32	67,99	68,78	69,99	59,31	59,31

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi, 2021

2.3.2.9. Perhubungan

Perhubungan sebagai salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang berkembang sangat dinamis, serta berperan di dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor transportasi akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik secara makro maupun mikro. Keberhasilan sektor transportasi secara makro dapat terlihat dari sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dampak ganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkannya terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dan kemampuannya meredam laju inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air. Oleh karenanya ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai merupakan hal yang sangat penting untuk diupayakan guna mewujudkan ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai.

Pelayanan urusan perhubungan berkaitan dengan mobilitas masyarakat baik dalam pengadaan transportasi maupun sarana dan prasarananya. Pelaksanaan urusan perhubungan dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45.

Indikator Sarana dan Fasilitas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bus (unit)								
	a. Terminal	6	6	5	5	2	2	2	2
	b. Pelabuhan								
2.	Jumlah terminal dalam kondisi baik (unit)	6	6	5	5	2	2	2	2
3.	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas (%)								
	a. Jumlah total rambu (unit)	176	286	356	491	607	746	796	151
	b. Jumlah rambu lalu lintas (unit)	176	110	70	135	116	138	21	140
	c. Jumlah kebutuhan rambu lalu lintas (unit)	-	-	-	-	822	700	60	140
4.	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik (%)	-	-	-	-	-	76%	80%	85%
5.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan quadrill (%))	-	-	-	-	61%	61%	-	69,69%
6.	Jumlah total fasilitas perlengkapan jalan (unit)								
	a. Jumlah halte (unit)	-	-	1	-	2	-	25	25
	b. Jumlah marka jalan (unit)	891	856	859	-	3.341	2.292	2.218	10.000
	c. Jumlah paku jalan (unit)	-	329	441	-	-	-	-	-
	d. Jumlah APILL (unit)	35	35	35	38	38	-	-	24
7.	Jumlah ATCS (unit)	-	-	-	-	-	5	3	6
8.	Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas (kasus)	-	-	-	13.826	12.769	1.243	841	658
9.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik (%)								
10.	Jumlah kecelakaan (jumlah)	195	237	262	403	414	455	457	202
11.	Jumlah korban kecelakaan								
	a. Meninggal	37	43	32	25	30	53	45	31
	b. Luka Berat	103	47	22	19	3	1	1	0
	c. Luka Ringan			379	656	655	723	661	291
12.	Jumlah Lokasi Parkir Dalam Kawasan (titik)	1	1	1	1	1	1	1	1
13.	Jumlah Lokasi Parkir Luar Kawasan (titik)	143	155		263	433	534	815	464

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus pelanggaran lalu lintas cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2016 kasus pelanggaran lalu lintas tercatat 13.826 kasus. Jumlah kasus ini terus berkurang hingga hanya 658 kasus di Tahun 2020. Menurunnya angka pelanggaran lalu lintas ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam mematuhi peraturan lalu lintas di Kota Jambi sudah semakin membaik.

Untuk memberikan jaminan keamanan bagi pengguna kendaraan umum dan barang, setiap kendaraan umum diwajibkan melakukan pengujian kendaraan bermotor. Angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kota Jambi telah memiliki sarana pengujian kendaraan sebanyak 1 unit yang beroperasi dengan baik. Waktu lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) kelayakan angkutan umum 45 menit per kendaraan dengan variasi biaya pengujian yang berbeda tergantung jenis kendaraannya. Persentase angkutan umum yang diuji setiap tahun cenderung menurun dari Tahun 2013-2020.

Tabel 2.46.
Pembangunan Urusan Perhubungan Tahun 2013 - 2020

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Jumlah kendaraan yang telah melakukan uji									
	a. Mobil Penumpang Umum	Unit	175	146	113	94	115	81	113	60
	b. Mobil Bus	Unit	1.150	1.861	894	863	805	813	617	458
	c. Mobil Barang	Unit	29.389	20.538	27.259	27.508	25.342	28.700	25.664	30.438
3	Jumlah kendaraan bermotor yang wajib uji (dua kali uji)									
	a. Mobil Penumpang Umum	Unit	27	51	51	52	62	62	70	60
	b. Mobil Bus	Unit	401	446	457	466	478	489	498	395
	c. Mobil Barang	Unit	102.289	12.542	14.488	15.829	16.876	18.928	20.707	23.838
4.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	45	45	45	45	45	45	20	30
5.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum									
	a. Mobil Penumpang Umum	Rupiah	30.000	-	-	-	-	-	-	-
	b. Kereta Gandeng/Tempel	Rupiah	37.000	-	-	-	-	-	-	-
	c. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus									
	1) JBB dibawah 2 ton	Rupiah	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2) JBB diatas 2 s/d 7 ton	Rupiah	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3) JBB diatas 7 s/d 14 ton	Rupiah	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4) JBB diatas 14s/d 24 ton	Rupiah	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5) JBB diatas 24 ton	Rupiah	55.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	d. Plat/tanda uji	Rupiah	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	e. Biaya Denda	Rupiah								
	f. Buku Uji	Rupiah	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	g. Tanda Samping Uji (Cat)	Rupiah								
	h. Tanda Samping Uji (Stiker)	Rupiah	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2021

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Kewenangan urusan komunikasi dan informatika menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah meliputi sub urusan informasi dan komunikasi publik yaitu Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sedangkan rincian kewenangan untuk sub urusan aplikasi informatika adalah Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Ketersediaan dan keterbukaan informasi menjadi syarat mutlak pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan keterbukaan Informasi tersebut masyarakat bisa dengan mudah mengakses kebutuhan akan informasi khususnya yang bersifat terbuka (publik). Jaminan akan keterbukaan informasi semakin dikuatkan dengan adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam UU no 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah dicanangkan bahwa arah pembangunan sektor Kominfo adalah membangun masyarakat Indonesia berbasis pengetahuan (*knowledge based society*) yang disebut sebagai Masyarakat Informasi Indonesia. Untuk itu jaringan informasi dan komunikasi harus terus dikembangkan agar penyampaian informasi atau pesan dapat lebih cepat sampai kepada yang berkepentingan. Oleh karena itu pembentukan dan pemberdayaan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika sangat dibutuhkan.

Untuk mendistribusikan Informasi Nasional di Kota Jambi dilaksanakan melalui beberapa media antara lain media massa seperti majalah, radio, dan televisi; media online seperti website; media tradisional seperti pertunjukan rakyat; media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.

Tabel 2.47.

Capaian urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2020

No	Indikator	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Website milik Pemerintah Daerah	3	5	8	14	25	28	40	40
2.	Persentase SKPD telah memiliki website	5,55	9,25	14,81	25,92	46,29	511,85	74,07	74,07
3.	Persentase update website Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui :								
	a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi.	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Media baru seperti website (media online).	2	2	2	2	2	2	2	2
	c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat.	-	-	-	-	1	1	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2021

Tuntutan pelayanan bidang komunikasi dan Informasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi komunikasi dan informasi yang ada. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat luas dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi juga harus diimbangi oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama pelaksana pembangunan. Untuk memudahkan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat saat ini Kota Jambi telah memiliki website resmi yang dikelola oleh pemerintah. Selain itu, untuk memberikan pelayanan informasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, semua Pemerintah Daerah di Kota Jambi telah memiliki website. Meskipun sudah semua Perangkat Daerah memiliki website, tetapi belum semua website milik Perangkat Daerah aktif melakukan updating informasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi di bidang teknologi informasi pada setiap perangkat daerah.

Tabel 2.48.

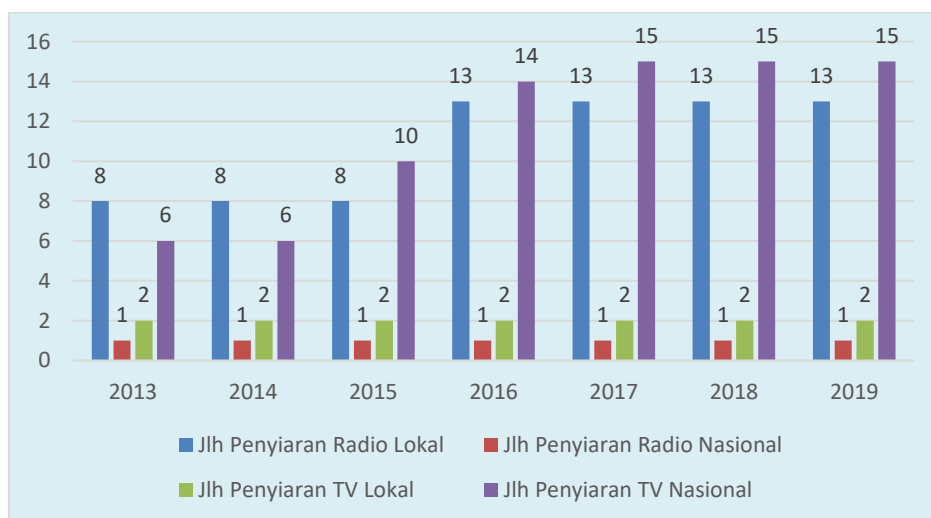
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Nasional	15	15	15	15	15	15	15	15

2.	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Lokal	32	32	32	32	32	32	32	32
Total		47	47	47	47	47	47	47	47

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2021

Untuk penyiaran Radio/TV dari Tahun 2013 sampai dengan 2020 secara keseluruhan mengalami peningkatan terutama pada rentang waktu Tahun 2015 sampai Tahun 2016. Pada periode tahun tersebut semua penyiaran baik radio maupun televisi mengalami peningkatan yang cukup signifikan kecuali untuk penyiaran radio nasional yang stagnan jumlahnya yaitu 1 penyiaran. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya Kota Jambi sehingga berdampak positif terhadap jumlah penyiaran untuk radio maupun televisi baik lokal maupun nasional.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2021

Gambar 2.41.

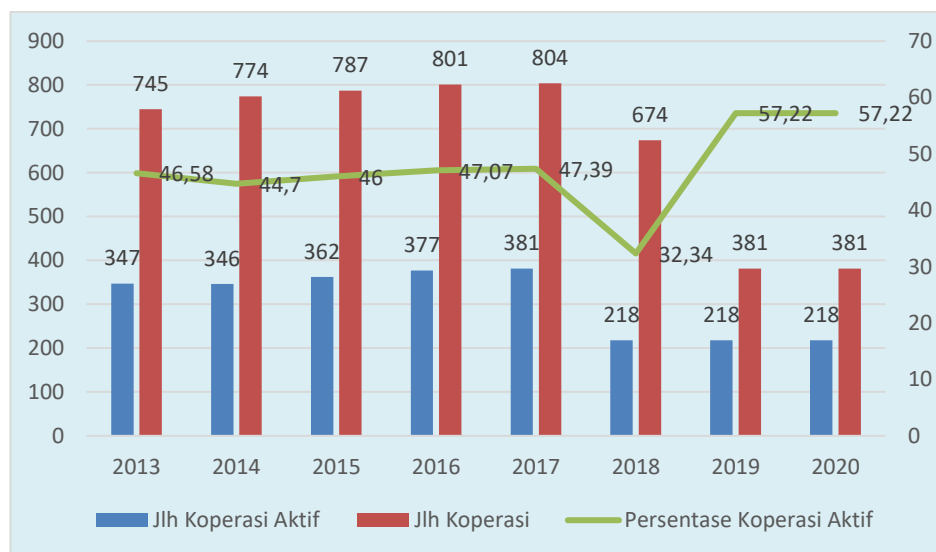
Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2013-2020 Kota Jambi

2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang penting dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi koperasi dan UMKM di Kota Jambi baik dari peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah, penyerapan tenaga kerja dan jumlah unit usahanya. Pencapaian kinerja urusan Koperasi dan UKM dengan mendasarkan indikator koperasi aktif, menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Dari hasil verifikasi data koperasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi pada Tahun 2020, di Kota Jambi terdapat 381 koperasi, namun sebanyak 163 koperasi (42,78%) merupakan koperasi tidak aktif.

Berdasarkan rapat evaluasi dan data koperasi di kementerian Koperasi dan UKM RI bahwa yang dikategorikan koperasi aktif adalah koperasi yang memiliki sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi) dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 3 (tiga) tahun berturut-turut. Juga sesuai dengan Program Aksi Reformasi Tahun 2016-2019 bahwasannya paradigma pembinaan koperasi bukan lagi berorientasi pada kuantitas tetapi pada kualitas koperasi yaitu berbasis IT, penguatan kelembagaan serta mendorong peningkatan jumlah anggota koperasi. Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya peningkatan kapasitas pengurus dalam manajemen koperasi sehingga kinerja koperasi semakin baik, sesuai dengan visi Kota Jambi

Dari kondisi tersebut nampaknya perlu peningkatan kapasitas pengurus dalam manajemen koperasi sehingga kinerja koperasi semakin baik. Disamping itu dalam rangka menyelaraskan visi Kota Jambi “Menjadikan Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya dengan Mengedepankan Pelayanan Prima”, perlu pergeseran arahan pengembangan koperasi di Kota Jambi.



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, 2021

Gambar 2.42.

Persentase Koperasi Aktif di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Selain koperasi, upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah pemberdayaan dan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Penentuan kriteria usaha mikro, kecil dan

menengah secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Jumlah UMKM di Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika pada Tahun 2013 jumlah UMKM hanya sebesar 10.556 unit, tumbuh menjadi 10.763 unit pada Tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa UMKM menjadi salah satu sektor perekonomian yang bisa diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pengembangan sektor UMKM di Kota Jambi adalah mengenai pembinaan. Dari jumlah yang sangat banyak tersebut, baru sebagian kecil yang memiliki sertifikat/perijinan. Walaupun demikian jumlah UMKM yang memiliki sertifikat meningkat signifikan yaitu sebanyak 6.517 unit pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2015 yang hanya 15 unit.

Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam pengembangan UMKM adalah kemampuan fasilitasi pemerintah untuk mengikutsertakan pelaku UMKM dalam pameran-pameran. Keikutsertaan pelaku UMKM dalam pameran tersebut cukup penting dalam rangka mengenalkan produk dan memperluas jaringan pasar. Data yang ada menunjukkan sampai Tahun 2020 baru 0,0088% pelaku UMKM atau sebanyak 95 pelaku yang mendapatkan kesempatan mengikuti pameran.

Tabel 2.49.

Indikator Urusan UMKM Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Unit	10.556	10.556	10.545	10.704	10.763	10.763	10.763	10.763
2.	Persentase UMKM yang telah mengikuti Pameran	%	0,0040	0,0047	0,0071	0,0070	0,0074	0,0078	0,0088	0,0088
		Unit	43	50	75	75	80	95	95	95
3.	Jumlah UMKM yang memiliki perijinan/sertifikasi	Unit / Tahun	-	-	15	58	335	539	1.200	6.517
4.	Persentase usaha mikro	%	-	-	-	-	-	77,61	49	50,39

No	Indikator	Satuan	Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	menjadi usaha kecil									

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, 2021

2.3.2.12. Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didorong agar kinerja sektor penanaman modal dapat meningkat. Iklim investasi di Kota Jambi saat ini cukup kondusif, selama jenis investasinya tidak bertentangan dengan norma sosial di masyarakat dan cenderung pro rakyat seperti tidak mematikan usaha lokal, mengutamakan dan memberdayakan tenaga kerja lokal, serta jenis usahanya tidak menimbulkan penurunan kualitas lingkungan.

Potensi dan peluang penanaman modal di Kota Jambi cukup terbuka khususnya di bidang usaha mikro dan jasa termasuk investasi di bidang pergudangan, namun potensi dan peluang penanaman modal di bidang industri besar relatif terbatas karena keterbatasan lahan. Perkembangan penanaman modal di Kota Jambi menunjukkan kecenderungan meningkat. Total realisasi investasi berskala nasional di Kota Jambi tahun 2020 sebesar Rp 249,446 milyar. Nilai tersebut mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan total realisasi Investasi Tahun 2014 sebesar Rp 48 milyar.

Tabel 2.50.

Jumlah Investor dan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kota Jambi 2013-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (unit)	n/a	5	12	22	14	17	14	37
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar)	n/a	48	413,13	541,94	640,53	317,73	1.055,27	249,446
3.	Jenis Izin yang Dilayani	n/a	43	43	51	73	73	82	82
4.	Izin yang Diterbitkan	n/a	13.062	16.651	11.265	10.172	9.835	2.542	3.001

Sumber: DPMPSTP Kota Jambi, 2021

Saat ini salah satu kendala penanaman modal di Kota Jambi adalah masih terbatasnya daya dukung infrastruktur dan suprastruktur perekonomian, sehingga masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan penataan infrastruktur dan suprastruktur perekonomian. Langkah lainnya untuk meningkatkan investasi di Kota Jambi, perlu dibuat pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Jambi, karena

meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi pengurangan pengangguran. Pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Jambi dibuat berdasarkan zonasi, tata ruang atau sentra/klaster produk unggulan kewilayahan. Kegiatan promosi dan pameran-pameran potensi dan peluang investasi di Kota Jambi perlu lebih ditingkatkan, terutama di event-event besar.

Tabel 2.51.
Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Jambi 2013-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	(n/a)	87	160	957	2.859	2.909	8.731	8.837
2.	Jumlah seluruh PMA/PMDN	(n/a)	5	12	22	14	17	432	1.253
3.	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	(n/a)	87	91	96	143	116	20	7

Sumber: DPMPSTP Kota Jambi, 2021

Berdasarkan tabel di atas, daya serap tenaga kerja di Kota Jambi, pada Tahun 2014 rasio daya serap tenaga kerja sebesar 87%, terjadi peningkatan pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 91% dan 96% dan kemudian Tahun 2017 meningkat signifikan menjadi sebesar 143%.

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan.

Berdasarkan data pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Jambi dalam kurun waktu Tahun 2013-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52.
Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah klub olahraga (buah)	28	28	28	28	28	30	218	218
2	Jumlah gedung olahraga (buah)	4	4	4	4	4	2	2	2
3	Jumlah kegiatan olahraga (kali)	28	28	28	28	28	30	32	32
4	Jumlah organisasi pemuda (buah)	15	15	15	14	20	50	50	79

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	Jumlah kegiatan kepemudaan (kali)	1	6	6	6	6	6	6	4
6	Jumlah kegiatan olahraga (kali)	28	28	28	28	28	28	28	28

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, 2021

2.3.2.14. Statistik

Kewenangan pemerintah daerah dalam Urusan Statistik sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota. Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pemantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Data statistik sudah menjadi kebutuhan publik dalam arti luas, bukan saja untuk kepentingan pemerintah saja tetapi juga menjadi kebutuhan para stakeholders, dunia usaha, akademisi, para pengamat serta masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan urusan statistik di Kota Jambi telah dilaksanakan oleh Bappeda Kota Jambi sebagai Perangkat Daerah yang memiliki Tupoksi penyelenggaraan urusan statistik. Hasil dari pelaksanaan urusan statistik antara lain adalah Buku "Kota Jambi dalam Angka" sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan Kota Jambi. Sejak Tahun 2017 berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perangkat daerah kewenangan urusan statistik daerah menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi.

2.3.2.15. Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dimana kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kota Jambi adalah a) penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, dan b) penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya di Kota Jambi, Urusan Persandian dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dimana permasalahannya dihadapkan pada kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang persandian dan belum optimalnya pelatihan SDM dan pengembangan

teknologi informasi dalam penyelenggaraan bidang persandian. Di sisi lain, penyelenggaraan urusan persandian juga belum mendapatkan perhatian dan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum dilaksanakan dengan optimal. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja pembangunan pada urusan persandian berkaitan dengan ketersediaan Tempat Kegiatan Sandi (TKS), sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang persandian, dan informasi persandian.

Tabel 2.53.

Capaian Urusan Persandian Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah SDM sandi yang memiliki kualifikasi atau kompetensi persandian	Orang	1	1	1	2	2	2	3	31
2.	Persentase informasi terenkripsi yang diserahkan kepada Kepala Daerah	%	50	100	66,67	50	75	142	113	122

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2021

2.3.2.16. Kebudayaan

Pelaksanaan urusan kebudayaan di Kota Jambi difokuskan untuk mengangkat kesenian tradisonal, upacara-upacara adat yang berkembang di masyarakat. Penyelenggaraan urusan kebudayaan ditujukan untuk melestarikan nilai-nilai budaya dengan cara pembinaan sanggar-sanggar seni dan pelestarian cagar budaya di Kota Jambi. Peningkatan sarana dan prasarana seni dan budaya serta pelaksanaannya dan mengikuti even-even seni budaya di dalam maupun di luar daerah.

Adapun capaian pelaksanaan urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.54.

Capaian Urusan Kebudayaan

No	Indikator	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	1	3	3	5	5	5	5	5
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (buah)	-	-	-	-	-	-	8	8
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)	3	3	3	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, 2021

Kinerja pembangunan sektor kepariwisataan, seni dan budaya khususnya pada upaya pembangunan daya tarik wisata budaya (*cultural tourism*) dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan melalui kegiatan festival seni dan budaya serta kegiatan

pelestarian kawasan cagar budaya. Sebagai wilayah perkotaan, maka pengembangan pariwisata Kota Jambi harus focus pada pariwisata kota (*urban tourism*), sehingga aktifitas apresiasi terhadap seni dan budaya serta kawasan bersejarah (*heritage*) perlu ditingkatkan agar daya tarik wisatawan untuk berkunjung semakin meningkat. Harapan dari peningkatan kunjungan ini adalah peningkatan pengeluaran wisatawan yang berdampak *multiflier* pada ekonomi masyarakat.

2.3.2.17. Perpustakaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang perpustakaan untuk Pemerintah Daerah meliputi:

- a) Pembinaan perpustakaan, dengan lingkup:
 - ✓ Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b) Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, dengan lingkup:
 - ✓ Pelestarian naskah kuno milik Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (*reading habit society*) menuju masyarakat belajar (*learning society*) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah.

Rasio kinerja urusan perpustakaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari jumlah koleksi judul buku yang terdapat di perpustakaan, dimana pada Tahun 2013 hanya sebanyak 1.549 judul dan jumlah sebanyak 4.028 eksemplar mengalami peningkatan signifikan pada Tahun 2020 sebanyak 25.996 judul dan jumlah sebanyak 58.178 eksemplar. Untuk jumlah pengunjung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2013 jumlah pengunjung sebanyak 11.769 orang, meningkat pada tahun 2019 menjadi 32.423 orang. Namun di tahun 2020 tingkat kunjungan menurun drastis hal ini disebabkan adanya pandemi covid. Secara perbandingan jumlah penduduk mengalami peningkatan cukup signifikan dari hanya 0,72% pada tahun 2013 meningkat menjadi 9,59 pada tahun 2020.

Secara detil pelaksanaan urusan perpustakaan di Kota Jambi yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55.
Capaian Urusan Perpustakaan

No	Indikator	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perpustakaan (buah)	1	1	1	1	1	1	370	301
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun (orang)	11.769	12.692	14.896	28.435	37.337	30.274	32.423	14.087
3.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (judul)	1.549	1.215	18.298	19.569	20.128	23.142	24.479	25.996
4.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eks)	4.028	1.863	41.326	44.639	46.180	50.021	55.352	58.178
5.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	556.332	568.062	576.067	583.487	591.134	614.329	615.675	606.200
6.	Eksemplar buku per jumlah penduduk Kota Jambi(%)	0,72	0,33	7,17	7,65	7,81	8,14	8,99	9,59

Sumber: Dinas Kearsip dan Perpustakaan Kota Jambi, 2021

2.3.2.18. Kearsipan

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten pada Urusan Kearsipan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah terkait dengan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan. Pengelolaan arsip meliputi pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. Untuk perlindungan dan penyelamatan arsip meliputi pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 Tahun, penyelamatan arsip pada Perangkat Daerah, autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media.

Pengelolaan arsip statis mencakup kegiatan yang dilakukan guna penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana kearsipan yang ada didalam pengelolaannya. Pelaksanaan urusan kearsipan di Kota Jambi dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Capaian pelaksanaan urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56.
Capaian Urusan Kearsipan

No	Indikator	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah SKPD Yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku	-	-	-	1	12	6	5	5
2.	Jumlah SKPD	50	50	50	50	50	50	39	39
3.	Persentase Pengolahan Arsip secara Baku	-	-	-	2	24	15	28	41

Sumber: Dinas Kearsip dan Perpustakaan Kota Jambi, 2021

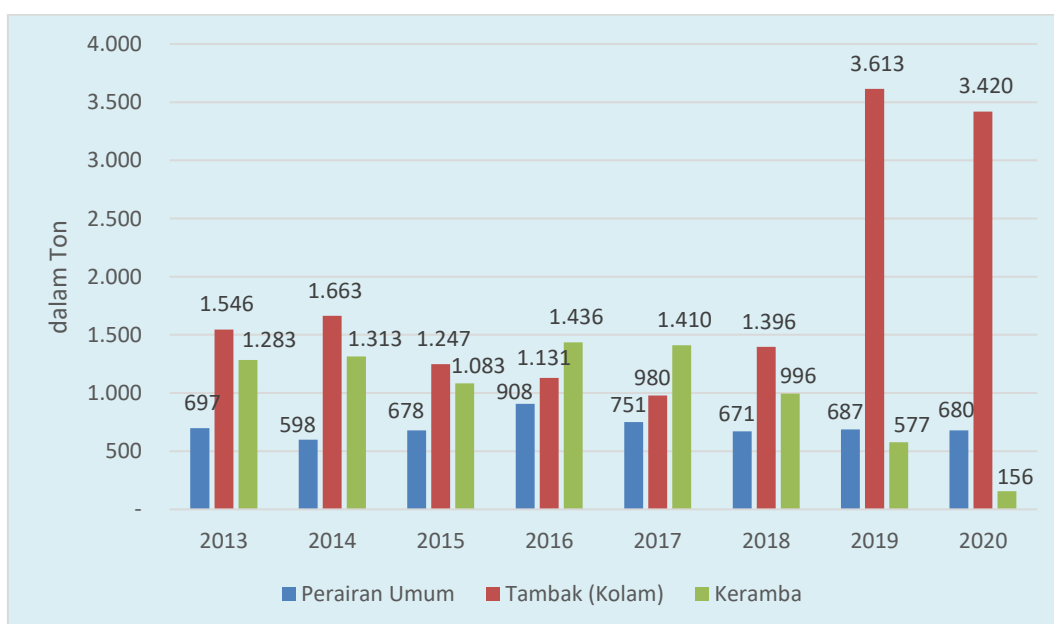
2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1. Kelautan dan perikanan

Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kota Jambi sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Kewenangan urusan kelautan dan perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan (1) Perikanan Tangkap meliputi: (a). Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Kontribusi sektor perikanan selama beberapa tahun terakhir relatif kecil akan tetapi terus menunjukkan tren naik terhadap PDRB di Kota Jambi dari sisi nilai tetapi dilihat dari persentasenya tren tiap tahun menurun, pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020 berada pada kisaran 0,06%-0,07%.

Potensi areal perikanan di Kota Jambi pada Tahun 2020 sebesar 4.255,57 hektar, terdiri dari perairan umum 680,03 hektar, kolam 3.419,89 hektar dan Keramba 155,65 hektar. Produksi perikanan dalam kurun waktu Tahun 2013-2020 mengalami fluktuasi walaupun kecenderungan meningkat. Produksi ikan pada Tahun 2013 sebesar 3.519,49 ton meningkat menjadi 4.255,57 ton pada Tahun 2017.



Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2021

Gambar 2.43.
Produksi Perikanan di Kota Jambi Menurut Sumber Produksi
Tahun 2013-2020 (dalam Ton)

2.3.3.2. Pariwisata

Peran pariwisata di Kota Jambi ditujukan untuk meningkatkan peran yang berbasis potensi daerah dan memperhatikan kearifan lokal melalui peningkatan-peningkatan kunjungan wisata, penyelenggaraan event dan promosi pariwisata baik tingkat nasional maupun internasional. Namun dalam hal peningkatan-peningkatan ini masih dihadapi berbagai masalah, diantaranya belum dimilikinya dokumen perencanaan yang terintegrasi di bidang pariwisata, belum optimalnya promosi potensi pariwisata daerah dan belum optimalnya pembinaan, koordinasi dan sinergitas antar stakeholder bidang kepariwisataan. Saat ini di Kota Jambi telah terbentuk lembaga kepariwisataan antara lain PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia); ASITA (Asosiasi Indonesia Tours dan Travel). Permasalahan yang paling utama adalah Kota Jambi tidak memiliki objek wisata yang dapat dijual kepada daerah lainnya. Walaupun untuk saat ini Kota Jambi telah berupaya untuk mempromosikan Danau Sipin sebagai daerah objek wisata dengan melengkapi sarana dan prasarana seperti jogging track, perahu di seputaran Danau Sipin

Tabel 2.57.
Indikator Urusan Pariwisata Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	2,15	2,31	2,27	2,29	2,40	2,36	2,38	-6,59
2.	Dokumen RIPPDA Kota Jambi	Dok	-	-	-	1	-	-	1	-
3.	Tersusunnya sistem informasi kepariwisataan	sistem	-	-	-	-	-	-	4	3
4.	Jumlah Restoran	Unit	Tad	Tad	479	527	617	672	710	872
5.	Jumlah Hotel									
	a. Berbintang	Unit	Tad	Tad	23	26	28	30	30	24
	b. Non Bintang	Unit	Tad	Tad	68	67	68	69	69	54

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, 2021

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Kota Jambi selama 5 Tahun terakhir yang peningkatannya belum signifikan. Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Kota Jambi pada tahun 2013 s.d. 2020 berada pada kisaran

2%, namun dengan adanya pandemi Covid di tahun 2020 maka kontribusi sektor pariwisata pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -6,59%

2.3.3.3. Pertanian

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian.

Tabel 2.58.

Indikator Urusan Pertanian Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun						
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Produksi Padi	ton	9.577	7.186	2.012	4.383	5.510	6.243	3.920
2.	Produksi Palawija	ton	1.133	2.280	1.293	3.012	6.750	2.250	2.807,73
3.	Produksi Sayur-sayuran	ton	7.401	7.498	54.570	8.497,8	6.660	5.139	5.485,21
4.	Produksi Tanaman Buah-buahan	kwintal	26.912	27.291	34.329,85	28.010,5	10.328	5.108	496,52
5.	Produksi Daging	Kg	9.548.257	6.427.090	5.451.876	6.024.856	tad	6.577.008	5.108,196
6.	Produksi Telur	Kg	4.647.466	4.075.622	2.665.976	2.818.750	tad	1.688.596	189.300

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Produksi padi yang dihasilkan dalam Kota Jambi pada Tahun 2013 adalah sebesar 9.577,38 ton dan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. dimana produksi padi tahun 2019 hanya sebesar 3.920 ton Jika dibandingkan Tahun 2013 berarti terjadi penurunan produksi sebesar 25.7%.

Untuk Palawija, produksi palawija seperti jagung tahun 2020 sebesar 351,5 ton, ubi kayu sebesar 6.294,5 ton, ubi jalar 95,28 ton, dan kacang tanah sebesar 54,08 ton. Data produksi tanaman buah-buahan di Kota Jambi tahun 2020 seperti jeruk siam 74,8 ton, alpukat 485,5 ton, pepaya 3.658,04 ton, pisang 2.037,49 ton, mangga dan rambutan masing-masing sebesar 486,05 ton dan 1.131,57 ton

Sarana prasarana milik Pemerintah Kota Jambi yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan daging hewan adalah Rumah Potong Hewan (RPH). Untuk memenuhi daging yang aman, sehat, utuh dan halal perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana memadai sesuai dengan standar teknis RPH, sehingga masih perlu dilakukan berbagai perbaikan dan pemeliharaan RPH. Untuk ternak unggas, saat ini Pemerintah Kota Jambi belum memiliki Rumah Potong Unggas, saat ini pemotongan unggas dilakukan tersebar oleh para pedagang unggas di pasar-pasar, dan belum memenuhi kaidah-kaidah keamanan dan kesehatan.

2.3.3.4. Perdagangan

Perdagangan secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni perdagangan dalam negeri (domestik) dan perdagangan luar negeri (internasional). Perdagangan dalam negeri adalah perdagangan yang dilakukan dalam ruang lingkup dalam negeri saja atau nasional. Penjual, pembeli, dan tempat transaksinya juga hanyabersifat domestik atau dilakukan di dalam negeri saja. Sedangkan perdagangan luar negeri/internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Terkait dengan pelaksanaan perdagangan dalam negeri, pemerintah telah memiliki arah kebijakan dan pengendalian. Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud yaitu:

- 1) Peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi;
- 2) Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
- 3) Pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri;
- 4) Peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
- 5) Pelindungan konsumen.

Sedangkan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan perdagangan luar negeri meliputi:

- 1) Peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;
- 2) Peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan
- 3) Peningkatan kemampuan Eksporir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal.

Terkait dengan perdagangan dalam negeri, sarana prasarana perdagangan yang dimiliki Kota Jambi antara lain adalah tersedianya pasar. Tahun 2020 tercatat ada 20 pasar daerah yang tersebar di seluruh wilayah Kota Jambi dan hanya 6 yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi. Dari total seluruh pasar tersebut hanya 1 unit yang memenuhi kriteria sebagai pasar sehat.

Selain penyediaan pasar, untuk mendukung sektor perdagangan dalam negeri juga dilakukan penataan terhadap kawasan perdagangan kaki lima dan pembinaan terhadap para pedagang. Jumlah kawasan perdagangan kaki lima yang ditata sebanyak 2 lokasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga kondusifitas sektor perdagangan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pasar; pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;

Pemantuan ketersediaan harga, pasokan, akses pangan dikumpulkan secara rutin /periodik; dan upaya perlindungan terhadap konsumen.

Tabel 2.59.
Indikator Urusan Perdagangan Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pasar yang diawasi									
	a. Pasar Tradisional	Unit	6	6	6	6	7	7	6	6
	b. Pasar Modern	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah.	Frekuensi	-	-	-	-	-	365 hari	365 hari	366 hari
3.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)*	%	24,85	26,46	28,17	29,64	30,24	30,75	31,48	-
4.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)*	Milyar Rupiah	4.121,00	5.021,86	5.999,14	7.233,21	7.952,23	8.896,45	9.712,78	-
5.	Jumlah pasar daerah	Unit	19	19	19	19	21	21	20	20
6.	Jumlah pasar daerah kategori sehat	Unit	-	1	1	1	1	1	1	1
7.	Lokasi PKL yang tertata	Lokasi	-	-	-	2	2	3	3	3

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, 2021

2.3.3.5. Perindustrian

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai peranan cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Disamping mampu menyerap tenaga kerja dan menyediakan lapangan usaha secara dominan, IKM juga memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat luas. Jika ditinjau dari sisi kualitas dan kuantitas, komoditi IKM ini terus mengalami peningkatan. Namun demikian, IKM saat ini dihadapkan pada persaingan pasar yang lebih ketat lagi ketika telah berlakunya Kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community (AEC)*, yang berlaku sejak Tahun 2015. Produk dari luar negeri terutama negara-negara ASEAN semakin deras masuk ke pasar Indonesia dengan harga dan kualitas yang cukup bersaing. Apabila kondisi ini tidak segera diantisipasi dikhawatirkan produk IKM kita akan kalah bersaing dan tersingkir. Untuk menghadapi dampak negatif akibat adanya persaingan, perlu dilakukan langkah antisipatif dengan cara meningkatkan kemampuan daya saing para IKM, yaitu dengan melakukan peningkatan desain, standardisasi mutu, peningkatan kualitas produk dan inovasi desain produk baik aspek sumber daya manusia, teknologi maupun peluang pasar.

Gambaran kinerja urusan perindustrian di Kota Jambi selama kurun waktu Tahun 2013-2020 dapat dilihat dari capaian indikator bidang perindustrian seperti Jumlah dan pertumbuhan IKM (Industri Kecil dan Menengah) serta kontribusi sektor Industri terhadap PDRB.

Tabel 2.60.
Indikator Pertumbuhan IKM Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah IKM	Unit	-	-	2.403	2.884	2.990	3.120	3.562	4.162
2.	Jumlah IKM yang mendapat binaan atau bantuan	Unit	-	-	-	402	792	390	407	45 IKM,3 KUB
3.	Jumlah sentra industri yang berkembang	Sentra	-	-	-	3	3	3	3	3
4.	Jumlah IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	Unit	-	-	20	30	45	34	52	4
5.	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi HaKI	Unit	-	-	10	20	35	10	-	15
6.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)*	%	11,99	11,88	11,59	10,88	10,77	10,36	10,38	-
7.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)*	Milyar Rupiah	1.988,89	2.254,42	2.467,77	2.655,30	2.830,67	2.998,23	3.195,26	-

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, 2021

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa secara kuantitatif jumlah IKM mengalami peningkatan setiap Tahunnya dari 2015 hingga 2020, yaitu dari 2.403 unit menjadi 4.162 unit. Namun, dari segi pertumbuhan mengalami perlambatan. Di sisi lain, peningkatan jumlah IKM di Kota Jambi ini belum dibarengi dengan pembinaan maupun pemberian bantuan. Hal ini dilihat dari jumlah IKM yang mendapat binaan yang sangat rendah proporsinya dibandingkan jumlah IKM yang ada, pada Tahun 2015, yaitu tidak ada yang dibina dan Tahun 2020 sebanyak 45 IKM. Demikian halnya dengan jumlah produk IKM yang dipromosikan di Kota Jambi yang tergolong sangat sedikit, dimana Tahun 2015 hanya 20IKM yang mengikuti promosi produk dan Tahun 2020 hanya 4 IKM, artinya secara rata-rata hanya 6-7% IKM yang dibina mampu untuk mempromosikan produknya. Sementara itu, kontribusi sektor industri terhadap PDRB (ADHB) Kota Jambi terus menunjukkan peningkatan dan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDRB selama periode Tahun 2013-2020. Peningkatan sektor industri ini juga sejalan dengan peningkatan jumlah sentra industri yang berkembang setiap Tahunnya.

2.3.4. Urusan Penunjang

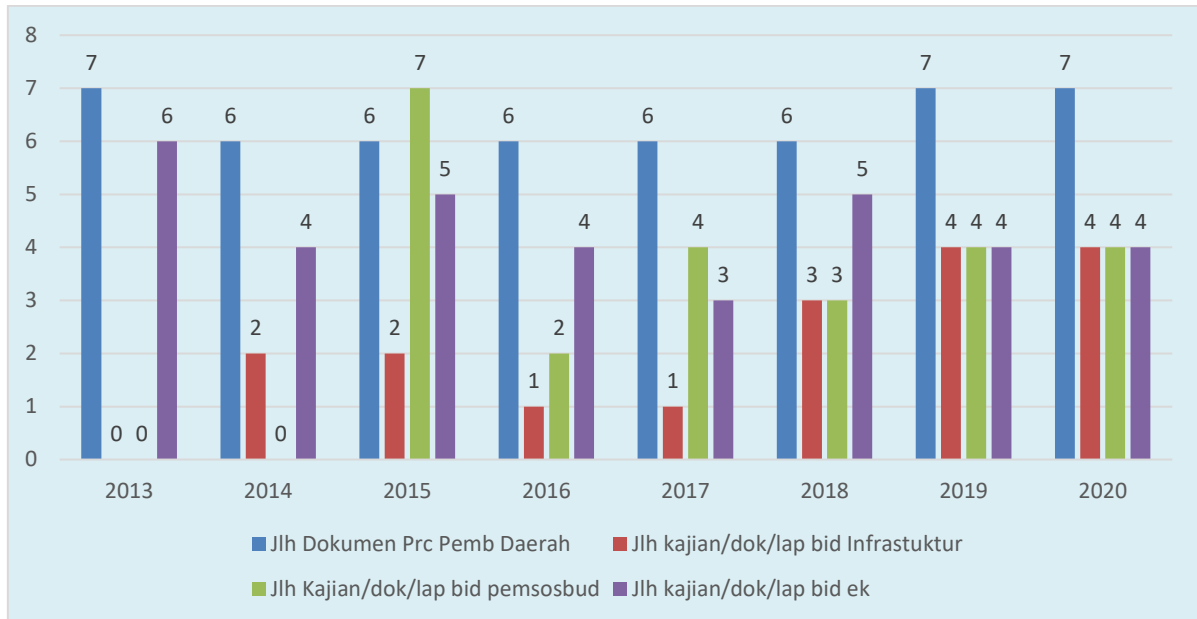
2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun meliputi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 Tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 Tahun. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan Teknokratik, Politik, Partisipatif, Top-down dan Bottom-up. Di Kota Jambi dokumen perencanaan yang telah dimiliki yaitu: RPJPD Tahun 2005-2025, RPJMD yang disusun setiap 5 Tahun sekali, dan RKPD yang disusun setiap Tahun.

Penyusunan rencana pembangunan didahului dengan evaluasi pembangunan daerah agar rencana yang disusun dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Evaluasi kinerja pembangunan dilaksanakan dengan menyusun laporan evaluasi hasil RPJMD dan evaluasi RKPD setiap Tahun sebagai dasar dalam penyusunan RKPD Tahunberikutnya. Penyusunan dokumen perencanaan multisektor juga menjadi tanggung jawab perangkat daerah fungsi perencanaan pembangunan. Beberapa dokumen perencanaan multisektor yang telah diamanatkan oleh pemerintah telah disusun, antara lain RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), dan Rencana Aksi Daerah Pencapaian SDG's. Berbagai dokumen perencanaan multi sektor tentunya akan disesuaikan dengan kebijakan terbaru sebagaimana termuat dalam RPJMD dan RPJMN dan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Jumlah dokumen perencanaan per Tahun yang telah disusun meningkat selama periode Tahun 2013-2020, yaitu dari 13 dokumen menjadi 14 dokumen. Dari beberapa dokumen perencanaan yang telah disusun, sampai dengan Tahun 2020 telah mencapai 100% yang diimplementasikan, yaitu ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau dasar penyusunan dokumen/rencana kegiatan oleh Perangkat Daerah lainnya.



Sumber : Bappeda Kota Jambi, 2021

Gambar 2.44.

Indikator Urusan Perencanaan Kota Jambi Tahun 2013-2020

Selain dari jumlah dokumen dan implementasi perencanaan dalam pembangunan, tidak kalah penting dilihat dari sisi kualitas perencanaan pembangunan daerah yang diukur dengan kesesuaian perencanaan program yang membandingkan kesesuaian antara rencana dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.61.

Capaian Kesesuaian Perencanaan Program Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah program RKPD	54	54	54	54	54	59	67
2.	Jumlah program RPJMD	54	54	54	54	54	59	67
3.	Ratio penjabaran program RPJMD dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bappeda Kota Jambi, 2021

2.3.4.2. Keuangan

Kinerja keuangan daerah terutama dilihat dari pendapatan asli daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam kurun waktu Tahun 2013-2020, persentase kontribusi PAD terhadap total APBD dari sebesar 12,70% pada Tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 21,93% pada Tahun 2020. Selama ini ada dua sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi

penerimaan Kota Jambi yaitu Sektor Pajak Daerah : PPJU, Parkir dan PBB, serta lain-lain PAD yang sah. Adapun kendala yang dihadapi dalam peningkatan PAD yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah secara mandiri masih rendah sehingga perlu peran aktif petugas pajak daerah untuk melakukan pengawasan dan penagihan.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Jambi menunjukkan kinerja yang baik. Meskipun demikian penerapan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis accrual dirasa belum optimal. Berdasarkan hasil audit BPK, laporan keuangan pemerintah daerah Kota Jambi memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi dalam rangka mempertahankan status tersebut yaitu menindaklanjuti temuan pengecualian atas LKPD, penyusunan Peraturan Walikota dan surat edaran Walikota sebagai pedoman perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan sistem informasi manajemen daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, dan rekonsiliasi angka dalam laporan.

Tabel 2.62.
Indikator Urusan Keuangan Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Belanja Langsung terhadap total APBD (%)	41,81	42,71	52,12	49,31	56,85	58,37	41,89	53,20
2.	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi) (%)	12,70	18,50	19,00	18,30	26,50	20,85	23,15	21,93
3.	Rasio SILPA terhadap total belanja Tahun sebelumnya (%)	12,87	10,90	11,90	8,50	9,00	11,55	13,37	9,94
4.	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja (%)	85,64	87,19	85,45	86,04	89,54	89,95	89,86	91,20
5.	Rasio realisasi PAD terhadap target PAD (%)	112	125	86	91	102	100,89	103,06	96,24
6.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	tad	WDP	Disclermer	WTP	WTP	WTP	WTP	Menunggu hasil
7.	Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah	23,72	23,17	26,99	27,79	28,02	28,24	26,01	26,64
8.	Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung dibanding Total Belanja Daerah (%)	55,09	54,83	48,55	47,28	40,71	38,94	40,60	37,68
9.	Persentase penyusunan APBD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Jambi, 2021

2.3.4.3. Penelitian dan Pengembangan

Salah satu urusan penunjang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah penelitian dan pengembangan. Jumlah kajian yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kota Jambi Hal ini juga disebabkan masih minimnya produk penelitian yang mendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan masih minimnya kegiatan pengembangan yang mendukung inovasi produk-produk kreatif dalam rangka pengembangan perekonomian Kota Jambi.

Pengembangan inovasi yang lahir dari program penelitian dan pengembangan mesti diarahkan dalam bentuk diversifikasi produk yang dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis yang menyelenggarakan masing-masing urusan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan umum. Kebijakan seperti ini berimplikasi pada dorongan pelembagaan terhadap program dan kegiatan yang berbasis pada hasil penelitian dan pengembangan oleh masing-masing sektor.

2.3.4.4. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Jambi maka peran aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan penempatan aparat berdasarkan *"merit system"* semakin penting. Kewenangan pemerintah Kota Jambi dalam manajemen kepegawaian daerah yaitu: (1) melaksanakan pembinaan teknis dan (2) pelayanan administratif kepegawaian sesuai peraturan yang baru yaitu UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Roadmap Reformasi Birokrasi secara Nasional. Pembinaan teknis administratif, meningkatkan kedisiplinan ASN dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan publik.

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik. Upaya mengukur profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. IP ASN ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi dalam rangka pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indikator pengukuran profesionalitas ASN meliputi 4 (empat) dimensi yaitu: a) Kualifikasi 25%, b) Kompetensi 40%, c) Kinerja 30% dan d) Disiplin 5%.

Posisi IP ASN Kota Jambi pada tahun 2018 sebesar 68, yang berarti berada pada kategori 'Rendah'. Rendahnya profesionalitas ASN ini secara umum disebabkan oleh belum optimalnya dimensi kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki ASN. Upaya Pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan indeks tersebut adalah meningkatkan kualifikasi ASN (pendidikan formal/tugas belajar bagi ASN) dan kompetensi (kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural). Upaya tersebut dilakukan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel berikut menunjukkan bahwa jumlah PNS dalam kurun waktu 2013-2020 yang tersebar di 50 perangkat daerah.

Tabel 2.63.

Indikator Urusan Kepegawaian dan Diklat Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah ASN	Orang	8.134	7.902	8.030	6.886	6.581	6.326	6.213	5.816
2.	Jumlah ASN berpendidikan S-3	Orang	1	16	13	8	10	26	5	7
3.	Jumlah ASN berpendidikan S-2	Orang	175	380	416	323	319	333	327	347
4.	Jumlah ASN berpendidikan S-1	Orang	3.608	4.493	4.602	3.855	3.722	3.640	3.689	3.516
5.	Jumlah ASN berpendidikan SLTA/Sederajat	Orang	2.978	1.622	1.635	1.445	1.307	1.1.84	1.087	937
6.	Jumlah ASN berpendidikan SLTP/Sederajat	Orang	164	126	122	108	97	79	70	91
7.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pim II	Orang	0	0	1	0	2	10	5	0
8.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pim III	Orang	15	0	11	19	19	15	5	0
9.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pim IV	Orang	80	0	0	0	7	29	30	30
10.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis setiap Tahun	Orang	399	340	80	370	240	190	120	252
11.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan	Orang	37	0	243	0	1	1	239	-
12.	Jumlah ASN pensiun setiap Tahun	Orang	308	160	245	364	343	317	442	329
13.	Jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN dalam satu Tahun yang ditangani	Kasus	55	52	88	40	36	36	35	26
14.	Persentase pengelolaan data kepegawaian	%	65	80	88	90	95	95	97	97

Sumber: BKPSDMD Kota Jambi, 2021

2.3.4.5. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Jambi merupakan salah satu perangkat daerah yang termasuk pada kelompok urusan penunjang pemerintahan. Sekretariat daerah memiliki fungsi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijaksanaan pemerintah daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kota Jambi didukung oleh 9 bagian, yang meliputi: 1) Bagian Tata Pemerintahan, 2) Bagian Hukum, 3) Bagian Pembangunan, 4) Bagian Perekonomian, 5) Bagian Kesejahteraan Rakyat, 6) Bagian Organisasi, 7) Bagian Umum, 8) Bagian Kerjasama Daerah, dan 9) Bagian Humas.

Tabel 2.64.

Indikator Urusan Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai LPPD	1,66 (sedang)	1,66 (sedang)	2,84 (tinggi)	3,06 (sangat tinggi)	Hasil blm keluar	2,9893	Hasil beum keluar	Hasil belum keluar
2.	Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan	11	12	16	16	5	7	10	10
3.	Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang diterbitkan	25	51	42	80	5	88	66	78
4.	Jumlah Produk Hukum daerah yang tersosialisasikan	-	3	1	1	5	4 perda 1 perwal	4 perda 3 perwal	1 perda 3 perwal
5.	Persentase paket pengadaan B/J yang diumumkan melalui LPSE Kota Jambi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Nilai LKJIP	n/a	n/a	n/a	CC	B	B	B	Belum ada review
7.	Jumlah kerjasama daerah	12	11	7	13	23	29	52	37
8.	Persentase publikasi kegiatan KDH/WKDH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase pemenuhan pelayanan KDH/WKDH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

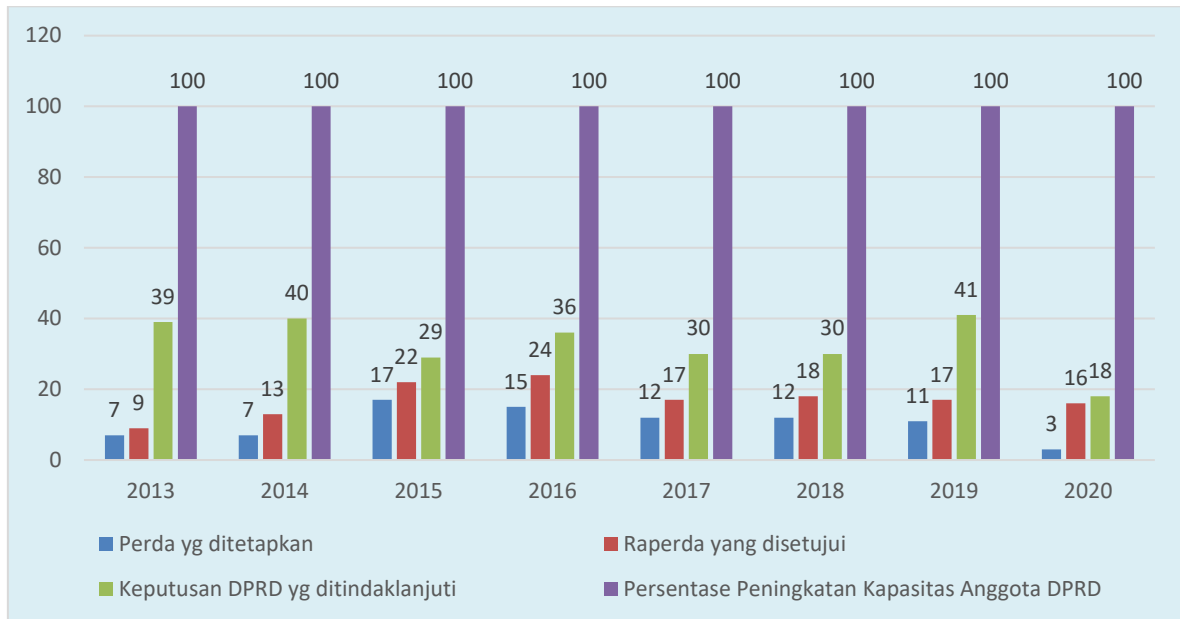
Sumber: *Bagian Organisasi Setda-Kota Jambi Kota Jambi, 2021*

2.3.4.6. Sekretariat Dewan

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, adalah menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jumlah anggota DPRD Kota Jambi tahun 2020 sebanyak 45 orang yang berasal dari 7 fraksi di DPRD, dengan perincian berdasarkan jumlah anggota berdasarkan fraksi, sebagai berikut, 8 anggota dewan dari Fraksi Demokrat, 6 anggota dewan dari Fraksi PDI-P, 7 anggota dari fraksi Gerindra, 4 anggota dari fraksi PAN, 5 anggota dewan dari fraksi Nasdem, 5 anggota dewan dari fraksi PKS, 4 anggota dari fraksi Golkar dan 6 anggota dewan dari fraksi PBRB.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,

Sekretariat DPRD mempunyai fungsi a) Memfasilitasi rapat anggota DPRD; b) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD; c) Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan pembukuan keuangan DPRD; d) Pengelolaan kehumasan, keprotokolan, perpustakaan dan dokumentasi; e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Sumber: Sekretariat DPRD Kota Jambi Kota Jambi, 2021

Gambar 2.45.

Indikator Urusan Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun 2013-2020

2.3.4.7. Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Kota Jambi dalam penyelenggaraan pemerintahan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat berdasarkan amanat undang-undang. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan pengawasan terhadap berbagai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sepenuhnya dilaksanakan oleh Inspektorat. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi secara berkala dan menginformasikan hasilnya kepada publik.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat bersifat internal dalam rangka meningkatkan kinerja urusan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Jambi, obyek pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dilakukan dengan pemeriksaan terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan. Laporan hasil pemeriksaan di Kota Jambi pada Tahun 2017 mencapai 68 laporan dengan kinerja laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang telah disusun sangat baik yaitu mencapai 100%.

Salah satu tugas dan fungsi lain dari pelaksanaan pengawasan di daerah adalah menindak lanjuti hasil temuan dari instansi pemeriksa dari tingkat pusat, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK salah satunya akan menghasilkan temuan-temuan atas tindakan pengelolaan keuangan di daerah. Temuan-temuan tersebut kemudian harus ditindak lanjuti oleh Inspektorat. Sampai Tahun 2020, rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kota Jambi telah mencapai 100%.

Terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kota Jambi telah meraih skor 71,28. Dengan pencapaian skor tersebut artinya, dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kota Jambi telah mampu menunjukkan kecenderungan perbaikan dan/atau sebagian besar target yang relevan terpenuhi.

Tabel 2.65.
Indikator Urusan Pengawasan Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	75,0	71,9	66,7	66,2	64,52	60,07	60	66
2.	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	LHP	56	96	96	89	68	322	430	401
3.	Persentase laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang telah disusun	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	%	10%	10%	20%	30%	40%	40%	40	88,23
5.	Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat Kota	level	N/A	N/A	N/A	N/A	Level II	N/A	Level II	Level III
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	N/A	58,27	55,09	55,74	71,28	55,74	71,28	N/A

Sumber: Inspektorat Kota Jambi, 2021

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah didefinisikan oleh *Centre for Regional and Urban Studies (CURDS)*, Inggris sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. Daya saing daerah menilai kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam memproduksi dan memasarkan barang dan jasanya.

Daya saing daerah menjadi salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi, kekhasan, dan unggulan dari daerah itu sendiri. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk melihat tingkat daya saing daerah diantaranya dapat dilihat melalui indikator makro ekonomi seperti LPE dan PDRB per kapita.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut.

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan Hukum Engel/Engel Law bahwa semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode Tahun 2013-2020 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.66.
Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga
di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Komponen Pengeluaran	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019**	2020**
Total Konsumsi Rumah Tangga								
ADHB (Miliar Rp)	10.710,25	12.086,27	13.123,57	14.212,68	15.432,00	16.415,75	17.584,80	17.679,42
ADHK 2010 (Miliar Rp)	9.122,70	9.598,45	10.072,15	10.526,96	11.071,36	11.483,38	12.061,84	12.020,30
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	64,58	63,69	61,63	58,24	58,69	56,74	57,08	59,30
Rata-rata konsumsi RT								
ADHB (Juta Rp)	80,63	89,73	96,04	102,69	110,05	115,70		
ADHK 2010 (Juta Rp)	68,68	71,26	73,71	76,06	78,95	80,94		
Rata-rata konsumsi Perkapita								
ADHB (Juta Rp)	18,81	21,28	22,78	24,36	26,11	27,45	29,08	28,92
ADHK 2010 (JutaRp)	16,02	16,90	17,48	18,04	18,73	19,20	19,95	19,66
Pertumbuhan								
Total konsumsi RT Perkapita	4,76	3,76	3,44	3,19	3,81	2,51		
	4,36	5,45	3,48	3,19	3,81	2,51		

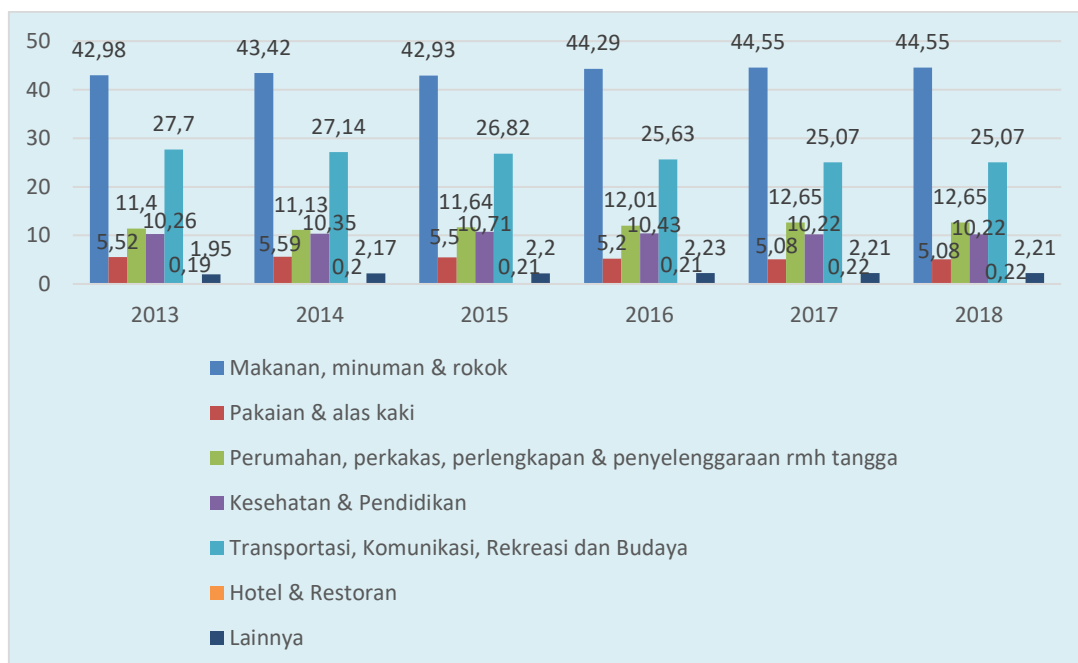
Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

Selama periode 2013-2020 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB fluktuatif, yaitu 64,58 persen (2013); 63,69 persen (2014); 61,63 persen (2015); 58,24 persen (2016), 58,69 persen (2017), 56,74 persen (2018), 57,08 persen (2019) dan 59,30 pada tahun 2020. Posisi tertinggi terjadi pada Tahun 2013 sebesar 64,58 persen dan terendah pada Tahun 2016 sebesar 56,74 persen.

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini

memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumahtangga.

Secara rata-rata, konsumsi per-rumah tangga dari Tahun ke Tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada Tahun 2013, setiap rumah tangga di Kota Jambi menghabiskan dana sekitar 80,63 juta Rupiah se Tahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 89,73 juta Rupiah (2014); 96,04 juta Rupiah (2015); 102,69 juta Rupiah (2016); dan 110,05 juta Rupiah (2017). Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumahtangga tumbuh pada kisaran 2 s.d 4 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2013 sebesar 4,76 persen. Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” meningkat pada kisaran 18,81% s.d 26,53%. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumahtangga, seperti terlihat pada tabel berikut:



Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Gambar 2.46.
Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga di Kota Jambi Tahun 2013-2018

Secara rata-rata dari Tahun 2013 s.d 2018, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kota Jambi, bahwa konsumsi bukan makanan tidak jauh berbeda dengan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 42,98 persen (2013); 43,42 persen (2014); 42,93 persen (2015); 44,29 persen (2016) dan 44,55 (2017).

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antarwilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan. Namun demikian pembahasan berikut ini hanya meliputi infrastruktur yang memiliki peranan vital di Kota Jambi.

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sampai dengan Tahun 2020 rasio ketaatan ruang adalah sebesar 100% persen. Hal ini menggambarkan bahwa dalam memanfaatkan ruang masih taat pada aturan yang berlaku yakni belum melebihi daya tampung dan daya dukung serta juga dapat menggambarkan ketaatan warga pada regulasi RTRW serta optimalnya pengendalian tata ruang.

b. Akseibilitas Daerah

Tumbuh kembangnya suatu kawasan dalam perkotaan tentunya tidak akan terlepas dari peningkatan infrastruktur sebagai trigger, yang biasanya diawali melalui pembangunan jalan dan jembatan. Hal ini merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67.

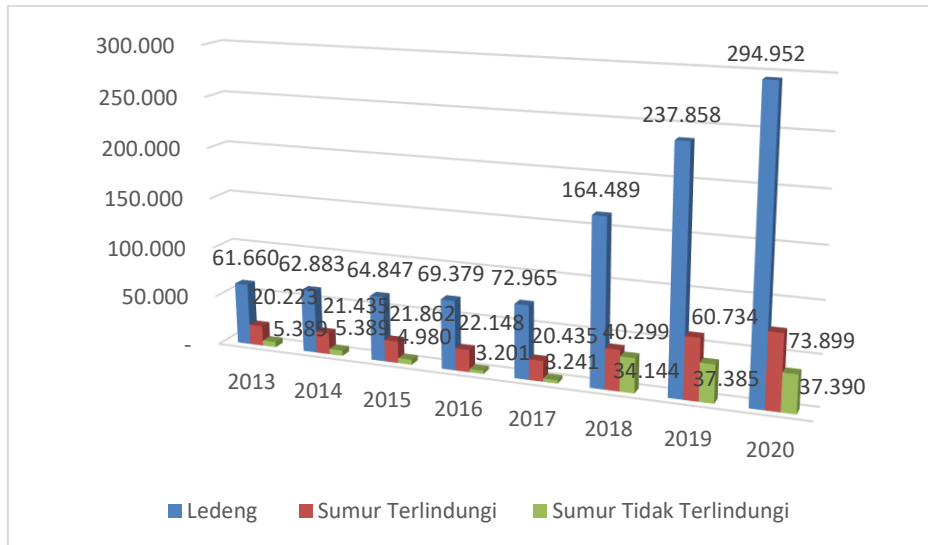
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Jambi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang Jalan (KM)	506,27	506,27	506,27	510,45	510,45	510,45	510,45	510,45
2.	Jumlah Kendaraan								
	a. Roda 4	dta	dta	dta	dta	dta	dta	dta	dta
	b. Roda 2	dta	dta	dta	dta	dta	dta	dta	dta
3.	Rasio	dta	dta	dta	dta	dta	dta	dta	dta

Sumber : Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2021

c. Ketersediaan Air Bersih

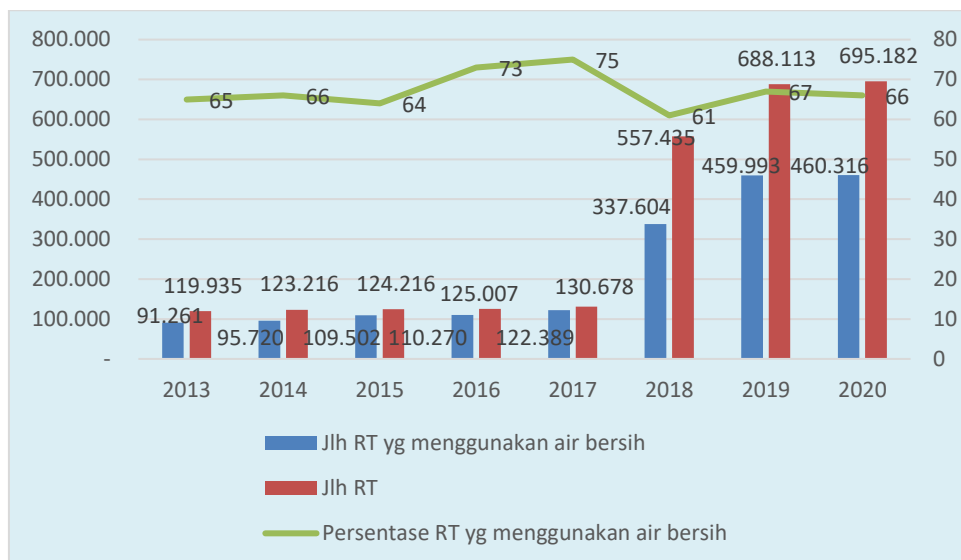
Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sementara air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, air sungai dan danau, mata air, air sumur dangkal, dan air sumur dalam. Sumber air bersih yang digunakan rumah tangga di kota Jambi dalam kurun waktu 2013-2020 dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 2.47.

Sumber Air Bersih Rumah Tangga (RT) di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Dari gambar di atas terlihat penggunaan terbesar air bersih masyarakat Jambi berasal dari air ledeng sebesar 61.660 rumah tangga pada tahun 2013 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan menjadi 294.952 pengguna rumah tangga di tahun 2020. Untuk persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dari tahun 2013 – 2020 mengalami fluktuasi. Seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kota Jambi & Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2021

Gambar 2.48.

Persentase Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih di Kota Jambi Tahun 2013-2020

d. Fasilitas Listrik

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Pada Tahun 2013 jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik sebanyak 139.083 rumah tangga. Adapun pada Tahun 2020, rumah tangga pengguna listrik meningkat menjadi 458.187 rumah tangga. Gambaran secara lengkap mengenai persentase jumlah rumah tangga di Kota Jambi yang telah menggunakan listrik selama kurun waktu delapan tahun terakhir ditampilkan pada berikut:

Tabel 2.69.
Persentase Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Listrik di Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rumah Tangga	139.083	142.016	144.017	145.872	147.784	557.435	688.113	695.182
2.	Jumlah Pelanggan PLN	290.887	290.887	371.983	247.105	428.587	502.139	533.711	562.793
3.	Rasio Elektrifikasi	209%	205%	258%	169%	290%	90,08%	77,56%	80,96%

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklim kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain kemudahan perizinan, pengenaan pajak daerah, angka kriminalitas yang dilihat dari jumlah kejadian kejahatan dan jumlah demonstrasi.

a. Kemudahan Perizinan

Pembentukan daya saing investasi dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan, kemudahan dalam memperoleh perijinan dan berapa lama proses dilakukan, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.70.
Lama Proses Perizinan di Kota Jambi Tahun 2020

No	Jenis Perizinan	Lama Mengurus	Jumlah Persyaratan	Biaya Resmi (rata-rata maks Rupiah)
1.	Tanda Daftar Industri (TDI)	4 Hari Kerja	8 dokumen	Gratis
2.	Izin Usaha Industri (IUI)	4 Hari Kerja	8 dokumen	Gratis
3.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	4 Hari Kerja	-	Gratis
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	4 Hari Kerja	-	Gratis

No	Jenis Perizinan	Lama Mengurus	Jumlah Persyaratan	Biaya Resmi (rata-rata maks Rupiah)
5.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	4 Hari Kerja	8 dokumen	Gratis
6.	Izin Usaha Pusat Perbelajaan (IUPP)	4 Hari Kerja	13 dokumen	Gratis
7.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	4 Hari Kerja	7	disesuaikan
8.	Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR)	4 Hari Kerja	5	disesuaikan
9.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	4 Hari Kerja	7	Gratis
10.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	4 Hari Kerja	7	Gratis

Sumber: DPMPTSP Kota Jambi, 2021

b. Pengenaan Pajak Daerah

Jumlah penerimaan pajak daerah pada tahun 2020 sebesar Rp. 216.815.393.479,- atau hanya tercapai sebesar 93,43% dibandingkan target yang harus dicapai sebesar Rp. 232.060.000.000,- selain pajak daerah terdapat retribusi yang pada tahun 2020 sebesar Rp. 40.479.596.104 atau melebihi target 110,55% sebesar Rp. 36.618.000.000,-. Penerimaan pajak dan retribusi diperoleh dari sektor perdagangan dan jasa, yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame, serta retribusi diperoleh dari parkir

Tabel 2.71.
Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Di Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pajak Daerah						
	Target	190.882.000.000	187.252.000.000	198.940.000.000	203.500.000.000	242.090.000.000	232.060.000.000
	Realisasi	147.889.448.423	158.740.884.099	201.429.136.841	215.444.433.949	256.028.625.688	216.815.393.479
	Persentase	77%	85%	101%	105,87%	105,76%	93,43%
2.	Jumlah Retribusi						
	Target	63.057.026.000	73.679.471.000	46.403.840.000	44.012.000.000	45.068.647.000	36.618.000.000
	Realisasi	58.812.352.554	80.679.063.851	43.077.425.944	40.389.059.087,29	38.541.261.596	40.479.596.104
	Persentase	93%	110%	93%	91,77%	85,22%	110,55%

Sumber : BPS Kota Jambi, 2021

c. Angka Kriminalitas

Jika dilihat dari kejadian kejahatan Tahun 2020 tersebut akan dapat mempengaruhi iklim investasi, dimana orang akan berpikir ulang untuk menanamkan sahamnya apabila tingkat keamanannya kurang. Kejadian kejahatan tersebut dapat disebabkan karena faktor ekonomi dimana tingkat kemiskinan terlalu tinggi, faktor lingkungan pergaulan dan belum baiknya disiplin masyarakat dalam mematuhi hukum/peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus

globalisasi yang tidak terbandung menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat. Tantangan kedepan yang dihadapi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah meningkatnya gangguan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, serta tindakan kriminal, kekerasan secara kualitas maupun kuantitas maupun tak terlepas pula munculnya berbagai isu dan teror yang dapat meresahkan masyarakat sebagai akibat kemajuan teknologi yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tabel 2.72.

Jumlah Kasus Kejahatan Di Kota Jambi Tahun 2014-2020

No	Uraian	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Kejahatan	778	1.058	1.039	6.959	5.806	6.021	3.890
2.	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana				38,08%	54,48%	63,33%	63,01%

Sumber: Polresta Jambi, 2021

d. Angka Demonstrasi

Demonstrasi ("demo") atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan. Demonstrasi di Kota Jambi didominasi oleh demonstrasi ekonomi. Salah satu permasalahan diantaranya adalah berkaitan dengan Kejadian demo di Kota Jambi bisa dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.73.

Jumlah Demonstrasi Di Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Demonstrasi Politik	-	10	-	tad	Tad	6	-	-
2.	Demonstrasi Ekonomi	280	158	65	tad	Tad	-	5	2
3.	Demonstrasi Mogok Kerja	-	-	-	tad	Tad	-	1	-
Jumlah		280	168	65	tad	Tad	6	6	2

Sumber: Kesbangpol Kota Jambi, 2021

2.4.4. Fokus Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumberdaya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pembangunan SDM di Kota Jambi diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan daerah. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah.

a. Kualitas Tenaga Kerja

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi yang masuk di suatu daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Selain itu, kualitas tenaga kerja juga ditentukan oleh kondisi internal tenaga kerja itu sendiri seperti: motivasi kerja, keahlian/ketrampilan, pengalaman kerja, serta sikap dan perilaku. Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri.

Jumlah angkatan kerja selama periode 2013 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 jumlah angkatan kerja sebanyak 248.761 meningkat menjadi 307.022 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 296.275. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.74.
Perkembangan Ketenagakerjaan Di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Tahun	Angkatan Kerja		Total Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	TPAK (%)	TPT (%)
	Bekerja	Pengangguran				
2013	230.243	18.518	248.761	160.376	60,80	7,44
2014	235.722	26.569	262.291	158.137	62,39	10,13
2015	254.351	20.098	274.449	154.093	64,04	7,32
2016	<i>BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016</i>					
2017	268.264	15.754	284.018	159.325	64,06	5,55
2018	277.809	19.488	297.290	154.575	65,79	6,56

2019	283.387	20.635	307.022	15.340	66,84	4,19
2020	26.205	31.008	296.275	462.029	64,12	10,49

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Dari sisi jenjang pendidikan, angkatan kerja Kota Jambi juga memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik. Hal ini tidak terlepas dari iklim investasi yang kondusif yang mendukung kesejahteraan tenaga kerja. Pemerintah Kota Jambi telah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) yang terus meningkat disesuaikan dengan perkembangan harga serta kemampuan pemberi kerja. Nilai UMK Kota Jambi Tahun 2013 sebesar Rp. 1.300.000 per pekerja per bulan dan meningkat menjadi Rp. 2.900.000 per pekerja per bulan pada tahun 2020. Peningkatan ini menunjukkan positifnya pertumbuhan perekonomian di Kota Jambi sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2020 mencapai 10,49% mengalami peningkatan tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan dunia mengalami pandemi Covid sehingga kondisi ini ikut berimbas pada kondisi tenaga kerja di kota Jambi. Karena adanya beberapa kebijakan dalam menghadapi pandemi ini sehingga perekonomian mengalami kelesuan sehingga banyak pekerja yang di PHK. Beberapa kebijakan di gelontorkan pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan jumlah pengangguran.

Tabel 2.75.

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah lulusan S1	52.594	53.778	54.668	55.491	Tad	45.329	47.389	50.270
2.	Jumlah lulusan S2	4.382	4.490	4.556	4.610	Tad	3.892	4.135	4.394
3.	Jumlah lulusan S3	392	402	406	409	Tad	269	279	370
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	59.381	60.694	61.645	62.526	Tad	49.490	52.253	55.034
5.	Jumlah penduduk	556.332	568.062	576.067	583.487	591.134	614.329	616.355	620.708
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 ((4/5)x10000)	1.067,36	1.068,44	1.070,10	1.071,59	Tad	805,59	847,77	886,64

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

b. Tingkat Ketergantungan

Selain itu, salah satu fokus dalam aspek sumber daya manusia adalah angka *dependency ratio*/rasio ketergantungan, yang menunjukkan tingkat ketergantungan SDM produktif (15-64) Tahun terhadap usia nonproduktif (0-15 dan 65+). Per Tahun 2020, rasio ketergantungan Kota Jambi berada pada angka 43,68 dimana angka ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya tahun 2019 sebesar 40,02. Hal ini

menunjukkan perkembangan yang kurang baik, dimana masyarakat dengan usia produktif tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat yang kurang produktif.

Tabel 2.76.
Rasio Ketergantungan Di Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	148.672	148.302	147.899	147.302	147.827	155.255
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 Tahun	20.828	21.826	22.947	24.149	5.014	29.040
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	169.500	170.128	170.846	171.491	172.841	84.295
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	406.566	413.359	420.288	426.612	431.897	421.905
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	41.69	41.16	40.64	40,20	40,02	43,68

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

2.4.5. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/ kota, meliputi: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Sosial.

Pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dilaksanakan secara bertahap, berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah. Jangka waktu dan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh daerah, digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan urusan wajib daerah yang berbasis pada pelayanan dasar, daerah dapat menetapkan rencana pencapaian dan penerapan SPM lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPNK sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah. Adapun SPM yang menjadi kewenangan daerah dalam tabel berikut.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian 2020	Perangkat Daerah PJ
Pendidikan				
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Dinas Pendidikan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Dinas Pendidikan
Kesehatan				
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	98,46%	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	87,45%	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	90,76%	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan belita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	20,47%	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan	123,11%	Dinas Kesehatan

		skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar		
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	28,94%	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	42,53%	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	50,27%	Dinas kesehatan
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	45,70%	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	104,41%	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Jumlah orang yang mendapatkan pelayana TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	37,98%	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	41,63%	Dinas Kesehatan
Pekerjaan Umum				

1	Penyediaan Kebutuhan pokok air Minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	70,99 %	Dinas PUPR
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	75,50 %	Dinas PUPR
Perumahan Rakyat				
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan	Jumlah warga negara yang memperoleh Kualitas lingkungan Permukiman Perkotaan	100%	Dinas Perkim
2	Pengembangan dan Fasilitas Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Penyelenggara Perumahan yang mendapat Fasilitas	100%	Dinas Perkim
3	Peningkatan, Pemeliharaan dan Penataan Utilitas Umum	Jumlah Permukiman yang mendapat Utilitas Umum	100%	Dinas Perkim
Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat				
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah korban kebakaran yang bisa diselamatkan	100%	Dinas Damkar
2	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	Jumlah masyarakat yang diselamatkan pada kondisi darurat non kebakaran	100%	Dinas Damkar
Satuan Polisi Pamong Praja				
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang mendapat layanan Akibat Penegakan Perda dan Perkada	100%	Satpol PP
Urusan Sosial				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti	68,81%	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang mendapat rehabilitasi	68,81%	Dinas Sosial

3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang mendapat rehabilitasi	68,81%	Dinas Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapat rehabilitasi	68,81%	Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kota jambi	Jumlah Korban bencana daerah yang tertangani	100%	Dinas Sosial

2.4.6. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada tanggal 25 September 2015, 193 negara dari Majelis Umum PBB mengadopsi Agenda Pembangunan Pembangunan Berkelanjutan yang akan dicapai pada tahun 2030 ke depan. Program yang diluncurkan meliputi program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama (Sustainable Development Goals (SDGs), menggantikan program sebelumnya Millennium Development Goals (MDGs) yang selesai akhir tahun 2015.

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB/SDGs akan disusun 3 (tiga) dokumen perencanaan, yaitu : Peta Jalan TPB/SDGs, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan melibatkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar. Pelaksanaan TPB di Kota Jambi sebagai berikut :

- Angka kemiskinan meningkat dari 8,12% pada 2019, menjadi 8,27% pada 2020.
- Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 94,03 pada 2020, tertinggi se Provinsi Jambi

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki sebesar 81,90 dan IPM perempuan sebesar 77,01
- Angka harapan hidup meningkat dari 71,57 (2019) menjadi 72,65 (2020)
- Angka harapan lama sekolah meningkat dari 14,9 pada 2019, menjadi 15,1 (2020)
- Tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 6,53 (2019) menjadi 10,49 pada 2020
- Sebanyak 99,69% rumah tangga sudah memiliki sumber penerangan listrik dari PLN, sementara 0,31% lainnya bersumber dari non PLN.
- Sebanyak 0,15% rumah tangga belum memiliki fasilitas tempat buang air besar. Angka ini adalah yang terendah dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jambi

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam rangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Kapasitas keuangan daerah harus diketahui, agar daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan, sehingga belanja pembangunan dapat dilakukan secara optimal, efektif dan efisien. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk kebutuhan itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dalam periode RPJMD yang lalu yaitu periode tahun 2013 - 2018. Berdasarkan analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun kebelakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan kedepan. Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD terdiri atas target dan realisasi pendapatan, target dan realisasi belanja, serta penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pengelolaan keuangan daerah selalu diterapkan prinsip dan pendekatan serta norma yang berlaku secara universal, yaitu dilaksanakan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun lalu dapat dilihat dari anggaran pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan di Palang Merah Indonesia dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan baik dari aspek fisik maupun non fisik.

Landasan yang dijadikan acuan dalam perhitungan APBD pada 5 (lima) tahun yang lalu, adalah proyeksi indikator makro ekonomi, antara lain terdiri dari (i) laju pertumbuhan ekonomi; (ii) kemiskinan dan pengangguran; (iii) pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan; (iv) daya saing daerah; dan (v) pendapatan perkapita masyarakat dan laju inflasi lokal.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Jambi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu dilakukan dan dirumuskan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja. Pendekatan ini diarahkan dan bertujuan untuk dapat menampung aspirasi dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap program pembangunan secara optimal. Namun demikian, agar ada jaminan bahwa dalam penyusunan anggaran dilakukan secara transparan, efisien, efektif, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran dan tepat dalam penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam perumusannya memperhatikan beberapa faktor, diantaranya faktor keseimbangan antara pendapatan dengan belanja serta pembiayaan.

Tabel. 3.1.
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2013-2017 Kota Jambi

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata-rata Pertum- buhan (%)
A	PENDAPATAN	1.164.352.549.296,01	1.320.648.890.197,28	1.387.222.252.820,42	1.571.332.218.626,47	1.500.633.237.946,70	6,81
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	149.041.969.818,21	246.427.699.826,28	263.925.520.119,42	287.525.214.004,49	397.327.847.289,10	
1.1	Pajak Daerah	91.476.549.341,38	128.824.086.122,82	147.889.448.423,30	158.740.884.098,89	201.429.136.841	
1.2	Retribusi Daerah	37.169.611.073,05	59.939.980.257,70	58.812.352.554,45	80.679.063.851,03	43.077.425.944	
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.388.593.783,78	5.017.222.922,00	7.974.858.186,57	7.266.051.209,95	8.066.340.479	
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.007.215.620,00	52.646.410.523,76	49.248.860.955,10	40.839.214.844,62	144.754.944.025,57	
2	DANA PERIMBANGAN	821.633.897.881,00	852.471.935.221,00	858.677.840.368,00	1.177.857.284.208,00	1.013.005.895.282,00	6,91
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	146.767.549.881,00	123.603.433.221,00	83.342.923.368,00	102.727.973.433,00	108.336.723.678,00	
2.2	Dana Alokasi Umum	626.331.743.000,00	678.620.172.000,00	668.201.807.000,00	727.564.344.000,00	714.783.378.000,00	
2.3	Dana Alokasi Khusus	48.534.605.000,00	50.248.330.000,00	107.133.110.000,00	347.564.966.775,00	189.885.793.604,00	
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	193.676.681.596,80	221.749.255.150,00	264.618.892.333,00	105.949.720.413,98	90.299.495.375,60	-10,23
3.1	Hibah	573.637.000,00	521.847.475,00	-	39.039.796.578,00	2.819.000.000,00	
3.2	Dana darurat	9.658.244.274,80	8.750.000.000,00	8.000.000.000,00	-	-	
3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah Daerah lainnya **)	44.644.819.322,00	65.061.601.675,00	73.840.521.333,00	66.598.538.835,98	80.760.495.375,60	

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata-rata Pertum- buhan (%)
3.4	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	138.799.981.000,00	147.415.806.000,00	182.778.371.000,00	311.385.000,00	-	
3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	6.720.000.000,00	
B	BELANJA	1.151.885.966.248,19	1.277.947.245.874,50	1.426.801.893.158,80	1.526.705.967.976,45	1.496.544.155.634,80	6,90
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	639.848.119.610,19	651.963.306.769,00	638.692.856.708,00	735.466.555.433,50	633.792.563.865,00	0,30
1.1	Belanja Pegawai	592.744.670.347,00	642.424.088.743,00	627.677.871.221,00	721.853.145.334,50	609.075.861.181,00	
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
1.4	Belanja Hibah	41.322.686.558,00	3.791.283.500,00	5.627.038.649,00	9.682.097.750,00	18.623.738.650,00	
1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.436.830.000,00	4.282.750.000,00	3.645.000.000,00	1.557.150.000,00	3.407.880.000,00	
1.6	Belanja Bagi hasil	2.019.711.376,00	971.706.526,00	-	-	-	
1.7	Belanja Bantuan keuangan	835.652.829,19	-	1.194.446.838,00	1.292.132.400,00	1.292.132.400,00	
1.8	Belanja Tidak Terduga	488.568.500,00	493.478.000,00	548.500.000,00	1.082.029.949,00	1.392.951.634,00	
2	BELANJA LANGSUNG	512.037.846.638,00	625.983.939.105,50	788.109.036.450,80	791.239.412.542,95	862.751.591.769,80	14,40
2.1	Belanja Pegawai	41.838.019.666,00	58.257.749.136,00	65.075.970.607,00	62.458.092.882,00	74.716.530.322,50	
2.2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.332.594,00	271.629.484.774,50	337.904.321.856,00	304.585.364.771,00	368.718.465.478,80	
2.3	Belanja Modal	273.218.494.378,00	296.096.705.195,00	385.128.743.987,80	424.195.954.889,95	419.316.595.968,50	
C	PEMBIAYAAN DAERAH	126.744.644.712,82	126.928.509.214,34	169.630.153.537,12	89.348.040.165,74	127.320.238.476,00	7,24
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	148.238.459.062,82	139.211.227.760,64	169.630.153.537,12	130.079.638.923,74	134.489.386.517,76	-1,04
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	148.238.459.062,82	139.211.227.760,64	169.630.153.537,12	130.079.638.923,74	134.489.386.517,76	
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	21.493.814.350,00	12.282.718.546,30	-	40.731.598.758,00	7.169.148.041,76	-62,63

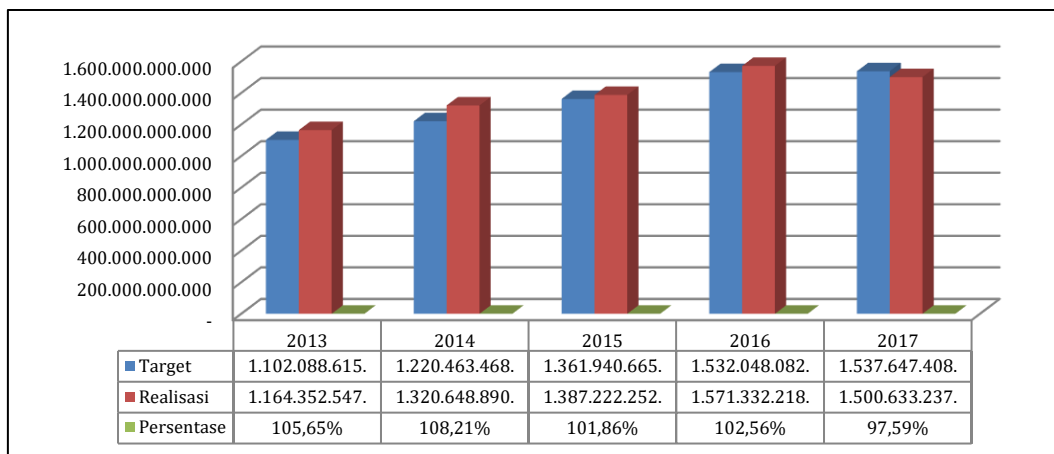
No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata- rata Pertum- buhan (%)
2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	39.039.796.578,00	6.988.000.000,00	-66,05
2.2	Pembayaran Pokok Utang	1.493.814.350,00	2.282.718.546,30	-	1.691.802.180,00	181.148.041,76	-18,24

Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Target pendapatan daerah merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan realisasi merupakan capaian pada akhir tahun anggaran. Kapasitas kemampuan keuangan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan pembiayaan.

Berdasarkan data dari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, secara umum pendapatan daerah Kota Jambi selalu mengalami peningkatan. Hal ini didukung meningkatnya Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah. Untuk pertumbuhan pendapatan daerah Kota Jambi Tahun 2013-2017 rata-rata sebesar 6,81%, yang didukung dengan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 29,89%, Dana Perimbangan sebesar 6,91% dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar -10,23%. Selanjutnya peningkatan pendapatan daerah dapat dilihat dari tabel dan gambar berikut:



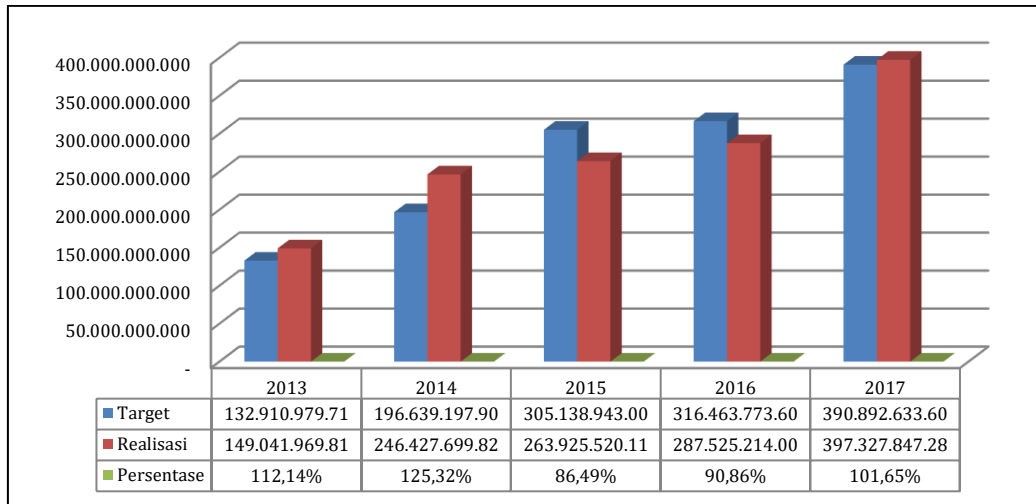
Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

Gambar 3.1.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017

1. Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2013, Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi dari target 132,910 milyar rupiah realisasinya 149,041 milyar rupiah (112,14%), selanjutnya meningkat cukup signifikan pada tahun 2017 dari target sebesar 390,892 milyar rupiah terrealisasi sebesar 397,327 milyar rupiah (101,65%). Untuk lebih jelasnya lihat grafik dibawah.

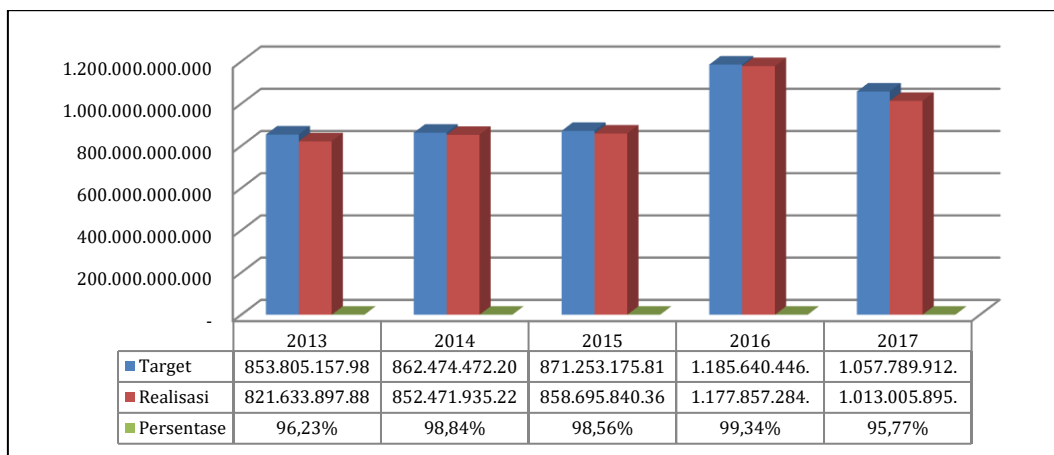


Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

Gambar 3.2.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2017

2. Dana Perimbangan

Selama tahun 2013-2017, realisasi dana perimbangan mengalami peningkatan secara fluktuatif, hal ini terlihat dari target dana perimbangan tahun 2013 sebesar 853,805 milyar rupiah realisasinya 821,633 milyar rupiah (96,23%); dan tahun 2017 dari target sebesar 1,057 triliun rupiah hanya terrealisasi sebesar 1,013 triliun rupiah (95,77%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



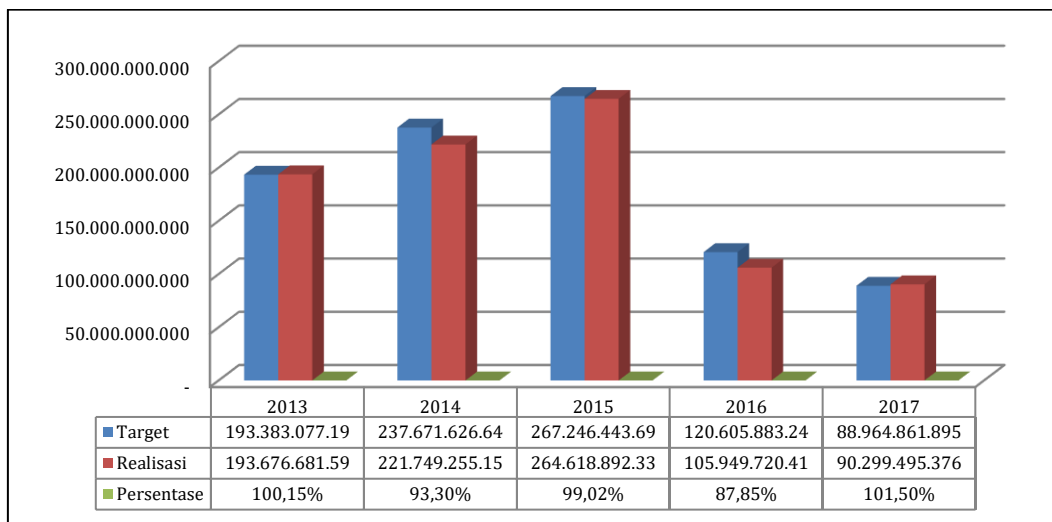
Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

Gambar 3.3.
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2013-2017

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada tahun 2013, lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan 193,383 milyar rupiah terealisasi sebesar 203,334 milyar rupiah (105,15%), terus meningkat hingga tahun 2015 yang ditargetkan 267,246 milyar rupiah realisasinya sebesar 264,618

milyar rupiah (99,02%), dan ditahun 2016 terjadi penurunan yang cukup signifikan dengan target 120,605 milyar rupiah realisasinya hanya 105,949 milyar rupiah (87,85%), dan ditahun 2017 terjadi penurunan kembali dari target sebesar 88,964 milyar rupiah terealisasi sebesar 90,299 milyar rupiah (101,50%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

Gambar 3.4.

Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2013-2017

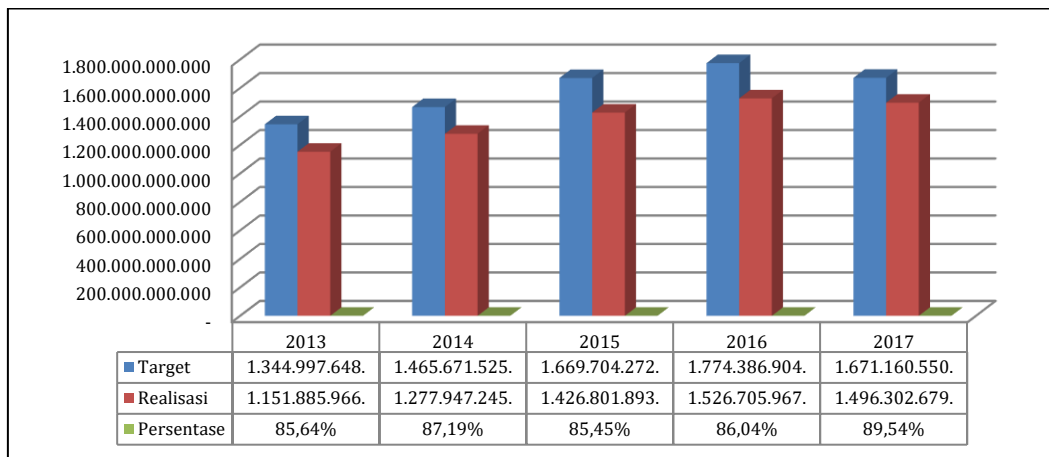
3.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dari tahun 2013-2017, total akumulasi realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Jambi sebesar 6,879 triliun rupiah dari rencana sebesar 7,925 triliun rupiah (86,80%). Belanja daerah tersebut terbagi atas 2 jenis belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program

dan kegiatan yaitu belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Adapun kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.



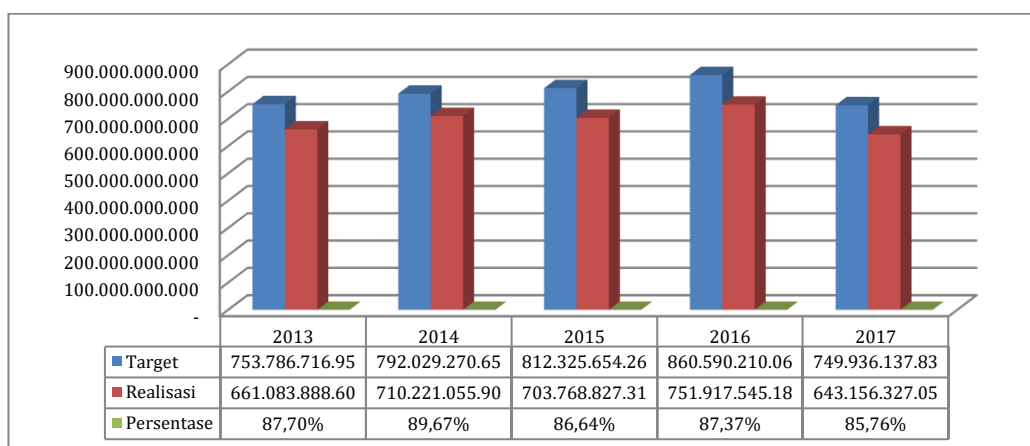
Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

Gambar 3.5.

Target dan Realisasi Belanja Tahun 2013-2017

1. Belanja Tidak Langsung

Realisasi belanja tidak langsung dari tahun 2013-2017 sebesar 3,470 triliun rupiah dari rencana sebesar 3,968 triliun rupiah atau sebesar 87,44%. Rincian rencana dan realisasi belanja tidak langsung dapat dilihat pada grafik berikut.



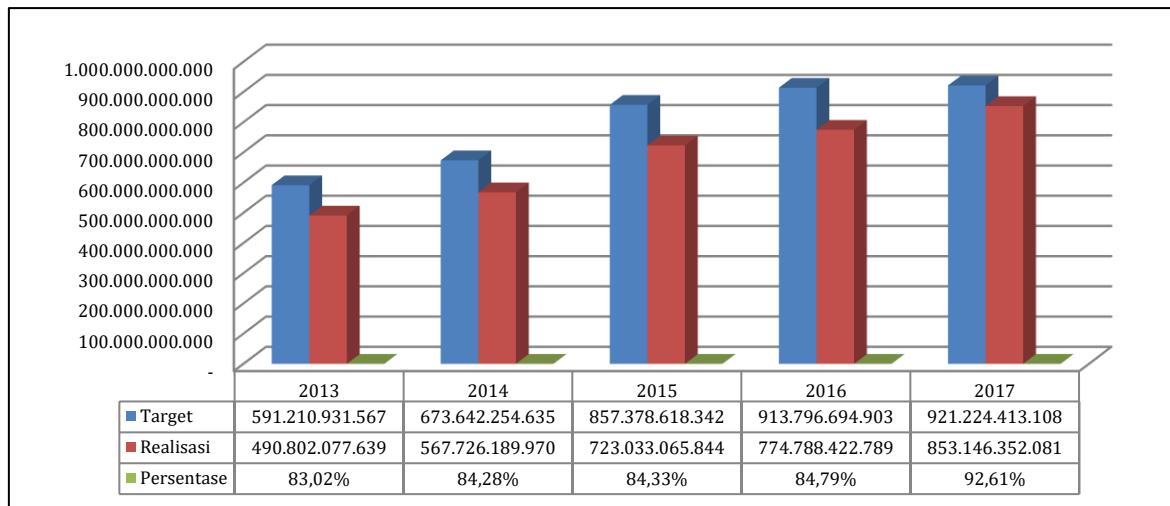
Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

Gambar 3.6.

Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2013-2017

2. Belanja Langsung

Realisasi Belanja Langsung dari Tahun 2013-2017 sebesar 3,409 triliun rupiah dari target sebesar 3,957 triliun rupiah atau sebesar 86,16%. Rincian rencana dan realisasi belanja langsung dapat dilihat pada grafik berikut



Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

Gambar 3.7.

Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2013-2017

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Jambi mencakup : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah hanya mencakup penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Jambi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu dilakukan dan dirumuskan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja. Pendekatan ini diarahkan untuk dapat menampung aspirasi dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap program pembangunan secara optimal. Namun demikian, agar ada jaminan bahwa dalam penyusunan anggaran dilakukan secara transparan, efisien, efektif, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran dan tepat dalam penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam perumusannya

memperhatikan beberapa faktor, diantaranya faktor keseimbangan antara pendapatan dengan belanja serta pembiayaan.

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. Penyertaan modal kepada BUMD;
- c. Persentase SILPA diupayakan tidak meningkat dengan semakin efektifnya perencanaan anggaran.

Realisasi pembiayaan daerah Kota Jambi tahun 2013-2017 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
PENERIMAAN	148.238.459.062	139.211.227.761	169.630.153.537	130.079.638.924	134.489.386.518
SiLPA TA Sebelumnya	148.238.459.062	139.211.227.761	169.630.153.537	130.079.638.924	134.489.386.518
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	0	0	0	0	0
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
PENGELUARAN	21.493.814.350	12.282.718.546	0	40.731.598.758	7.169.148.042
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	20.000.000.000	10.000.000.000	0	39.039.796.578	39.039.796.578
Pembayaran Pokok Utang	1.493.814.350	2.282.718.546,30	0	1.691.802.180	1.691.802.180
Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	0	0	0	0	0
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	126.744.644.713	124.645.790.699	169.630.153.537	89.348.040.166	127.320.238.476

Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa sumber satu-satunya penerimaan pembiayaan adalah berasal dari SiLPA yang besarnya fluktuatif. Hal ini menunjukkan peningkatan SiLPA yang tidak diharapkan tidak dapat terwujud. Di masa mendatang Pemerintah Kota

Jambi harus lebih cermat lagi dalam perencanaan anggaran. Dari sisi pengeluaran pembiayaan, persentase terbesar dipergunakan untuk penyertaan modal kepada BUMD disusul sebagian kecil dipergunakan untuk pembayaran pokok hutang. Dengan banyaknya penerimaan pembiayaan, seharusnya Pemerintah Kota Jambi lebih berani lagi dalam penggunaan penerimaan pembiayaan, misalnya dipergunakan untuk pembentukan dana cadangan.

3.1.2. Neraca Daerah

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Jambi menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Aset daerah merupakan asset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kewajiban baik jangka panjang maupun pendek, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul dari konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumberdaya ekonomi dimasa yang akan datang. Ekuitas dana yang meliputi Dana lancar dan investasi merupakan selisih antara asset dengan kewajiban pemerintah daerah.

Secara umum kondisi neraca daerah Kota Jambi tergolong baik, terlihat dari rasio lancar dan rasio quick yang mencapai lebih dari angka 1, dan rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal yang bernilai kurang dari 0,1. Kondisi ini tentunya perlu dijaga dan dipertahankan sehingga kondisi keuangan daerah tetap dalam kondisi sehat. Hasil perhitungan analisis rasio keuangan daerah Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Analisis Rasio Keuangan Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	1930,37%	2764,38%	2135,24%	895,09%	700,45%
2.	Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	1844,43%	2563,41%	1970,36%	815,44%	618,17%

3.	Rasio total hutang terhadap aset	0,39%	0,30%	0,27%	1,94%	2,03%
4.	Rasio hutang terhadap modal	0,39%	0,27%	0,28%	1,97%	2,07%

Perkembangan jumlah aset Kota Jambi menunjukkan fluktuatif dimana mulai tahun 2013 sebesar Rp. 2.834.180.148.702 meningkat menjadi Rp. 3.389.620.552.563 pada tahun 2015, kemudian terjadi penurunan aset pada tahun 2017 menjadi 2.791.326.204.027, hal ini dikarenakan adanya akumulasi penyusutan dan Amortisasi terhadap aset-aset yang ada pada tahun 2017. Jumlah kewajiban mengalami peningkatan dari Rp. 10.943.610.924 pada tahun 2013 menjadi Rp. 56.529.212.124 pada tahun 2017. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
A.	ASET					
1	Aset Lancar					
	Kas di Kas Daerah	139.077.589.994,64	168.885.502.258,12	129.645.704.136,74	133.844.212.656,76	105.775.310.526,87
	Kas di BLUD	-	-	-	-	21.187.010.666,03
	Kas Lainnya Dana BOS	-	-	-	4.309.323.057,40	4.670.389.966,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	207.906.616,00	825.903.539,00	484.533.302,00	194.016.988,00	38.354.212,00
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	94.444.710,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	9.832.000,00	8.758.000,00	46.449.500,00	19.982.696,00	6.760.360,00
	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	-	-	-	-	50.000.000,00
	Piutang Pajak	41.509.242.791,00	31.580.850.088,00	51.386.861.532,00	59.490.145.409,00	62.730.513.866,00
	Piutang Retribusi	2.461.752.546,00	2.917.293.441,25	3.362.192.048,75	3.076.107.509,75	3.142.088.174,25
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	200.000,00	88.665.000,00
	Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi	11.242.884.093,00	15.588.190.887,00	-	-	-
	Piutang Lainnya	7.338.340.411,00	2.386.495.049,00	-	8.080.264.138,00	7.385.795.149,00
	Penyisihan Piutang	-	-	(1.938.967.591,00)	(29.569.021.313,90)	(39.315.190.713,79)
	Beban Dibayar Dimuka	-	-	524.870.564,00	623.270.228,00	245.160.515,25
	Persediaan	9.404.137.096,76	17.419.628.043,64	15.356.584.320,59	17.588.136.637,64	22.108.756.764,27
	Jumlah Aset Lancar	211.251.685.548,40	239.612.621.306,01	198.868.227.813,08	197.656.638.006,65	188.208.059.195,88
2	Investasi Jangka Panjang					
	Investasi Nonpermanen	255.357.240,10	261.478.036,32	199.296.036,32	19.547.363,98	19.673.400,59
	Investasi Permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah)	56.376.589.446,00	66.906.880.646,00	65.051.395.965,82	127.829.676.379,99	134.729.300.093,38
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	56.631.946.686,10	67.168.358.682,32	65.250.692.002,14	127.849.223.743,97	134.748.973.493,97

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
3	Aset Tetap					
	Tanah	456.825.675.083,00	472.934.455.252,00	475.243.924.252,00	481.346.826.952,00	429.849.671.502,00
	Peralatan dan Mesin	375.602.944.207,00	434.017.560.944,77	479.323.832.515,50	503.473.427.161,57	550.633.614.181,87
	Gedung dan Bangunan	665.332.063.541,40	739.511.420.434,45	774.897.313.909,51	871.183.176.438,12	879.346.393.657,18
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.013.806.748.794,65	1.145.715.391.115,86	1.394.517.596.521,97	1.639.074.967.370,01	1.824.961.081.518,32
	Aset Tetap Lainnya	46.247.683.642,93	53.876.087.373,54	79.242.935.341,15	124.804.427.216,24	196.676.491.102,67
	Konstruksi dalam Pengerjaan	670.541.825,00	-	2.069.825.002,10	31.194.115.704,83	15.000.698.158,49
	Akumulasi Penyusutan	-	-	(96.347.814.283,96)	(1.394.513.185.665,30)	(1.549.786.214.990,86)
	Jumlah Aset Tetap	2.558.485.657.093,98	2.846.054.915.120,62	3.108.947.613.258,27	2.256.563.755.177,47	2.346.681.735.129,67
4	Aset Lainnya					
	Tuntutan Ganti Rugi	767.787.040,00	767.787.040,00	767.787.040,00	785.110.815,00	827.738.815,00
	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	41.117.000.000,00	41.117.000.000,00
	Aset Tak Berwujud	1.603.166.000,00	1.399.248.518,92	1.877.217.318,92	2.325.381.318,92	2.980.727.318,92
	Aset Lain-Lain	5.439.906.334,00	5.785.267.743,00	13.909.015.130,65	45.706.384.430,92	79.268.953.152,42
	Amortisasi	-	-	-	-	(2.506.983.078,00)
	Jumlah Aset Lainnya	7.810.859.374,00	7.952.303.301,92	16.554.019.489,57	89.933.876.564,84	121.687.436.208,34
	JUMLAH ASET	2.834.180.148.702,48	3.160.788.198.410,87	3.389.620.552.563,06	2.672.003.493.492,93	2.791.326.204.027,86
B.	KEWAJIBAN					
1	Kewajiban Jangka Pendek					
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	74.268.850,00	81.252.260,00	79.724.240,00	33.921.525,00	27.028.443,00
	Utang Bunga	8.586.623.528,05	8.586.623.528,05	8.586.623.528,05	8.586.623.528,05	8.586.623.528,05
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	6.191.573.257,00	6.277.714.534,75
	Utang Belanja	-	-	647.280.053,00	4.893.544.641,00	7.161.252.249,54
	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.282.718.546,30	-	-	2.376.670.990,00	4.816.923.369,06
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	10.943.610.924,35	8.667.875.788,05	9.313.627.821,05	22.082.333.941,05	26.869.542.124,40

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
2	Kewajiban Jangka Panjang					
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	29.659.670.000,00	29.659.670.000,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	29.659.670.000,00	29.659.670.000,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	10.943.610.924,35	8.667.875.788,05	9.313.627.821,05	51.742.003.941,05	56.529.212.124,40
C.	EKUITAS					
	JUMLAH EKUITAS	2.823.236.537.778,13	3.152.120.322.622,82	3.380.306.924.742,01	2.620.261.489.551,88	2.734.796.991.903,46
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.834.180.148.702,48	3.160.788.198.410,87	3.389.620.552.563,06	2.672.003.493.492,93	2.791.326.204.027,86

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali timbul permasalahan dengan masyarakat khususnya para pengusaha. Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi atau penetapan tarif yang terlalu tinggi seringkali dikeluhkan dan akan menghambat pertumbuhan sektor riil. Untuk itu perlu dikembangkan terobosan baru untuk meningkatkan PAD, yaitu dengan:

a. Perbaikan manajemen

Melalui perbaikan manajemen diharapkan setiap potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhaan sistem dan prosedur.

b. Peningkatan Investasi

Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan:

- 1) Menjaga stabilitas ekonomi daerah;
- 2) Menyederhanakan prosedur perijinan;
- 3) Mempertegas peraturan/kebijakan agar tidak tumpang tindih baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota, maupun antar sektor;
- 4) Meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha;
- 5) Menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja;
- 6) Meningkatkan keamanan dan ketertiban;
- 7) Meniadakan tumpang tindih pemungutan;
- 8) Menyederhanakan prosedurnya.

c. Optimalisasi Aset Daerah

Peningkatan PAD juga dapat diraih dengan meningkatkan penggunaan aset daerah. Optimalisasi aset dapat dicapai dengan perbaikan administrasi aset dan peningkatan *turn over*. Optimalisasi aset juga dilaksanakan dengan bekerjasama dengan swasta. Selain itu, diperlukan perbaikan manajemen BUMD dan rencana pembentukan badan usaha baru.

2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK, Bagi hasil pajak Provinsi dan Pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.

3.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang infrastruktur, daya beli, kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Kota Jambi.

3. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi belanjalangsung untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama pemerintah dengan badan usaha (pihak swasta) bila memungkinkan.

5. *Transparan dan Akuntabel*

Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui publikasi masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasilnya.

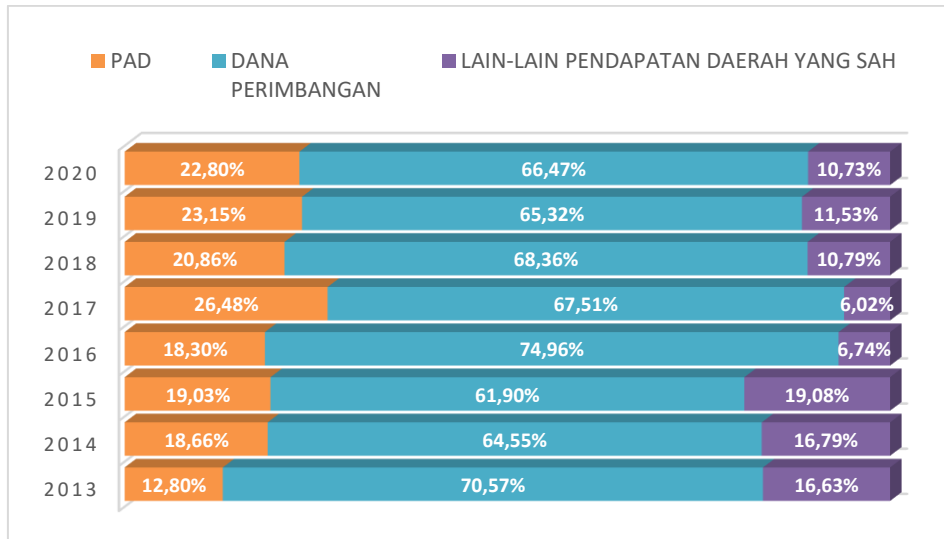
3.2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dapat digali dari pinjaman daerah, tetapi jumlah defisit diupayakan tidak melampaui 4,5% dari pendapatan daerah. Selain itu, besaran pinjaman daerah tidak melebihi kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini tercermin dari besaran rasio kemampuan membayar kembali pinjaman atau *Debt Services Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 2,5 coverage.

3.2.4. Proporsi Anggaran Pendapatan

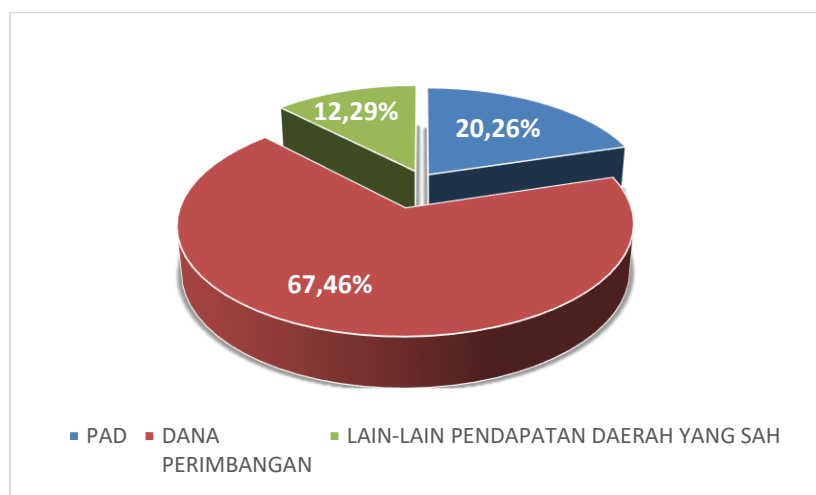
Sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2013-2017 Pemerintah Kota Jambi berhasil meningkatkan sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dan mendanai pembangunan di Kota Jambi.

Ditinjau dari nilai atau besaran perolehannya masing-masing sumber pendapatan daerah mengalami peningkatan. Ditinjau dari proporsinya, pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan walaupun tetap di bawah dana perimbangan. Proporsi perolehan pendapatan daerah Kota Jambi dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3.8.
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017

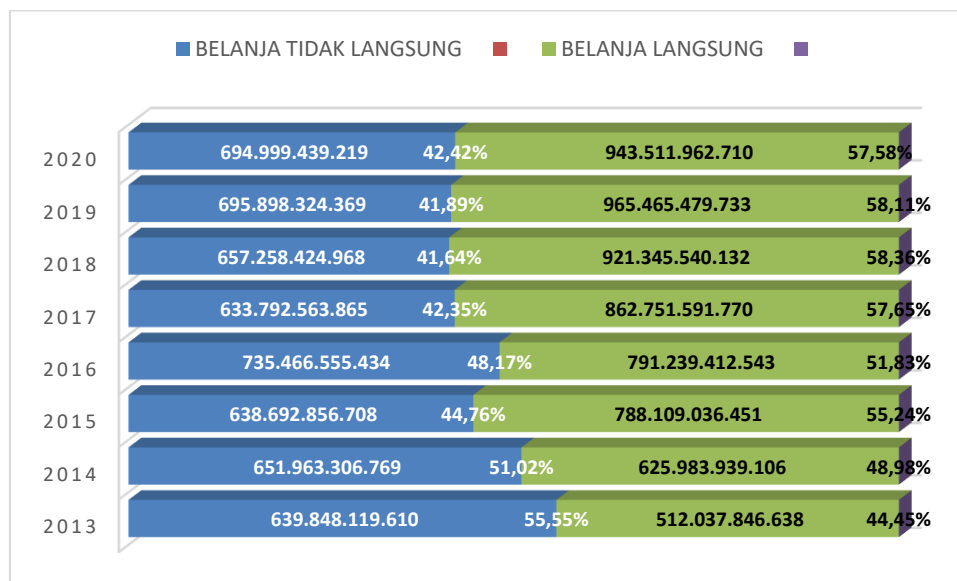
Bila dihitung secara agregat selama 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2013-2017, kontribusi keseluruhan pendapatan asli daerah sebesar 19,36%; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 12,62%. Sementara itu dana perimbangan memberi kontribusi terbesar pada pendapatan daerah Kota Jambi yakni 68,02%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Jambi masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada dana-dana dari pusat dan provinsi. Secara skematik proporsi total dari ketiga sumber pendapatan tersebut dapat dilihat pada grafik 3.9.



Gambar 3.9.
Proporsi Agregat Realisasi Pendapatan Tahun 2013-2020

3.2.5. Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi belanja Pemerintah Kota Jambi dari tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh makin meningkatnya pendapatan daerah. Secara nilai, masing-masing komponen belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung mengalami peningkatan. Walaupun proporsi belanja tidak langsung memiliki proporsi yang lebih besar dibanding belanja langsung, namun dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 3.10.



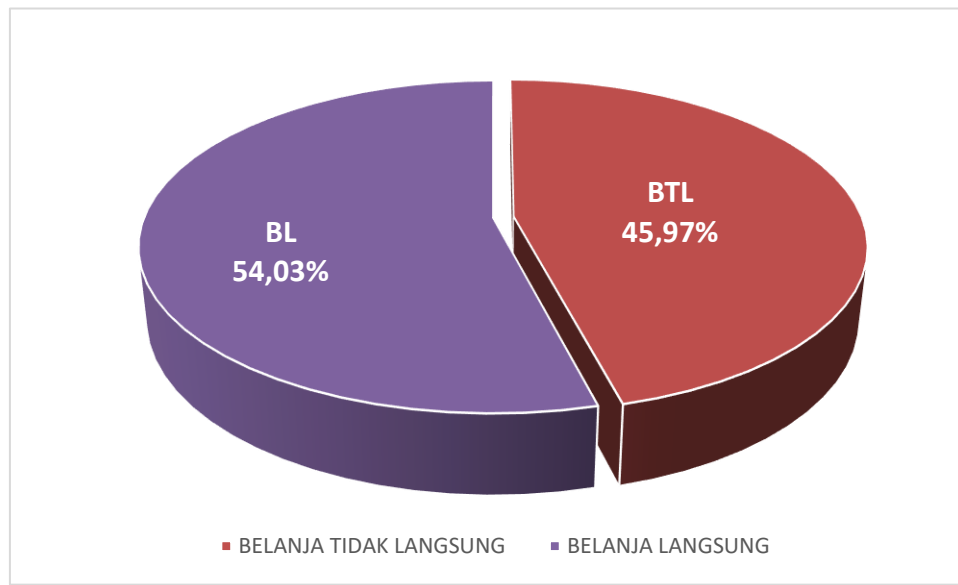
Gambar 3.10.
Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2013-2020

Selanjutnya jika dilihat proporsi belanja aparatur/pegawai terhadap total belanja daerah dapat dilihat pada tabel 3.5. berikut :

Tabel 3.5.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Belanja Pegawai (Rp)	Total Pengeluaran (Rp)	Persentase (%)
1	2013	592,744,670,347	1,151,885,966,248	51.46%
2	2014	642,424,088,743	1,277,947,245,875	50.27%
3	2015	627,677,871,221	1,426,801,893,159	43.99%
4	2016	721,853,145,335	1,526,705,967,977	47.28%
5	2017	609,075,861,181	1,496,544,155,635	40.70%
6	2018	614,857,160,444	1,578,603,965,100	38.95%
7	2019	674,533,158,047	1,661,363,804,102	40.60%
8	2020	628,395,170,421	1,638,511,401,928	38.35%

Secara agregat selama 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2013-2017, proporsi belanja langsung hanya 52,04%. Sementara itu, proporsi realisasi belanja tidak langsung sebesar 47,96%, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang ada telah lebih banyak untuk belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu belanja barang dan jasa serta belanja modal. Secara skematik proporsi belanja dapat dilihat pada grafik 3.11.



Gambar 3.11.
Proporsi Agregat Realisasi Belanja Tahun 2013-2020

3.2.6. Analisis Pembiayaan Daerah

Tabel 3.6
Defisit Riil Anggaran Kota Jambi

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.164.352.549.296,01	1.320.648.890.197,28	1.387.222.252.820,42	1.571.332.218.626,47	1.500.633.237.946,70
	Dikurangi Realisasi :					
2.	Belanja Daerah	1.151.885.966.248,19	1.277.947.245.874,50	1.426.801.893.158,80	1.526.705.967.976,45	1.496.544.155.634,80
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	21.493.814.350,00	12.282.718.546,30		40.731.598.758,00	7.169.148.041,76
	Defisit Riil	-9.027.231.302,18	30.418.925.776,48	-39.579.640.338,38	3.894.651.892,02	-3.080.065.729,86

Tabel 3.7.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Jambi

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	139.211.227.760,64	169.630.153.537,12	130.050.513.198,74	133.974.290.815,76	131.650.797.287,90
2.	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00	0.00	95.530.000,00	490.279.094,00	547.233.821,00
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	10.079.390.375,75	0.00	9.883.239.140,50	12.158.403.461,50

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

Tabel 3.8.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Jambi

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	139.211.227.760,64		169.630.153.537,12		130.050.513.198,74		133.974.290.815,76		131.650.797.287,90	
2.	Pelampauan Penerimaan PAD	16.130.990.108,21	12,25	49.788.501.926,28	37,82	(41.213.422.880,58)	-31,31	(28.938.559.595,51)	-21,98	6.435.213.689,10	4,89
3.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(25.443.048.474,00)	-19,33	(17.696.755.828,00)	-13,44	(7.202.866.805,58)	-5,47	(18.054.225.131,02)	-13,71	(50.988.383.911,40)	-38,73
4.	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	253.337.000,80	0,19	521.847.475,00	0,40	0,00	0,00	(4.385.100.422,00)	-3,33	819.000.000,00	0,62
5.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	148.269.949.125,63	112,62	137.016.559.963,84	104,08	178.466.822.884,32	135,56	185.352.175.964,29	140,79	175.384.967.510,20	133,22
6.	Kewajiban Kepada Pihak Ke Tiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kegiatan Lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 3.9.
Defisit Rill Anggaran Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	Surplus (Defisit)	22.124.827.323	51.451.644.324	(39.561.640.339)	44.626.250.650	4.330.558.812
3.	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	148.238.459.063	139.211.227.761	169.630.153.537	130.079.638.924	134.489.386.518
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	148.238.459.063	139.211.227.761	169.630.153.537	130.079.638.924	134.489.386.518
3.1.2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	21.493.814.350	12.282.718.546	0	40.731.598.758	7.169.148.042
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	20.000.000.000	10.000.000.000	0	39.039.796.578	6.988.000.000
3.2.3	Pembayaran pokok utang	1.493.814.350	2.282.718.546	-	1.691.802.180	181.148.042
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
3.2.5	Pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu	-	-	-	-	-
3.2.6	Pengeluaran perhitungan pihak ketiga	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Neto	126.744.644.713	139.211.227.761	169.630.153.537	89.348.040.166	127.320.238.476
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	148.869.472.036	190.662.872.085	130.068.513.198	133.974.290.816	131.650.797.288

Keterangan : SiLPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Dari tabel 3.6 terlihat bahwa Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Jambi pada tahun 2013-2017 berasal dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya, secara berurutan nilainya sebesar 139,2 milyar, 169.6 milyar, 130,05 milyar, 133,9 milyar dan 131,6 milyar. Selain itu, juga berasal dari pos Penerimaan Piutang Daerah pada tahun 2014 sebesar 10,07 milyar, tahun 2016 sebesar 9,8 milyar dan tahun 2017 sebesar 12,15 milyar. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Jambi cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsungnya.

Pada tabel 3.7 di atas, dapat dilihat bahwa Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Jambi tahun 2013-2017 terbesar berasal dari pos Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya, dimana nilainya berkisar antara 137 milyar hingga 185 milyar. Sedangkan dari pos pelampauan penerimaan PAD nilainya positif pada tahun 2013, 2014 dan tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2015 dan tahun 2016 tidak mengalami pelampauan dari target PAD, hal ini dikarenakan penetapan target PAD yang jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Namun secara realisasi, persentase penerimaan PAD dari tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Selanjutnya, berdasarkan tabel 3.8 diatas pada tahun 2013 dan tahun 2014, APBD Kota Jambi mengalami surplus 22,124 milyar dan 51,451 milyar akan tetapi di tahun 2016 mengalami defisit sebesar 39,561 milyar hal ini disebabkan karena realisasi pendapatan daerah lebih kecil dari realisasi belanja daerah. Namun pada tahun 2016 dan 2017 mengalami surplus kembali sebesar 44,626 Milyar dan 4,330 Milyar.

Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu perlu dihitung dulu kemampuan riil anggaran untuk 5 tahun kedepan. Salah satu metode sederhana untuk memperkirakan kemampuan anggaran tersebut adalah fungsi forecast, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan hubungan 2 (dua) kumpulan data, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun berkenaan.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017, dilakukan proyeksi untuk memperoleh gambaran pendapatan tahun 2018-2023. Sedangkan pendapatan tahun 2018 menggunakan data APBD Perubahan Kota Jambi Tahun 2018. Pendapatan daerah Kota Jambi diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,628,500,835,180.00 pada tahun 2018 dan menjadi sebesar Rp. 1.995.369.239.000,- pada tahun 2023. Beberapa asumsi yang mendasari peningkatan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat sesuai dengan target dalam RPJMN tahun 2013-2017 berada pada angka rata-rata 5,11%
2. Rata-rata Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tahun 2013-2017 pada angka 6,66%.
3. Pendapatan pajak naik rata-rata sebesar 10,02%.
4. Pendapatan retribusi daerah naik sebesar 3,17%.
5. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik sebesar 5,07%.
6. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meningkat sebesar 13,48%.
7. Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU) 3,72%, Dana Alokasi Khusus (DAK)- 2,90% dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 5,75%.

Kebijakan dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Jambi tahun 2018-2023 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Intensifikasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan potensi yang ada.
2. Pengembangan basis data dan potensi pajak dan retribusi daerah agar valid dan *up to date*.
3. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras pada perangkat daerah penghasil, termasuk peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah.
4. Peningkatan kinerja bisnis BUMD yang ada dan mengali potensi pendapatan baru melalui pembentukan BUMD agar memberikan dampak pada peningkatan bagi hasil laba BUMD terhadap PAD.
5. Peningkatan tata kelola BLUD agar menghasilkan peningkatan pendapatan daerah sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD.
6. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.
7. Pemulihan ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid-19.

Sementara itu, dalam hal proyeksi belanja daerah didasarkan pada realisasi Belanja Daerah tahun 2013-2017. Proyeksi Belanja pada Tahun 2018-2022 masih mengacu pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 sebelum perubahan, sedangkan untuk Tahun 2023 dan masa transisi Tahun 2024 berdasarkan pada Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023. Kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah Kota Jambi sebagai berikut:

1. Belanja daerah dikelola secara tertib dan transparan berbasis akrual sesuai dengan asas efisien, efektif, dan akuntabel.
2. Belanja daerah diutamakan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama, selanjutnya belanja langsung program unggulan kepala daerah, belanja prioritas perangkat daerah, dan belanja tidak langsung di luar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.
3. Belanja langsung diarahkan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai kewenangan kabupaten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah baru dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan;

4. Pengalokasian belanja langsung didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan tolok ukur kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan pada prioritas dan target kinerja pembangunan sesuai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Jambi;
5. Belanja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku, dan tunjangan pegawai diarahkan pada peningkatan kinerja Aparat Sipil Negara (ASN).

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya. Asumsi pembiayaan yaitu SiLPA direncanakan semakin berkurang seiring dengan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, diharapkan mencapai angka nol. Kebijakan berkaitan penerimaan pembiayaan daerah Kota Jambi yaitu: dalam menetapkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, terutama hanya berasal dari sisa penghematan belanja.

Kebijakan berkaitan pengeluaran pembiayaan daerah Kota Jambi yaitu: penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan dana yang diinvestasikan/ disertakan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada maupun rencana pembentukan BUMD yang baru untuk memperkuat struktur modal dan juga memperkuat share permodalan khususnya BUMD yang kepemilikannya bersama oleh Pemerintah Kota Jambi dan Provinsi. Penyertaan modal pemerintah daerah yang dianggarkan dalam APBD didasarkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.

Tabel 3.10.
Proyeksi RPJMD dan
APBD Kota Jambi Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Uraian	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		PROYEKSI RPJMD	APBD	PROYEKSI RPJMD	APBD	PROYEKSI RPJMD	APBD
1.00	PENDAPATAN	1,628,500,835,180	1,627,977,843,445	1,660,053,885,000	1,660,053,885,000	1,745,418,018,000	1,745,507,222,930
1.01	Pendapatan Asli Daerah	335,902,135,250	328,896,647,550	364,142,193,000	364,142,193,000	418,375,472,000	403,484,193,000
1.01.01	Pajak Daerah	203,500,000,000	200,000,000,000	223,000,000,000	223,000,000,000	260,000,000,000	255,000,000,000
1.01.02	Retribusi Daerah	44,012,000,000	42,846,000,000	46,726,000,000	46,726,000,000	50,366,850,000	47,568,000,000
1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	8,850,000,000	8,500,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	9,780,000,000	10,000,000,000
1.01.04	Lain-lain PAD yang sah	79,540,135,250	77,550,647,550	85,416,193,000	85,416,193,000	98,228,622,000	90,916,193,000
1.02	Dana Perimbangan	1,125,497,214,930	1,125,550,934,000	1,134,707,598,000	1,134,707,598,000	1,144,291,970,000	1,126,863,703,930
1.02.01	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	118,890,269,930	118,943,989,000	137,956,917,000	137,956,917,000	139,000,000,000	102,028,814,930
1.02.02	Dana Alokasi Umum	714,783,378,000	714,783,378,000	757,404,051,000	757,404,051,000	764,748,606,000	763,018,217,000
1.02.03	Dana Alokasi Khusus	291,823,567,000	291,823,567,000	239,346,630,000	239,346,630,000	240,543,364,000	261,816,672,000
1.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	167,101,485,000	173,530,261,895	161,204,094,000	161,204,094,000	182,750,576,000	215,159,326,000
1.03.01	Hibah	62,534,000,000	61,845,400,000	61,845,400,000	61,845,400,000	61,845,400,000	58,911,800,000
1.03.03	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah Daerah lainnya **)	81,347,485,000	86,964,861,895	81,347,485,000	81,347,485,000	100,893,967,000	131,000,000,000
1.03.04	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	18,000,000,000	18,000,000,000	11,291,209,000	11,291,209,000	13,291,209,000	18,527,526,000
1.03.05	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	5,220,000,000	6,720,000,000	6,720,000,000	6,720,000,000	6,720,000,000	6,720,000,000

No.	Uraian	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		PROYEKSI RPJMD	APBD	PROYEKSI RPJMD	APBD	PROYEKSI RPJMD	APBD
2.00	BELANJA	1,755,151,632,467	1,671,628,127,491	1,710,612,142,885	1,710,612,142,885	2,177,900,775,000	2,212,680,342,930
2.01	Belanja Tidak Langsung	759,889,727,857	749,279,018,491	795,111,216,885	795,111,216,885	796,723,410,000	753,881,710,930
2.01.01	Belanja Pegawai	709,626,059,182	699,171,149,816	769,336,362,485	769,336,362,485	770,842,287,000	721,563,236,930
2.01.02	Belanja Bunga	0		0		3,600,000,000	1,000,000,000
2.01.04	Belanja Hibah	42,749,214,275	42,593,414,275	14,725,400,000	14,725,400,000	14,725,400,000	21,553,843,619
2.01.05	Belanja Bantuan Sosial	4,116,455,000	4,116,455,000	7,651,455,000	7,651,455,000	4,157,723,000	7,637,723,000
2.01.07	Belanja Bantuan Keuangan	1,292,132,400	1,292,132,400	1,292,132,400	1,292,132,400	1,292,133,000	100,000,000
2.01.08	Belanja tidak terduga	2,105,867,000	2,105,867,000	2,105,867,000	2,105,867,000	2,105,867,000	2,026,907,381
2.02	Belanja Langsung	995,261,904,610	922,349,109,000	915,500,926,000	915,500,926,000	1,381,177,365,000	1,458,798,632,000
2.02.01	Belanja Pegawai	70,245,532,548	80,090,602,958	64,233,008,032	64,233,008,032	65,517,669,000	64,787,962,108
2.02.02	Belanja barang dan jasa	460,107,061,790	410,408,318,737	472,736,494,365	472,736,494,365	496,330,323,000	567,399,452,976
2.02.03	Belanja Modal	464,909,310,272	431,850,187,305	378,531,423,603	378,531,423,603	819,329,373,000	826,611,216,916
	SURPLUS/(DEFISIT)	(126,650,797,287)	(43,650,284,046)	(50,558,257,885)	(50,558,257,885)	(432,482,757,000)	(467,173,120,000)
3.00	PEMBIAYAAN	126,650,797,287	43,650,284,046	50,558,257,885	50,558,257,885	432,482,757,000	467,173,120,000
3.01	Penerimaan Pembiayaan	131,650,797,287	48,650,284,046	50,558,257,885	50,558,257,885	447,482,757,000	467,173,120,000
3.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	131,650,797,287	48,650,284,046	50,558,257,885	50,558,257,885	47,482,757,000	67,173,120,000
3.01.03	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0	0	400,000,000,000	400,000,000,000
3.02	Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0	15,000,000,000	0
3.02.01	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0	15,000,000,000	0

Tabel 3.11.
APBD Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 dan 2023

No.	Uraian	APBD 2021	APBD 2022	PROYEKSI RAPBD 2023
1	PENDAPATAN DAERAH	1,655,334,439,926	1,690,837,982,885	1.419.660.132.075
1.1	Pendapatan Asli Daerah	419,564,834,233	465,887,262,838	506.699.848.172
1.1.01	Pajak Daerah	270,860,000,000	317,880,000,000	350.000.000.000
1.1.02	Retribusi Daerah	47,875,900,000	49,761,000,000	52.588.197.203
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	9,602,267,383	9,602,267,383	10.000.000.000
1.1.04	Lain-lain PAD yang sah	91,226,666,850	88,643,995,455	94.111.650.969
1.2	Pendapatan Transfer	1,175,857,805,693	1.162.863.727.047	912.960.283.903
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,060,921,226,000	1,162,863,727,047	782.995.596.000
1.2.1.01	Dana Perimbangan	1,020,401,698,000	1,049,712,354,000	782.995.596.000
1.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	89,173,247,000	1,039,327,944,000	107.706.883.000
1.2.1.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	697,632,020,000	107,706,883,000	675.288.713.000
1.2.1.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	106,961,013,000	675,288,713,000	0
1.2.1.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	126,635,418,000	57,738,124,000	0
1.2.1.02	Dana Insentif Daerah (DID)	40,519,528,000	10,384,410,000	0
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	114,936,579,693	113,151,373,047	129.964.687.902,91
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	111,216,579,693	113,151,373,047	129.964.687.902,91
1.2.2.02	Bantuan Keuangan	3,720,000,000	0	0
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	59,911,800,000	62.086.993.000	0
1.3.1	Pendapatan Hibah	59,911,800,000	62,086,993,000	0
1.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan Dalam Negeri	1,000,000,000	0	0
1.3.1.02	Pendapatan Hibah Dana Bos	58,911,800,000	62,086,993,000	0
2	BELANJA DAERAH	2,073,287,529,465	1,773,747,078,885	1.409.660.132.075
2.1	Belanja Operasi	1,321,000,163,809	1,385,937,983,167	
2.1.01	Belanja Pegawai	720,771,684,715	716,132,993,086	
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	530,384,808,867	540,444,547,923	
2.1.03	Belanja Bunga	15,000,000,000	8,000,000,000	
2.1.04	Belanja Hibah	46,846,715,377	1,259,178,000	
2.1.05	Belanja Bantuan Sosial	7,996,954,850	113,162,997,058	
2.1.06	Belanja Subsidi		6,938,267,100	
2.2	Belanja Modal	742,652,799,631	368,859,813,748	
2.2.01	Belanja Modal Tanah	9,450,000,000	9,000,000,000	
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78,264,734,577	54,400,356,213	
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	389,646,776,694	164,440,567,946	
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	253,690,354,718	129,630,403,339	
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11,600,933,642	11,388,486,250	

No.	Uraian	APBD 2021	APBD 2022	PROYEKSI RAPBD 2023
2.3	Belanja Tidak Terduga	9,634,566,025	18,949,281,970	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(417,953,089,539)	(82.909.096.000)	10.000.000.000,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	417,953,089,539	82.909.096.000	(10.000.000.000,00)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	419,953,089,539	130.409.096.000	75.000.000.000,00
3.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	34,953,089,539	75.000.000.000	75.000.000.000,00
3.1.02	Penerimaan Pinjaman Daerah	385,000,000,000	55.409.096.000	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2,000,000,000	47.500.000.000	85,000,000,000.00
3.2.01	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah ke Bank Jambi	2,000,000,000	0	10,000,000,000,00
3.2.02	Penyertaan Modal Pemkot ke Peseroda Siginjai Sakti	0	500.000.000	5,000,000,000,00
3.2.03	Pembayaran Pokok Utang atas pinjaman	0	47.000.000.000	70,000,000,000,00

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Tahapan penghitungan kerangka pendanaan didahului dengan penghitungan kapasitas riil keuangan daerah. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan. Penghitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

Selanjutnya, penggunaan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu Prioritas I untuk Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama. Prioritas II untuk Belanja Langsung untuk Program Unggulan Kepala daerah dan Program Prioritas di luar Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.

Hasil penghitungan Kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2018-2023 dan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2018-2023 tercantum pada Tabel 3.10 dan Tabel 3.11.

Tabel 3.12.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
1	Pendapatan	1.660.053.885.000	1.728.854.168.000	1.810.498.430.000	1.896.175.855.000	1.995.369.239.000
2	Pencairan dana cadangan (sesuai perda)					
3	Sisa lebih Riil Perhitungan Anggaran	50.558.257.885	40.446.607.000	32.357.286.000	25.885.829.000	20.708.664.000
	Total Penerimaan	1.710.612.142.885	1.769.300.775.000	1.842.855.716.000	1.922.061.684.000	2.016.077.903.000
	<i>Dikurangi:</i>					
4	Belanja Tidak Langsung	795.111.216.885	793.123.410.000	803.729.467.000	821.013.186.000	873.018.709.000
5	Pengeluaran Pembiayaan		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	915.500.926.000	975.177.365.000	1.038.126.249.000	1.100.048.498.000	1.142.059.194.000

Tabel 3.13.

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Jambi Tahun 2019 - 2023

NO.	URAIAN	Proyeksi				
		2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	915.500.926.000	975.177.365.000	1.038.126.249.000	1.100.048.498.000	1.142.059.194.000
	Prioritas I					
	Belanja Langsung untuk Program Unggulan Kepala Daerah	582.000.000.000	620.000.000.000	645.000.000.000	681.000.000.000	690.000.000.000
	Prioritas II					
	Belanja Langsung untuk Program Prioritas diluar Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan Belanja Prioritas I	333.500.926.000	355.177.365.000	393.126.249.000	419.048.498.000	452.059.194.000

3.3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pada bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah memberikan gambaran tentang arah dan upaya dalam pengelolaan keuangan daerah. Optimalisasi penerimaan dan pembiayaan daerah serta efisiensi dan efektifitas belanja daerah menjadi upaya prioritas dalam arah kebijakan keuangan daerah mendatang.

Selain pendanaan yang bersumber dari APBD baik yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pendanaan non APBD seperti dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan potensi yang dapat menunjang pendanaan pembangunan di Kota Jambi.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya adalah:

- 1) Penggalian dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi yang potensial;
- 2) Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan Perangkat Daerah penghasil;
- 3) Optimalisasi penggunaan Teknologi dan Sistem Infomasi untuk pengelolaan pendapatan daerah;
- 4) Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Penghasil, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
- 5) Meningkatkan penyertaan modal pada BUMD yang telah ada dan mengalokasikan anggaran pada pembentukan BUMD baru serta Perusahaan Daerah untuk peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
- 6) Meningkatkan pendayagunaan aset dan keuangan daerah;

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah :

- 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penghasilan dana bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak lainnya;
- 2) Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan;

- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi Jambi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan

Berdasarkan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut di atas, untuk dapat merealisasikan proyeksi penerimaan pendapatan daerah diperlukan strategi pencapaiannya, antara lain:

- a. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, dapat ditempuh melalui:
 - 1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
 - 2) Optimalisasi pemungutan atas pajak dan retribusi serta pengembangan sistem penagihan atas wajib pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah
 - 4) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - 5) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak, seperti pengembangan gerai/outlet, dan kerjasama dengan pihak perbankan;
 - 6) Meningkatkan penyertaan modal untuk BUMD dan mengalokasikan anggaran pada pembentukan BUMD baru dan Perusahaan Daerah guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
 - 7) Revitalisasi Perusahaan Daerah (PD) melalui berbagai upaya, antara lain: pengelolaan PD secara profesional, peningkatan sarana/prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas agar PD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik/perbankan;
 - 8) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - 9) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, terutama dengan perbankan sehingga mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah melalui layanan perbankan secara langsung;
 - 10) Mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah penghasil.

- b. Strategi pencapaian target Dana Perimbangan, dapat ditempuh melalui:
- 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak penghasilan dan Pajak lainnya yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Jambi, serta bukan pajak lainnya
 - 2) Meningkatkan akurasi data-data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan;
 - 3) Sosialisasi mengenai pungutan pajak dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - 4) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan peningkatan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak).
- c. Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dapat ditempuh melalui :
- 1) Sosialisasi mengenai pungutan pajak yang dikelola oleh provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pajak metrologi, dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - 2) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bantuan Keuangan.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efektif, efisien, proporsional, fokus, transparan dan akuntabel, terutama untuk belanja daerah yang prioritas seperti:

1. Pemenuhan alokasi anggaran untuk urusan dan bidang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelayanan dan operasional perangkat daerah
3. Penganggaran belanja kegiatan yang proporsional, rasional, efektif dan efisien berbasis program prioritas (*Money Follow Programs, Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial*) dalam rangka memenuhi janji politik dan program prioritas kepala daerah
4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan

ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial;

5. Pemenuhan alokasi belanja untuk kegiatan prioritas yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD pada saat pelaksanaan reses
6. Pemenuhan belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
7. Alokasi belanja untuk mendukung program dan kegiatan prioritas pemerintah pusat dan provinsi Jambi.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada:

1. Optimalisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
2. Pembentukan dana cadangan secara bertahap dalam mempersiapkan anggaran untuk kebutuhan pemilihan kepala daerah tahun 2024.
3. Penyertaan Modal atau Investasi Daerah kepada perusahaan daerah.
4. Dalam rangka percepatan pencapaian Visi dan Misi Kota Jambi 2018-2023 Pembangunan Infrastruktur melalui skema Pinjaman Daerah guna peningkatan perekonomian daerah, membentuk Sumber Daya Manusia yang kompetitif serta penataan kawasan untuk lingkungan yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Jambi berencana untuk mengajukan pinjaman daerah ke PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) yang digunakan untuk kegiatan: 1) RSUD H. Abdurrahman Sayoeti; 2) Pendestrian Trotoar dalam Kota Jambi; 3) Peremajaan Pipa PDAM; 4) Terminal Rawasari; 5) Kawasan Ecowisata Danau Sipin; 6) Gedung Parkir (eks Istana Anak-anak); 7) Penataan Pendestrian dan Box Utilitas Kawasan Pasar; 8) Gedung Serbaguna; dan 9) Sport Center Kota Jambi.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan *pembangunan* daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah dan *stakeholder* lainnya.

Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan melalui pendekatan aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum yang menggambarkan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya sesuai dengan Undang- Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Hal ini dimaksudkan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

1. *Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah*

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik. Upaya mengukur profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. IP ASN ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi dalam rangka pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indikator pengukuran profesionalitas ASN meliputi 4 (empat) dimensi yaitu: a) Kualifikasi 25%, b) Kompetensi 40%, c) Kinerja 30% dan d) Disiplin 5%. Posisi IP ASN Kota

Jambi pada tahun 2018 sebesar 68, yang berarti berada pada kategori 'Rendah'. Rendahnya profesionalitas ASN ini secara umum disebabkan oleh belum optimalnya dimensi kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki ASN. Upaya Pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan indeks tersebut adalah meningkatkan kualifikasi ASN (pendidikan formal/tugas belajar bagi ASN) dan kompetensi (kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural).

2. Masih Tingginya Jumlah Pelanggaran Terhadap PERDA

Persentase Penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan Walikota pada tahun awal RPJMD sebesar 82%. Tingginya angka tersebut dikarenakan belum optimalnya sosialisasi terkait perda tersebut dan ketidakpahaman serta kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat terkait perda-perda yang berlaku. Namun dalam hal tersebut pemerintah kota jambi melalui dinas-dinas terkait telah melakukan upaya yang maksimal dalam penegakan perda tersebut.

3. Belum Tercapainya respon time penanganan bencana dan penyelamatan

Respon time penanganan bencana dan penyelamatan merupakan salah satu permasalahan di kota jambi. *Respon time* (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Permasalahan ini terjadi dikarenakan kurangnya armada, posko-posko kendali kebakaran yang belum maksimal, serta masih banyak permukiman yang tidak mampu dilewati oleh armada kebakaran.

4. Adanya Potensi Konflik

Konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh pluralitas disumbang dari berbagai wilayah, termasuk Kota Jambi. Kota Jambi berpotensi mendapatkan konflik sosial secara horizontal. Potensi konflik tersebut disumbang dari perbedaan yang ada dalam masyarakat, terutama sengketa pendirian rumah ibadah.

5. Masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas

Dengan perkembangan yang terjadi khususnya di Kota Jambi salah

satunya adalah perkembangan lalu lintas. Kita tahu bahwa dengan terjadinya perkembangan lalu lintas maka pasti ada yang namanya masalah yang perlu diatasi oleh pihak siapapun yang ingin bersimpatik termasuk masyarakat dan mahasiswa secara khususnya dan secara luasnya adalah pemerintah yang terkait. Masalah yang benar - benar diperhatikan dikota besar adalah salah satunya masalah lalu lintas termasuk pada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan manusia sendiri. Hal tersebut bisa dilihat dari angka kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat setiap tahunnya. Perkembangan lalu lintas bisa menyebabkan pengaruh positif maupun negatif bagi kehidupan dilingkungan masyarakat apalagi didaerah yang sudah maju dan berkembang. Setiap tahunnya juga jumlah kendaraan terus meningkat dan tidak sedikit masyarakat yang melanggar peraturan -peraturan lalu lintas sehingga pemerintah maupun kepolisian harus semakin ketat dan tegas untuk masalah lalu lintas, hal tersebut untuk mengurangi atau menekan tingkat kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh banyak hal seperti : pengemudi kendaraan yang buruk, bus besar atau kecil yang sembarangan parkir, ketidakteratur antara transportasi yang besar dan yang kecil atau tidak sesuai dengan luas jalan, pejalan kaki yang kurang hati-hati, jalanan yang tidak layak seperti jalan yang berlubang, kerusakan kendaraan, kendaraan yang sudah tidak layak lagi pakai, pengendara yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan masih banyak lagi yang menimbulkan masalah pelanggaran lalu lintas yang telah ditentukan pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Pelanggaran lalu lintas termasuk masalah transportasi yang sangat berpengaruh terhadap pelanggaran sosial, karena dapat merugikan beberapa pihak dan kalangan yang berkaitan.

6. *Minimnya kecepatan tempuh rata - rata (pada saat tertentu)*

Permasalahan Minimnya kecepatan tempuh rata-rata (pada saat tertentu) disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan populasi, pesatnya tingkat pertumbuhan jumlah dan kepemilikan kendaraan pribadi, urbanisasi dan sistem angkutan umum yang kurang memadai. Pesatnya jumlah kendaraan pribadi yang berada di Kota Jambi terlihat dalam lima tahun terakhir pertumbuhan kendaraan roda dua berdasarkan data pada BPS Kota Jambi mencapai 28,68 persen pertahun dan roda empat 26,42 persen, sehingga menyebabkan meningkatnya volume lalu lintas. Adapun penyebab lainnya yakni dikarenakan

adanya aktivitas parkir di badan jalan. Hal tersebut mengakibatkan bekurangnya kapasitas jalan akibat mengecilnya lebar jalan dengan adanya parkir di badan jalan.

7. Rendahnya kualitas lingkungan permukiman

Persoalan permukiman merupakan masalah yang serius karena dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan yang fatal dan kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial di luar kontrol atau kemampuan pemerintah kota untuk menangani dan mengawasinya. Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya, namun masih saja banyak kita jumpai permukiman masyarakat miskin di hampir setiap sudut kota yang disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat di perkotaan. Misalnya yaitu, pendirian rumah maupun kios dagang secara liar di lahan-lahan pinggir jalan sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas yang akhirnya menimbulkan kemacetan jalanan kota. Masyarakat miskin di perkotaan itu unik dengan berbagai problematika sosialnya sehingga perlu mengupas akar masalah dan merumuskan solusi terbaik bagi kesejahteraan mereka. Dapat dijelaskan bahwa bukanlah kemauan mereka untuk menjadi sumber masalah bagi kota namun karena faktor-faktor ketidakberdayaanlah yang membuat mereka terpaksa menjadi ancaman bagi eksistensi kota yang mensejahterakan.

Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman masyarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan yang dianggap sebagai bagian kota yang mesti disingkirkan. Terbentuknya permukiman kumuh, yang sering disebut sebagai *slum area* sering dipandang potensial menimbulkan banyak masalah perkotaan.

8. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni

Rumah termasuk kebutuhan pokok di dalam urutan prioritas kebutuhan manusia/ masyarakat. Setiap bagian dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama-sama memenuhi fungsi sebenarnya sesuai kebutuhan penghuninya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/ atau memiliki/ memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman,

serasi, dan teratur. Pemerintah beranggapan bahwa masalah perumahan merupakan tanggung jawab bersama, namun kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan rumah tersebut pada hakekatnya merupakan tanggung jawab individual dalam hal ini dilaksanakan secara swadaya oleh masing-masing rumah tangga. Oleh karenanya berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam mewujudkan Rumah Layak Huni.

Pengentasan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan Nasional. Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan pengentasan kemiskinan telah dirancang dan dilaksanakan. Salah satu program adalah program Pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih dan air limbah

Pemenuhan layanan air bersih dan air limbah pada masyarakat perkotaan merupakan kebutuhan dasar yang akan berkaitan langsung kepada derajat kesehatan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong terwujudnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kompetitif. Saat ini cakupan layanan air minum Jambi baru mencapai 77% atau masih ada 23% masyarakat yang masih memanfaatkan air tanah atau sumber lainnya, sedangkan untuk layanan air limbah saat ini baru mencapai 0,39% yang mencapai akses sanitasi layak berdasarkan SNI. Hal ini tercermin dari masih banyaknya tanki septic yang digunakan masyarakat Kota Jambi tidak kedap air dan relative jarang disedot secara berkala. sedangkan untuk air minum perluasan jaringan masih terkendala dengan usia pipa asbes yang tidak mampu dialiri dengan tekanan relative tinggi untuk daerah yang jauh dan relative tinggi secara topografi (bagian selatan Kota Jambi). Untuk itu kedepan Pemerintah Kota Jambi merencanakan akselerasi perluasan layanan air limbah melalui pembangunan IPAL terpusat dan peningkatan sistem pengangkutan dan pengolahan setempat. Sedangkan untuk memperluas cakupan dan peningkatan kualitas layanan air minum pemerintah kota jambi akan berupaya melakukan peremajaan jaringan dan penguatan sistem produksi maupun distribusi.

9. Rendahnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Infrastruktur Jalan

Penanganan jalan di Kota Jambi di bagi atas dua fokus, yaitu jalan status kota dan jalan non status atau yang dikenal sebagai jalan lingkungan. Untuk kondisi jalan status kota relative dalam kondisi cukup baik yaitu mencapai 86,32%,

namun demikian kondisi ini masih memerlukan peningkatan kapasitas, disamping meningkatkan kualitas jalan dalam kondisi baik, jalan perkotaan masih memerlukan pelebaran- pelebaran untuk mengantisipasi jumlah kendaraan yang bertambah seiring kemajuan kota. Sedangkan untuk penanganan jalan lingkungan juga diperlukan mengingat perkembangan pesat beberapa pusat-pusat pemukiman dan kegiatan di Kota Jambi sebagai *trigger* sebaran pengembangan kawasan.

10. Banyaknya titik genangan/banjir di Kota Jambi

Pesatnya pembangunan Kota Jambi dalam beberapa tahun terakhir tentunya tidak hanya menimbulkan dampak positif, tetapi juga berdampak langsung pada menurunnya kemampuan drainase perkotaan menerima debit air yang masuk ke drainase yang tidak lagi terserap alami kedalam tanah akibat ruang yang terbangun. Hal ini diperparah dengan kondisi cuaca ekstrem yang mengakibatkan curah hujan lebih tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menjadi faktor penyebab terjadinya 19 titik genangan di Kota Jambi. Untuk itu kedepan Kota Jambi akan melakukan langkah-langkah penangan yang komprehensif untuk mengatasi persoalan tersebut dimulai dari peningkatan kerjasama penanganan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stake holder lainnya hingga kedalam rekayasa teknis untuk mengendalikan debit air yang ditampung dalam drainase perkotaan hingga peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang kota.

11. Belum terwujudnya harmonisasi ruang kota

Ruang Kota yang harmonis tentunya merupakan harapan dari setiap masyarakat perkotaan. Sebuah kota yang nyaman untuk ditempati, mendukung aktifitas ekonomi serta mampu menginspirasi setiap orang yang datang merupakan impian dari banyak kota di dunia. Sebelum menuju titik tersebut, tentunya kota tersebut harus terbebas dari segala macam persoalan seperti banjir, titik kemacetan, kualitas udara hingga ke persoalan batas-batas wilayah administrative yang memang merupakan persoalan yang berkaitan erat dengan penataan dan pemanfaatan ruang kota. Untuk itu diperlukan penguatan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam peningkatan kualitas perencanaan tata ruang melalui regulasi, control pemanfaatan ruang serta pengawasan terhadap pelanggaran- pelanggaran tata ruang yang melibatkan setiap lapisan aparatur

Pemerintahan.

12. Rendahnya rasio RTH publik

Tabel 4.1.
Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi Tahun 2012-2018

Uraian	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Luas Kota Jambi	17.533	17.533	17.533	17.533	17.533	17.533	17.533
Luas RTH (Ha)	1.175,40	1.193,72	1.212,05	1.272,14	1.290,47	1.609,53	1.844,47
Ratio RTH (%)	6.70	6.81	6.91	7.26	7.36	9.18	10.52

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2018.

Tingginya harga dan terbatasnya lahan merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Jambi dalam mencapai target perluasan, pengembangan dan perlindungan terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sebagaimana tergambar pada tabel di atas rasio RTH di Kota Jambi pada Tahun 2018 baru mencapai 10,52% atau seluas 1.844,47 ha. Hal ini tentunya masih jauh dari arahan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Penataan Ruang, yaitu RTH publik 20% dan Privat 10% dari luasan wilayah.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi adalah melakukan pendataan RTH publik dan privat yang terdigitasi dengan baik untuk mendapatkan data yang lebih valid dan terkini. Perluasan RTH publik direncanakan dengan terus melaksanakan “*land banking*” setiap tahunnya, untuk kepentingan prasarana dan sarana umum. Pemanfaatan lahan pekarangan, ruang terbuka pada bangunan dan lingkungan, serta lahan-lahan publik yang masih tersedia untuk meningkatkan tutupan lahan, dengan penanaman vegetasi tanaman dan pohon yang berdaun lebat dan berimplikasi pada volume tutupan lahan.

Indeks kinerja tutupan lahan sangat mempengaruhi indeks kualitas udara dan air pada kinerja lingkungan hidup Kota Jambi. Oleh karenanya, mewujudkan rasio ruang terbuka hijau dan indeks kinerja tutupan lahan akan menjadi tantangan dan permasalahan pembangunan perkotaan Kota Jambi yang berkelanjutan.

13. Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah

Penanganan sampah selama 5 Tahun terakhir mengalami peningkatan dengan asumsi volume timbulan sampah sebesar 2,5 lt/orang/hari. Volume sampah yang masuk ke TPA Talang Gulo sama dengan volume sampah terangkut, rata-rata pada Tahun 2017 sebesar 163 Ton/hari.

Tabel 4.2.
Persentase Penanganan Sampah Kota Jambi

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Sampah yang ditangani	410.260	438.520	454.148	459.891	571,222
2.	Volume Produksi Sampah	560.037	566.594	574.072	581.326	587,254
3.	Persentase Penanganan Sampah (%)	73,26	77,35	79,11	79,11	75,27
4.	Jumlah TPS	455	445	445	445	445
5.	Jumlah Daya Tampung TPS (m ³ /hari)	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
6.	Jumlah Penduduk	591.134	597.043	604.923	611.353	618,814
7.	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2022

Di dalam manajemen pengelolaan persampahan, terdapat pola perlakuan terhadap sampah yaitu dari pewadahan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan mobilisasi, pengolahan dan pemrosesan akhir. Saat ini, cakupan penanganan persampahan di Kota Jambi telah mencapai penanganan 75,27% dari keseluruhan cakupan pelayanan. Cakupan pelayanan pengelolaan persampahan tidak saja ditekankan pada penanganan, akan tetapi juga pada pengurangan sampah di titik sumber atau rumah tangga. Hingga akhir tahun 2021, perlakukan pengurangan sampah di titik sumber atau rumah tangga, dengan mendorong berfungsi secara aktif sebanyak 445 jumlah TPS.

Pemerintah Kota Jambi telah merumuskan Kebijakan Strategis Daerah Pengelolaan Persampahan, dengan meningkatkan target pengurangan sampah di tingkat rumah tangga hingga 30% pada akhir tahun 2030, serta mengoptimalkan penanganan sampah yang terpilah, modern dan berkelanjutan. Hal ini adalah pekerjaan rumah yang besar dalam mengoptimalkan pelayanan dan utilitas perkotaan di bidang persampahan. Tekanan pembangunan yang berdampak pada peningkatan luasan kawasan terbangun dan timbulan sampah, membutuhkan pengelolaan persampahan yang efektif.

Tidak saja pada pengelolaan terhadap limbah atau sampah yang bersumber dari rumah tangga, Pemerintah Kota Jambi juga mempunyai potensi permasalahan yang timbul dari timbulan limbah B3 di Kota Jambi yang terus meningkat, seiring pertumbuhan aktifitas ekonomi dan industri.

14. Menurunnya kualitas Lingkungan Hidup

Kecenderungan penurunan kualitas lingkungan hidup di Kota Jambi ditunjukkan oleh Indeks Kinerja Lingkungan Hidup yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Cukup signifikan penurunan IKLH Kota Jambi rata-rata selama 5 Tahun terakhir yaitu 0,64 poin tiap tahunnya. Penurunan kualitas air dan udara di Kota Jambi menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan kota, serta tekanannya terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Jambi. Tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup oleh pembangunan perkotaan dapat diantisipasi dengan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, sesuai kaidah tata ruang, serta komitmen penuh dari seluruh stakeholder untuk tetap melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Jambi dalam setiap aktifitas sosial, budaya dan ekonominya.

Pemerintah Kota Jambi telah berupaya merumuskan kebijakan dan implementasinya untuk tetap menjaga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Jambi. Peningkatan IKTL melalui penanaman vegetasi hijau pada median jalan, pedestrian, fasilitas publik yang telah diserahkan kepada pemerintah, dan bahkan pada ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah Kota Jambi. Akan tetapi, tekanan terhadap kualitas air dan udara tetap mendorong IKLH Kota Jambi mengalami penurunan hingga pada titik 50,31 poin, jauh di bawah batas ambang bawah (threshold index) skala nasional 66,46 poin, dalam kategori cukup.

Tabel 4.3.
Indikator Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kota Jambi
Tahun 2013 – 2017

No	Indikator Kinerja	Tahun								
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Kualitas Air	46.39	46.32	46.05	45.79	39.41	32.11	38.27	43.32	43.99
2.	Indeks Kualitas Udara	99.08	96.48	95.33	93.05	83	80.68	76.84	84.51	85.02
3.	Indeks Tutupan Lahan	n/a	25.14	26.84	27.77	27.77	39.33	44.81	44.82	49.91

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2021

Indeks Tutupan Lahan (ITL) Kota Jambi pada tahun 2021 sebesar 49,91, sehingga dapat dihitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Jambi pada tahun 2017 dan 2021 adalah sebagai berikut:

IKLH	=	(IKAx30%)	+	(IKUx30%)	+	(ITLx40%)	
IKLH 2017	=	(30,78x30%)	+	(83,00x30%)	+	(27,77x40%)	= 45,24
IKLH 2021	=	(43,99x30%)	+	(85,02x30%)	+	(49,91x40%)	= 58,67

IKLH Kota Jambi mengalami peningkatan indeks tahun 2017 ke tahun 2021 yaitu 45,24 menjadi 58,67.

15. Lemahnya tata niaga perdagangan

Permasalahan lemahnya tata niaga perdagangan disebabkan antara lain kurangnya koordinasi antar Instansi Pemerintah terkait distribusi perdagangan, pembangunan atau revitalisasi Sarana dan prasarana perdagangan sebaiknya berdasarkan SNI, kondisi saat ini Kota Jambi memiliki pasar daerah sebanyak 21 unit yang terdiri dari 7 unit pasar tradisional/rakyat dan 14 unit pasar tematik, idealnya untuk Kecamatan terdapat 1 pasar rakyat, juga belum meratanya perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam hal tera/tera ulang.

16. Belum optimalnya pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan

Kecukupan ketersediaan pangan strategis di Kota Jambi sudah cukup memadai secara kemandirian, situasi kemandirian pangan di Kota Jambi Tahun 2017 adalah: dari segi ketersediaan Energi Kota Jambi terpenuhi sebesar 2.459 kkal/kap/hari (103,9% AKE) dari angka kecukupan energi yang seharusnya dipenuhi sebesar 2.400 kkal/kap/hari; dari segi ketersediaan Protein Kota Jambi terpenuhi sebesar 63,57 gr/kap/hari (109% AKP) dari angka kecukupan protein yang seharusnya dipenuhi sebesar 63 gr/kap/hari; dari segi ketersediaan Lemak Kota Jambi terpenuhi sebesar 59,12 gr/kap/hari (124% AKL) dari angka kecukupan lemak yang seharusnya dipenuhi sebesar 47,34 gr/kap/hari, dan skor PPH 89,70.

Kendati demikian, perubahan masa tanam dan panen yang disebabkan oleh perubahan iklim dan cuaca, saat ini sangat berdampak pada kelangkaan bahan pangan pada bulan-bulan tertentu. Demikian pula perlunya kesiapan Pemerintah Kota Jambi untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pangan ini agar tidak terjadi lonjakan harga pangan (Volatile Food), yang akan berdampak pada inflasi bahan pangan.

Berkaitan dengan kualitas/keamanan pangan segar, pemerintah Kota Jambi secara rutin melakukan pengecekan sampel bahan pangan segar dan kemasan agar dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat, namun belum dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat.

Tabel 4.4.
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Kota Jambi Tahun 2020

Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram /Kapita/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kkal /Kapita	%	%AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
Padi-padian	271,5	1.141,3	51,9	53,1	0,5	26,0	26,5	25,0	25,0
Umbi-umbian	42,2	97,6	4,4	4,5	0,5	2,2	2,3	2,5	2,3
Pangan Hewani	35,0	300,5	13,7	14,0	2,0	27,3	28,0	24,0	24,0
Minyak dan Lemak	24,7	218,9	10,0	10,2	0,5	5,0	5,1	5,0	5,0
Buah/Biji Berminyak	82,2	27,9	1,3	1,3	0,5	0,6	0,6	1,0	0,6
Kacang-kacangan	21	73,2	3,3	3,4	2,0	6,7	6,8	10,0	6,8
Gula	30,9	107,3	4,9	5,0	0,5	2,4	2,5	2,5	2,5
Sayur dan Buah	317,3	108,7	4,9	5,1	5,0	24,7	25,3	30,0	25,3
Lain-lain	42,4	122,6	5,6	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total		2198,0	100,0	102,2	11,5	95	97,1	100	91,5

Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2022

Berdasarkan hasil analisis konsumsi tahun 2020, PPH Kota Jambi sudah mencapai nilai optimal, yaitu telah mencapai 91,50 dimana nilainya telah berada di atas nilai skor PPH ideal minimal 90, hal ini berarti telah beragamnya konsumsi pangan oleh masyarakat Kota Jambi dimana skornya telah melebihi skor ideal 1 selain konsumsi Buah/Biji berminyak dengan skor 0,6.

17. Rendahnya kemandirian daerah terhadap dana perimbangan

Komponen pendapatan daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen besar, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain -lain Pendapatan Daerah yang Sah. APBD Kota Jambi beberapa tahun terakhir selalu berada di atas angka 1,6 Triliun. Dari total APBD Kota Jambi, sebagian besar masih didominasi oleh Dana Perimbangan, baik itu Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Jika dilihat dari proporsi secara persentase, Dana

Perimbangan menempati perentase tertinggi diikuti oleh PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kemandirian daerah dapat dilihat dari seberapa besar daerah tersebut bisa membiayai APBD dari PAD. Beberapa tahun terakhir, rata-rata PAD Kota Jambi berkisar diantara angka 18%-26% dari total APBD Kota Jambi. Namun demikian, Pemerintah Kota Jambi selalu berkomitmen untuk meningkatkan PAD dari tahun ke tahun dengan mengupayakan intensifikasi maupun ekstensifikasi dan juga bekerjasama dengan berbagai pihak dan memanfaatkan teknologi, hal ini dapat dilihat dari target dan realiasi PAD yang selalu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

18. Rendahnya daya saing tenaga kerja

Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Hal ini secara umum disebabkan oleh beberapa hal seperti terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja dan rendahnya skill tenaga kerja, kondisi ini dapat menjadi beban bagi pemerintah Kota Jambi. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), di mana TPT merupakan persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jambi pada tahun 2021 sebesar 10.66 persen. Oleh karena itu perlu dikembangkan jenis pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan tenaga kerja, pelaksanaan *job fair* dan peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja.

19. Tingginya penduduk yang terpapar penyakit menular dan tidak menular

Secara umum derajat kesehatan masyarakat Kota Jambi telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun demikian masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu penyelesaian dan mendapat perhatian semua pemangku kepentingan antara lain: masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular, masih adanya angka kematian ibu dan anak, keterbatasan mutu tenaga kesehatan, serta penyebarannya yang kurang merata, pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya, belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan, masih ditemukannya balita gizi kurang serta baduta *stunting*. Penyelenggaraan kesehatan di Kota Jambi dikembangkan dengan mendorong promosi kesehatan

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan perorangan, optimalisasi sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi warga Kota Jambi khususnya keluarga kurang mampu, penerapan ISO pada fasilitas kesehatan, penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi kegawat darurat, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan..

20. *Belum optimalnya daya saing pendidikan*

Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah di tingkat global. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan menjadi perhatian semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Permasalahan pendidikan di Kota Jambi adalah belum optimalnya akses dan mutu pendidikan yang ditandai dengan masih rendahnya daya tampung siswa terutama ditingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri, masih banyaknya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki, belum meratanya penyebaran guru, masih rendahnya kualitas dan kuantitas guru dan masih rendahnya kualitas siswa.

Penyelenggaraan pendidikan di Kota Jambi dikembangkan untuk mendorong peningkatan daya saing global, dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berstandar nasional, mengembangkan metode dan sistem mengajar yang efektif dan berdampak pada kualitas dan pembentukan karakter siswa.

21. *Belum optimalnya peran serta perempuan di dalam pembangunan*

Perempuan adalah sumber daya manusia yang jumlahnya besar dan memiliki potensi yang tinggi dalam kaitannya sebagai subyek dan obyek pembangunan. Sebagai bagian terbesar dari sumber daya manusia, perempuan memiliki peran strategis dalam kehidupan. Peran penting tersebut tercermin dalam segala aspek kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat bahwa negara. Dalam berbagai kajian telah banyak dipaparkan bahwa perempuan adalah *agent of development* sebagai aset bangsa yang potensial, dan perannya sebagai kontributor sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa. Meskipun saat ini upaya untuk meningkatkan peran dan kualitas perempuan dalam pembangunan telah banyak dikembangkan, akan tetapi kesenjangan gender masih terjadi diberbagai lini bagi perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Persoalan paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas

hidup perempuan adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender, atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, mengacu pada kesetaraan hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan dan penilaian atas perempuan dan laki-laki dalam kehidupan maupun di tempat kerja. Berdasarkan data survey angkatan kerja nasional (sakernas) tahun 2013- 2016 jumlah angkatan kerja perempuan sebesar 46,69% atau 89.061 jiwa dari jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 213.694 jiwa. Jika ditinjau dari jumlah angkatan kerja perempuan menunjukkan belum optimalnya peran serta perempuan dalam pembangunan di Kota Jambi sehingga perlu adanya langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam mendukung pembangunan.

22. *Tingginya kasus kejahatan anak*

Masa depan anak adalah harapan dan impian yang harus diwujudkan yaitu mewujudkan impian anak Indonesia khususnya anak-anak di kota Jambi agar menjadi anak yang cerdas, berahlak mulia, aktif berpartisipasi serta memiliki jiwa nasionalisme dan semangat patriotisme yang kuat. Anak juga merupakan karunia tuhan yang maha kuasa, ini merupakan potensi kekayaan dan kesejahteraan bangsa dimasa depan, anak adalah investasi dan anak juga generasi penerus bangsa yang perlu dilindungi agar hidup, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang layak dan pewaris masa depan. Akan tetapi tindak kekerasan atau kasus kejahatan terhadap anak setiap tahunnya meningkat, baik itu dilakukan di lingkungan keluarga maupun di luar dari keluarga. Dimana berdasarkan data yang masuk dinas pemberdayaan masyarakat perempuan dan perlindungan anak dari tahun 2015 hingga 2017 terdapat 124 kasus kekerasan terhadap anak-anak. Dari kasus tersebut tidak hanya kekerasan terhadap fisik maupun psikis tapi juga kekerasan seksual dan penelantaran. Faktor dari pemicu dari kekerasan anak diantaranya faktor ekonomi, teknologi informasi dan pergaulan lingkungan yang baik. Melihat dari kasus tersebut perlu dilakukan langkah-langkah percepatan dalam upaya sosialisasi yang efektif guna dapat menurunkan kasus kejahatan terhadap anak-anak.

23. *Belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan*

Pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, hal ini lebih menegaskan perhatian pemerintah

terhadap pemuda, inti dari undang-undang tersebut adalah untuk pengembangan dan pemberdayaan pemuda oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah disegala bidang.

Namun minat pemuda dikota jambi masih rendah terhadap pengembangan bidang kewirausahaan, Terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat memfasilitasi pemuda untuk berpartisipasi dalam pengembangan kepemudaan dan olahraga ataupun belum optimalnya fasilitas untuk pemuda menuangkan kreatifitasnya.

24. *Tingginya Angka Penyandang PMKS*

Sesuai dengan amanat UU nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya melalui jaminan sosial dan perlindungan sosial. Jaminan sosial bertujuan menjamin PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Didalam PMKS sendiri terdapat 26 indikator yang harus ditangani, namun dapat disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut. Untuk kota jambi sendiri terdapat 23 indikator dari 26 indikator yang ada, dilihat secara trend selama 3 (tiga) tahun PMKS kota jambi menunjukkan peningkatan diantaranya: anak terlantar meningkat sebesar 25,4%, anak nakal yang berhadapan dengan hukum meningkat sebesar 200%, tuna susila juga meningkat dari tahun 2015 hingga 2017 sebesar 131,4%. Jika ditinjau dari aspek penyelenggaraan pemerintah bahwasanya program dan kegiatan terutama pada PMKS belum optimal sehingga ini menjadi tugas dari pemerintah Kota Jambi untuk dapat menyusun langkah-langkah dan strategi dalam upaya menurunkan anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

No	JENIS PMKS	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Anak balita Terlantar	-	-	-
2	Anak Terlantar	165	180	207
3	Anak Nakal yang Berhadapan dengan Hukum	17	25	51
4	Anak Jalanan	52	18	51
5	Anak dengan Kedisabilitasan	506	506	506
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	-	39	46
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	-	-
8	Lanjut usia terlantar	8.001	8.246	8.462
9	Penyandang disabilitas	1.558	1.841	1.533
10	Tuna susila	270	110	625
11	Gelandangan	196	141	161
12	Pengemis	28	28	79

No	JENIS PMKS	TAHUN		
		2015	2016	2017
13	Pemulung	-	-	55
14	Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan	-	-	54
15	Orang dengan HIV/AIDS (OOHA)	395	395	395
16	Korban penyalahgunaan napza	110	450	395
17	Korban trafficking	-	1	-
18	Korban tindak kekerasan	-	20	21
19	Korban bencana alam	1.209	672	1.487
20	Korban bencana sosial	116	120	258
21	Perempuan rawan sosial ekonomi	102	150	45
22	Fakir miskin	31.707	31.707	26.751
23	Keluarga bermasalah sosial psikologis	6.423	8.906	8.564
	Jumlah	50.555	53.555	49.757

Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi, 2018

Sementara itu perlindungan sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar keberlangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal. Tahun 2017 ditetapkan sebanyak 31.707 orang PMKS memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar, untuk mencapai target tersebut dilaksanakan kegiatan peningkatan dan pembinaan pelayanan PMKS yang didalamnya terdiri dari rangkaian sub kegiatan pelayanan pemberdayaan lanjut usia. Dari target yang ditetapkan baru dapat direalisasikan sebesar 26.751 orang PMKS (84,4%). Disamping itu selain memberikan bantuan kebutuhan dasar Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini dinas sosial juga memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti pelatihan kuliner dan bantuan bagi kelompok usaha bersama (KUBE), dll, sesuai dengan ketrampilan masing-masing. Berdasarkan data jumlah populasi penanganan PMKS meningkat 4.340 atau 69,8% dari tahun 2013 sebesar 6.229 orang menjadi 10.569 orang pada tahun 2017, sementara jumlah PMKS yang ditangani hanya sebesar 70% dari tahun 2013 hingga 2017. Kenaikan terjadi pada tahun 2017 yang mencapai 80%. Salah satu tidak tercapainya target penanganan ialah keterbatasan anggaran dan tinggi partisipasi masyarakat PMKS yang ingin mendapatkan kegiatan tersebut.

25. *Optimalisasi Penanganan dan pencegahan penularan Pandemi Covid-19*

Dalam 2 tahun terakhir ini Pemerintah Kota Jambi telah melakukan secara maksimal dalam penanganan dan pencegahan Pandemi covid-19 namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat beberapa masalah yang ditemui, masalah tersebut antara lain: masih kurangnya ruang pelayanan khusus untuk pasien

Covid 19, terbatasnya tenaga kesehatan dan sarana parasana dalam penanganan pasien.

26. Pemulihan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19

Dalam pola dan kondisi normal, kebijakan ekonomi daerah di Kota Jambi untuk tahun 2020 dan 2021 diarahkan dalam rangka pencapaian daya saing daerah yang tangguh. Pencapaian daya saing daerah yang tangguh dimaknai sebagai upaya meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yang kemudian mempunyai dampak *multiplier* terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan implementasinya di prioritaskan melalui pengembangan produk unggulan lokal Kota Jambi yang komparatif dan kompetitif. Berbasis pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir (2015-2019), bahkan tahun 2019 mampu tumbuh 7,79 persen, sehingga diperkirakan ekonomi Kota Jambi akan tumbuh sekitar 8,8 persen tahun 2020 dan 2021 di proyeksi menjadi 9,02 persen.

Akan tetapi persoalan Pandemi Covid 19 telah membuat perubahan dalam perekonomian Kota Jambi, sehingga beberapa sektor unggulan di Kota Jambi tidak bergerak dengan baik terutama sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; pengadaan listrik dan gas dan industri pengolahan, kemudian sektor informal yang masih menjadi motor penggerak perekonomian menjadi tidak berjalan, karena semakin diperketatnya kebijakan social dan physical distancing. Apalagi jika Kota Jambi ditetapkan sebagai wilayah PSBB dan zona merah; dan semakin menurunnya permintaan konsumen luar wilayah Jambi terhadap produk Jambi. Hal tersebut berdampak kepada meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Jambi.

NO	URUSAN	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	OPD
1.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas daya saing siswa; 2. Rendahnya daya tampung sekolah; 3. Rendahnya kualitas lulusan yang dapat diterima di SMA favorit; 4. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan; 5. Rendahnya kompetensi tenaga pendidik; 6. Tidak optimalnya penerapan Kurikulum K13; 7. Distribusi tenaga pendidik tidak merata. 	Belum optimalnya daya saing pendidikan	DISDIK
2.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat; 2. Tingginya penduduk yang terpapar penyakit menular; 3. Rendahnya sapsras pelayanan kesehatan dasar; 4. Rendahnya kualitas tenaga kesehatan; 5. Masih kurangnya Alat kesehatan; 6. Tingginya Masyarakat dengan pola hidup tidak sehat. 	Tingginya penduduk yang terpapar penyakit menular dan tidak menular	DINKES
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya titik genangan dan banjir di Kota Jambi; 2. Tingginya alih fungsi retensi alami; 3. Belum terintegrasinya sistem jaringan drainase; 4. Rendahnya pengawasan dan perlindungan sumber daya air; 5. Masih tingginya sedimentasi pada saluran; 6. Banyaknya timbulan sampah yang menyumbat drainase; 7. Banyaknya timbunan sampah di pinggir jalan dan lingkungan 8. Pengolahan sampah yang tidak terpadu 9. Belum meratanya pembangunan saluran drainase; 10. Ketidaksesuaian dimensi drainase dengan debit air; 11. Belum adanya regulasi yang mengatur secara mendetail (RDTR); 12. Lemahnya pengawasan pembangunan bangunan; 13. Masih banyaknya bangunan liar dan tidak sesuai spesifikasi; 14. Terjadinya degradasi kawasan strategis; 15. Kurangnya penataan dan perlindungan bangunan dan kawasan cagar budaya; 16. Kurang representatifnya estetika kota; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih dan air limbah; 2. Rendahnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Infrastruktur Jalan; 3. Banyaknya titik genangan/banjir di Kota Jambi; 4. Belum terwujudnya harmonisasi ruang kota; 5. Rendahnya rasio RTH public; 6. Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah; 7. Masih banyaknya bangunan liar dan tidak sesuai spesifikasi. 	DPUPR

NO	URUSAN	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	OPD
		17. Banyaknya bangunan yang tidak memiliki Serti?kat Layak Fungsi (SLF); 18. masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih; 19. Rendahnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Infrastruktur dan Keselamatan Jalan.		
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Rendahnya kualitas lingkungan permukiman; 2. Tingginya luasan kawasan kumuh; 3. Tingginya backlog perumahan; 4. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan permukiman; 5. Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap rumah layak huni; 6. Aksesibilitas Permukiman; 7. Banyaknya masyarakat yang tidak terlayani Fasum dan Fasos; 8. Masih banyak Fasum dan Fasos perumahan yang belum diserahkan; 9. Tingginya biaya pemakaman; 10. Masih banyaknya wilayah yang belum terlayani LPJU.	1. Rendahnya kualitas lingkungan permukiman; 2. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni.	DPRKP
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1. Rendahnya kenyamanan serta perlindungan masyarakat; 2. Lemahnya penegakan PERDA; 3. Rendahnya respon time penanganan bencana; 4. Kurangnya Jumlah Pejabat PPNS; 5. Masih minimnya sarana dan prasarana Satpol PP; 6. Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam Mematuhi Perda; 7. Kurangnya pemahaman masyarakat akan bahaya kebakaran; 8. Minimnya sarana dan prasarana kebakaran di kecamatan.	1. Lemahnya penegakan PERDA; 2. Rendahnya <i>respon time</i> penanganan bencana; 3. Masih banyaknya kasus pelanggaran PERDA yang tidak memiliki ketetapan hukum (INKRACHT); 4. Tingginya potensi konflik.	SATPOL PP, DISDAMKAR DAN KESBANGPOL
6.	Sosial	1. Tingginya Angka Penyandang PMKS; 2. Rendahnya keterampilan penduduk miskin; 3. Masih ditemuinya pengemis di jalan-jalan protokol; 4. Minimnya fasilitas bagi kaum lansia; 5. Tingginya penyalahgunaan Napza;	Tingginya Angka Penyandang PMKS	DINSOS

NO	URUSAN	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	OPD
		6. Tingginya penduduk dibawah garis kemiskinan; 7. Tingginya kasus human trafficking.		
7.	Tenaga Kerja	1. Rendahnya daya saing tenaga kerja; 2. Rendahnya kualitas tenaga kerja; 3. Tingginya angka pengangguran; 4. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja; 5. Belum optimalnya penyelesaian Konflik terhadap ketenagakerjaan; 6. Kurangnya tenaga pengawasan ketenagakerjaan; 7. Rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal.	Rendahnya daya saing tenaga kerja	DTKK
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Belum optimalnya peran serta perempuan di dalam pembangunan; 2. Tingginya angka ketimpangan gender; 3. Tingginya kasus kejahatan anak; 4. Rendahnya rasio pada tenaga kerja perempuan pada lapangan kerja; 5. Tingginya jumlah kejahatan perempuan; 6. Tingginya angka perceraian; 7. Tingginya kekerasan dalam rumah tangga; 8. Tingginya jumlah kejahatan anak; 9. Tingginya kasus pelecehan seksual terhadap anak.	1. Belum optimalnya peran serta perempuan di dalam pembangunan; 2. Tingginya kasus kejahatan anak.	DPMPA
9.	Pangan	1. Belum optimalnya ketahanan dan keamanan pangan; 2. Minimnya ketahanan pangan; 3. Rendahnya keamanan pangan; 4. Rendahnya diversifikasi pangan; 5. Banyaknya bahan pangan dalam kategori berbahaya; 6. Tidak adanya data bahan pangan layak dan aman dikonsumsi; 7. Rendahnya sarana dan prasarana keamanan pangan.	Belum optimal pola pangan harapan di Kota Jambi	DPKP
10.	Pertanahan	Banyaknya asset memiliki sertifikat pemda yang belum	Banyaknya aset pemda yang belum memiliki sertifikat	SETDA BAGIAN PEMERINTAHAN
11.	Lingkungan Hidup	1. Menurunnya kualitas Lingkungan Hidup; 2. Pembangunan tidak berwawasan lingkungan;	1. Menurunnya kualitas Lingkungan Hidup	DLH

NO	URUSAN	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	OPD
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Tingginya pencemaran air; 4. Tingginya angka pencemaran limbah B3; 5. Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah; 6. Belum optimalnya dokumen perencanaan lingkungan hidup; 7. Kebijakan strategis dan kebijakan spasial tidak disertai dukungan KLHS; 8. Tingginya tingkat polusi (tanah, air dan udara); 9. Banyaknya limbah rumah tangga dan pelaku usaha dibuang ke saluran drainase; 10. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat serta pelaku usaha terhadap pengelolaan limbah; 11. Belum optimalnya pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat; 12. Masih kurangnya SDM yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup; 13. Kurangnya sapras untuk pengurangan dan pengelolaan sampah; 14. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah; 15. Rendahnya pengelolaan sampah ditingkat sumber. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah 	
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya jumlah penduduk diluar Kota Jambi yang tidak tercatat; 2. Belum adanya informasi kependudukan secara terbuka. 	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	DKPS
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan; 2. Belum optimalnya pembinaan kelembagaan swadaya masyarakat; 3. Belum optimalnya pengumpulan dan analisis data & informasi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan. 	Belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan	DPMPPA DAN KECAMATAN
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya laju pertumbuhan penduduk; 2. Tingginya TFR. 	Tingginya laju pertumbuhan penduduk	DPPKB

NO	URUSAN	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	OPD
15.	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas; Banyaknya kendaraan parkir dibadan jalan; Kurangnya lahan parkir; Belum adanya angkutan moda massal yang representatif; Rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam berkendara; Masih kurangnya sarana dan prasarana keselamatan jalan. 	<ol style="list-style-type: none"> Masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas; Minimnya kecepatan tempuh rata - rata (pada saat tertentu). 	DISHUB
16.	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> Lemahnya implementasi <i>smart city</i> dan <i>e-government</i>; Belum optimalnya pembentukan dan pengembangan jaringan kerjasama komunikasi dan informasi untuk mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat; Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data elektronik; Minimnya Sarana dan Prasarana TIK; Rendahnya jaringan internet di kantor pemerintahan; Rendahnya integrasi aplikasi pemerintahan; Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM; Belum adanya peraturan pendukung <i>smart city</i>. 	Belum optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	DISKOMINFO
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> Rendahnya manajemen koperasi; Rendahnya pengembangan koperasi; Rendahnya akses Koperasi terhadap sumber- sumber permodalan; Rendahnya kualitas SDM Koperasi; Rendahnya minat terhadap produk lokal; Rendahnya akses UMKM terhadap sumber- sumber permodalan; Rendahnya ketersediaan produk lokal di pasaran; Rendahnya kualitas SDM Koperasi dan UMKM; Rendahnya Kualitas Produk UMKM; Minimnya UMKM yang berdaya saing. 	<ol style="list-style-type: none"> Rendahnya manajemen koperasi; Rendahnya daya saing lokal 	DTKK DAN DPP
18.	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya iklim investasi; Rendahnya minat investor untuk menanamkan modal; 	Rendahnya kemandirian daerah terhadap dana perimbangan	DPMPSTP

NO	URUSAN	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	OPD
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Belum optimalnya pelaksanaan promosi dan kerjasama penanaman modal; 4. Rendahnya kepastian hukum dalam berinvestasi; 5. Belum optimalnya pengawasan terhadap penanaman modal; 6. Belum optimalnya kerjasama pemerintah dan badan usaha; 7. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan; 8. Belum tersedianya data dan sistem informasi; 		
19.	Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan; 2. Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan; 3. Minimnya prestasi olahraga dikancah nasional; 4. rendahnya kepedulian pemuda dalam pembangunan; 5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan; 6. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan; 7. Masih rendahnya minat generasi muda ikut dalam kepramukaan. 	Belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan	DISPORA
20.	Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data dalam pembangunan; 2. Rendahnya ketersediaan dan validitas data; 3. Kurangnya ketersediaan data pendukung ; 4. Belum tersedianya basis data yang valid dan <i>update</i>. 	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data dalam pembangunan	DISKOMINFO
21.	Persandian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya pengamanan data dan informasi daerah; 2. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang persandian; 3. Masih banyaknya aplikasi informasi yang belum tersandikan. 	Lemahnya pengamanan data dan informasi daerah	DISKOMINFO
22.	Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya degradasi terhadap nilai - nilai seni dan budaya; 2. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana bidang kebudayaan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan kebudayaan; 3. Belum optimalnya pelestarian terhadap seni dan budaya daerah; 	Tingginya degradasi terhadap nilai-nilai seni dan budaya	DPK

NO	URUSAN	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	OPD
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Belum optimalnya pelestarian terhadap sejarah daerah; 5. Rendahnya pemahaman siswa terhadap kearifan lokal; 6. Semakin tergerus kearifan lokal dan nilai- nilai sejarah; 7. Minimnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Sejarah Jambi; 8. Rendahnya Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan; 9. Rendahnya minat masyarakat terhadap museum daerah. 		
23.	Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya literasi masyarakat; 2. Rendahnya minat baca masyarakat; 3. Rendahnya budaya dan minat baca (pendidikan karakter); 4. Pergeseran paradigma dan budaya baca kearah digital; 5. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah. 	Belum optimalnya daya saing pendidikan	DPK
24.	Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengelolaan arsip pemerintah; 2. Belum optimalnya pembinaan kearsipan terhadap SDM kearsipan; 3. Belum memadainya sarana prasarana kearsipan pada setiap Perangkat Daerah ditunjukkan persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif. 	Belum optimalnya pengelolaan arsip	DKP
25.	Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya daya saing produk perikanan; 2. Rendahnya produktivitas perikanan; 3. Rendahnya kualitas lingkungan perairan; 4. Menurunnya biodiversitas spesies perikanan; 5. Belum optimalnya penggunaan teknologi perikanan. 	Belum optimalnya pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan	DKPP
26.	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kunjungan wisata melalui dan ke Kota Jambi; 2. Rendahnya pembinaan, koordinasi dan sinergi antar stakeholders kepariwisataan; 3. Rendahnya aktivitas kepariwisataan; 4. Rendahnya kreativitas dalam pengelolaan kepariwisataan; 5. Belum adanya pemanfaatan HAKI dalam pengembangan ekonomi kreatif; 6. Belum terpetanya potensi sumber daya pariwisata; 7. Minimnya sarana dan prasarana kepariwisataan. 	Rendahnya pembinaan, koordinasi dan sinergi antar stakeholders kepariwisataan	DPK
27.	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengelolaan hewan peliharaan; 	Belum optimalnya pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan	DKPP

NO	URUSAN	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	OPD
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Minimnya keamanan daging konsumsi secara Aman, Sehat, Unggul dan Halal; 3. Minimnya sarana dan prasarana RPH sesuai SNI; 4. Rendahnya pemeriksaan terhadap kesmavet. 		
28.	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas pengelolaan sarana prasarana perdagangan; 2. Tingginya Biaya Logistik; 3. Tingginya fluktuasi harga; 4. Tidak adanya data surplus dan defisit; 5. Tingginya oligopoli komoditi; 6. Belum optimalnya informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah; 7. Rendahnya transaksi di pasar induk dan rakyat; 8. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap pedagang; 9. Minimnya pasar rakyat sesuai SNI; 10. Tingginya tingkat kecurangan transaksi pasar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya tata niaga perdagangan; 2. Masih lemahnya manajemen perpasaran. 	DPP
29.	Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pembinaan pemerintah terhadap industri kecil dan menengah; 2. Rendahnya ketersediaan bahan baku di pasaran; 3. Rendahnya Kualitas Produk Industri yang dihasilkan; 4. Rendahnya daya saing produk industri IKM; 5. Rendahnya kemampuan IKM dalam manajemen, akses permodalan dan penggunaan IT. 	Rendahnya daya saing produk industri IKM	DPP
30.	Perencanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal, disebabkan kurangnya kapasitas SDM perencana; 2. Banyaknya amanat pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan multisektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah; 3. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; 	Belum optimalnya perumusan kebijakan dalam proses pembangunan	BAPPEDA

NO	URUSAN	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	OPD
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas; 5. Belum maksimalnya fungsi monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan yang telah dilaksanakan; 6. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan sistem keuangan. 		
31.	Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah terlihat dari persentase besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD; 2. Belum optimalnya Tertib dan akuntabilitas keuangan daerah; 3. Rendahnya kemandirian daerah terhadap dana perimbangan; 4. Belum optimalnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis acrual; 5. Belum optimalnya pendapatan daerah; 6. Belum terintegrasinya sistem keuangan dengan perencanaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kemandirian daerah terhadap dana perimbangan; 2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah. 	BPKAD DAN BPPRD
32.	Penelitian dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih minimnya produk penelitian yang mendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan; 2. Masih minimnya produk penelitian yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan; 3. Masih minimnya kegiatan pengembangan yang mendukung inovasi produk-produk kreatif dalam rangka pengembangan perekonomian. 	Belum optimalnya produk penelitian didalam perumusan kebijakan	BAPPEDA
33.	Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya reformasi birokrasi; 2. Masih belum optimalnya pembinaan disiplin dan terdapat ASN yang tidak disiplin di setiap unit kerja PD; 3. Belum optimalnya kompetensi ASN yang sesuai dengan unit kerja Perangkat Daerah; 4. Jumlah ASN yang pensiun lebih besar daripada pengangkatan ASN baru, terutama memenuhi kebutuhan 	Belum optimalnya kompetensi ASN yang sesuai dengan unit kerja Perangkat Daerah	BKPSDMD

NO	URUSAN	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	OPD
		tenaga teknis, tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga fungsional tertentu.		
34.	Sekretariat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya PD yang mampu menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang dihasilkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; Masih rendahnya produk hukum daerah yang tersosialisasikan; Masih belum optimalnya capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan publik. 	Belum Optimalnya Akuntabilitas Pemerintahan	SETDA
35.	Sekretariat Dewan	<ol style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM; Belum optimalnya kinerja pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD. 	Belum optimalnya	SEKRETARIAT DEWAN
36.	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> Rendahnya pengawasan dan pengendalian tata kelola pemerintahan; Masih rendahnya capaian penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi; Masih rendahnya level kapabilitas APiP. 	Belum optimalnya Sinergitas penyelenggaraan pemerintah daerah	INSPEKTORAT

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah maka perlu memperhatikan isu strategis kota, provinsi, nasional bahkan dunia internasional dalam proses perumusannya.

Fungsi keselarasan dan keterlibatan nasional dan provinsi ialah untuk menjelaskan permasalahan dan isu nasional dan provinsi yang ada di daerah, maupun sebaliknya untuk memberikan masukan permasalahan dan isu yang ada di daerah kepada provinsi. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional.

Berdasarkan permasalahan yang perlu penanganan prioritas dan memperhatikan isu strategis di provinsi, nasional serta internasional, maka isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Jambi 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar

Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar menjadi isu strategis yang dititikberatkan pada kondisi kualitas hidup masyarakat terutama pada isu - isu yang menyangkut urusan pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta keterampilan dan keahlian tenaga kerja. Hal ini disebabkan masih belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), baik indeks pendidikan maupun indeks kesehatan, masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, belum optimalnya capaian angka harapan hidup, masih cukup tingginya angka kematian ibu dan bayi dan masih ditemukannya kasus balita gizi buruk, belum optimalnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, belum optimalnya pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan, dan belum optimalnya pelayanan

KB yang menyebabkan angka kelahiran total masih belum optimal, serta masih belum optimalnya penanganan PMKS terutama yang berada diluar panti.

2. Penanggulangan kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan masih menjadi isu strategis yang perlu segera ditangani dan mendapat perhatian khusus. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja.

3. Infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup

Infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup merupakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian. Hal ini ditandai dengan masih luasnya kawasan permukiman kumuh, masih banyaknya rumah tidak layak huni, belum optimalnya capaian rumah tangga bersanitasi seperti kurangnya ketersediaan layanan air minum perpipaan, pengelolaan limbah, dan penanganan sampah, terbatasnya ruang terbuka hijau dan ruang-ruang publik/taman-taman kota, masih terdapat genangan air saat musim hujan, belum optimalnya penataan trotoar dan jaringan drainase, menurunnya kapasitas badan air penerima limpasan air hujan, masih terbatasnya ketersediaan fasilitas pendukung lalu lintas, belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas, dan belum optimalnya cakupan layanan angkutan umum.

4. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat

Pertumbuhan dan pemerataan perekonomian serta daya beli masyarakat menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan prioritas. Hal ini ditandai dengan masih kurang optimalnya kontribusi kategori unggulan terhadap pertumbuhan PDRB, masih rendahnya PDRB per kapita dan daya beli masyarakat dan masih tingginya kontribusi bahan makanan terhadap laju inflasi, masih tingginya rasio gini atau kesenjangan pendapatan masyarakat, belum optimalnya nilai investasi daerah dan kunjungan wisatawan yang masuk, kurangnya jumlah pelaku wirausaha, kurangnya daya saing dan kemandirian para pelaku usaha mikro dan kecil, pemasaran dan akses terhadap permodalan, serta belum memadainya sarana dan prasarana perdagangan. Hal ini ditambah lagi dengan dampak pandemi covid 19, yang tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi ini membawa efek yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan terjadinya resesi yang menyebabkan ekonomi menjadi lesu, hal ini berdampak pada daya beli masyarakat melemah, penghasilan merosot, rendahnya tingkat konsumsi,

investasi tidak bergairah, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

5. Tata nilai kehidupan masyarakat dan kebudayaan daerah

Tata nilai kehidupan masyarakat yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam beragama, moral, akhlak, karakter dan kearifan lokal menjadi isu strategis yang menjadi prioritas, hal ini disebabkan dengan masih rendahnya implementasi perda tata nilai kehidupan masyarakat yang religius, menurunnya moral, akhlak dan karakter masyarakat, rentannya kehidupan masyarakat akan konflik, toleransi beragama, berbangsa dan bernegara, masih adanya pelanggaran dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, masih terbatasnya sarana dan prasarana seni dan budaya, belum optimalnya pembinaan, apresiasi dan pelestarian terhadap seni dan budaya.

6. Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga

Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga menjadi isu strategis yang mendapat perhatian. Hal ini ditandai dengan belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender, masih cukup tingginya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, belum optimal dan memadainya perlindungan dan ketersediaan sarana prasarana publik yang ramah perempuan dan anak, serta optimalisasi pengendalian penduduk

7. Tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berbasis teknologi informasi

Tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel menjadi isu strategis, yang ditandai oleh masih kurangnya tingkat disiplin pegawai, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah dan kinerja aparatur, belum optimalnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas instansi pemerintah, masih terdapat beberapa gedung kantor perangkat daerah yang belum representatif, masih belum optimalnya implementasi e-government pada seluruh perangkat daerah dan pelayanan publik.

BAB V VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

Mengacu kepada visi misi serta program prioritas yang dikampanyekan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2018-2023 dan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran untuk Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018 -2023 sebagai berikut:

5.1. Visi

Visi dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2018-2023 adalah :

“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”

Visi tersebut mengandung makna:

- Pusat Perdagangan dan Jasa : berarti pemusatan/konsentrasi distribusi barang dan jasa skala pelayanan lokal dan regional yang didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda;
- Berbasis Masyarakat : *community based* merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan;

- Berakhlak : berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;
- Berbudaya : memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;
- Pelayanan Prima : upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

5.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

Misi ke-1 : Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi

Untuk menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, Pemerintah Kota Jambi menetapkan sasaran pokok penguatan tata kelola dan birokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat meningkat secara maksimal. Pelayanan yang berkualitas diberikan oleh pemerintah dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif dan efisien yang

berbasis teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat agar dapat mengakses seluruh layanan yang diberikan pemerintah secara cepat, tepat dan aman.

Misi ke-2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat

Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban serta kenyamanan bermasyarakat. Penegakan hukum yang dimaksud pada misi ke-2 memiliki tujuan menegakkan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan atau Peraturan Daerah (PERDA). Sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman dalam melakukan aktivitas. Selain itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terutama dalam upaya kewaspadaan dini.

Misi ke-3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan

Pencapaian misi ke-3 merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan sebab Pemerintah Kota Jambi telah memiliki target untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan sehingga konektivitas dan pemerataan pembangunan dapat tercapai. Selain itu, sesuai dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), lingkungan merupakan salah satu isu vital dalam pembangunan, maka Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi ke-4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perkotaan diarahkan pada perekonomian inklusif, terutama pada sektor perdagangan dan jasa, khususnya penguatan UMKM dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan serta peluang kerja.

Misi ke-5 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

Kehidupan masyarakat Kota Jambi tercermin dari akses Pendidikan yang berkualitas dengan memberikan perhatian lebih pada siswa tidak mampu. Dan meningkatnya pelayanan kesehatan terutama para ibu, anak, remaja dan lansia. Kualitas Pendidikan dan kesehatan yang tinggi diharapkan akan berdampak pada penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Misi ke-1 : Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi

Pada Misi ke-1, terdapat 1 (satu) tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi yang meningkat dari tahun ke tahun, dengan upaya yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut melalui beberapa sasaran yaitu ;

Sasaran 1 : Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK

Misi ke-2 : Penguatan Penegakan Hukum, Tramtibmas dan Kenyamanan Masyarakat

Pada Misi ke-2, terdapat 2 (dua) tujuan yaitu: (1) Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat: yang dapat diukur dari 2 (dua) indikator ialah (1) Persentase Peningkatan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan (2) Penanganan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan serta tujuan ke-2 Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman yang dapat dilihat melalui indikator tujuan Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan dengan sasaran:

- Sasaran 1 : Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan.
- Sasaran 2 : Cakupan pelayanan pemadam kebakaran.
- Sasaran 3 : Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila.
- Sasaran 4 : Persentase orkemas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat.

Misi ke-3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan

Pada Misi ke-3, terdapat 1 (satu) tujuan yaitu: Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutanyang dilihat dari indikator tujuan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Dengan sasarannya yaitu:

- Sasaran 1 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan.
- Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni.
- Sasaran 3 : Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan.
- Sasaran 4 : Penurunan Luasan Kawasan Genangan.
- Sasaran 5 : Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Misi ke-4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan

Pada misi ke-4, terdapat 1 (satu) tujuan yaitu Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi yang diukur Laju Pertumbuhan Ekonomi yang akan dilihat dengan sasaran, yaitu:

- Sasaran 1 : Pengendalian Laju Inflasi Kota Jambi.
- Sasaran 2 : Meningkatnya Ketahanan Pangan.
- Sasaran 3 : Meningkatkan Aktivitas Pariwisata.
- Sasaran 4 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Sasaran 5 : Meningkatkan Realisasi Investasi.
- Sasaran 6 : Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka.
- Sasaran 7 : Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil

Misi ke-5 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

Pada Misi ke-5, terdapat 1 (satu) tujuan yaitu terwu Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing yang akan ditandai dengan peningkatan(1) Indeks Pembangunan Manusia, (2) Indeks Pembangunan Gender, (3) Kriteria Kota Layak Anak, (4) Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, (5) Persentase Penduduk Miskin, dengan pencapaian beberapa sasaran yang mendukung misi tersebut antara lain:

- Sasaran 1 : Meningkatkan Derajat Kesehatan;
- Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan;
- Sasaran 3 : Mengendalikan Angka Kelahiran Penduduk;
- Sasaran 4 : Meningkatkan Kesetaraan Gender;
- Sasaran 5 : Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak;
- Sasaran 6 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
- Sasaran 7 : Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan;
- Sasaran 8 : Menurunkan Angka PMKS.

Tabel 5.1.

Visi Misi dan Perubahan Tujuan, Sasaran serta Indikator Jangka Menengah Kota Jambi (Sebelum Perubahan)

VISI : MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,33	2,44	2,55	2,66	2,77	2,33	2,44	
					Indeks Profesionalitas ASN	55	56	57,5	59	60,5	62	62	
					Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB	A	A	
					Indeks survey persepsi Korupsi		3,65	3,69	3,73	3,75	3,8	3,8	
					Indeks Kepuasan Masyarakat	85,28	85,5%	86%	87%	87,5%	88,5%	88,5%	
2	Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan Walikota	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	82%	82%	80%	75%	66%	60%	60%	
			Penurunan Jumlah kasus atau pelanggaran per tahun	meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman	Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
			Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
3	Penguatan Pengelolaan Infrastruktur	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatkan layanan infrastruktur dan Utilitas perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	50,59%	53,07%	60,77%	70,61%	78,25%	85,79%	85,79%	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	32,11	37,75	38,30	38,50	38,65	38,75	38,75
					Indeks Kualitas Udara	80,68	80,70	80,72	80,74	80,76	80,78	80,78
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	39,33	41,30	41,70	42,00	42,30	42,50	42,50
4	Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	20	36	52	68	84	100	100
				Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	90,2	90,5	91	91,5	92	92,5	92,5
				Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,36%	2,37%	2,38%	2,39%	2,40%	2,41%	2,41%
				Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4%	8%	9%	9%	9%	9%	9%
				Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	410 M	430,5 M	430,5 M	474,62 M	498,35 M	523,37 M	523,37 M
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,96%	65%	65,25%	65,50%	65,75%	66%	66%
				Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7,61%	8,08%	8,54%	9,01%	9,47%	9,94%	10,00%
					Persentase Daya Saing Produk IKM	4,3	4,3	5,35	6,5	7,5	8,3	8,3
					Persentase koperasi berkualitas	13%	16,06%	19,27%	23,85%	29,82%	36,70%	36,70%

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
5	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,34	72,35	72,35	72,36	72,36	72,37	72,37
				Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,25	14,60	14,61	14,62	14,63	14,64	14,64
					Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	21,32	21,32	17,32	12,32	8,32	4,32	4,32
					Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,68	10,68	10,69	10,70	10,71	10,72	10,72
				Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	N/A	1,05	1,05	1,03	1,01	1,01	1,01
					Persentase Jumlah Keluarga Sejahter	N/A	96,23%	96,46%	96,69%	96,92%	97,15%	97,15%
			Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	94,89	94,90	94,91	94,93	94,94	94,95	94,95
					Indeks Pemberdayaan Gender	68,07	68,10	68,20	68,30	68,40	68,50	68,50
			Kriteria Kota Layak Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	50%	70%	80%	80%	80%	80%	80%
			Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23	60,23	61,43	63	64	66	66
					Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	50	50,5	51	51,5	52
			Persentase Penduduk Miskin	Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	60	65	70	75	80	85	85

Tabel 5.2.
Visi, Misi, Tujuan Jangka Menengah Kota Jambi (Setelah Perubahan)

VISI : MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	2019		2020		2021		Target 2022	Target 2023
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	BB	B	BB	BB
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Peningkatan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-	75%	75%	79%	81%
		Penanganan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman	Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	5.1	7.22	5.67	7.44	7.47	7.58	7.5	7.7
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52.06	52.46	52.39	55.16	52.57	58.67	55.2	55.5
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.28	5.33	5.39	-3.28	2.75-3.25	3.94	3.25-4.25	4.25-5.25
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	77.14	78.26	77.54	78.37	78.39	79.12	79.15	79.20
		Indeks Pembangunan Gender	94.90	94.14	94.91	94.03	94.40	94.42	94.45	95.0
		Kriteria Kota Layak Anak	Madya	Madya	Nindya	-	Madya	Nindya	Nindya	Nindya
		Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60.23%	70.96%	61.43%	59.15%	63.00%	87%	88%	89%
		Persentase Penduduk Miskin	8.49	8.12	7.89	8.27	7.29	9.02	9.0	8.9

Tabel 5.3.
Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi (Setelah Perubahan)

VISI : MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2019		2020		2021		Target 2022	Target 2023
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.44	2.85	2.55	2.85	2.9	1.69	3.0	3.1
				Indeks Profesionalitas ASN	56	56.2	57.5	62.95	63.08	64.24	64.08	64.88
				Nilai SAKIP	B	B	BB	B	BB	B	BB	BB
				Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	-	-	-	-	2.352	2.352	2.648	2.972
				Indeks Pelayanan Publik (IPP)	-	-	-	-	3.97 (B)	3.97 (B)	3.99 (B)	4.02 (B)
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Peningkatan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan	-	-	-	-	81%	81%	84%	86%
			Penanganan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan	Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman	Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	20%	20%	40%	40%	60%	60%	80%	100%

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2019		2020		2021		Target 2022	Target 2023
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
			Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	Persentase orkemas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%	20%	40%	48.71%	60%	60%	80%	100%
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan	-	-	-	-	0.48	0.48	0.47	0.46
			Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman Tidak Layak Huni yang ditangani	-	-	-	-	48.06%	48.06%	49.11%	54.71%
			Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	-	-	-	-	56.38%	74.76%	63.31%	67.09%
			Penurunan Luasan Kawasan Genangan	Luasan Kawasan Genangan	-	-	1314 Ha	-	1013 Ha	1013 Ha	860 Ha	711 Ha
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	37.75	38.27	38.3	39.6	39.75	43.99	39.9	40.05
				Indeks Kualitas Udara	80.7	76.84	80.72	84.51	80.74	85.02	80.76	80.78
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	41.3	44.81	41.7	44.81	44.85	49.91	44.87	44.9
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Laju Inflasi Kota Jambi	Laju Inflasi					3.50-5.00	1.67	3.50-5.00	3.50-5.00
			Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan					78	78	79	80
			Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2.36%	2.37%	2.38%	2.38%	2.39%	2.22%	2.40%	2.41%
			Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8%	16.13%	9%	-9.64%	9%	7.97%	9%	9%
			Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	430.5 M	1.055T	430.5 M	249.4M	474.62 M	653,18 M	498.35 M	523.37 M
			Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.56	6.72	6.42	10.49	10.22	10.66	9.60	9.10

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2019		2020		2021		Target 2022	Target 2023
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
			Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7.61%	8.08%	8.08%	8.54%	9.01%	9.01%	9.47%	9.94%
				Persentase Daya Saing Produk IKM	4.30%	19.30%	5.35%	2.80%	6.50%	1.64%	7.50%	8.30%
				Persentase koperasi berkualitas	16.06%	16.50%	19.27%	19.73%	23.85%	26.36%	32.72%	44.09%
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Umur Harapan Hidup (UHH)	72.35	72.57	72.35	72.65	72.73	72.71	72.81	72.89
			Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.6	14,62	14.61	15.10	15.11	15.37	15.38	15.39
				Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10.68	10.68	10.69	10.92	10.93	11.20	11.21	11.22
			Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.05	1.05	1.05	1.10	1.03	1.31	1.03	1.01
				Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	96.23%	96.00%	96.46%	96.00%	96.69%	96.83%	96.92%	97.15%
		Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	68.10	69,83	68.20	69.83	68.30	67.88	68.40	68.50
		Kriteria Kota Layak Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	70%	70%	80%	80%	70%	80%	80%	80%
		Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60.2%	71.0%	61.43%	59.15%	87.0%	87%	88.0%	89.0%
			Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	50	-	50.5	-	57.9	57.91	57.95	58
		Persentase Penduduk Miskin	Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	65%	62%	70%	67%	70%	80%	75%	80%

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

6.1.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsip sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;

4. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Penentuan alternatif strategi untuk pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran dirumuskan dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas yang telah diuraikan dan dirumuskan dalam bab-bab sebelumnya. Guna lebih mempertajam dan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya, maka strategi umum pembangunan tersebut dirinci lagi kedalam strategi dan sasaran pembangunan, seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 6.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Jambi

VISI : Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak Dan Berbudaya dengan Mengedepankan Pelayanan Prima

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Penguatan birokrasi dan Meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi		
T.1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	S1. Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Pengembangan infrastruktur dan aplikasi TIK
		Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur
		Peningkatan transparansi kinerja instansi pemerintah
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dari KKN
Menyelenggarakan Pelayanan Publik Berbasis TIK		
Misi 2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat		
T.2. Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	S.2. Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan regulasi daerah
	S.3. Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Peningkatan manajemen logistik dan pelayanan kebakaran
T.3. Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan aman	S.4. Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Membangun dan memfasilitasi masyarakat dalam kerangka Konesus dasar bangsa
	S5. Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	Membina, memberdayakan memfasilitas orkemas dan parpol
Misi 3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan		
T.4. Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	S.6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan perkotaan
	S.7. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang berkelanjutan
	S.8. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Peningkatan sarana dan prasarana serta pengelolaan air bersih, air limbah dan bangunan
		Peningkatan infrastruktur jalan yang mantap
		Peningkatan harmonisasi ruang kota

Tujuan	Sasaran	Strategi
	S.9. Penurunan Luasan Kawasan Genangan	Peningkatan sistem jaringan drainase dan perlindungan retensi Peningkatan sinergisitas penanganan titik genangan
	S.10. Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan
Misi 4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan		
T.5. Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	S.11. Pengendalian Laju Inflasi Kota Jambi	Penguatan pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan
	S.12. Meningkatnya Ketahanan Pangan	Meningkatkan Ketahanan Pangan
	S.13. Meningkatkan Aktivitas Pariwisata	Penguatan daya saing kepariwisataan
	S.14. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	S.15. Meningkatkan Realisasi Investasi	Peningkatan Iklim Investasi
	S.16. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatan peluang kerja pada usia produktif serta perluasan lapangan usaha Sinergitas hubungan antar stakeholder ketenagakerjaan
	S.17. Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Peningkatan daya saing usaha mikro kecil untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif Mendorong Terciptanya Produktivitas IKM
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan		
T.6. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	S.18. Meningkatkan Derajat Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat (universal healthcare)
		Peningkatan Akses Kesehatan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran
	S.19. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Peningkatan akses mutu dan tata kelola pendidikan dasar
		Peningkatan Akses Pendidikan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran
	S.20. Mengendalikan Angka Kelahiran Penduduk	Peningkatan Akses dan Pelayanan Keluarga Berencana yang Berkualitas
	S.21. Meningkatkan Kesetaraan Gender	Peningkatan Pengarusutamaan Gender
	S.22. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Peningkatan pemenuhan hak anak
	S.23. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan pembinaan, monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
	S.24. Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan
S.25. Menurunkan angka PMKS	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS	

6.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah dan perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horison waktu pencapaian arah kebijakan, secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Urut-urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun untuk penyusunan RPJMD. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode atau dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintahan daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Guna mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka pelaksanaan prioritas pembangunan harus fokus dan terarah dengan jelas. Untuk itu diperlukan arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan dalam horizon waktu yang dituangkan dalam tema pembangunan pada setiap tahun yang akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah.

Adapun arah kebijakan dalam horizon waktu atau tema pembangunan tahunan disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1.2.
Arah Kebijakan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Optimalisasi ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Optimalisasi ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK
Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah
Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan
Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel
Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis TIK
Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda
Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan
Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol
Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan	Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas
Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan
Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik
Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan
Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur
Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang
Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan	Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan	Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan	Mengoptimalkan pengelolaan persampahan	Mengoptimalkan pengelolaan persampahan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Mendorong partisipasi masyarakat untuk pengurangan tingkat pencemaran lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan
Pengendalian dan pengawasan lingkungan				
Peningkatan dan pengelolaan tutupan lahan binaan				
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan
Meningkatkan manajemen pengelolaan perpasaran	Meningkatkan manajemen tataniaga	Meningkatkan manajemen tataniaga	Mengoptimalkan manajemen tataniaga	Mengoptimalkan manajemen tataniaga
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga
Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan
Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya
Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)	Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)	Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)	Mendorong aktivitas MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)	Mendorong aktivitas MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)
Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah
Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah
Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi
Mendorong kewirausahaan untuk angkatan kerja produktif	Mendorong kewirausahaan untuk angkatan kerja produktif	Mendorong kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja	Mendorong kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja	Mendorong kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja
Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja			

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis
Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif
Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal	Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal	Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal	Meningkatkan pemasaran produk lokal	Meningkatkan pemasaran produk lokal
Meningkatkan koperasi berkualitas	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Pengembangan Koperasi	Pengembangan Koperasi
Meningkatkan sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar
Meningkatkan sarana prasarana pendidikan	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas
Menekan angka putus sekolah	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan
	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik

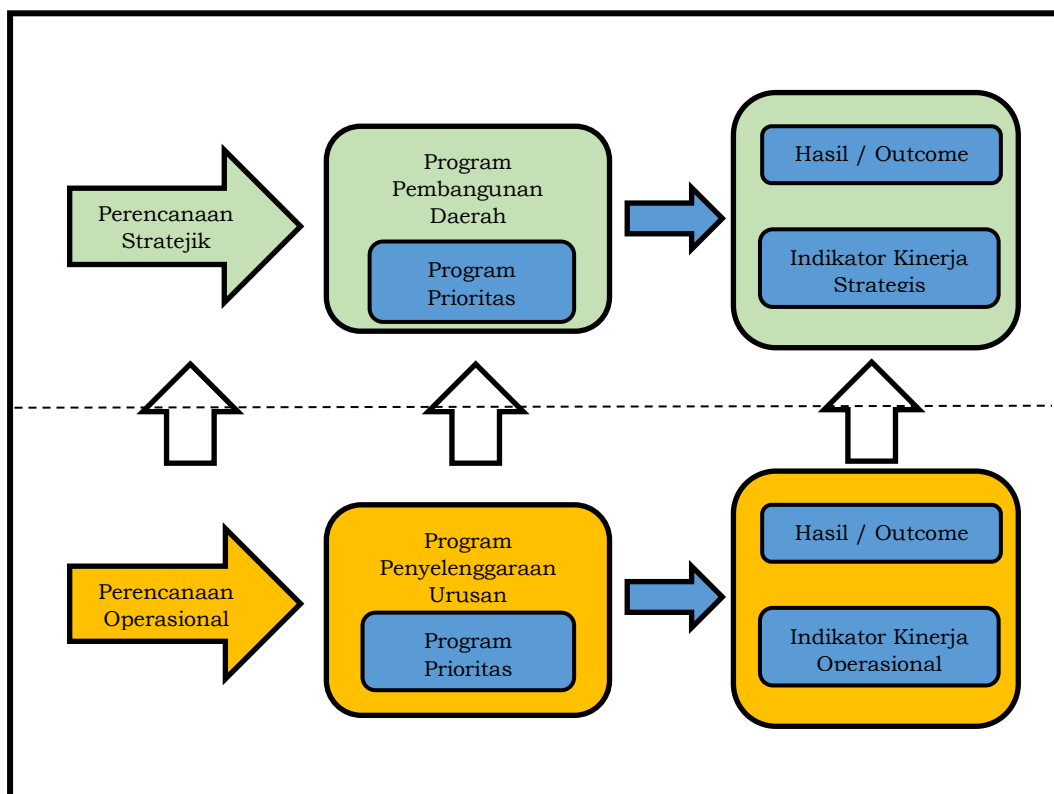
TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas
Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan
Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga yang berkualitas	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga yang berkualitas
Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan
Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan	Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan	Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan	Mengoptimalkan peran perempuan terhadap pembangunan	Mengoptimalkan peran perempuan terhadap pembangunan
Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Mengoptimalkan pemenuhan hak anak	Mengoptimalkan pemenuhan hak anak
Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Mengoptimalkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Mengoptimalkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan pembinaan olahraga dan pengembangan kepemudaan	Meningkatkan pembinaan olahraga dan pengembangan kepemudaan	Mengembangkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Mengembangkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Mengembangkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
		Meningkatkan prestasi atlit dan pemuda	Meningkatkan prestasi atlit dan pemuda	Meningkatkan prestasi atlit dan pemuda
Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Mengoptimalkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Mengoptimalkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS
Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS

6.2. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

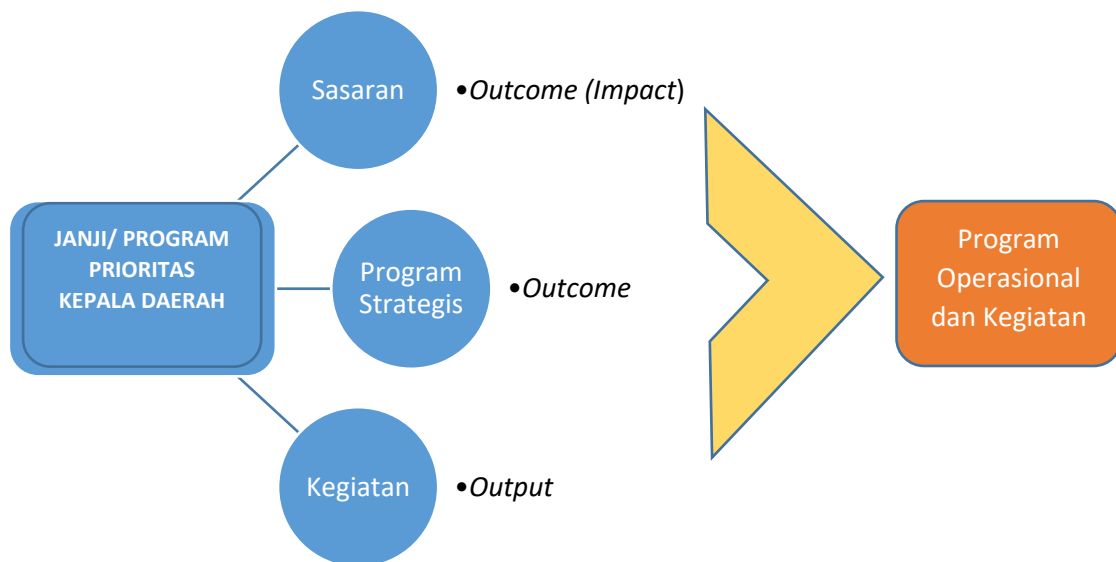
Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program prioritas bersifat strategis mengikuti diagram kinerja pembangunan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 6.1.
Arsitektur Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah

Sesuai arsitektur perencanaan dan kinerja tersebut di atas, perencanaan dipisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program untuk perencanaan strategis dan program untuk perencanaan

operasional. Dalam hal program didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional, yang demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan *urgent*. Program strategis selanjutnya disebut dengan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah pada intinya merupakan implementasi dari janji-janji dan program prioritas serta agenda politik kepala daerah terpilih yang diusung pada waktu kampanye. Sesuai dengan kaidah perencanaan dan pengukuran kinerja, janji dan program prioritas kepala daerah terpilih diimplementasi dalam tataran sasaran, program dan kegiatan yang mempunyai tingkatan indikator sasaran (*outcome/impact*), program (*outcome*) atau kegiatan (*output*) yang dilaksanakan dalam bentuk program operasional dan kegiatan di perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, sebagaimana ilustrasi gambar berikut ini :



Gambar 6.2.
Ilustrasi Implementasi Janji/Program Prioritas Kepala Daerah

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Program Prioritas Pembangunan

1. *Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan*

Infrastruktur merupakan aspek penting dalam upaya penyediaan ruang kota yang harmonis, baik dalam meningkatkan kenyamanan bagi

kehidupan sosial masyarakat, mendorong kemajuan kegiatan perekonomian daerah serta dapat memberikan perlindungan maupun perbaikan/recovery terhadap degradasi lingkungan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun pembangunan infrastruktur ini dilaksanakan melalui perluasan dan peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar, penataan Kawasan strategis guna mendorong potensi ekonomi, penyediaan ruang publik serta penyediaan/penataan fungsi-fungsi konservasi lingkungan yang di dukung penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. Termasuk di dalamnya penyediaan transportasi publik yang didukung jaringan transportasi dalam kota maupun daerah *hinterland* dalam suatu keterpaduan pembangunan dalam perspektif pembangunan regional.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kota Jambi ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat, karena keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tetapi yang paling penting adalah keberhasilan pembangunan manusianya, sehingga nantinya dapat terwujud manusia yang kompeten dan mandiri.

Prioritas Pengembangan SDM ini akan menjadi perhatian dari setiap Perangkat Daerah baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan yang dilakukan antara lain Pengembangan SDM Aparatur Pemerintah maupun pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja/pelaku UMKM melalui pelatihan kerja yang terencana agar peningkatan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap kerja (attitude) dapat dilakukan. Diharapkan dengan adanya peningkatan kapasitas dasar penduduk akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

3. Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan bukan hanya merupakan masalah ekonomi semata, akan tetapi juga merupakan masalah sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, implikasi permasalahan kemiskinan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia secara keseluruhan, yang pada

akhirnya akan menentukan kelangsungan pembangunan kualitas manusia itu sendiri yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dalam kaitan proses perkembangan dinamika kehidupan masyarakat, maka masalah kemiskinan dipandang sebagai masalah yang sangat dinamis, sehingga membutuhkan peran institusi, program serta metode pendekatan yang mampu menjawab permasalahan kemiskinan.

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam implementasi penanggulangan kemiskinan yaitu:

- a) Masih lemahnya koordinasi terutama dalam hal: pendataan, pendanaan, dan kelembagaan;
- b) Lemahnya koordinasi antar program-program penanggulangan kemiskinan antara instansi pemerintah pusat dan daerah;
- c) Lemahnya integrasi program pada tahap perencanaan, sinkronisasi program pada tahap pelaksanaan, dan sinergi antar pelaku (pemerintah, dunia usaha, masyarakat madani);
- d) Belum optimalnya kelembagaan di pemerintah, dunia usaha, LSM, dan masyarakat madani dalam bermitra dan bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja.

Dengan dimensinya yang luas dan kompleks, kemiskinan perlu ditangani secara komprehensif dan sistemik. Pemecahan masalah kemiskinan juga tidak lagi dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui kebijakan yang terpusat dan berjangka pendek, melainkan memerlukan pendekatan yang terpadu, terencana, berkesinambungan, dan menuntut keterlibatan berbagai pihak.

4. Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah

Apabila melihat tren dan menganalisis berbagai sektor ekonomi, maka sektor pariwisata menjadi sektor yang paling memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai andalan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Setiap tahun performa pariwisata Indonesia terus menanjak, sektor ini terus tumbuh dan bergerak lincah dalam peningkatan ekonomi Indonesia.

Potensi pengembangan pariwisata di Kota Jambi juga telah dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Berbagai pembangunan fisik maupun non fisik dilakukan dalam rangka pengembangan pariwisata di Kota Jambi seperti pengembangan Danau Sipin sebagai kawasan wisata terpadu,

perbaikan infrastruktur publik, pembangunan berbagai fasilitas umum dan juga perbaikan sistem pelayanan publik yang pada akhirnya akan mengakselerasi aktivitas ekonomi masyarakat.

Konsep pengembangan pariwisata di Kota Jambi kedepannya adalah pengembangan pariwisata berbasis penataan kawasan, diantaranya adalah penataan kawasan Pasar Kota Jambi, pembangunan kawasan wisata Jambi Kota Seberang yang memiliki potensi wisata alam dan juga wisata budaya.

Selain sebagai ibu kota Provinsi Jambi, Kota Jambi juga merupakan daerah strategis sebagai pintu masuk dan perlintasan ke daerah lainnya, baik perlintasan antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi maupun perlintasan antar provinsi. Hal ini tentu juga akan memberi banyak manfaat bagi pengembangan pariwisata di Kota Jambi, terutama bidang perhotelan, restoran, transportasi dan penyelenggaraan aktivitas MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*).

Ketika promosi dan akomodasi transportasi berjalan seirama, tentu diperlukan perhatian yang cukup intensif terhadap kualitas objek wisata dan keramahan tuan rumah itu sendiri. Inovasi paket wisata dan berbagai kreativitas lainnya juga harus digerakkan berkesinambungan. Selain itu, juga dibutuhkan sinergitas semua stakeholder terkait dalam pengembangan pariwisata di Kota Jambi. Hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah peran masyarakat pengguna teknologi untuk memaksimalkan promosi sektor pariwisata di Kota Jambi. Kombinasi apik antara perkembangan teknologi, pariwisata, serta keramahan budaya akan menjadi nilai tambah bagi pengembangan aktivitas kepariwisataan.

Apabila aktivitas kepariwisataan mampu dikelola dengan baik dan diorganisasi dengan manajemen yang sehat, maka hal ini tentu akan meningkatkan promosi daerah Kota Jambi di level nasional maupun internasional. Dengan demikian, peningkatan investasi di Kota Jambi pun juga akan tumbuh, dan selanjutnya akan berdampak pada peningkatan lapangan usaha dan pengurangan pengangguran. Muaranya tentu adalah perbaikan struktur dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.

2. Janji Politik Kepala Daerah

1. Peningkatan Implementasi IT Dalam Pengelolaan Perkotaan Dan Pemerintahan
2. Jambi Cerdas
3. Jambi Bugar
4. Kota Layak Anak
5. Kegiatan Khusus Lansia
6. Perluasan Layanan Kesehatan 119
7. Peningkatan Jumlah Dan Kualitas PKM Rawat Inap
8. Pelayanan Prima Perizinan
9. Peningkatan Frekuensi Job Fair
10. Kepastian Hukum
11. Peningkatan SDM Dan Prasarana Bagi Pelaku IKM/UMKM
12. Laporan Keuangan Yang Akuntabel
13. Peningkatan Rekrutmen Guru Agama
14. Peningkatan Akses Dan Responsibilitas Terhadap Keluhan Masyarakat Berbasis IT
15. Peningkatan Destinasi Wisata Serta Prasarananya
16. Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Pelayanan Publik
17. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Dan Swasta

Guna mempercepat implementasi dari program pembangunan daerah tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil dengan menggunakan pendekatan yang bersifat *holistik-tematik*, *integratif* dan *spasial*. Pendekatan *holistik-tematik*, *integratif* dan *spasial* adalah sebagai berikut:

- Pendekatan *holistik-tematik* dalam perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur / bagian / kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- Pendekatan *integratif* dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- Pendekatan *spasial* dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Tabel 6.3.
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif (Sebelum Perubahan)

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Misi 1 : Penguatan birokrasi dan Meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi															
T1 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	BB		BB		A		A		A		A		
S1 : Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.33	2.33		2.44		2.55		2.66		2.77		2.77		
	Indeks Profesionalitas ASN	55	56		57,5		59		60,5		62		62		
	Nilai SAKIP	B	B		BB		BB		BB		A		A		
	Indeks persepsi anti Korupsi	n/a	3,65		3,69		3,73		3,75		3,8		3,8		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.28	85.5		86		87		87.5		88.5		88.5		
P1 : Peningkatan akses dan kualitas informasi public	Persentase Peningkatan ekosistem TIK	20%	30%	0	45%	6.400.000.000	60%	5.932.800.000	70%	6.621.296.000	80%	7.622.863.770	80%	7.622.863.770	KOMINFO
	Cakupan akses dan kualitas informasi publik	30%	40%		60%		70%		80%		90%		90%		
P2 : Penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah	Rasio Jumlah Informasi Milik Pemerintah yang diamankan	15%	20%	0	35%	600.000.000	50%	556.200.000	55%	541.059.000	65%	714.643.240	65%	714.643.240	
P3 : Manajemen data/informasi/statistik daerah	Tingkat ketersediaan data/informasi/statistik daerah	5%	10%	0	20%	155.000.000	39%	143.100.000	40%	139.204.500	50%	183.864.470	50%	183.864.470	

Perubahan RPJMD Kota Jambi 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
P4 : Penataan, pelayanan, pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan	93,23%	93,23%	3.856.200.000	96%	4.971.000.000	97%	4.608.000.000	98%	4.482.560.000	100%	10.920.670.720	100%	10.920.670.720	BKPSDMD
	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	85%	85%		89%		91%		93%		95%		95%		
	Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan pengendalian	72%	72%		83%		88%		94%		100%		100%		
	Persentase Penilaian Kinerja ASN	85%	85%		87%		87%		87%		87%		87%		
	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	32%	32%		46%		53%		60%		67%		67%		
	Persentase Pengembangan Kualifikasi ASN				27%		52%		84%		100%		100%		
P5 : Peningkatan dan pengembangan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pengendalian Keuangan Daerah Tepat Waktu dan sesuai aturan	33 OPD	33 OPD	2.546.041.150	35 OPD	3.622.000.000	37 OPD	3.343.500.000	38 OPD	3.239.732.500	40 OPD	4.262.764.370	40 OPD	4.262.764.370	BPKAD

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
	Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja	75%	75%	80%	85%	95%	100%	100%							
	Jumlah OPD dan BLUD yang mneyajikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dan SAK	37 OPD	37 OPD	40 OPD dan 11 BLUD	40 OPD dan 21 BLUD	40 OPD dan 21 BLUD	40 OPD dan 22 BLUD	40 OPD dan 22 BLUD							
	Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Data Barang Milik Daerah yang Akurat dan Tepat waktu	20 PD	20 PD	20 PD	30 PD	40 PD	40 PD	40 PD							
P6: Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	4.278.543.000	100%	4.906.000.000	100%	4.547.700.000	100%	4.423.901.500	100%	5.843.193.520	100%	5.843.193.520	BAPPEDA
P7: Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Persentase Dokumen hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar perencanaan	1	100%		100%	200.000.000	100%	270.000.000	100%	297.500.000	100%	436.000.000	100%	436.000.000	
P8 : Peningkatan Sistem pengawasan internal, Pembinaan Internal dan Pengendalian	Cakupan pelaksanaan pembinaan internal dan pengendalian kebijakan KDH	85%	100%	2.343.990.000	100%	2.914.000.000	100%	2.700.900.000	100%	2.627.375.500	100%	8.470.299.490	100%	8.470.299.490	INSPEKTOR AT

Perubahan RPJMD Kota Jambi 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
Pelaksanaan Kebijakan KDH															
P9 : Peningkatan kapasitas lembaga dan pelayanan kedinasan DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	1 dok	6 dok	34.956.263.500	6 dok	36.004.000.000	6 dok	33.375.600.000	6 dok	32.467.042.000	6 dok	42.883.233.440	6 dok	42.883.233.440	SETWAN
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran untuk mengakomodir Program- program kerja DPRD	9 dok	9 dok		9 dok		9dok		9 dok		9 dok		9 dok		
P10: Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, sekretariat daerah, Aparatur dan Keprotokolan	Meningkatnya kinerja layanan keprotokolan	70%	70%	3.400.000.000	80%	4.000.000.000	90%	3.696.300.000	100%	3.582.928.500	100%	4.716.065.940	100%	4.716.065.940	SETDA
	Jumlah telaah/rekomendasi staf ahli walikota terhadap kebijakan pemerintah daerah	1 Telaah/rekomendasi	1 Telaah/rekomendasi		2 Telaah/rekomendasi		3 Telaah rekomendasi		3 Telaah rekomendasi		3 Telaah rekomendasi		3 Telaah rekomendasi		
P11 : Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan setda dan kerumahtanggaan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah jabatan dan kantor Sekretariat Daerah	32,08%	32,08%	1.590.060.000	17,3%	1.279.000.000	17,07%	1.188.900.000	17,07%	1.310.989.000	17,07%	1.846.540.660	17,07%	1.846.540.660	
	Ketepatan waktu Penyampaian LPPD	48%	48%		61%	12.953.000.000	74%		87%	15.131.045.500	100%	22.165.441.030	100%	22.165.441.030	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
P12: Penataan Administrasi pemerintahan dan kewilayahan	Persentase Ketersediaan Lahan Tanah Untuk Pelayanan Masyarakat	13%	13%		16%		20%	13.806.900.000	23%		32%		32%		
	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	N/A	3 Kec		6 Kec		9 Kec		11 Kec		11 Kec		11 Kec		
P13: Penataan Peraturan Perundang-undangan dan penyelesaian perkara pemerintah daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diselesaikan	20%	20%	1.092.000.000	20%	1.124.000.000	20%	1.041.300.000	20%	1.012.953.500	20%	1.337.932.490	20%	1.337.932.490	
	Persentase penyelesaian perkara Pemerintah Daerah	27,27%	27,27%		27,27%		27,27%		27,27%		27,27%		27,27%		
P14: Peningkatan Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitas Kerjasama Luar Negeri	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Kesepakatan bersama yang di tindaklanjuti	66,67%	66,67%	725.000.000	76,92%	846.000.000	85,71%	781.200.000	93,33%	757.384.000	100%	997.100.390	100%	997.100.390	
	Persentase Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
P15: Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan monitoring bidang perekonomian	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan Monitoring	45%	75%	799.850.000	75%	823.000.000	75%	762.300.000	75%	741.548.500	75%	979.454.380	75%	979.454.380	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
	Bidang perekonomian														
P16: Tata Kelola Organisasi dan Ketatalaksanaan	Persentase meningkatnya kualitas anjab dan ABK sesuai dengan peraturan yang berlaku	16%	16%		38%	435.000.000	59%	1.053.000.000	79%	1.024.250.000	100%	1.343.949.290	100%	1.343.949.290	
	Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja	15%	15%		30%		50%		75%		100%		100%		
	Rata-rata indeks pelayanan publik	B	B		B		A		A		A		A		
P17: Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan dan kelembagaan Keagamaan	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kepemudaan	66,67%	66,67%	8.963.713.750	75%	9.232.000.000	80%	8.557.200.000	100%	8.324.254.000	100%	10.994.870.330	100%	10.994.870.330	
P18: Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	71,43%	71,43%	6.200.000.000	72,23%	6.386.000.000	73,68%	5.919.300.000	75%	5.758.163.500	76,19%	7.605.517.510	76,19%	7.605.517.510	
P19: Tata Kelola Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tertib administrasi pembangunan	50%	70%		75%	2.279.000.000	80%	2.112.300.000	85%	2.054.798.500	100%	2.714.025.880	100%	2.714.025.880	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Persentase Kinerja Kelembagaan Pengadaan	19,13%	19,13%		37,81%		30,44%		65,00%		69,06%		69,06%		
P20: Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	93%	93%	2.550.648.000	96%	2.627.000.000	99%	2.434.500.000	100%	2.368.227.500	100%	3.128.011.150	100%	3.128.011.150	DKPS
	cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	82%	82%		86,5%		91 %		95,5%		100%		100%		
	validitas database kependudukan	87%	87%		89%		91%		93%		95%		95%		
	Cakupan Pemanfaatan data Kependudukan	-	26,8%		33,3%		45%		72,7%		100%		100%		
P21: Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan non perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86,45%	86,45%	673.760.000	86,75 %	793.000.000	86,85 %	734.400.000	86,95 %	714.408.000	87 %	943.606.460	87 %	943.606.460	DPMPSTP
P22: Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	83%	85%	13.831.600.000	89%	13.831.600.000	92%	13.109.400.000	95%	13.047.058.000	98%	17.689.569.670	98%	17.689.569.670	SEMUA KECAMATAN
P23: Pengelolaan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah arsip yang terselamatkan	46.019	1.200	725.920.500	1.200	1.247.000.000	1.200	1.155.600.000	1.200	1.124.142.000	1.200	1.484.793.640	52.019	1.484.793.640	DKP
	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	-	20		36		36		36		36		164		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
Misi 2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat															
T2 : Meningkatkan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah	9%	9%		6%		5%		3%		3%		3%		
	Penurunan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
S2 : Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	82	82		80		75		66		60		60		
P24 : Pembinaan Dan Perlindungan Masyarakat	Rasio Petugas perlindungan masyarakat	45%	54%	798.718.800	68%	822.000.000	72%	761.400.000	80%	740.673.000	85%	978.297.890	85%	978.297.890	SATPOL PP
P25 : Penyelenggaraan Trantibum Serta Penegakan Regulasi Daerah	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	60%	75%	5.069.000.000	85%	6.221.000.000	90%	5.766.300.000	90%	5.609.328.500	98%	7.408.932.740	98%	7.408.932.740	
	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Jambi	55%	69%		74%		79%		84%		98%		98%		
S3 : meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan kebakaran dan kebencanaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
P26 : Peningkatan Kesiagaan Di ni dan Manajemen Logistik Kebencanaan	Cakupan pelayanan kesiagaan dini	100%	100%	5.711.580.000	100%	5.882.000.000	100%	5.452.200.000	100%	5.303.779.000	100%	7.005.355.880	100%	7.005.355.880	DISDAMKAR
	Cakupan Peningkatan Pelayanan kebakaran Dan Penyelamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
T3: Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan aman	Persentase penyelesaian gangguan ideologi, konflik, suku, agama, ras dan antar golongan	76,08%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
S4: Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila	20%	20%		20%		20%		20%		20%		20%		
S5: Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%	20%		20%		20%		20%		20%		20%		
P27 : Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitasi bagi Orkemas dan Parpol	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan	-	-	25.425.000	100%	500.000.000	100%	463.500.000	100%	450.882.500	100%	595.536.760	100%	595.536.760	BKBP

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	kondisi daerah yang kondusif														
P28 : Peningkatan Karakter, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peningkatan peran forum kemasyarakatan dalam mengantisipasi sumber potensi konflik di daerah	-	-	494.88 9.000	100%	700.00 0.000	100%	648.90 0.000	100%	631.235. 500	100%	833.751. 900	100%	833.751.90 0	
Misi 3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan															
T4 : Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	N/A	5.1		5.67		6.0		6.40		7.00		7.00		
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	49,57	52,06		52.39		52,57		52,74		52,86		52,86		
S6 : meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	50.59%	53,07%		60,77%		70,61%		78,25%		85,79%		85,79%		
P29: Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan	Capaian ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan	65%	65%	3.825.5 30.000	74%	6.940.0 00.000	84%	6.433.2 00.000	91%	6.258.07 4.000	100%	8.265.81 1.170	100%	8.265.811. 170	DISHUB
	Cakupan yang terlayani angkutan umum	33.89%	41.39%		54.75%		70.19%		85.09%		100%		100%		
P30: Pengendalian dan Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas	Pengurangan Jumlah Titik Kemacetan	60 Titik	41 Titik	4.423.0 20.000	36 Titik	1.555.0 00.000	28 Titik	1.440.9 00.000	20 Titik	1.401.67 5.500	0 Titik	1.797.44 2.700	0 Titik	1.797.442. 700	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
P31 : Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Persentase Pelayanan Perparkiran	68.17%	74.76%	2.239.964.000	80.74%	2.307.000.000	88.99%	2.138.400.000	94.58%	2.080.188.000	100%	27.475.510.100	100%	27.475.510.100	
P32 : Penataan dan Peningkatan kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan	Persentase penanganan Luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	78.79%	78.79%	3.804.751.000	83%	3.918.000.000	87%	3.631.500.000	87%	3.532.642.500	87%	4.665.996.790	87%	4.665.996.790	DPRKP
P33 : Pengembangan dan Fasilitas Penyelenggaraan Perumahan	Persentase Pemenuhan Rumah bagi MBR	12.5%	12.5%	2.500.000.000	25%	2.500.000.000	50%	6.817.500.000	75%	6.631.912.500	100%	8.759.585.530	100%	8.759.585.530	
P34 : Peningkatan, Pemeliharaan dan Penataan Utilitas Umum	Persentase Permukiman yang dilayani Utilitas Umum	20%	20%	24.758.245.000	40%	23.000.000.000	60%	21.321.000.000	80%	20.740.595.000	100%	27.394.665.890	100%	27.394.665.890	
P35 : Pembangunan, pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum	66,39%	67,39%	88.627.428.650	69,39%	525.884.157.000	71,39%	107.855.147.059	73,39%	113.707.253.336	75,39%	132.122.55.147	75,39%	132.122.55.147	DPUPR
	Rasio Cakupan Pelayanan Air Limbah	0.39%	0,97%		1.56%		2,16%		2,77%		3,38%		3,38%		
	Rasio Bangunan dalam kondisi baik	37.20%	53,37%		61,46%		69,54%		77,63%		85,18%		85,18%		
P36 : Pembangunan , peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Ratio jalan status kota dalam Kondisi Baik	86.32%	89.06%	112.886.616.400	91.79%	112.373.273.000	94.53%	106.112.742.498	97.26%	105.228.469.644	100%	141.687.039.420	100%	141.687.039.420	DPUPR
	Ratio jembatan dalam Kondisi Baik	94.59%	94.59%		97.3%		97.3%		100%		100%				
P37 : Peningkatan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase/sungai	Rasio Sistem Jaringan Drainase/sungai dalam Kondisi Baik	n/a	5,26	10.990.300.000	15,79%	30.125.382.000	47,37%	33.204.284.379	57,89%	30.855.000.000	68,42%	44.799.000.000	68,42%	44.799.000.000	DPUPR

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
P38: Perencanaan Teknis ke PU-an	Rasio dokumen perencanaan yang diimplementasikan	76%	80%	837.120.600	84%	7.182.478.000	90%	6.550.740.000	94%	6.496.150.500	100%	8.746.875.585	100%	8.746.875.585	
P39: Fasilitasi, koordinasi pembinaan dan keterpaduan tata ruang	Rasio Kesesuaian Ruang	94,46%	95%	904.097.000	95,2%	1.640.062.000	95,5%	1.612.854.000	95,7%	1.726.913.550	95,9%	2.325.238.304	95,9%	2.325.238.304	
S7 : Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	32,11	37,75		38,30		38,50		38,65		38,75		38,75		
	Indeks kualitas udara	80,68	80,70		80,72		80,74		80,76		80,78		80,78		
	Indeks tutupan lahan	39,33	41,30		41,70		42,00		42,30		42,50		42,50		
P40: Peningkatan kinerja pengelolaan sampah	Persentase Jumlah Sampah yang ditangani	79,16%	78,66%	29.483.208.050	78,16%	41.417.000.000	76,66%	38.392.063.564	77,16%	37.349.689.201	76,66%	49.336.289.445	76,66%	49.336.289.445	DLH
	Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	11,73%	12,23%		12,73%		13,23%		13,73%		14,23%		14,23%		
P41 : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Usaha yang Sudah Mengelola Lingkungan sesuai dengan Dokumen Lingkungan	136	145	2.015.919.666	153	2.076.000.000	160	2.138.000.000	170	2.202.140.000,00	180	2.268.204.000	180	2.268.204.000	DLH
P42 : Perlindungan dan Rehabilitasi Sumber daya alam	Persentase Kecukupan Ruang Terbuka Hijau Publik	11,79%	12%	10.658.995.600	14%	10.978.000.000	16%	10.176.300.000	18%	9.899.278.500	20%	13.075.199.640	20%	13.075.199.640	
Misi 4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan															
T5 : Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.26	5.28		5.39		5.50		5,61		5.72		5.72		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,56	6,56		6,42		6,28		6,14		6,00		6,00		
S11 : Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	20	36		52		68		84		100		100		
P43 : Pembinaan, Peningkatan, dan Pengawasan Perdagangan	Cakupan Bina Perdagangan	88%	90%	4.389.85 8.500	92,25%	5.950.000. 000	95,25%	5.463.9 00.000	97,50%	5.257.25 0.000	100%	7.014.15 0.000	100%	7.014.150. 000	DPP
S12 : Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	90,2	90,5		91		91,5		92		92,5		92,5		
P44 : Peningkatan, Produksi, Mutu Produk dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (gram/ kapita/ hari)	2.944	2.944	4.507.24 2.000	2,989	3.539.000. 000	3,080	3.757.5 00.000	3,180	3.659.25 0.000	3,200	5.126.41 6.060	3,200	5.126.416. 060	
		76,24	76,24		79		82		85		88		88		
P45: Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Kelembagaan Tani	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	88,5	88,5	1.143.31 9.000	89	2.375.200. 000	89,5	2.927.9 43.000	90	2.765.27 9.500	90,5	3.819.36 0.000	90,5	3.819.360. 000	DPKP
	Penurunan Pangan segar yang Tercemar	7	7		6		5		4		3		3		
S13 : Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,36%	2,37%		2,38%		2,39%		2,40%		2,41%		2,41%		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
P46 : Pembinaan, peningkatan dan perluasan pengelolaan pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	400.000	450.000	2.474.305.000	500.000	2.000.000.000	600.000	1.854.000.000	650.000	2.653.530.000	700.000	5.163.074.163	700.000	5.163.074.163	DPP
	PAD sektor pariwisata	43 M	43,5 M		45,5 M		47 M		48 M		50 M		50 M		
	Lama Kunjungan wisata	3 hari	3 hari		3 hari		3 hari		3 hari		3 hari		3 hari		
P47 : Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Kebudayaan	Jumlah pelestarian, penyelenggaraan even seni dan budaya	5	5		5	1.500.000.000	6	1.390.500.000	6	1.352.647.500	6	1.786.608.100	6	1.786.608.100	
S14 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4%	8%		9%		9%		9%		9%		9%		
P48 : Peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah	Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah	9%	9%	3.053.202.000	9%	3.644.000.000	9%	3.377.700.000	9%	3.285.751.500	9%	4.339.898.220	9%	4.339.898.220	BPPRD
	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Keakuratan Basis Data dan Pelaporan Pajak	60%	60%		63%		65%		68%		70%		70%		
	Persentase Penyelesaian Piutang Pajak	10%	10%		15%		20%		25%		30%		30%		
S15 : Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	410 M	430.5 M		430.5 M		474.62 M		498.35 M		523.37 M		523.37 M		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
P50 : Peningkatan realisasi investasi	Realisasi Investasi	410 M	430.5 M	269.95 5.500	430.5 M	678.00 0.000	474.62 M	628.20 0.000	498.35 M	611.099. 000	523.37 M	807.153. 720	523.37 M	807.153.72 0	DPMPTSP
S16 : Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,96%	65%		65,25%		65,50%		65,75%		66%		66%		
P51 : Peningkatan kualitas, perlindungan dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja terdaftar yang dilatih dan ditempatkan	6%	7%		7%		7%		7%		7%		7%		DTKK
	Persentase Peningkatan penyerapan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis	56%	56%	796.731. 500	57%	1.820.000. 000	58%	1.686.6 27.810	59%	1.640.71 4.053	60%	2.167.09 3.310	60%	2.167.093. 310	
S17 : Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7,61%	8,08%		8,54%		9,01%		9,47%		9,94%		10,00%		
	Persentase Daya Saing Produk IKM	4,3	4,3		5,35		6,5		7,5		8,3		8,3		
	Persentase koperasi berkualitas	13%	16,06%		19,27%		23,85%		29,82%		36,70%		37,00%		
P52 : Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	48,31%	49%	859.445. 250	49,69%	885.000.00 0	50,38%	819.90 0.000	51,07%	797.580. 500	51,76%	1.053.46 3.200	51,76%	1.053.463. 200	DTKK
P53: Pembinaan dan peningkatan Industri Kecil Menengah	Cakupan Bina IKM	4,3	4,3	4.108.76 3.500	5,35	2.450.000. 000	6,5	2.313.0 00.000	7,5	2.320.50 0.000	8,3	3.210.05 0.000	8,3	3.210.050. 000	DPP

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
P54 : Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT	41,28%	48,16%	609.120.250	57,33%	627.000.000	68,8%	580.500.000	82,56%	564.697.500	98,62%	745.865.200	98,62%	745.865.200	DTKK
Misi 5 : peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan															
T6 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	76.74	77.14		77.54		77.94		78.44		78.84		78.84		
	Indeks Pembangunan Gender	94.90	94.90		94.91		94.93		94.94		94.95		94.95		
	Kriteria Kota Layak Anak	Pratama	Madya		Nindya		Utama		KLA		KLA		KLA		
	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23%	60,23%		61,43%		63%		64%		66%		66%		
	Persentase Penduduk Miskin	8,49	7,89		7,29		6,69		6,09		5,49		5,49		
S18 : Meningkatkan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,34%	72,35%		72,35%		72,36%		72,36%		72,37%		72,37%		
P55: Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Meningkatkan status puskesmas yang terakreditasi	5 Puskemas utama dan 0 Puskemas Paripurna	3 Puskemas Utama	76.629.583.850	8 Puskemas Utama	80.928.000.000	6 Puskemas Utama	77.719.500.000	3 Puskemas Paripurna	75.603.802.500	2 Puskemas Paripurna	105.703.325.992	2 Puskemas Paripurna	105.703.325.992	DINKES Dan RSUD

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah memenuhi kelengkapan Sarana, Prasarana dan alat kesehatan sesuai standar minimal 85%.	0	20%		30%		40%		50%		60%		60%		
	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kesehatan rujukan	B	B		B		A		A		A		A		
	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	93,37%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase pelayanan penyakit menular dan tidak menular	76,50%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Rumah Sakit pemerintah yang ter akreditasi	50%	50%		50%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Puskesmas yang menjalankan pelayanan kesehatan tradisional	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase Pelayanan Imunisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase pelayanan gizi masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Cakupan pelayanan kesehatan remaja	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Cakupan pelayanan kesehatan lansia	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase pencapaian Keluarga berPHBS	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%		
	Cakupan Kelurahan yang Melaksanakan STBM	40%	60%	70%	75%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%		
	Persentase pelayanan Kesehatan olah raga dan kesehatan kerja di puskesmas	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Persentase Ketenagaan kesehatan sesuai dengan kompetensi	96%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase Peningkatan pelayanan kefarmasian	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
S19: Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.25	14,60	14.61		14.62		14.63		14.64		14.64		14.64	
	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	21,32	21,32	17,32		12,32		8,32		4,32		4,32		4,32	
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,68	10,68	10,69		10,70		10,71		10,72		10,72		10,72	
P56 : Peningkatan akses, mutu dan tata kelola pendidikan	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD dan PNF	'- APK PAUD usia 5-6 tahun 75 %, usia 3-5 50 %, usia 0-3 20%	121.598.505.200	'APK PAUD usia 5-6 tahun 90 %, usia 3-5 55 %, usia 0-3 30%		132.492.000.000		'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 60%, usia 0-3 35%		124.572.600.000		'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 70%, usia 0-3 45%		121.068.849.000	
	'Jumlah anak putus sekolah atau yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi	'Paket A : 128 Orang, Paket B : 370		'Paket A : 68 Orang, Paket B : 418		'Paket A : 60 Orang, Paket B : 310		'Paket A : 40 Orang, Paket B : 300 Orang ,		'Paket A : 35 Orang, Paket B : 250		'Paket A : 30 Orang, Paket B : 225		'Paket A : 30 Orang, Paket B : 225	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
	memperoleh layanan pendidikan	Orang , Paket C : 418 Orang	Orang , Paket C : 617 Orang		Orang , Paket C : 408 Orang		Paket C : 450 Orang		Orang , Paket C : 425 Orang		Orang , Paket C : 400 Orang		Orang , Paket C : 400 Orang		
	'Jumlah anak putus sekolah atau yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi memperoleh pendidikan kecakapan hidup	'250 Orang	'140 Orang		'160 Orang		'180 Orang		'200 Orang		'220 Orang		'220 Orang		
	Angka partisipasi kasar (APK) SD	114,3%	114,4%		114,5%		114,6%		114,7%		114,8%		114,8%		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	97,6%	97,8%		97,9%		98%		98,1%		98,2%		98,2%		
	Angka Partisipasi SD	100,48%	100,62%		100,70%		100,80%		100,85%		100,88%		100,88%		
	Rerata UAS SD	60,25%	60,50%		60,65%		60,73%		60,79%		60,82%		60,82%		
	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	98,8%	99,0%		99,3%		99,5%		99,6%		'99,8%		'99,8%		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	71,7%	72,0%		72,3%		72,5%		72,6%		72,8%		72,8%		
	Angka Partisipasi SMP	83%	83,5%		83,8%		84%		84,2%		84,4%		84,4%		
	Rerata UN SMP	50,93%	51,20%		51,40%		51,50%		51,60%		51,65%		51,65%		
	Kompetensi pendidik fan tenaga kependidikan yang memenuhi standar nasional	92,60%	92,80%		93%		93,20%		93,40%		93,50%		93,50%		

Perubahan RPJMD Kota Jambi 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
P57 : Peningkatan Mutu dan Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Rata - Rata pengunjung Perpustakaan Per tahun	32.092 Pengunjung	35.173 Pengunjung	552.691.000	37.836 Pengunjung	1.069.000.000	42.836 Pengunjung	990.900.000	47.836 Pengunjung	963.925.500	52.836 Pengunjung	1.273.175.590	52.836 Pengunjung	1.273.175.590	DKP
S20 : Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	N/A	1,05		1,05		1,03		1,01		1,01		1,01		
	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	N/A	96,23%		96,46%		96,69%		96,92%		97,15%		97,15%		
P58 : Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Laju Pertumbuhan Penduduk	N/A	1,05	4.759.993.000	1,05	4.902.000.000	1,03	4.544.100.000	1,01	4.420.039.950	1,01	5.838.567.560	1,01	5.838.567.560	DPPKB
	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	N/A	96,23%		96,46%		96,69%		96,92%		97,15%		97,15%		
S21 : Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	94.89	94.90		94.91		94.93		94.94		94.95		94.95		
	Indeks Pemberdayaan Gender	68.07	68.10		68.20		68.30		68.40		68.50		68.50		
S22 : Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	50%	70%		80%		90%		100%		100%		100%		
P59 : Peningkatan Kesetaraan Gender, perlindungan perempuan dan anak	Penurunan Ratio KDRT	0,025%	0,023%	3.591.385.000	0,021%	3.699.000.000	0,020%	3.428.100.000	0,019%	3.334.779.500	0,017%	4.404.655.120	0,017%	4.404.655.120	DPMPPA

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Rasio Penurunan Kekerasan Terhadap Anak	0,0247	0,02371		0,0227		0,0217		0,0207		0,0197		0,0197		
	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	75%	80%		82%		85%		87%		90%		90%		
S23 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60.23%	60.23%		61.43%		63%		64%		66%		66%		
P60 : Peningkatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat	Persentase Kelompok UEM yang Aktif	73%	75%	4.351.493.000	77%	4.482.000.000	79%	4.154.400.000	81%	4.154.400.000	83%	5.337.854.260	83%	5.337.854.260	DPMPPA
	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	63%	65%		66%		67%		68%		70%		70%		
	Persentase Pemanfaatan Alat Teknologi Tepat Guna	70%	75%		77%		80%		83%		85%		85%		
	Persentase Usulan Sarana Prasarana Kelurahan yang Terakomodir	92%	93%		94%		95%		96%		97%		97%		
P61 : Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat kecamatan	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan	40%	70%		75%	15.296.400.000	80%	13.886.730.000	85%	13.214.177.350	90%	16.996.886.802	90%	16.996.886.802	SEMUA KECAMATAN

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
P62: Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir	50%	50%	50%	27.812.000.000	60%	25.781.724.000	70%	25.079.888.180	80%	33.126.106.423	80%	33.126.106.423		
P63: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan	40%	45%	50%	7.998.000.000	60%	7.414.146.000	70%	7.213.166.470	80%	9.526.197.295	80%	9.526.197.295		
S24 : Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	50	50,5		51	51,5	52	52						
P64 : Program Pembinaan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan kepemudaan	Persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam organisasi	30%	40%	50%	7.752.810.000	60%	8.442.810.090	70%	8.771.141.594	80%	12.372.469.142	80%	12.372.469.142	DISPORA	
	Persentase pembinaan cabang olahraga prestasi	68,89%	71,11%	73,33%		75,56%	77,78%	80%	80%						
S25 : Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	65%	65%	70%		75%	80%	85%	85%						
P65 : Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan PMKS	Persentase pelayanan bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar	60%	100%	100%	2.739.152.000	100%	5.321.000.000	100%	4.932.000.000	100%	4.797.740.000	100%	11.336.967.880	DINSOS	
	Persentase pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah	60%	100%	100%		100%	100%	100%	100%						

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	kesejahteraan sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya														
	Persentase pemberdayaan sosial potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menangani PMKS	60%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase peningkatan penangan jumlah keluarga miskin	60%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

NOMOR							Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
1	1	1	1	2	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan Formal Persentase Pengembangan Kompetensi			25%		30%		35%		BKPSDMD			
								50%	2,870,714,239	53%	5,521,977,000	57%	2,385,978,050						
							Nilai SAKIP	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BAPPEDA, ORGANISASI, INPEKTORAT				
1	1	1	1	3	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			B	214,233,938,092	B	214,233,938,092	B	199,361,298,759	DISDIK			
1	1	1	1	3	2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100%	187,483,323,247	100%	358,068,212,950	100%	199,359,801,490	DINKES			
1	1	1	1	3	3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			BB	13,459,305,819	BB	13,459,305,819	BB	14,318,574,262	DPUPR			
1	1	1	1	3	4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			B	6,484,749,491	B	6,484,749,491	B	6,115,296,992	DPRKP			
1	1	1	1	3	5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			NA	11,285,934,787	NA	8,726,504,018	NA	7,830,187,796	SATPOL PP			
1	1	1	1	3	6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			B	7,937,638,363	B	7,937,638,363	B	7,176,225,594	DISDAMKAR			
1	1	1	1	3	7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			7101%	6,649,685,913	7439%	6,335,145,700	7777%	6,493,664,235	DINSOS			
1	1	1	1	3	8	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			BB	4,999,363,551	BB	4,999,363,551	BB	5,725,601,328	DTKK			
1	1	1	1	3	9	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			A	10,917,378,621	A	10,917,378,621	A	11,103,956,166	DLH			
1	1	1	1	3	10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			NA	8,031,878,382	NA	6,860,654,988	NA	6,965,077,890	DKPS			

NOMOR						Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	1	1	1	3	11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			BB	5,011,924,360	BB	5,030,247,224	BB	5,325,548,451	DPMPPA		
1	1	1	1	3	12	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100%	5,124,485,135	100%	5,205,924,628	100%	5,530,237,000	DPPKB		
1	1	1	1	3	13	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			BB	13,031,123,530	BB	13,031,123,530	BB	11,879,494,992	DISHUB		
1	1	1	1	3	14	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			CC	5,117,847,047	CC	5,117,847,047	CC	5,785,808,533	DISKOMINFO		
1	1	1	1	3	15	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			BB	5,973,083,055	BB	5,973,083,055	BB	6,495,096,267	DPMPSTP		
1	1	1	1	3	16	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			B	4,612,244,452	B	5,119,155,666	B	5,229,327,667	DISPORA		
1	1	1	1	3	17	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100%	6,863,754,491	100%	6,863,754,491	100%	6,984,236,131	DKP		
1	1	1	1	3	18	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			BB	4,655,405,166	BB	4,655,405,166	BB	5,549,114,815	DPK		
1	1	1	1	3	19	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			BB	13,874,550,200	BB	13,874,550,200	BB	14,395,329,532	DPKP		
1	1	1	1	3	20	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			BB	8,992,466,420	BB	8,992,466,420	BB	8,567,763,686	DPP		
1	1	1	1	3	21	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			NA	34,853,866,119	NA	34,655,118,747	NA	35,273,352,102	SETDA		
1	1	1	1	3	22	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			NA	46,697,545,614	NA	44,307,423,490	NA	40,572,856,381	SET. DPRD		
1	1	1	1	3	23	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			73.0 - 73.5	7,209,200,114	73.6-73.9	12,114,800,000	74.0-74.5	8,514,304,363	BAPPEDA		

NOMOR						Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	1	1	1	3	24	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			BB	9,103,542,958	BB	9,103,542,958	BB	10,804,180,326	BPKAD		
1	1	1	1	3	25	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			BB	23,312,878,535	BB	23,312,878,535	BB	22,271,554,606	BPPRD		
1	1	1	1	3	26	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			B	22,748,522,251	BB	23,506,222,800	A	8,770,309,084	BKPSDMD		
1	1	1	1	3	27	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			B	8,768,703,424	B	9,084,893,712	B	11,139,849,900	INSPEKTORAT		
1	1	1	1	3	28	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			7205%	6,641,324,425	7431%	7,305,456,860	7657%	6,506,423,562	Kecamatan Kota Baru		
1	1	1	1	3	29	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			7339%	7,009,192,056	7546%	9,060,570,864	7753%	6,636,198,343	Kecamatan Telanaipura		
1	1	1	1	3	30	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			7956%	7,779,999,351	8406%	8,557,999,286	8856%	8,148,166,199	Kecamatan Jelutung		
1	1	1	1	3	31	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			7589%	4,908,969,880	7830%	4,990,074,471	8071%	5,455,475,458	Kecamatan Pasar		
1	1	1	1	3	32	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			7800%	8,029,960,245	7960%	8,832,956,270	8120%	7,002,478,792	Kecamatan Jambi Selatan		
1	1	1	1	3	33	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			7927%	11,693,328,500	8080%	13,763,866,008	8156%	9,392,366,255	Kecamatan Jambi Timur		
1	1	1	1	3	34	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			7143%	5,544,816,740	7409%	6,000,291,544	7662%	5,870,135,142	Kecamatan Danau Teluk		
1	1	1	1	3	35	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			7357%	6,536,060,709	7755%	6,536,060,709	8153%	6,989,507,394	Kecamatan Pelayangan		
1	1	1	1	3	36	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			7613%	8,029,960,245	7763%	8,832,956,269	7913%	8,557,564,552	Kecamatan Alam Barajo		

NOMOR							Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
1	1	1	1	3	37	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			7241%	6,242,259,633	7355%	6,866,485,596	7461%	6,026,974,929	Kecamatan Danau Sipin			
1	1	1	1	3	38	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			7812%	6,573,292,270	8140%	6,919,255,021	8468%	6,775,776,901	Kecamatan Paal Merah			
1	1	1	1	3	39	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			NA	4,430,425,795	NA	4,430,425,795	NA	4,095,269,185	BKBP			
1	1	1	1	3	40	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Program Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti			100%	26,538,938,800	100%	26,629,548,976	100%	23,521,978,554	SETDA			
1	1	1	1	3	41	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang Diimplementasikan			100%	3,363,999,721	100%	3,385,669,477	100%	1,779,669,344	SETDA			
1	1	1	1	3	42	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah			100%	1,444,393,000	100%	1,099,412,146	100%	1,382,963,985	BAPPEDA			
1	1	1	1	3	43	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah			21,33	1,210,297,551	21,57	1,523,998,120	21,81	1,184,565,031				
1	1	1	1	3	44	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan			100%	745,553,419	100%	917,000,000	100%	692,166,621				
1	1	1	1	3	45	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah			70%	1,216,420,678	75%	1,365,111,673	80%	1,972,143,771	BPKAD			
1	1	1	1	3	46	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			100%	29,467,424,142	100%	27,890,213,645	100%	27,895,918,978				
1	1	1	1	3	47	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Pelaksanaan Pengawasan, Pembinaan dan Evaluasi SAKIP PD			100%	2,414,850,000	100%	1,288,720,000	100%	1,290,350,100	INSPEKORAT			
							Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)			2.352		2.648		2.972	INSPEKTORAT				
1	1	1	1	4	1	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Cakupan Pelaksanaan, Pembinaan dan Evaluasi RB PD			100%	397,685,000	100%	1,618,825,000	100%	832,800,000	INSPEKORAT			

NOMOR	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023							
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)					3.97 (B)			3.99 (B)			4.02 (B)		ORGANISASI DAN OPD PELAYANAN PUBLIK			
1	1	1	1	5	1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD					100%	27,011,923,250	100%	27,361,376,510	100%	26,620,143,619	Sekretariat DPRD
1	1	1	1	5	2	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan					99%	187,800,697	100%	273,423,700	100%	385,057,260	DKPS
1	1	1	1	5	3	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil					99.00%	187,800,697	100%	273,423,700	100%	339,600,500	DKPS
1	1	1	1	5	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Validitas database Kependudukan Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan					91%	2,820,191,495	93%	2,282,639,011	95%	1,701,364,321	DKPS
1	1	1	1	5	5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya kualitas profil kependudukan Kota Jambi					100%	32,574,960	100%	32,574,960	100%	35,900,029	DKPS
1	1	1	1	5	6	Program Pengelolaan Arsip	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati diri Bangsa					0%	0	350 Orang	357 Orang		350,407,433	DKP
1	1	1	1	5	7	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis Sebagai Warisan Budaya yang dipreservasi					52%	10,630,643	68%	283,332,637	88%	162,873,291	DKP
1	1	1	1	5	8	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah Perizinan Penggunaan Arsip					0%	0	1 Izin	1 Izin		38,290,218	DKP
1	1	1	1	5	9	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					87.93	151,105,515	90.65	166,216,600	93.37	904,138,865	Kecamatan Kota Baru
1	1	1	1	5	10	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					92	84.164.541	95	96,789,222	98	1,888,787,536	Kecamatan Telanaipura
1	1	1	1	5	11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					84%	107,740,360	88%	118,514,396	92%	231,357,426	Kecamatan Jelutung
1	1	1	1	5	12	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					92	95,061,300	93	320,913,500	95	286,855,720	Kecamatan Pasar

NOMOR	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023								
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	1	1	1	5	13	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					80%	742,551,159	80%	816,806,275	80%	2,094,151,227	Kecamatan Jambi Selatan	
1	1	1	1	5	14	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					92	687,800,000	95	756,580,000	98	630,231,160	Kecamatan Jambi Timur	
1	1	1	1	5	15	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					87	19,797,942	88	30,100,050	89	227,028,854	Kecamatan Danau Teluk	
1	1	1	1	5	16	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					3.67	25,897,987	3.89	150,258,800	4.11	156,218,020	Kecamatan Pelayangan	
1	1	1	1	5	17	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					90	742,551,159	95	816,806,275	98	540,061,482	Kecamatan Alam Barajo	
1	1	1	1	5	18	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					88%	304,425,910	90%	334,868,501	92%	440,681,919	Kecamatan Danau Sipin	
1	1	1	1	5	19	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					93	239,008,840	94	262,909,724	95	129,111,970	Kecamatan Paal Merah	
MISI 2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat																			
2	1					Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Peningkatan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					-	-	75%		79%		81%	SATPOL PP
2	1	1	1			Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan							81%		84%		86%	SATPOL PP
2	1	1	1	1	1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat					NA	1,168,675,821	76%	6,320,695,982	79%	6,465,812,204	SATPOL PP	
							Penanganan jumlah kasus kebakaran dan bencana					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DISDAMKAR

NOMOR							Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
2	2	1	2	1	1	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase peningkatan fasilitasi pembinaan umat beragama dan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba			100%	248,069,000	100%	248,069,000	100%	186,760,000	BKBP			
2	2	1	2	1	2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan daerah dan potensi konflik di Kota Jambi			100%	134,651,000	100%	134,651,000	100%	807,693,920	BKBP			
MISI 3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan																			
3	1					Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	5.1		5.67		7.47		7.5		7.7	DPUPR, DPRKP, DISHUB		
3	1	1	1			Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan				0.48		0.47		0.46		DISHUB		
3	1	1	1	1	1	Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio Layanan Angkutan Sungai dan Danau				45%	700,000,000	64%	700,000,000	71%	156,525,585	DISHUB		
3	1	1	1	1	2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan				0.48	40,879,225,000	0.47	31,320,445,000	0.46	8,196,979,423			
3	1	1	2			Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman Tidak Layak Huni yang ditangani				48.06%		49.11%		54.71%		DPRKP		
3	1	1	2	1	1	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR				60%	806,021,206	63%	1,092,872,897	65%	602,943,199	DPRKP		
3	1	1	2	1	2	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh				64.48%	5,759,621,154	66.12%	2,624,028,952	75.44%	2,266,935,470			
3	1	1	2	1	3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Perumahan yang dilayani Utilitas Umum				82%	27,618,191,428	88%	26,431,830,096	94%	24,589,824,339			

NOMOR						Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.		
3	1	1	2	1	4	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan					0%	0	20%	22,619,495	50%	0			
3	1	1	3			Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan					56.38%		63.31%		67.09%		DPUPR		
3	1	1	3	1	1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum					71.39%	57,782,580,000	73.39%	4,959,426,420	75.39%	5,000,000,000	DPUPR		
3	1	1	3	1	2	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rasio Cakupan Sarana dan Prasarana Persampahan					79.87%	2,406,837,550	84.49%	741,285,025	88.72%	741,000,000			
3	1	1	3	1	3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah					3.85%	6,583,728,790	4.05%	6,130,594,552	6.01%	11,575,000,000			
3	1	1	3	1	4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik					47.37%	1,297,304,490	51.26%	1,361,367,500	56.39%	1,370,000,000			
3	1	1	3	1	5	Program Pengembangan Permukiman	Rasio Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik					84%	56,064,546,320	86.52%	49,657,731,455	89.12%	49,217,000,000			
3	1	1	3	1	6	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik					61.46%	294,873,827,740	68.44%	75,067,234,212	76.39%	130,527,931,498			
3	1	1	3	1	7	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik					17.52%	131,752,099,600	48%	6,000,118,836	49.49%	6,757,494,242			
3	1	1	3	1	8	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap					85.55%	51,575,765,250	90.37%	89,022,000,000	95.00%	47,100,000,000			
3	1	1	3	1	9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an					15.09%	2,484,277,857	23.64%	1,950,000,000	53%	1,950,000,001			
3	1	1	3	1	10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang					75.00%	4,585,999,757	80.00%	1,947,562,000	85%	1,999,999,997			
3	1	1	4			Penurunan Luasan Kawasan Genangan	Luasan Kawasan Genangan									1314 Ha	1013 Ha	860 Ha	711 Ha	DPUPR
3	1	1	4	1	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					52.76%	32,291,938,320	54.19%	28,251,115,000	55.62%	28,500,000,000	DPUPR		

NOMOR	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52.06		52.39		52.57		55.2		55.5		DLH
3	1 2 1	Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	37.75		38.3		39.75		39.9		40.05		DLH
3	1 2 1 1 1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup					100%	296,839,855	100%	14,776,080	100%	3,747,750	DLH
3	1 2 1 1 2	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					100%	215,854,234	100%	166,540,000	100%	12,450,000	
3	1 2 1 1 3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup					7 Nilai	1,622,806,723	7 Nilai	1,633,324,457	7 Nilai	1,188,135,732	
		Indeks Kualitas Udara	80.7		80.72		80.74		80.76		80.78		DLH
3	1 2 1 2 1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)					0.06%	7,286,865,621	0.06%	7,465,489,900	0.06%	6,411,836,970	DLH
3	1 2 1 2 2	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)					100%	31,393,550	100%	52,382,193	100%	113,640,510	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	41.3		41.7		44.85		44.87		44.9		DLH
3	1 2 1 3 1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					20%	199,704,960	25%	344,011,111	30%	188,563,000	DLH
3	1 2 1 3 2	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					0	0	0	0	100%	0	
3	1 2 1 3 3	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup					100%	26,739,900	100%	123,060,201	100%	75,590,000	

NOMOR						Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	1	2	1	3	4	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan					90.98%	35,785,928,643	90.98%	32,151,754,977	92%	31,249,079,872	
MISI 4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan																		
4	1					Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.28		5.39		2.75- 3.25		3.25-4.25		4.25-5.25		DPP, DPKP, DPK, BPPRD, BPKAD, DPMTSP DPP
4	1	1	1			Pengendalian Laju Inflasi Kota Jambi	Laju Inflasi					3.00- 3.75		3.00-4.10		3.10-4.20		DPP
4	1	1	1	1	1	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pengembangan ekspor					41.67%	91,575,335	70.83%	337,000,000	100%	96,813,442	DPP
4	1	1	1	1	2	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan pemasaran produk dalam negeri					60.87%	910,999,748	80.43%	1,130,000,000	100%	837,235,139	
4	1	1	1	1	3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan					66%	2,066,560,398	66%	2,430,000,000	100%	1,366,319,643	
4	1	1	1	1	4	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan					66%	137,236,284	66%	134,835,000	100%	96,479,710	
4	1	1	1	1	5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting					66%	688,236,841	66%	934,250,000	100%	513,416,530	
4	1	1	1	1	6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen					58.98%	163,225,168	79.49%	245,000,000	100%	145,305,957	
4	1	1	2			Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan					78		80		82		DPKP
4	1	1	2	1	1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya					2.536 Ton	355,000,000	2.586 Ton	375,000,000	2.638 Ton	380,000,000	DPKP
4	1	1	2	1	2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan (PUD) Sungai Danau dan Rawa					600 Ton	75,000,000	680 Ton	80,000,000	680 Ton	70,000,000	
4	1	1	2	1	3	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Produksi Produk Perikanan bernilai Tambah/Produksi Olahan Hasil Perikanan					1868 Ton	125,000,000	1887 Ton	130,000,000	1906 Ton	80,000,000	

NOMOR	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
4	1	1	2	1	4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penurunan Daerah Rawan Pangan			40%	160,000,000	60%	200,000,000	80%	125,000,000	
4	1	1	2	1	5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tingkat Keamanan Pangan Segar			85%	163,000,000	85%	538,000,000	85%	358,600,000	
4	1	1	2	1	6	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan			88.80	1,050,000,000	91.00	1,100,000,000	93.10	380,000,000	
4	1	1	2	1	7	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pertanaman Aman dari Serangan OPT dan DPI (Dampak Perubahan Iklim)			80%	135,000,000	85%	135,000,000	90%	94,736,819	
4	1	1	2	1	8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian penyakit hewan dan penjaminan pangan asal hewan yang ASUH			75%	588,000,000	75%	647,500,000	75%	555,000,000	
4	1	1	2	1	9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penambahan pembangunan prasarana (Pembangunan Screen House)			40%	184,000,000	60%	56,000,000	80%	135,333,649	
4	1	1	2	1	10	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Laju Peningkatan Produktivitas Pertanian			20%	665,000,000	20%	820,000,000	20%	550,000,000	
4	1	1	2	1	11	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan			2%	305,000,000	2%	340,000,000	2%	350,000,000	
4	1	1	3			Meningkatkan Aktivitas Pariwisata	Peningkatan Kunjungan Wisatawan			600 Org		650 Org		700 Org		DPK
4	1	1	3	1	1	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan			35%	994,285,196	35%	1,098,626,823	35%	665,096,026	DPK
4	1	1	3	1	2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional			35%	149,645,130	0%	97,296,190	30%	0	
4	1	1	3	1	3	Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Pembinaan Sejarah Kota Jambi			35%	24,000,000	35%	34,087,540	35%	81,031,336	
4	1	1	3	1	4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Objek Daya Tarik Destinasi Wisata			30%	1,440,428,932	25%	1,215,743,592	20%	705,665,406	
4	1	1	3	1	5	Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan Pemasaran Pariwisata			30%	923,251,860	25%	1,201,391,091	25%	754,369,434	
4	1	1	3	1	6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			35%	250,079,626	25%	444,493,910	20%	687,722,983	

NOMOR	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
4	1	1	3	1	7	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual			0%	0	0%	0	50%	0	
4	1	1	4			Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8%	9%	9%		9%		9%		BPPRD
4	1	1	4	1	1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah			100%	25,409,284,284	100%	26,776,300,000	100%	7,872,445,394	BPPRD
4	1	1	5			Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	430.5 M	430.5 M	474.62 M		498.35 M		523.37 M		DPMPTSP
4	1	1	5	1	1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			84	892,232,389	85	759,373,300	85.5	827,691,598	DPMPTSP
4	1	1	5	1	2	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terselenggaranya Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Terintegrasi Secara Elektronik			100%	65,999,620	100%	72,599,582	100%	47,264,133	
4	1	1	5	1	3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan jumlah Investor berskala Nasional yang berinvestasi di Kota Jambi			2 investor	94,574,800	2 investor	219,180,800	2 investor	71,570,717	
4	1	1	5	1	4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Ketaatan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal oleh Investor (LKPM)			10%	533,747,577	10%	454,835,553	10%	458,840,289	
4	1	1	5	1	5	Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Jumlah Calon Visitor (Pengunjung)			10%	454,304,746	10%	233,758,660	10%	272,536,996	
4	1	1	6			Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.56	6.42	10.37		9.8		9.3		DTKK
4	1	1	6	1	1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam RTKD					100%	49,539,800	100%	0	DTKK
4	1	1	6	1	2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih dan Bekerja			60%	470,069,199	100%	470,069,199		339,892,113	
4	1	1	6	1	3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja yang Terdaftar			42%	201,543,806	100%	201,543,806		92,044,706	

NOMOR	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
4	1	1	6	1	4	Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Perselisihan HI dengan Perjanjian Bersama			58%	329,033,968	100%	329,033,968		228,939,088	
4	1	1	7			Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	8.08%		8.54%	9.01%	9.47%		9.94%		DTKK
4	1	1	7	1	1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Cakupan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam			8%	39,999,870				0	DTKK
4	1	1	7	1	5	Program Pemberdayaan Usaha menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Berpotensi Menjadi Usaha Mikro Berkualitas			30%	202,889,976	9,42%	493,841,379	15,71%	230,328,673	
4	1	1	7	1	6	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil			20%	143,678,430				0	
							Persentase Daya Saing Produk IKM	4.30%		5.35%	6.50%	7.50%		8.30%		DPP
4	1	1	7	2	1	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengelolaan sistem informasi industri			66%	123,965,259	66%	144,315,159	100%	45,244,513	DPP
4	1	1	7	2	2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian izin usaha industri			66%	106,074,800	66%	150,000,000	100%	56,526,586	
4	1	1	7	2	3	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase perencanaan dan pembangunan industri			66%	536,596,346	66%	632,000,000	100%	684,894,794	
							Persentase koperasi berkualitas	16.06%		19.27%	23.85%	22.82%		36.70%		DTKK
4	1	1	7	3	1	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang Sehat			37.50%	20,178,154	37.70%	33,443,984	44.50%	0	DTKK
4	1	1	7	3	2	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi yang Berkompetensi			14%	539,282,212	45%	252,904,515	54.50%	138,213,366	
4	1	1	7	3	3	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Omset Koperasi			22%	122,742,000	5%	220,698,681	5%	71,980,726	
MISI 5 : PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT PERKOTAAN																

NOMOR							Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
5	1						Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	77.14		77.54		78.39		79.15		79.20		DISDIK, DINKES, DPPKB, DAN OPD
5	1	1	1				Meningkatkan Derajat Kesehatan	Umur Harapan Hidup (UHH)	72.35		72.35		72.73		72.81		72.89		DINKES
5	1	1	1	1	1	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM Bidang Kesehatan yang mencapai >90%					100%	58,589,230,557	100%	99,148,720,929	100%	35,646,434,511	DINKES
5	1	1	1	1	1	2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kopetensi sumberdaya manusia kesehatan yang sesuai standar					100%	349,556,917	100%	595,000,000	100%	159,999,911	DINKES
5	1	1	1	1	1	3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase pengawasan untuk sarana produksi alkes, PKRT dan UMOT					100%	368,537,970	100%	465,000,000	100%	125,695,373	DINKES
5	1	1	1	1	1	4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					100%	389,055,991	100%	390,461,590	100%	136,068,715	DINKES
5	1	1	2				Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.6		14.61		15.11		15.38		15.39		DISDIK
5	1	1	2	1	1	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya APM 1. PAUD 2. KESETARAAN 3. SD 4. SMP					14,62	142.058.880.134	14,63	118,030,599,568	14,64	41,842,189,892	DISDIK
5	1	1	2	1	2	2	Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya Kompetensi Peserta Didik terhadap Kearifan Lokal					12,32	319.380.058	8,32	28,932,680	4,32	28,929,862	DISDIK
							Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		10.68		10.69		10.93		11.21		11.22		DISDIK
5	1	1	2	2	1	1	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan					10,70	81,656,000	10,71	81,656,000	10,72	79,392,800	DISDIK
5	1	1	2	2	2	2	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Tertib Pengelolaan Perizinan Pendidikan					100%	33.164.585	100%	137,241,395	100%	158,477,687	DISDIK
5	1	1	2	2	3	3	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Jumlah Perpustakaan yang memenuhi SNP					-	0	2	1,245,184,235	2	789,616,659	DPK

NOMOR						Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
5	1	1	2	2	4	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah naskah Kuno yang dilestarikan			-	0	1 Naskah	56,827,020	1 Naskah	54,576,268	DPK		
5	1	1	3			Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.05	1.05	1.03		1.03		1.01		DPPKB		
5	1	1	3	1	1	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Pengendalian Penduduk			11 Data	245,713,237	11 Data	220,428,139	11 Data	123,898,001	DPPKB		
5	1	1	3	1	2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Advokasi KIE dan Penggerakan Lini Lapangan Ratio Akseptor KB			100%	4,494,642,464	100%	1,497,314,800	100%	1,549,404,999	DPPKB		
							Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	96.23%	96.46%	96.69%		96.92%		97.15%		DPPKB		
5	1	1	3	2	1	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga			68%	1,058,933,099	32%	151,977,358	51%	126,460,000	DPPKB		
							Indeks Pembangunan Gender	94.90	94.91	94.40		94.45		95.0		DPMPPA		
5	1	2	1			Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	68.10	68.20	68.30		68.40		68.50		DPMPPA		
5	1	2	1	1	1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan			94.20%	715,349,070	94.20%	715,349,070	94.20%	654,765,683	DPMPPA		
5	1	2	1	1	2	Program Perlindungan Perempuan	Penurunan Rasio KDRT			0.020	485,107,261	0.019	533,617,987	0.017	146,305,300	DPMPPA		
5	1	2	1	1	3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan keluarga berkualitas			30%	177,149,200	35%	177,149,200	40%	191,508,280	DPMPPA		
							Kriteria Kota Layak Anak	Madya	Nindya	Madya		Nindya		Nindya		DPMPPA		
5	1	3	1			Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	70%	80%	70%		80%		80%		DPMPPA		
5	1	3	1	1	1	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Nilai Indeks Pembangunan Keluarga			30%	168,951,590	35%	185,846,749	40%	0	DPMPPA		

NOMOR						Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
5	1	3	1	1	2	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)			80%	305,283,114	90%	335,811,425	100%	298,626,759	DPMPPA		
5	1	3	1	1	3	Program Perlindungan Khusus Anak	Penurunan Rasio Kekerasan Terhadap Anak			0.054	571,677,622	0.052	628,845,384	0.05	267,678,308			
5	1	3	1	1	4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan data Gender dan anak			20%	282,101,590	25%	282,101,590	30%	267,409,952			
							Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60.23%	61.43%	63.00%		88%		89%	DPMPPA, KECAMATAN, DISPORA			
5	1	4	1			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60.2%	61.43%	87.0%		88%		89%	DPMPPA, KECAMATAN			
5	1	4	1	1	1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			70%	4,744,445,907	71%	4,744,445,907	73%	4,082,157,267	DPMPPA		
5	1	4	1	1	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat yang dibina dikelurahan			65%	3,615,277,600	70%	3,976,805,360	75%	3,530,768,938	Kecamatan Kota Baru		
5	1	4	1	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan			85%	1,492,387,460	86%	1,598,633,005	87%	2,986,824,315	Kecamatan Telanaipura		
5	1	4	1	1	4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan			60%	8,262,070,000	70%	9,088,000,000	80%	3,646,106,956	Kecamatan Jelutung		
5	1	4	1	1	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan			80%	3,682,458,400	82%	4,050,704,240	84%	1,406,991,922	Kecamatan Pasar		
5	1	4	1	1	6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan			82%	4,001,909,301	83%	4,402,100,231	84%	3,059,679,000	Kecamatan Jambi Selatan		
5	1	4	1	1	7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat yang di kelurahan			60%	2,393,995,661	70%	2,753,095,010	80%	4,247,497,430	Kecamatan Jambi Timur		
5	1	4	1	1	8	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan			72.72%	2,656,307,868	72.72%	2,921,938,654	72.72%	1,579,162,790	Kecamatan Danau Teluk		

NOMOR	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023							
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
5	1	4	1	1	9	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					80%	3,660,322,107	83%	4,026,354,300	86%	1,439,369,706	Kecamatan Pelayangan
5	1	4	1	1	10	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					61.11%	1,442,759,800	72.22%	1,615,145,800	88.88%	3,664,055,013	Kecamatan Alam Barajo
5	1	4	1	1	11	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					80%	3,615,277,600	81%	3,976,805,360	82%	3,311,966,981	Kecamatan Danau Sipin
5	1	4	1	1	12	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan					63%	1,226,217,720	64%	1,613,335,270	66%	4,606,941,457	Kecamatan Paal Merah
5	1	4	1	1	13	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian kasus terkait ketentraman dan ketertiban umum					100%	146,130,500	100%	160,743,550	100%	56,108,500	Kecamatan Kota Baru
5	1	4	1	1	14	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					86%	81,983,760	88%	85,200,000	90%	186,148,320	Kecamatan Telanaipura
5	1	4	1	1	15	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					35%	148,800,000	45%	164,000,000	55%	92,156,351	Kecamatan Jelutung
5	1	4	1	1	16	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					85%	47,044,070	86%	51,748,477	87%	290,985,100	Kecamatan Pasar
5	1	4	1	1	17	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					90%	161,383,600	91%	177,521,960	92%	108,840,000	Kecamatan Jambi Selatan
5	1	4	1	1	18	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					100%	84,557,500	100%	97,241,125	100%	77,388,800	Kecamatan Jambi Timur
5	1	4	1	1	19	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					25%	91,710,800	50%	100,881,880	75%	27,375,000	Kecamatan Danau Teluk
5	1	4	1	1	20	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					60%	832,486,980	65%	915,735,700	70%	152,406,400	Kecamatan Pelayangan
5	1	4	1	1	21	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					40%	14,874,250	60%	161,124,900	80%	152,946,700	Kecamatan Alam Barajo

NOMOR	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023							
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
5	1	4	1	1	22	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					85%	146,130,500	86%	160,743,550	87%	399,621,773	Kecamatan Danau Sipin
5	1	4	1	1	23	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					100%	41,202,500	100%	295,298,436	100%	48,714,800	Kecamatan Paal Merah
5	1	4	1	1	24	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					100%	311,794,080	100%	342,973,488	100%	259,560,135	Kecamatan Kota Baru
5	1	4	1	1	25	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					80%	320,899,450	81%	400,434,500	82%	646,841,486	Kecamatan Telanaipura
5	1	4	1	1	26	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					100%	669,000,000	100%	735,000,000	100%	1,287,213,068	Kecamatan Jelutung
5	1	4	1	1	27	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					81%	634,539,671	83%	697,993,638	85%	209,691,800	Kecamatan Pasar
5	1	4	1	1	28	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					79%	465,984,539	80%	512,582,993	81%	21,650,981	Kecamatan Jambi Selatan
5	1	4	1	1	29	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					100%	755,975,094	100%	869,371,358	100%	102,516,355	Kecamatan Jambi Timur
5	1	4	1	1	30	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					60%	1,332,879,813	70%	1,466,167,794	80%	273,298,214	Kecamatan Danau Teluk
5	1	4	1	1	31	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					75%	555,651,129	79%	611,216,250	83%	337,498,480	Kecamatan Pelayangan
5	1	4	1	1	32	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					50%	152,850,610	62.5%	325,554,200	75%	349,372,253	Kecamatan Alam Barajo
5	1	4	1	1	33	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					80%	311,794,080	82%	342,973,488	84%	134,754,398	Kecamatan Danau Sipin
5	1	4	1	1	34	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					100%	431,938,600	100%	353,968,001	100%	212,454,872	Kecamatan Paal Merah

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional

Sumber-sumber pendanaan yang akan digunakan untuk mendanai pembangunan daerah terdiri dari APBD Kota Jambi, APBD Provinsi Jambi, APBN serta dana-dana dari pihak-pihak lain seperti swasta, CSR, masyarakat, bantuan lain yang tidak mengikat, dan, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagaimana diuraikan pada bab III, maka kerangka pendanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan didistribusikan pada program-program pembangunan daerah dan program perangkat daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1.
 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2018 – 2023 (Sebelum Perubahan)

KAPASITAS RIIL KEUANGAN	PROYEKSI				
	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KAPASITAS RIIL KEUANGAN	915.500.926.000	975.177.365.000	1.038.126.249.000	1.100.048.498.000	1.142.059.194.000
BELANJA	1.710.612.142.885	1.768.300.775.000	1.841.855.716.000	1.921.061.684.000	2.015.077.903.000
Belanja Tidak Langsung	795.111.216.885	793.123.410.000	803.729.467.000	821.013.186.000	873.018.709.000
- Belanja Pegawai	769.336.362.485	770.842.287.000	781.427.555.000	798.690.382.000	822.651.093.000
- Belanja Bunga	-	-	-	-	-
- Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
- Belanja Hibah	14.725.400.000	14.725.400.000	14.725.400.000	14.725.400.000	42.749.215.000
- Belanja Bantuan Sosial	7.651.455.000	4.157.723.000	4.178.512.000	4.199.404.000	4.220.401.000
- Belanja Bagi Hasil					
- Belanja Bantuan Keuangan	1.292.132.400	1.292.133.000	1.292.133.000	1.292.133.000	1.292.133.000
- Belanja Tidak Terduga	2.105.867.000	2.105.867.000	2.105.867.000	2.105.867.000	2.105.867.000
Belanja Langsung	915.500.926.000	975.177.365.000	1.038.126.249.000	1.100.048.498.000	1.142.059.194.000
- Belanja Pegawai	64.233.008.032	65.517.669.000	66.828.022.000	68.164.582.000	69.527.874.000
- Belanja Modal	378.531.423.603	417.329.373.000	469.772.080.000	515.311.984.000	554.207.858.000
- Belanja Barang dan Jasa	460.107.061.790	472.736.494.365	492.330.323.000	501.526.147.000	516.571.932.000

Tabel 7.2

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
1	Pendapatan	1.660.053.885.000	1.728.854.168.000	1.810.498.430.000	1.896.175.855.000	1.995.369.239.000
2	Pencairan dana cadangan (sesuai perda)					
3	Sisa lebih Riil Perhitungan Anggaran	50.558.257.885	40.446.607.000	32.357.286.000	25.885.829.000	20.708.664.000
	Total Penerimaan	1.710.612.142.885	1.769.300.775.000	1.842.855.716.000	1.922.061.684.000	2.016.077.903.000
	<i>Dikurangi:</i>					
4	Belanja Tidak Langsung	795.111.216.885	793.123.410.000	803.729.467.000	821.013.186.000	873.018.709.000
5	Pengeluaran Pembiayaan		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	915.500.926.000	975.177.365.000	1.038.126.249.000	1.100.048.498.000	1.142.059.194.000

Tabel 7.3

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Jambi Tahun 2019 - 2023

NO.	URAIAN	Proyeksi				
		2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	915.500.926.000	975.177.365.000	1.038.126.249.000	1.100.048.498.000	1.142.059.194.000
	Prioritas I					
	Belanja Langsung untuk Program Unggulan Kepala Daerah	582.000.000.000	620.000.000.000	645.000.000.000	681.000.000.000	690.000.000.000
	Prioritas II					
	Belanja Langsung untuk Program Prioritas diluar Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan Belanja Prioritas I	333.500.926.000	355.177.365.000	393.126.249.000	419.048.498.000	452.059.194.000

7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Indikasi rencana program pembangunan dalam RPJMD terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung terhadap janji dan program prioritas kepala daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta program prioritas pembangunan lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), mendukung program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), prioritas pusat dan provinsi, yang selanjutnya dijabarkan dan diimplementasikan dalam program prioritas yang bersifat operasional pada perangkat daerah yang disesuaikan dengan program-program yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu akan disajikan pula pencapaian indikator dan target kinerja serta alokasi pendanaan pagu indikatif program. Pagu indikatif merupakan jumlah anggaran sementara yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan. Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun renstra perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program operasional pada perangkat daerah yang disertai kebutuhan pendanaannya terbagi ke dalam 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar dan 6 urusan pilihan, serta fungsi pendukung dan penunjang urusan pemerintahan.

Jumlah program pada perangkat daerah sebelumnya sebanyak 67 program, sedangkan pada Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 menjadi sebanyak 128 Program yang terdiri dari 1 Program Non Urusan dan 127 Program Urusan. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaannya (Sebelum perubahan dan setelah perubahan) terinci pada tabel berikut ini:

Tabel 7.4.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Tahun 2018 -2023 (Sebelum Perubahan)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD			
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target		(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
URUSAN WAJIB																
TERKAIT PELAYANAN DASAR																
Pendidikan															DISDIK	
Program Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan (tahun 2019-2023)	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD dan PNF	'- APK PAUD usia 5-6 tahun 75 %, usia 3-5 50 %, usia 0-3 20%	'APK PAUD usia 5-6 tahun 90 %, usia 3-5 55 %, usia 0-3 30%	121.5 98.50 5.200	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 60%, usia 0-3 35%	132.4 92.00 0.000	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 65%, usia 0-3 40%	124.5 72.60 0.000	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 70%, usia 0-3 45%	121.0 68.84 9.000	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 75%, usia 0-3 50%	166.7 66.18 1.020	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 75%, usia 0-3 50%	166.7 66.18 1.020		
	'Jumlah anak putus sekolah atau yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi memperoleh layanan pendidikan	'Paket A : 128 Orang, Paket B : 370 Orang , Paket C : 418 Orang	'Paket A : 68 Orang, Paket B : 418 Orang , Paket C : 617 Orang		'Paket A : 60 Orang, Paket B : 310 Orang , Paket C : 408 Orang		'Paket A : 40 Orang, Paket B : 300 Orang , Paket C : 450 Orang		'Paket A : 35 Orang, Paket B : 250 Orang , Paket C : 425 Orang		'Paket A : 30 Orang, Paket B : 225 Orang , Paket C : 400 Orang		'Paket A : 30 Orang, Paket B : 225 Orang , Paket C : 400 Orang			
	'Jumlah anak putus sekolah atau yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi memperoleh pendidikan kecakapan hidup	'250 Orang	'140 Orang		'160 Orang		'180 Orang		'200 Orang		'220 Orang		'220 Orang			
	Angka partisipasi kasar (APK) SD	114,3%	114,4%		114,5%		114,6%		114,7%		114,8%		114,8%			
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	97,6%	97,8%		97,9%		98%		98,1%		98,2%		98,2%			
	Angka Partisipasi SD	100,48%	100,62%		100,70%		100,80%		100,85%		100,88%		100,88%			
	Rerata UAS SD	60,25%	60,50%		60,65%		60,73%		60,79%		60,82%		60,82%			
	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	98,8%	99,0%		99,3%		99,5%		99,6%		'99,8%		'99,8%			
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	71,7%	72,0%		72,3%		72,5%		72,6%		72,8%		72,8%			
	Angka Partisipasi SMP	83%	83,5%		83,8%		84%		84,2%		84,4%		84,4%			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Rerata UN SMP	50,93%	51,20%		51,40%		51,50%		51,60%		51,65%		51,65%		
	Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar nasional	92,60%	92,80%		93%		93,20%		93,40%		93,50%		93,50%		
Kesehatan															DINKES DAN RSUD
Program Peningkatan Akses dan mutu pelayanan kesehatan (tahun 2018-2019)	Jumlah puskesmas dengan pelayanan 24 jam	100%	100%	76.62 9.583 .850											DINKES DAN RSUD
Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat (tahun 2020-2023)	Meningkatkan status puskesmas yang terakreditasi	5 Puskesmas utama dan 0 Puskemas P Aripurna	3 Puskesmas Utama		8 Puskesmas Utama	80.92 8.000. 000	6 Puskesmas Utama	77.71 9.500. 000	3 Puskesmas Paripurna	75.60 3.802. 500	2 Puskesmas Paripurna	105.7 03.32 5.992	2 Puskesmas Paripurna	105.7 03.32 5.992	DINKES DAN RSUD
	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah memenuhi kelengkapan Sarana, Prasarana dan alat kesehatan sesuai standar minimal 85%.	0	20%		30%		40%		50%		60%		60%		
	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	93,37%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kesehatan rujukan	B	B		B		A		A		A		A		
	Persentase pelayanan penyakit menular dan tidak menular	76,50%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Rumah Sakit pemerintah yang terakreditasi	50%	50%		50%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Puskesmas yang menjalankan pelayanan kesehatan tradisional	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target		(RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Pelayanan Imunisasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase pelayanan gizi masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	75%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Cakupan pelayanan kesehatan remaja	40%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Cakupan pelayanan kesehatan lansia	75%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase pencapaian Keluarga berPHBS	70%	75%		80%		85%		90%		95%		95%		
	Cakupan Kelurahan yang Melaksanakan STBM	40%	60%		70%		75%		80%		85%		85%		
	Persentase pelayanan Kesehatan olah raga dan kesehatan kerja di puskesmas	50%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Ketenagaan kesehatan sesuai dengan kompetensi	96%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan pelayanan kefarmasian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Pekerjaan Umum dan penataan ruang															PUPR
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang (tahun 2018-2019)	Dokumen tata ruang dan rasio kesesuaian ruang	94.96%													
Program Perencanaan Tata Ruang (tahun 2018-2019)	Tersediannya dokumen perencanaan tata ruang	94.46%	95%	904.097.000											
Program fasilitas koordinasi pembinaan dan keterpaduan tata ruang (tahun 2020-2023)	Rasio Kesesuaian Ruang				95.20%	1.640.062.000	95.50%	1.612.854.000	95.70%	1.726.913.550	95.90%	2.325.238.304	95.90%	2.325.238.304	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD			
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target		(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Berbasis (tahun 2018-2019)	Rasio Pelayanan jaringan air minum pejumlah rumah	100%														
Pembangunan, Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas Perkotaan	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum	66,39%	67,39%	88.62 7.428 .650	69,39%	525.8 84.15 7.000	71,39%	107.8 55.14 7.059	73,39%	113.7 07.25 3.336	75,39%	132.1 22.55. 147	75,39%	132.1 22.55. 147		
	Rasio Cakupan Pelayanan Air Limbah	0.39%	0,97%		1.56%		2,16%		2,77%		3,38%		3,38%			
	Rasio Bangunan dalam kondisi baik	37.20%	53,37%		61,46%		69,54%		77,63%		85,18%		85,18%			
Program Perencanaan Teknis ke PU-an (tahun 2020-2023)	Rasio dokumen perencanaan yang diimplementasikan	76%	80%	837.1 20.60 0	84%	7.182. 478.0 00	90%	6.550. 740.0 00	94%	6.496. 150.5 00	100%	8.746. 875.5 85	100%	8.746. 875.5 85		
Pembangunan, Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong (tahun 2018-2019)	Rasio Panjang Drainase dalam kondisi baik	n/a	5,26	10.99 0.300 .000												
Peningkatan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase/sungai (tahun 2020-2023)	Rasio Sistem Jaringan Drainase/sungai dalam Kondisi Baik	n/a	5,26	10.99 0.300 .000	15,79%	30.12 5.382. 000	47,37%	33.20 4.284. 379	57,89%	30.85 5.000. 000	68,42%	44.79 9.000. 000	68,42%	44.79 9.000. 000		
Pembangunan , peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (tahun 2018-2023)	Ratio jalan status kota dalam Kondisi Baik	86.32%	89.06%	112.2 88.61 6.400	91.79%	112.3 73.27 3.000	94.53%	106.1 12.74 2.498	97.26%	105.2 28.46 9.644	100%	141.6 87.03 9.420	100%	141.6 87.03 9.420		
	Ratio jembatan dalam Kondisi Baik	94.59%	94.59%		97.30%		97.30%		100%		100%		100%			
Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman															DPRKP	
Program Peningkatan kualitas Lingkungan Permukiman Berbasis Kawasan (tahun 2018-2019)	Persentase kawasan permukiman yang ditangani	78.79%														
Program Penataan dan Peningkatan kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan (tahun 2020-2023)	Persentase penanganan Luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan		78.79%	3.804 .751. 000	83%	3.918. 000.0 00	87%	3.631. 500.0 00	87%	3.532. 642.5 00	87%	4.665. 996.7 90	87%	4.665. 996.7 90		
Program Pembangunan, pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan (tahun 2018-2019)	Persentase Permukiman yang dilayani utilitas umum	20%	20%													

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target		(RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan, Pemeliharaan dan Penataan Utilitas Umum (TAHUN 2020-2023)	Persentase Permukiman yang dilayani Utilitas Umum			24.75 8.245 .000	40%	23.00 0.000. 000	60%	21.32 1.000. 000	80%	20.74 0.595. 000	100%	27.39 4.665. 890	100%	27.39 4.665. 890	
Program Pengembangan dan Fasilitas Penyelenggaraan Perumahan	Persentase Pemenuhan Rumah bagi MBR	12.50%	12.50%	2.500 .000. 000	25%	2.500. 000.0 00	50%	6.817. 500.0 00	75%	6.631. 912.5 00	100%	8.759. 585.5 30	100%	8.759. 585.5 30	
Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat															SATPOLPP, KESBANGPOL SATPOL PP
Program Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Trantibum Serta Penegakan Regulasi Daerah (tahun 2018-2019)	Terwujudnya penyelenggaraan trantibum dan penegakkan perda	100%	100%	5.069 .000. 000											
Program Penyelenggaraan Trantibum Serta Penegakan Regulasi Daerah (tahun 2020-2023)	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	60%	75%	5.069 .000. 000	85%	6.221. 000.0 00	90%	5.766. 300.0 00	90%	5.609. 328.5 00	98%	7.408. 932.7 40	98%	7.408. 932.7 40	
	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Jambi	55%	69%		74%		79%		84%		98%		98%		
Program Pembinaan Dan Perlindungan Masyarakat (tahun 2018-2023)	Rasio Petugas perlindungan masyarakat	45%	54%	798.7 18.80 0	68%	822.0 00.00 0	72%	761.4 00.00 0	80%	740.6 73.00 0	85%	978.2 97.89 0	85%	978.2 97.89 0	
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (tahun 2018-2019)	Terwujudnya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	76,71%	100%	563.8 19.00 0										KESBANGPOLI	
Program Peningkatan Karakter, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (tahun 2020-2023)	Persentase peningkatan peran forum kemasyarakatan dalam mengantisipasi sumber potensi konflik di daerah		100%	700.0 00.00 0	100%	648.9 00.00 0	100%	631.2 35.50 0	100%	833.7 51.90 0	100%	833.7 51.90 0	100%	833.7 51.90 0	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target		(RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitas bagi Orkemas dan Parpol (tahun 2019-2023)	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan kondisi daerah yang kondusif	100%	100%	273.848.000	100%	500.000.000	100%	463.500.000	100%	450.882.500	100%	595.536.760	100%	595.536.760	
Program Peningkatan Kesiagaan Dini dan Manajemen Logistik Kebencanaan (tahun 2018-2023)	Cakupan pelayanan kesiagaan dini	100%	100%	5.711.580.000	100%	5.882.000.000	100%	5.452.200.000	100%	5.303.779.000	100%	6.426.932.000	100%	7.005.355.880	DAMKAR
	Cakupan Peningkatan Pelayanan kebakaran Dan Penyelamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Sosial															DINSOS
Program Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase pelayanan bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar	60%	100%	2.739.152.000	100%	5.321.000.000	100%	4.932.000.000	100%	4.797.740.000	100%	11.336.967.880	100%	11.336.967.880	DINSOS
	Persentase pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	60%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase pemberdayaan sosial potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menangani PMKS	60%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase peningkatan penanganan jumlah keluarga miskin	60%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR															
Tenaga Kerja															NAKER DAN UMKM
Peningkatan Kualitas, Perlindungan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terdaftar yang dilatih dan ditempatkan	6%	7%	796.731.500	7%	1.820.000.000	7%	1.686.627.810	7%	1.640.714.053	7%	2.167.093.310	7%	2.167.093.310	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target		(RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase Peningkatan penyerapan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis	56%	56%		57%		58%		59%		60%		60%		
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak															DPMPA
Peningkatan Kesetaraan Gender, perlindungan perempuan dan anak	Penurunan Ratio KDRT	0,025%	0,023%	3.591.385.000	0,021%	3.699.000.000	0,020%	3.428.100.000	0,019%	3.334.779.500	0,017%	4.404.655.120	0,017%	4.404.655.120	
	Rasio Penurunan Kekerasan Terhadap Anak	0,0247	0,02371		0,0227		0,0217		0,0207		0,0197		0,0197		
	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	75%	80%		82%		85%		87%		90%		90%		
Pangan															DPKP
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Kelembagaan Tani(tahun 2018-2023)	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	88,5	88,5	1.143.319.000	89	2.375.200.000	89,5	2.927.943.000	90	2.765.279.500	96,90	3.819.360.000	96,90	3.819.360.000	
	Penurunan Pangan segar yang Tercemar	7	7		6		5		4		3		3		
Lingkungan Hidup															DLH
Program Penurunan Beban Pencemaran (tahun 2018-2019)	Jumlah sungai dan danau yang memenuhi baku mutu kelas IV	64.79%	64.79%	2.015.919.666											
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (tahun 2020-2023)	Jumlah Kegiatan Usaha yang Sudah Mengelola Lingkungan sesuai dengan Dokumen Lingkungan				153	2.076.000.000	160	2.138.000.000	170	2.202.140.000	180	2.268.204.000	180	2.268.204.000	
Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan, RTH, ruang publik dan keanekaragaman hayati (tahun 2018-2019)	Persentase RTH terhadap luas wilayah	20%	20%	10.658.995.6000											
	Jumlah dokumen kajian lingkungan														
	Jumlah usaha yang wajib rekomendasi izin gangguan														
	Persentase ketaatan kegiatan usaha														

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD			
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target		(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Jumlah pohon pelindung															
	Persentase RTH terhadap luas wilayah															
Perlindungan dan Rehabilitasi Sumber daya alam	Persentase Kecukupan Ruang Terbuka Hijau Publik	11,79%	12%	10.65 8.995 .600	14%	10.97 8.000. 000	16%	10.17 6.300. 000	18%	9.899. 278.5 00	20%	13.07 5.199. 640	20%	13.07 5.199. 640		
Program Peningkatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan (tahun 2018-2019)	Persentase cakupan pelayanan persampahan	75,43%	79,66%													
Peningkatan kinerja pengelolaan sampah (tahun 2020-2023)	Persentase Jumlah Sampah yang ditangani	75%	79,66%	29.48 3.208 .050	78%	41.41 7.000. 000	76%	38.39 2.063. 564	74%	37.34 9.689. 201	72%	49.33 6.289. 445	72%	49.33 6.289. 445		
	Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	18%	20%		22%		24%		26%		28%		28%			
Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil															DUKCAPIL	
Program Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (tahun 2018-2023)	cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	93%	93%	2.550 .648. 000	96%	2.627. 000.0 00	99%	2.434. 500.0 00	100%	2.368. 227.5 00	100%	3.128. 011.1 50	100%	3.128. 011.1 50		
	cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	82%	82%		86,5%		91%		95,5%		100%		100%			
	validitas database kependudukan	87%	87%		89%		91%		93%		95%		95%			
	Cakupan Pemanfaatan data Kependudukan	-	26,8%		33,3%		45%		72,7%		100%		100%			
Pemberdayaan masyarakat dan desa															DPMPPA	
Program Pemberdayaan Masyarakat (tahun 2018-2019)	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23%	60,23%	4.351 .493. 000												
Program peningkatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat (tahun 2020-	Persentase Kelompok UEM yang Aktif	73%	75%	4.351 .493. 000	77%	4.482. 000.0 00	79%	4.154. 400.0 00	81%	4.154. 400.0 00	83%	5.337. 854.2 60	83%	5.337. 854.2 60		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target		(RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2023)	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	63%	65%		66%		67%		68%		70%		70%		
	Persentase Pemanfaatan Alat Teknologi Tepat Guna	70%	75%		77%		80%		83%		85%		85%		
	Persentase Usulan Sarana Prasarana Kelurahan yang Terakomodir	92%	93%		94%		95%		96%		97%		97%		
Pengendalian penduduk dan KB															DPPKB
Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Laju Pertumbuhan Penduduk	N/A	1,05	4.759.993.000	1,05	4.902.000.000	1,03	4.544.100.000	1,01	4.420.039.950	1,01	5.838.567.560	1,01	5.838.567.560	
	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	N/A	96,23%		96,46%		96,69%		96,92%		97,15%		97,15%		
Perhubungan															DISHUB
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (tahun 2018-2019)	capaian ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan sesuai yang ditargetkan	65%	65%	3.825.530.000											
Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan (tahun 2020-2023)	Capaian ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan				74%	6.940.000.000	84%	6.433.200.000	91%	6.258.074.000	100%	8.265.811.170	100%	8.265.811.170	
	Cakupan yang terlayani angkutan umum		41.39%		54.75%		70.19%		85.09%		100%		100%		
Program Peningkatan Pengelolaan dan keselamatan perhubungan (tahun 2018-2019)	Pengurangan Jumlah Titik Kemacetan	60 Titik	41 Titik	4.423.020.000											
Program Pengendalian dan Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas (tahun 2020-2023)	Pengurangan Jumlah Titik Kemacetan				36 Titik	1.555.000.000	28 Titik	1.440.900.000	20 Titik	1.401.675.500	0 Titik	1.797.442.700	0 Titik	1.797.442.700	
Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Persentase Pelayanan Perparkiran	68.17%	74.76%	2.239.964.000	80.74%	2.307.000.000	88.99%	2.138.400.000	94.58%	2.080.188.000	100%	27.475.510.100	100%	27.475.510.100	
Diskominfo															DISKOMINFO

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD			
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target		(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (tahun 2018-2019)	Persentase peningkatan ekosistem TIK	20%														
Program Peningkatan akses dan kualitas informasi publik (tahun 2020-2023)	Persentase Peningkatan ekosistem TIK	20%	30%	0	45%	6.400.000,00	60%	5.932.800,00	70%	6.621.296,00	80%	7.622.863,70	80%	7.622.863,70		
	Cakupan akses dan kualitas informasi publik	30%	40%		60%		70%		80%		90%		90%			
Koperasi, Usaha kecil dan menengah															NAKER DAN UMKM	
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (tahun 2018-2023)	Persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT	41,28%	48,16%	609.120,250	57,33%	627.000,000	68,8%	580.500,000	82,56%	564.697,500	98,62%	745.865,200	98,62%	745.865,200		
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM (tahun 2018-2023)	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	48,31%	49%	859.445,250	49,69%	885.000,000	50,38%	819.900,000	51,07%	797.580,500	51,76%	1.053.463,200	51,76%	1.053.463,200		
Penanaman Modal															DPMPSTP	
Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik (tahun 2018-2019)	Persentase peningkatan jumlah pemohon yang mengajukan izin	65%														
	Persentase penerbitan perizinan sesuai SOP dan SP															
	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan masyarakat															
Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan (tahun 2020-2023)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86,45%	86,55%	673.760,000	86,75 %	793.000,000	86,85 %	734.400,000	86,95 %	714.408,000	87%	943.606,460	87%	943.606,460		
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (tahun 2018-2019)	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	410 M														
Peningkatan Realisasi Investasi (tahun 2020-2023)	Realisasi Investasi		430,5 M	269.955,500	430,5 M	678.000,000	474,62M	628.200,000	498,35 M	611.099,000	523,37 M	807.153,720	523,37 M	807.153,720		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target		(RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kepemudaan dan Olahraga															DISPORA
Program Pembinaan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan kepemudaan (tahun 2019-2023)	Persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam organisasi	30%	40%	7.752.810.000	50%	8.528.091.000	60%	8.442.810.090	70%	8.771.141.594	80%	12.372.469.142	80%	12.372.469.142	
	Persentase pembinaan cabang olahraga prestasi	68,89%	71,11%		73,33%		75,56%		77,78%		80%		80%		
Statistik															DISKOMINFO
Program Manajemen data/informasi/statistik daerah (tahun 2020-2023)	Tingkat ketersediaan data/informasi/statistik daerah	5%	10%	0	20%	155.000.000	39%	143.100.000	40%	139.204.500	50%	183.864.470	50%	183.864.470	
Persandian															DISKOMINFO
Program Penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah (tahun 2020-2023)	Rasio Jumlah Informasi Milik Pemerintah yang diamankan	15%	20%	0	35%	600.000.000	50%	556.200.000	55%	541.059.000	65%	714.643.240	65%	714.643.240	
Kebudayaan															DISPARBUD
Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata (tahun 2018-2019)	Jumlah penyelenggaraan dan partisipasi dalam event sen budaya dan cagar budaya yang dipugar	N/A													
Pembinaan, peningkatan dan perluasan pengelolaan kebudayaan (tahun 2020-2023)	Jumlah pelestarian, penyelenggaraan even seni dan budaya	5	5		5	1.500.000.000	6	1.390.500.000	6	1.352.647.500	6	1.786.608.100	6	1.786.608.100	
Perpustakaan															DKP
Program Peningkatan Mutu dan pelayanan Perpustakaan	Jumlah Rata - Rata pengunjung Perpustakaan Tahunan	32.092 Pengunjung	35.173 Pengunjung	552.691.000	37.836 Pengunjung	1.069.000.000	42.836 Pengunjung	990.900.000	47.836 Pengunjung	963.925.500	52.836 Pengunjung	1.273.175.590	52.836 Pengunjung	1.273.175.590	
Kearsipan															DKP
Program Pengelolaan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah arsip yang terselamatkan	46.019	1.2	725.920.500	1.2	1.247.000.000	1.2	1.155.600.000	1.2	1.124.142.000	1.2	1.484.793.640	52.019	1.484.793.640	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target		(RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(tahun 2018-2023)	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	-	20		36		36		36		36		164		
Pelayanan Urusan Pilihan				-		-		-		-		-		-	
Pariwisata															DISPARBUD
Pembinaan, peningkatan dan Perluasan Pengelola an Budaya dan Pariwisata (tahun 2018-2019)	Jumlah aktivitas kepariwisataan	2,4													
Pembinaan, peningkatan, dan perluasan pengelolaan pariwisata (tahun 2020-2023)	Jumlah kunjungan wisatawan	400	450	2.474.305.000	500	2.000.000.000	600	1.854.000.000	650	2.653.530.000	700	5.163.074.163	700	5.163.074.163	
	PAD Sektor Pariwisata	43 M	43,5 M		45,5 m		47 M		48 M		50 M		50 M		
	Lama Kunjungan wisata	3 Hari	3 Hari		3 Hari		3 Hari		3 Hari		3 Hari		3 Hari		
Pertanian															DPKP
Peningkatan, Produksi, Mutu Produk dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan(gram/ kapita/ hari)	2.944	2.944		2.989		3.08	3.757.500.000	3.18	3.659.250.000	3.2	5.126.416.60	3.2	5.126.416.60	
		76,24	76,24	4.507.242.000	79	3.539.000.000	82		85		88		88		
Kehutanan															
Energi dan Sumberdaya mineral															
Perdagangan															DPP
Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Perp asaran (tahun 2018-2019)	Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	88%		4.389.858.500											
Pembinaan, Peningkatan dan Pengawasan Perdagangan (tahun 2020-2023)	Cakupan bina perdagangan		90%		92,25%	5.950.000.000	95,25%	5.463.900.000	97,50%	5.257.250.000	100%	7.014.150.000	100%	7.014.150.000	
Perindustrian															DPP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD			
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target		(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Pembinaan, Pengembangan, Peningkatan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah (tahun 2018-2019)	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	4,3														
Pembinaan dan peningkatan Industri kecil menengah (tahun 2020-2023)	cakupan bina industri kecil menengah		4,3	4.108.763.500	5,35	2.450.000.000	6,5	2.313.000.000	7,5	2.320.500.000	8,3	3.210.050.000	8,3	3.210.050.000		
Kelautan dan Perikanan															DPKP	
Perencanaan															BAPPEDA	
Program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	4.278.543.000	100%	4.906.000.000	100%	4.547.700.000	100%	4.423.901.500	100%	5.843.193.520	100%	5.843.193.520		
Keuangan															BPKAD DAN BPPRD	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah (tahun 2018-2023)	Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pengendalian Keuangan Daerah Tepat Waktu dan sesuai aturan	33 OPD	33 OPD	2.546.041.150	35 OPD	3.622.000.000	37 OPD	3.343.500.000	38 OPD	3.239.732.500	40 OPD	4.262.764.370	40 OPD	4.262.764.370	BPKAD	
	Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja	75%	75%		80%		85%		95%		100%		100%			
	Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Data Barang Milik Daerah yang Akurat dan Tepat waktu	20 PD	20 PD		20 PD		30 PD		40 PD		40 PD		40 PD			
	Jumlah OPD dan BLUD yang menyajikan Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dan SAK	37 OPD	37 OPD		40 OPD dan 11 BLUD		40 OPD dan 21 BLUD		40 OPD dan 21 BLUD		40 OPD dan 22 BLUD		40 OPD dan 22 BLUD			
Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah (tahun 2018-	Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah	9%	9%	3.053.202.000	9%	3.644.000.000		3.377.700.000	9%	3.285.751.500	9%	4.339.898.220	9%	4.339.898.220	BPPRD	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target		(RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2023)						00									
	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Keakuratan Basis Data dan Pelaporan Pajak	60%	60%		63%		65%		68%		70%		70%		
	Persentase Penyelesaian Piutang Pajak	10%	10%		15%		20%		25%		30%		30%		
Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan															BKPSDMD
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (tahun 2018-2019)	Indeks Profesionalitas ASN	60%	60%	3.856.200.000											
Program Penataan, pelayanan, pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur (tahun 2020-2023)	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan	93,23%	93,23%		96%	4.971.000.000	97%	4.608.000.000	98%	4.482.560.000	100%	10.920.670.720	100%	10.920.670.720	
	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	85%	85%		89%		91%		93%		95%		95%		
	Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan	72%	72%		83%		88%		94%		100%		100%		
	Persentase Penilaian Kinerja ASN	85%	85%		87%		87%		87%		87%		87%		
	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	32%	32%		46%		53%		60%		67%		67%		
	Persentase Pengembangan Kualifikasi ASN				27%		52%		84%		100%		100%		
Penelitian dan pengembangan															BAPPEDA
Penelitian dan Pengembangan (tahun 2020-2023)	Persentase Dokumen hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar perencanaan	100%	100%		100%	200.000.000	100%	270.000.000	100%	297.500.000	100%	436.000.000	100%	436.000.000	
Pengawasan															INSPEKTORAT

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target		(RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Interna, Pembinaan Internal, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan pelaksanaan pembinaan internal dan pengendalian kebijakan KDH	85%	100%	2.343.990.000	100%	2.914.000.000	100%	2.700.900.000	100%	2.627.375.500	100%	8.470.299.490	100%	8.470.299.490	
Sekretariat dewan															SETWAN
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (tahun 2018-2019)		77%		34.956.263.5000											
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD (tahun 2018-2019)															
Program Peningkatan kapasitas lembaga dan pelayanan kedinasan DPRD (tahun 2020-2023)	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	1 dok	6 dok		6 dok	36.004.000.000	6 dok	33.375.600.000	6 dok	32.467.042.000	6 dok	42.883.233.440	6 dok	42.883.233.440	
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran untuk mengakomodir Program-program kerja DPRD	9 dok	9 dok		9 dok		9 dok		9 dok		9 dok		9 dok		
SETDA															
Pembinaan dan Fasilitasi bagi organisasi dan kegiatan keagamaan (Tahun 2018-2019)	Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan keagamaan	100%	100%	8.963.713.750											
	Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan kesejahteraan sosial	70%	70%												
	Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan kepemudaan	70%	70%												
Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan dan kelembagaan Keagamaan (tahun 2020-2023)	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kepemudaan	66,67%	66,67%	8.963.713.750	75%	9.232.000.000	80%	8.557.200.000	100%	8.324.254.000	100%	10.994.870.330	100%	10.994.870.330	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD			
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target		(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Peningkatan Kualitas Dan Pengelolaan Pelayanan Publik (tahun 2018-2019)	Meningkat nya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan penanaman modal, CSR dan BUD	35%	35%	799.850.000												
	Meningkat nya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan sarana dan prasarana ekonomi	30%	30%													
	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan distribusi dan produksi kebutuhan pokok	45%	75%													
Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan monitoring bidang perekonomian(tahun 2020-2023)	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan Monitoring Bidang perekonomian		75%		75%	823.000.000	75%	762.300.000	75%	741.548.500	75%	979.454.380	75%	979.454.380		
Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (2018-2019)	Tercapainya penyebarluasan informasi pembangunan daerah	71,43%	71,43%	6.200.000.000												
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan pemerintah daerah (2020-2023)	Persentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	71,43%	71,43%		72,23%	6.386.000.000	73,68%	5.919.300.000	75%	5.758.163.500	76,19%	7.605.517.510	76,19%	7.605.517.510		
Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, sekretariat daerah, Aparatur dan Keprotokolan	Meningkatnya kinerja layanan keprotokolan	70%	70%	3.400.000.000	80%	4.000.000.000	90%	3.696.300.000	100%	3.582.928.500	100%	4.716.065.940	100%	4.716.065.940		
	Jumlah telaah/rekomendasi staf ahli walikota terhadap kebijakan pemerintah daerah	1 Telaah/rekomendasi	1 Telaah/rekomendasi		2 Telaah/rekomendasi		3 Telaah/rekomendasi		3 Telaah/rekomendasi		3 Telaah/rekomendasi		3 Telaah/rekomendasi			
Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan setda dan kerumahtanggaan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah jabatan dan kantor Sekretariat Daerah	32,08%	32,08%	1.590.060.000	17,3%	1.279.000.000	17,07%	1.188.900.000	17,07%	1.310.989.000	17,07%	1.846.540.660	17,07%	1.846.540.660		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target		(RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan (tahun 2018-2019)	Terwujudnya sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan yang berkualitas dan tersedianya sarana dan prasarana pemkot	100%	80%	175.000.000											
Penataan Administrasi pemerintahan dan kewilayahan (tahun 2020-2023)	Ketepatan waktu Penyampaian LPPD	48%	48%		61%	12.953.000.000	74%	13.806.900.000	87%	15.131.045.500	100%	22.165.441.030	100%	22.165.441.030	
	Persentase Ketersediaan Lahan Tanah Untuk Pelayanan Masyarakat	13%	13%		16%		20%		23%		32%		32%		
	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	N/A	3 Kec		6 Kec		9 Kec		11 Kec		11 Kec		11 Kec		
Peningkatan Kerjasama Daerah (tahun 2018-2023)	Persentase Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	100%	100%	725.000.000	100%	846.000.000	100%	781.200.000	100%	757.384.000	100%	997.100.390	100%	997.100.390	
	Persentase Kesepakatan bersama yang di tindaklanjuti	66,67%	66,67%		76,92%		85,71%		93,33%		100%		100%		
	Persentase Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Penataan Peraturan Perundang-undangan dan penyelesaian perkara pemerintah daerah (tahun 2018-2023)	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diselesaikan	20%	20%	1.092.000.000	20%	1.124.000.000	20%	1.041.300.000	20%	1.012.953.500	20%	1.337.932.490	20%	1.337.932.490	
	Persentase penyelesaian perkara Pemerintah Daerah	27,27%	27,27%		27,27%		27,27%		27,27%		27,27%		27,27%		
Tata Kelola Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan (tahun 2018-2019)	Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas	50%	50%	385.620.000											
Tata Kelola Organisasi dan Ketatalaksanaan (tahun 2020-2023)	Rata-rata indeks pelayanan publik	20%	20%		20%	765.000.000	20%	747.000.000	20%	726.750.000	20%	951.549.290	20%	951.549.290	
	Persentase meningkatnya kualitas anjab dan ABK sesuai dengan peraturan yang berlaku	21%	16%		30%	120.000.000	50%	112.500.000	75%	110.500.000	100%	147.150.000	100%	147.150.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target		(RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja	100%	15%		38%	315.000.000	59%	193.500.000	79%	187.000.000	100%	245.250.000	100%	245.250.000	
Tata Kelola Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan (tahun 2018-2019)	Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas	20%	20%	494.060.000											
Tata Kelola Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa (tahun 2020-2023)	Persentase tertib administrasi pembangunan	50%	70%		75%	2.279.000.000	80%	2.112.300.000	85%	2.054.798.500	100%	2.714.025.880	100%	2.714.025.880	
	Persentase Kinerja Kelembagaan Pengadaan	19,13%	19,13%		37,81%		30,44%		65,00%		69,06%		69,06%		
Pemerintahan Umum															KECAMATAN
Pemberdayaan Masyarakat (tahun 2018-2019)	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan	40%	40%												
Pelayanan Umum Kecamatan (tahun 2020-2023)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	83	85	16501443.58	89	13.831.600.000	92	13.109.400.000	95	13.047.058.000	98	17.689.569.670	98	17.689.569.670	
Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat kecamatan tahun 2020-2023)	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan	40%	70%		75%	15.296.400.000	80%	13.886.730.000	85%	13.214.177.350	90%	16.996.886.802	90%	16.996.886.802	
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (tahun 2020-2023)	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir	50%	50%		50%	27.812.000.000	60%	25.781.724.000	70%	25.079.888.180	80%	33.126.106.423	80%	33.126.106.423	
Pemberdaya masyarakat kelurahan (tahun 2020-2023)	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditigkat kelurahan	40%	45%		50%	7.998.000.000	60%	7.414.146.000	70%	7.213.166.470	80%	9.526.197.295	80%	9.526.197.295	

Tabel 7.5.
Indikasi Rencana Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2018 -2023 (Setelah Perubahan)

NO.	OPD/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan					
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	Dinas Pendidikan							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	214,233,938,092	B	214,233,938,092	B	199,361,298,759
2	Dinas Kesehatan							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	187,483,323,247	100%	358,068,212,950	100%	199,359,801,490
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	13,459,305,819	BB	13,459,305,819	BB	14,318,574,262
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	6,484,749,491	B	6,484,749,491	B	6,115,296,992
5	Satuan Polisi Pamong Praja							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	NA	11,285,934,787	NA	8,726,504,018	NA	7,830,187,796
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	7,937,638,363	B	7,937,638,363	B	7,176,225,594
7	Dinas Sosial							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	71.01	6,649,685,913	74.39	6,335,145,700	77.77	6,493,664,235
8	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	4,999,363,551	BB	4,999,363,551	BB	5,725,601,328
9	Dinas Lingkungan Hidup							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	10,917,378,621	A	10,917,378,621	A	11,103,956,166

NO.	OPD/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan						
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	NA	8,031,878,382	NA	6,860,654,988	NA	6,965,077,890	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	5,011,924,360	BB	5,030,247,224	BB	5,325,548,451	
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	5,124,485,135	100%	5,205,924,628	100%	5,530,237,000	
13	Dinas Perhubungan								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	13,031,123,530	BB	13,031,123,530	BB	11,879,494,992	
14	Dinas Komunikasi dan Informatika								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	CC	5,117,847,047	CC	5,117,847,047	CC	5,785,808,533	
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	5,973,083,055	BB	5,973,083,055	BB	6,495,096,267	
16	Dinas Pemuda dan Olahraga								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	4,612,244,452	B	5,119,155,666	B	5,229,327,667	
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	6,863,754,491	100%	6,863,754,491	100%	6,984,236,131	
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	4,655,405,166	BB	4,655,405,166	BB	5,549,114,815	
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	13,874,550,200	BB	13,874,550,200	BB	14,395,329,532	

NO.	OPD/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan						
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	8,992,466,420	BB	8,992,466,420	BB	8,567,763,686	
21	Sekretariat Daerah KDH dan WKDH								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	NA	34,853,866,119	NA	34,655,118,747	NA	35,273,352,102	
22	Sekretariat DPRD dan DPRD								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	NA	46,697,545,614	NA	44,307,423,490	NA	40,572,856,381	
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	73.0 - 73.5	7,209,200,114	73.6- 73.9	12,114,800,000	74.0- 74.5	8,514,304,363	
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	9,103,542,958	BB	9,103,542,958	BB	10,804,180,326	
25	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	23,312,878,535	BB	23,312,878,535	BB	22,271,554,606	
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	22,748,522,251	BB	23,506,222,800	A	8,770,309,084	
27	Inspektorat Kota Jambi								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	8,768,703,424	B	9,084,893,712	B	11,139,849,900	
28	Kecamatan Kota Baru								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72.05	6,641,324,425	74.31	7,305,456,860	76.57	6,506,423,562	
29	Kecamatan Telanaipura								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	73.39	7,009,192,056	75.46	9,060,570,864	77.53	6,636,198,343	

NO.	OPD/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan					
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
30	Kecamatan Jelutung							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	79.56	7,779,999,351	84.06	8,557,999,286	88.56	8,148,166,199
31	Kecamatan Pasar							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	75.89	4,908,969,880	78.30	4,990,074,471	80.71	5,455,475,458
32	Kecamatan Jambi Selatan							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	78.00	8,029,960,245	79.60	8,832,956,270	81.20	7,002,478,792
33	Kecamatan Jambi Timur							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	79.27	11,693,328,500	80.80	13,763,866,008	81.56	9,392,366,255
34	Kecamatan Danau Teluk							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	71.43	5,544,816,740	74.09	6,000,291,544	76.62	5,870,135,142
35	Kecamatan Pelayangan							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	73.57	6,536,060,709	77.55	6,536,060,709	81.53	6,989,507,394
36	Kecamatan Alam Barajo							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	76.13	8,029,960,245	77.63	8,832,956,269	79.13	8,557,564,552
37	Kecamatan Danau Sipin							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72.41	6,242,259,633	73.55	6,866,485,596	74.61	6,026,974,929
38	Kecamatan Paal Merah							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	78.12	6,573,292,270	81.40	6,919,255,021	84.68	6,775,776,901
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	NA	4,430,425,795	NA	4,430,425,795	NA	4,095,269,185

NO.	OPD/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan						
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	JUMLAH			780,853,928,986		960,067,727,955			758,994,385,060

Tabel 7.6.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Tahun 2018 -2023 (Setelah Perubahan)

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
	Dinas Pendidikan											
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya APM 1. PAUD 2. KESETARAAN 3. SD 4. SMP					14,62	142,058,880,134	14,63	118,030,599,568	14,64	41,842,189,892
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya Kompetensi Peserta Didik terhadap Kearifan Lokal					12,32	319,380,058	8,32	28,932,680	4,32	28,929,862
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan					10,70	81,656,000	10,71	81,656,000	10,72	79,392,800
1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Tertib Pengelolaan Perizinan Pendidikan					100%	33,164,585	100%	137,241,395	100%	158,477,687
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
	Dinas Kesehatan											
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM Bidang Kesehatan yang mencapai >90%					100%	58,589,230,557	100%	99,148,720,929	100%	35,646,434,511
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kopetensi sumberdaya manusia kesehatan yang sesuai standar					100%	349,556,917	100%	595,000,000	100%	159,999,911
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase pengawasan untuk sarana produksi alkes, PKRT dan UMOT					100%	368,537,970	100%	465,000,000	100%	125,695,373
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					100%	389,055,991	100%	390,461,590	100%	136,068,715

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					52.76%	32,291,938,320	54.19%	28,251,115,000	55.62%	28,500,000,000
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum					71.39%	57,782,580,000	73.39%	4,959,426,420	75.39%	5,000,000,000
1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rasio Cakupan Sarana dan Prasarana Persampahan					79.87%	2,406,837,550	84.49%	741,285,025	88.72%	741,000,000
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah					3.85%	6,583,728,790	4.05%	6,130,594,552	6.01%	11,575,000,000
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik					47.37%	1,297,304,490	51.26%	1,361,367,500	56.39%	1,370,000,000
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Rasio Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik					84%	56,064,546,320	86.52%	49,657,731,455	89.12%	49,217,000,000
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik					61.46%	294,873,827,740	68.44%	75,067,234,212	76.39%	130,527,931,498
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik					17.52%	131,752,099,600	48%	6,000,118,836	49.49%	6,757,494,242
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap					85.55%	51,575,765,250	90.37%	89,022,000,000	95.00%	47,100,000,000
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an					15.09%	2,484,277,857	23.64%	1,950,000,000	53%	1,950,000,001
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang					75.00%	4,585,999,757	80.00%	1,947,562,000	85%	1,999,999,997
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman											
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR					60%	806,021,206	63%	1,092,872,897	65%	602,943,199
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh					64.48%	5,759,621,154	66.12%	2,624,028,952	75.44%	2,266,935,470
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Perumahan yang dilayani Utilitas Umum					82%	27,618,191,428	88%	26,431,830,096	94%	24,589,824,339

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM		Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	1.04.06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan					0%	0	20%	22,619,495	50%	0
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
	Satuan Polisi Pamong Praja												
	1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat					NA	1,168,675,821	76%	6,320,695,982	79%	6,465,812,204
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan												
	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Penurunan angka kejadian bencana					26%	3,976,716,676	25%	3,882,060,000	23%	0
	1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penurunan Angka Kejadian Kebakaran					85%	9,279,005,576	85%	9,058,140,000	83%	5,441,774,406
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
	Dinas Sosial												
	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Menangani PMKS					100%	1,579,491,570	100%	1,579,491,570	100%	1,649,263,770
	1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan					100%	85,408,330	100%	85,408,330	100%	53,099,000
	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial yang di layani					100%	1,382,638,800	100%	1,382,638,800	100%	1,300,831,950
	1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial PMKS Terlayani					100%	990,000,000	100%	990,000,000	100%	336,460,675
	1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana saat tanggap darurat					100%	737,756,000	100%	737,756,000	100%	712,680,370

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah											
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam RTKD							100%	49,539,800	100%	0
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih dan Bekerja				60%	470,069,199		100%	470,069,199		339,892,113
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja yang Terdaftar				42%	201,543,806		100%	201,543,806		92,044,706
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Perselisihan HI dengan Perjanjian Bersama				58%	329,033,968		100%	329,033,968		228,939,088
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak											
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan				94.20%	715,349,070		94.20%	715,349,070	94.20%	654,765,683
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Penurunan Rasio KDRT				0.020	485,107,261		0.019	533,617,987	0.017	146,305,300
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan keluarga berkualitas				30%	177,149,200		35%	177,149,200	40%	191,508,280
		Nilai Indeks Pembangunan Keluarga				30%	168,951,590		35%	185,846,749	40%	
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan data Gender dan anak				20%	282,101,590		25%	282,101,590	30%	267,409,952
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)				80%	305,283,114		90%	335,811,425	100%	298,626,759
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Penurunan Rasio Kekerasan Terhadap Anak				0.054	571,677,622		0.052	628,845,384	0.05	267,678,308
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan				88.80	1,050,000,000		91.00	1,100,000,000	93.10	380,000,000
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penurunan Daerah Rawan Pangan				40%	160,000,000		60%	200,000,000	80%	125,000,000
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tingkat Keamanan Pangan Segar				85%	163,000,000		85%	538,000,000	85%	358,600,000

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
	Dinas Lingkungan Hidup											
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian Perencanaan Lingkungan Hidup Dengan RPJM					100%	296,839,855	100%	14,776,080	100%	3,747,750
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi					7 Nilai	1,622,806,723	7 Nilai	1,633,324,457	7 Nilai	1,188,135,732
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan					0.06%	7,286,865,621	0.06%	7,465,489,900	0.06%	6,411,836,970
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)					100%	31,393,550	100%	52,382,193	100%	113,640,510
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)					20%	199,704,960	25%	344,011,111	30%	188,563,000
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup					100%	215,854,234	100%	166,540,000	100%	12,450,000
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup					0	0	0	0	100%	0
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup					100%	26,739,900	100%	123,060,201	100%	75,590,000
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan					90.98%	35,785,928,643	90.98%	32,151,754,977	92%	31,249,079,872
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan					99%	187,800,697	100%	273,423,700	100%	385,057,260
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil					99.00%	187,800,697	100%	273,423,700	100%	339,600,500
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Validitas database Kependudukan					91%	2,820,191,495	93%	2,282,639,011	95%	1,701,364,321

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan					53.26%		80.4%		53.26%	
	2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan					100%	32,574,960	100%	32,574,960	100%	35,900,029
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat					70%	4,744,445,907	71%	4,744,445,907	73%	4,082,157,267
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
	2.14.02	Program Pengendalian Penduduk					11 Data	245,713,237	11 Data	220,428,139	11 Data	123,898,001
	2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)					100%	4,494,642,464	100%	1,497,314,800	100%	1,549,404,999
							100%		100%		100%	
	2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)					68%	1,058,933,099	32%	151,977,358	51%	126,460,000
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
	Dinas Perhubungan											
	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)					0.48	40,879,225,000	0.47	31,320,445,000	0.46	8,196,979,423
	2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran					45%	700,000,000	64%	700,000,000	71%	156,525,585
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
	Dinas Komunikasi dan Informatika											
	2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik					70%	5,392,878,753	80%	4,011,400,000	85%	4,347,389,603

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	2.16.03	Program Aplikasi Informatika					75%	3,193,192,965	80%	2,579,443,100	90%	3,077,683,910
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah											
	2.17.03	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam					8%	39,999,870				0
	2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi					37,5%	20,178,154	84,6%	33,443,984	86,7%	0
	2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian					14%	539,282,212	16,9%	252,904,515	20,7%	138,213,366
	2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					22%	122,742,000	5%	220,698,681	5%	71,980,726
	2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)					30%	202,889,976	9,42%	493,841,379	15,71%	230,328,673
	2.17.08	Program Pengembangan UMKM					20%	143,678,430				0
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu											
	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					2 investor	94,574,800	2 investor	219,180,800	2 investor	71,570,717
	2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal					10%	454,304,746	10%	233,758,660	10%	272,536,996
	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal					84	892,232,389	85	759,373,300	85.5	827,691,598
	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					10%	533,747,577	10%	454,835,553	10%	458,840,289
	2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal					100%	65,999,620	100%	72,599,582	100%	47,264,133

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
	Dinas Pemuda dan Olahraga											
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Pelopor					65%	1,164,212,000	75%	1,397,054,400	83%	1,571,001,500
		Persentase wirausaha muda Pemula					75%	43,459,000	78%	52,150,800	80%	
		Persentase OKP yang Aktif					64%	56,107,000	86%	67,328,400	93%	
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga					31%	238,510,000	62%	298,125,000	87%	10,204,625,000
		Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi					78%	5,032,340,000	80%	5,132,340,000	82%	
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Gudep yang Dibina					25%	471,401,900	50%	416,924,099	80%	1,302,045,833
		Persentase Anggota Pramuka yang Dibina					25%	750,000,000	0%	640,081,572	70%	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
	Dinas Komunikasi dan Informatika											
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya data statistik sektoral					39%	143,100,000	40%	139,204,500	50%	58,942,700
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
	Dinas Komunikasi dan Informatika											
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Terwujudnya pengamanan informasi					50%	556,200,000	55%	541,059,000	65%	56,175,254
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan											
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan					35%	994,285,196	35%	1,098,626,823	35%	665,096,026
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional					35%	149,645,130	35%	97,296,190	30%	0
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Pembinaan Sejarah Kota Jambi					35%	24,000,000	35%	34,087,540	35%	81,031,336

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan											
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Jumlah Perpustakaan yang memenuhi SNP					-	0	2 Perpustakaan	1,245,184,235	2 Perpustakaan	789,616,659
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah naskah Kuno yang dilestarikan					-	0	1 Naskah	56,827,020	1 Naskah	54,576,268
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan											
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati diri Bangsa					0%	0	350 Orang	877,927,645	357 Orang	350,407,433
		Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis Sebagai Warisan Budaya yang dipreservasi					0%		25 Arsip		28 Arsip	
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip Yang Telah Habis Masa Retensinya					52%	10,630,643	68%	283,332,637	88%	162,873,291
2.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah Perizinan Penggunaan Arsip					0%	0	1 Izin	12,895,300	1 Izin	38,290,218
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan (PUD) Sungai Danau dan Rawa					600 Ton	75,000,000	680 Ton	80,000,000	680 Ton	70,000,000
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya					2.536 Ton	355,000,000	2.586 Ton	375,000,000	2.638 Ton	380,000,000
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Produksi Produk Perikanan bernilai Tambah/Produksi Olahan Hasil Perikanan					1868 Ton	125,000,000	1887 Ton	130,000,000	1906 Ton	80,000,000

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan											
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Objek Daya Tarik Destinasi Wisata					30%	1,440,428,932	25%	1,215,743,592	20%	705,665,406
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan Pemasaran Pariwisata					30%	923,251,860	25%	1,201,391,091	25%	754,369,434
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					35%	250,079,626	25%	444,493,910	20%	687,722,983
3.26.06	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual					0%	0	0%	0	50%	0
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Laju Peningkatan Produktivitas Pertanian					20%	665,000,000	20%	820,000,000	20%	550,000,000
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penambahan pembangunan prasarana (Pembangunan Screen House)					40%	184,000,000	60%	56,000,000	80%	135,333,649
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian penyakit hewan dan penjaminan pangan asal hewan yang ASUH					75%	588,000,000	75%	647,500,000	75%	555,000,000
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pertanian Aman dari Serangan OPT dan DPI (Dampak Perubahan Iklim)					80%	135,000,000	85%	135,000,000	90%	94,736,819
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan					2%	305,000,000	2%	340,000,000	2%	350,000,000
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian											
3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan					66%	137,236,284	66%	134,835,000	100%	96,479,710
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan					66%	2,066,560,398	66%	2,430,000,000	100%	1,366,319,643

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM		Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting					66%	688,236,841	66%	934,250,000	100%	513,416,530
	3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pengembangan ekspor					41.67%	91,575,335	70.83%	337,000,000	100%	96,813,442
	3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen					58.98%	163,225,168	79.49%	245,000,000	100%	145,305,957
	3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan pemasaran produk dalam negeri					60.87%	910,999,748	80.43%	1,130,000,000	100%	837,235,139
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian												
	3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase perencanaan dan pembangunan industri					66%	536,596,346	66%	632,000,000	100%	684,894,794
	3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pengendalian izin usaha industri					66%	106,074,800	66%	150,000,000	100%	56,526,586
	3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengelolaan sistem informasi industri					66%	123,965,259	66%	144,315,159	100%	45,244,513
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4.01	SEKRETARIAT DAERAH												
	Sekretariat Daerah KDH dan WKDH												
	4.01.02	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitas dan Koordinasi Program Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti					100%	26,538,938,800	100%	26,629,548,976	100%	23,521,978,554
	4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang Diimplementasikan					100%	3,363,999,721	100%	3,385,669,477	100%	1,779,669,344
4.02	SEKRETARIAT DPRD												
	Sekretariat DPRD dan DPRD												
	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD					100%	27,011,923,250	100%	27,361,376,510	100%	26,620,143,619

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5.01	PERENCANAAN											
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah					100%	1,444,393,000	100%	1,099,412,146	100%	1,382,963,985
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah					21,33	1,210,297,551	21,57	1,523,998,120	21,81	1,184,565,031
5.02	KEUANGAN											
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah											
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah					100%	29,467,424,142	100%	27,890,213,645	100%	27,895,918,978
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah					70%	1,216,420,678	75%	1,365,111,673	80%	1,972,143,771
	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah											
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah					100%	25,409,284,284	100%	26,776,300,000	100%	7,872,445,394
5.03	KEPEGAWAIAN											
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah											
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu					91%	2,575,878,850	93%	4,062,800,000	95%	2,731,712,866
		Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan				97%	98%		99%			
		Persentase Kinerja ASN yang mendapatkan Nilai Baik				87%	89%		91%			
		Persentase penurunan angka pelanggaran Disiplin ASN				6,25%	6,7%		7,1%			
		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan Formal				25%	30%		35%			

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah											
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan Kompetensi					50%	2,870,714,239	53%	5,521,977,000	57%	2,385,978,050
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan					100%	745,553,419	100%	917,000,000	100%	692,166,621
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
6.01	INSPEKTORAT DAERAH											
	Inspektorat Kota Jambi											
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Pelaksanaan Pengawasan, Pembinaan dan Evaluasi SAKIP PD					100%	2,414,850,000	100%	1,288,720,000	100%	1,290,350,100
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Cakupan Pelaksanaan, Pembinaan dan Evaluasi RB PD					100%	397,685,000	100%	1,618,825,000	100%	832,800,000
UNSUR KEWILAYAHAN												
7.01	KECAMATAN											
	Kecamatan Kota Baru											
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					87.93	151,105,515	90.65	166,216,600	93.37	904,138,865
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					80%	3,660,322,107	83%	4,026,354,300	86%	3,530,768,938
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					60%	832,486,980	65%	915,735,700	70%	56,108,500
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					75%	555,651,129	79%	611,216,250	83%	259,560,135

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Kecamatan Telanaipura												
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					92	84,164,541	95	96,789,222	98	1,888,787,536
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat yang di kelurahan					60%	2,393,995,661	70%	2,753,095,010	80%	2,986,824,315
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					100%	84,557,500	100%	97,241,125	100%	186,148,320
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					100%	755,975,094	100%	869,371,358	100%	646,841,486
Kecamatan Jelutung												
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					84%	107,740,360	88%	118,514,396	92%	231,357,426
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					80%	3,682,458,400	82%	4,050,704,240	84%	3,646,106,956
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					85%	47,044,070	86%	51,748,477	87%	92,156,351
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					81%	634,539,671	83%	697,993,638	85%	1,287,213,068
Kecamatan Pasar												
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					92	95,061,300	93	320,913,500	95	286,855,720
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan					63%	1,226,217,720	64%	1,613,335,270	66%	1,406,991,922
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					100%	41,202,500	100%	295,298,436	100%	290,985,100
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					100%	431,938,600	100%	353,968,001	100%	209,691,800
Kecamatan Jambi Selatan												
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					80%	742,551,159	80%	816,806,275	80%	2,094,151,227
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					80%	3,615,277,600	81%	3,976,805,360	82%	3,059,679,000

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Keterbiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					85%	146,130,500	86%	160,743,550	87%	108,840,000
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					80%	311,794,080	82%	342,973,488	84%	21,650,981
Kecamatan Jambi Timur												
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					92	687,800,000	95	756,580,000	98	630,231,160
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					60%	8,262,070,000	70%	9,088,000,000	80%	4,247,497,430
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Keterbiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					35%	148,800,000	45%	164,000,000	55%	77,388,800
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					100%	669,000,000	100%	735,000,000	100%	102,516,355
Kecamatan Danau Teluk												
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					87	19,797,942	88	30,100,050	89	227,028,854
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					85%	1,492,387,460	86%	1,598,633,005	87%	1,579,162,790
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Keterbiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					86%	81,983,760	88%	85,200,000	90%	27,375,000
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					80%	320,899,450	81%	400,434,500	82%	273,298,214
Kecamatan Pelayangan												
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					3.67	25,897,987	3.89	150,258,800	4.11	156,218,020
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					61.11%	1,442,759,800	72.22%	1,615,145,800	88.88%	1,439,369,706
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Keterbiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					40%	14,874,250	60%	161,124,900	80%	152,406,400
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					50%	152,850,610	62.5%	325,554,200	75%	337,498,480

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Kecamatan Alam Barajo												
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					90	742,551,159	95	816,806,275	98	540,061,482
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat yang dibina dikelurahan					65%	3,615,277,600	70%	3,976,805,360	75%	3,664,055,013
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian kasus terkait ketentraman dan ketertiban umum					100%	146,130,500	100%	160,743,550	100%	152,946,700
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					100%	311,794,080	100%	342,973,488	100%	349,372,253
Kecamatan Danau Sipin												
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					93	239,008,840	94	262,909,724	95	440,681,919
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					72.72%	2,656,307,868	72.72%	2,921,938,654	72.72%	3,311,966,981
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					25%	91,710,800	50%	100,881,880	75%	399,621,773
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					60%	1,332,879,813	70%	1,466,167,794	80%	134,754,398
Kecamatan Paal Merah												
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					88%	304,425,910	90%	334,868,501	92%	129,111,970
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					82%	4,001,909,301	83%	4,402,100,231	84%	4,606,941,457
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					90%	161,383,600	91%	177,521,960	92%	48,714,800
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					79%	465,984,539	80%	512,582,993	81%	212,454,872

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan penguatan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang cinta tanah air					100%	315,403,000	100%	315,403,000	100%	263,859,000
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Patai Politik dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilu					100%	1,487,851,244	100%	1,487,851,244	100%	3,477,837,895
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan kondisi daerah yang kondusif					100%	716,799,961	100%	716,799,961	100%	621,580,000
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase peningkatan fasilitasi pembinaan umat beragama dan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba					100%	248,069,000	100%	248,069,000	100%	186,760,000
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan daerah dan potensi konflik di Kota Jambi					100%	134,651,000	100%	134,651,000	100%	807,693,920
JUMLAH								1,208,927,281,762		845,938,845,036		650,665,747,015

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Konsep kinerja menurut beberapa ahli, diantaranya:

1. Anwar Prabu Mangkunegara (2000 : 67) menyatakan, bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
2. Ambar Teguh Sulistiyani (2003 : 223) menyatakan, bahwa kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya.
3. Maluyu S.P. Hasibuan (2001:34) mengemukakan bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.

4. John Whitmore (1997 : 104) mengemukakan, bahwa kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang, kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan.
5. Barry Cushway (2002 : 1998) menyatakan, bahwa kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan.
6. Veizal Rivai (2004 : 309) mengemukakan, bahwa kinerja adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan.
7. Robert L. Mathis dan John H. Jackson dalam terjemahaan Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira (2001 : 78) menyatakan, bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan.
8. John Witmore dalam ***Coaching for Perfomance*** (1997 : 104) menyebutkan, bahwa kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan.
9. Mink (1993 : 76) mengemukakan pendapatnya, bahwa individu yang memiliki kinerja yang tinggi memiliki beberapa karakteristik, diantaranya: (a) berorientasi pada prestasi, (b) memiliki percaya diri, (c) berpengendalian diri, (d) kompetensi.

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator keluaran (*outcome*) program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*impact*). Indikator Kinerja Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Target indikator kinerja utama pembangunan Kota Jambi tahun 2018-2023, dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2013-2018 dan memperhatikan peluang serta tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2023, tersaji dalam Tabel 8.1.

Pada dasarnya, seluruh indikator yang tercantum dalam Tabel 8.1 diharapkan menjadi indikator dari visi Kota Jambi Tahun 2018-2023 yaitu “Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya, Dengan Mengedapankan Pelayanan Prima” dengan misi:

1. Penguatan birokrasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi.
2. Penguatan penegakan hukum, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
3. Penguatan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan, serta penataan lingkungan.
4. Penguatan kapasitas ekonomi perkotaan.
5. Meningkatkan kualitas masyarakat perkotaan.

IPM Kota Jambi ditargetkan meningkat menurut hasil proyeksi berdasarkan pencapaian IPM tahun-tahun sebelumnya, sebagai acuan adalah pencapaian IPM pada tahun 2020 sebesar 78,37. Peningkatan target IPM ini selaras dengan meningkatnya komponen-komponen pendukung IPM. Komponen IPM yang perannya cukup dinamis dalam mempengaruhi pencapaian IPM diantaranya Pengeluaran Per Kapita Per Tahun yang Disesuaikan. Hal ini terlihat dari tabel di atas bahwa pergerakan komponen lain

seperti Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, relatif lebih lambat kenaikannya.

Pengeluaran Per Kapita Per Tahun, sangat dipengaruhi kondisi perekonomian daerah. Namun yang menjadi persoalan, perekonomian daerah sangat tergantung kepada situasi kondisi perekonomian nasional, regional bahkan internasional. Di sisi lain situasi kondisi perekonomian nasional, regional, dan internasional jauh diluar kewenangan pemerintah daerah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Jambi ditargetkan berkisar antara 5.25-5.75 persen sampai dengan 2023. Target ini diproyeksikan berdasarkan pencapaian LPE tahun 2020 yang merosot tajam ke angka -3,28 persen akibat Pandemi Covid-19. Apabila diasumsikan pemulihan ekonomi berhasil, maka pertumbuhan diproyeksikan stabil, mengingat pencapaian diatas 5 persen itu dapat dikategorikan termasuk tinggi.

Uraian tentang LPE ini akan terkait dengan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini terjadi karena konsep-konsep yang ada saling berkaitan. PDRB atas dasar harga berlaku adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun dasar, yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi (LPE) atau dengan bahasa teknis perhitungan LPE berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun beriringan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan akumulasi pencapaian indikator *outcome* atau *impact* dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah masa lalu, dan proyeksi yang disertai perhitungan atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan kedepan dalam kurun waktu 2018-2023.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai

program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategik RPJMD.

IKU yang termuat dalam RPJMD adalah IKU Kepala Daerah yang merupakan gambaran ukuran keberhasilan Kepala Daerah secara umum dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping pemenuhan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye. Sedangkan IKD merupakan indikator kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Jambi
(Sebelum Perubahan)

No	Indikator	Target Tahun ke				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	A	A	A
2	Persentase tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah	9%	6%	5%	3%	3%
3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	5,1	5,67	6,0	6,40	7,0
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,06	52,39	52,57	52,74	52,86
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,28	5,39	5,50	5,61	5,72
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,56	6,42	6,28	6,14	6,00
7	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8%	9%	9%	9%	9%
8	Indeks Pembangunan Manusia	77,14	77,54	77,94	78,44	78,84

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Jambi
(Setelah Perubahan)

NO.	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan				
			2019		2020		Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Target	Realisasi	Target	Realisasi							
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.33	2.44	2.85	2.55	2.85	2.66	2.77	2.33	2.9	3	3.1	3.2
2.	Nilai SAKIP	B	B	B	BB	B	BB	BB	A	BB	BB	BB	BB
3.	Indeks Pelayanan Publik									3.97 (B)	3.99 (B)	4.02 (B)	4.05 (B)
4.	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan	-	-	-	-	-	-	-	-	81%	84%	86%	88%
5.	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-	56.38%	63.31%	67.09%	70.99%
6.	Indeks Kualitas Air	32.11	37.75	38.27	38.3	39.6	38.5	38.65	38.75	39.75	39.9	40.05	40.2
7.	Indeks Kualitas Udara	80.68	80.7	76.84	80.72	84.51	80.74	80.76	80.78	80.74	80.76	80.78	80.8
8.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	39.33	41.3	44.81	41.7	44.81	42	42.3	42.5	44.85	44.87	44.9	44.92
9.	Indeks Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	78	80	82	84
10.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4.00%	4.00%	8.00%	16.13%	9%	-9.64%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
11.	Realisasi Investasi	410 M	410 M	430,5 M	1,055T	430,5 M	249,4M	474,6 M	498,35 M	474.62 M	498.35 M	523.37 M	575.70 M
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka	-	-	-	-	-	-	-	-	10.37	9.8	9.3	8.98
13.	Angka Harapan Hidup (AHH)	72.34	72.35	72.57	72.35	72.65	72.36	72.36	72.37	72.73	72.81	72.89	72.97
14.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14:25	14.6	14.62	14.61	15.1	14.62	14.63	14.64	15.11	15.38	15.39	15.40
15.	Indeks Pemberdayaan Gender	68.07	68.1	69,83	68.2	69.83	68.3	68.4	68.5	68.30	68.40	68.50	68.50
16.	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	50	-	50.5	-	51	51.5	52	57.9	57.95	58	58.5

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Jambi
(Sebelum Perubahan)

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian							
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,26	5,28	5,39	5,50	5,61	5,72	5,72
	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,36%	2,37%	2,38%	2,39%	2,40%	2,41%	2,41%
	Laju Inflasi	3,02	3,02	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	PDRB Perkapita	48,47 Juta	50,1 juta	52,9 Juta	54,3 Juta	56 juta	57,6 Juta	57,6 Juta
	Indeks Gini	0,375	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35
	Kemiskinan	8,49	8,09	7,69	7,29	6,89	6,89	7,49
	Indeks Pembangunan Masyarakat	76,74	77,14	77,54	77,94	78,44	78,44	78,44
	Angka melek huruf	0,99						
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,68	10,68	10,69	10,70	10,71	10,72	10,72
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,25	14,60	14,61	14,62	14,63	14,64	14,64
	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	21,32	21,32	17,32	12,32	8,32	4,32	4,32
	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,34	72,35	72,35	72,36	72,36	72,37	72,37
	Persentase balita gizi buruk							
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,96%	65%	65,25%	65,50%	65,75%	66%	66%
	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,50	5,36	5,22	5,08	4,94	4,8	4,8
	Rasio Penduduk yang bekerja							
	Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	N/A	96,23%	96,46%	96,69%	96,92%	97,15%	97,15%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,28%	85,5%	86%	87%	87,5%	88,5%	88,5%
	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4%	8%	9%	9%	9%	9%	9%
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Skor Pola Pangan Harapan	87,9	88,2	88,6	89	89,5	91	9,1
	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,36%	2,37%	2,38%	2,39%	2,40%	2,41%	2,41%

Perubahan RPJMD Kota Jambi 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ASPEK DAYA SAING							
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Urusan Wajib							
	Terkait Pelayanan Dasar							
	PEDIDIKAN							
	Pendidikan dasar							
	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD dan PNF	- APK PAUD usia 5-6 tahun 75 %, usia 3-5 50 %, usia 0-3 20%	'APK PAUD usia 5-6 tahun 90 %, usia 3-5 55 %, usia 0-3 30%	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 60%, usia 0- 3 35%	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 65%, usia 0- 3 40%	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 70%, usia 0- 3 45%	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3- 5 75%, usia 0- 3 50%	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3- 5 75%, usia 0-3 50%
	Angka partisipasi kasar (APK) SD	114,3%	114,4%	114,5%	114,6%	114,7%	114,8%	114,8%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	97,6%	97,8%	97,9%	98%	98,1%	98,2%	98,2%
	Angka Partisipasi SD	100,48%	100,62%	100,70%	100,80%	100,85%	100,88%	100,88%
	Rerata UAS SD	60,25%	60,50%	60,65%	60,73%	60,79%	60,82%	60,82%
	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	98,8%	99,0%	99,3%	99,5%	99,6%	'99,8%	'99,8%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	71,7%	72,0%	72,3%	72,5%	72,6%	72,8%	72,8%
	Angka Partisipasi SMP	83%	83,5%	83,8%	84%	84,2%	84,4%	84,4%
	Rerata UN SMP	50,93%	51,20%	51,40%	51,50%	51,60%	51,65%	51,65%
	Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah							

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KESEHATAN							
	Meningkatkan status puskesmas yang terakreditasi	5 Puskesmas utama dan 0 Puskemas PARIpurna	3 Puskesmas Utama	8 Puskesmas Utama	6 Puskesmas Utama	3 Puskesmas Paripurna	2 Puskesmas Paripurna	2 Puskesmas Paripurna
	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah memenuhi kelengkapan Sarana, Prasarana dan alat kesehatan sesuai standar minimal 85%.	20%	20%	30%	40%	50%	60%	60%
	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	93,37%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Pelayanan Kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kesehatan rujukan	B	B	B	A	A	A	A
	Persentase pelayanan penyakit menular dan tidak menular	76,50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Rumah Sakit pemerintah yang ter akreditasi	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Puskesmas yang menjalankan pelayanan kesehatan tradisional	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelayanan Imunisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pelayanan gizi masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan pelayanan kesehatan remaja	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan pelayanan kesehatan lansia	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian Keluarga berPHBS	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
	Cakupan Kelurahan yang Melaksanakan STBM	40%	60%	70%	75%	80%	85%	85%
	Persentase pelayanan Kesehatan olah raga dan kesehatan kerja di puskesmas	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Ketenagaan kesehatan sesuai dengan kompetensi	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Peningkatan pelayanan kefarmasian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan Pasien masyarakat miskin	24.282 org	30.000 org	30.000 org	30.000 org	30.000 org	30.000 org	30.000 org

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	N/A	5,1	5.67	6.0	6.40	7.00	7.00
	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	50.59%	53,07%	60,77%	70,61%	78,25%	85,79%	85,79%
	Cakupan Pelayanan Air Minum	66,39%	67,39%	69,39%	71,39%	73,39%	75,39%	75,39%
	Cakupan Pelayanan Air Limbah	0,39%	0,97%	1,56%	2,16%	2,77%	3,38%	3,38%
	Cakupan jalan status kota dalam Kondisi Baik	86,32%	89,06%	91,79%	94,53%	97,26%	100%	100%
	Cakupan Bangunan dalam kondisi baik	37.20%	53,37%	61,46%	69,54%	77,63%	85,18%	85,18%
	Cakupan Kesesuaian Ruang	94.46%	95%	95.2%	95.5%	95.7%	95.9%	95.9%
	Cakupan jembatan dalam Kondisi Baik	94.59%	94.59%	97.3%	97.3%	100%	100%	100%
	Cakupan Sistem Jaringan Drainase/sungai dalam Kondisi Baik	n/a	5,26	15,79%	47,37%	57,89%	68,42%	68,42%
	Cakupan dokumen perencanaan yang diimplementasikan	76%	80%	84%	90%	94%	100%	100%
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	Persentase penanganan Luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	78,79%	78,79%	83%	87%	87%	87%	87%
	Persentase Pemenuhan Rumah bagi MBR	12,5%	12,5%	25%	50%	75%	100%	100%
	Persentase Permukiman yang dilayani Utilitas Umum	70%	76%	82%	88%	94%	100%	100%
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MSAYARAKAT							
	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	82	82	80	75	66	66	66
	Cakupan pelayanan kebakaran dan kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Petugas perlindungan masyarakat	45%	69%	74%	79%	84%	98%	98%
	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	60%	75%	85%	90%	90%	98%	98%
	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Jambi	55%	69%	74%	79%	84%	98%	98%
	Cakupan pelayanan kesiagaan dini	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Cakupan Peningkatan Pelayanan kebakaran Dan Penyelamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan kondisi daerah yang kondusif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase peningkatan peran forum kemasyarakatan dalam mengantisipasi sumber potensi konflik di daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	SOSIAL							
	Persentase PMKS yang tertangani	65%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
	Persentase pelayanan bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pemberdayaan sosial potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menangani PMKS	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase peningkatan penanganan jumlah keluarga miskin	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	LAYANAN WAJIB NON DASAR							
	TENAGA KERJA							
	Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan							
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	Indeks Pembangunan Gender	94.89	94.90	94.91	94.93	94.94	94.95	94.95
	Indeks Pemberdayaan Gender	68.07	68.10	68.20	68.30	68.40	68.50	68.50
	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	50%	70%	80%	90%	100%	100%	100%
	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60.23%	60.23%	61.43%	63%	64%	66%	66%
	Penurunan Ratio KDRT	0,025%	0,023%	0,021%	0,02%	0,019%	0,017%	0,017%
	Rasio Penurunan Kekerasan Terhadap Anak	0,0247	0,02371	0,0227	0,0217	0,0207	0,0197	0,0197

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	75%	80%	82%	85%	87%	90%	90%
	PANGAN							
	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (gram/ kapita/ hari)	2.944	2.944	2,989	3.080	3.180	3.200	3.200
		76,24	76,24	79	82	85	88	88
	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	87,90%	90,59%	95,80%	96,40%	96,40%	96,60%	96,60%
	Penurunan Pangan segar yang Tercemar	7	7	6	5	4	3	3
	PERTANAHAN							
	Persentase luas lahan yang bersertifikat							
	LINGKUNGAN HIDUP							
	Indeks Kualitas Air	32,11	37,75	38,30	38,50	38,65	38,75	38,75
	Indeks Kualitas Udara	80,68	80,70	80,72	80,74	80,76	80,78	80,78
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	39,33	41,30	41,70	42,00	42,30	42,50	42,50
	Persentase Jumlah Sampah yang ditangani	79,16%	78,66%	78,16%	77,66%	77,16%	76,66%	76,66%
	Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	11,73%	12,23%	12,73%	13,23%	13,73%	14,23%	14,23%
	Jumlah Kegiatan Usaha yang Sudah Mengelola Lingkungan sesuai dengan Dokumen Lingkungan	136	145	153	160	170	180	180
	Persentase Kecukupan Ruang Terbuka Hijau Publik	11,79%	12%	14%	16%	18%	20%	20%
	ADMINISTRASI PECATATAN SIPIL							
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	93%	93%	96%	99%	100%	100%	100%
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	82%	82%	86,5%	91 %	95,5%	100%	100%
	Validitas Database Kependudukan	87%	87%	89%	91%	93%	95%	95%
	Cakupan Pemanfaatan data Kependudukan	-	26,8%	33,3%	45%	72,7%	100%	100%
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							
	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60.23%	60.23%	61.43%	63%	64%	66%	66%
	Persentase Kelompok UEM yang Aktif	73%	75%	77%	79%	81%	83%	83%

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	63%	65%	66%	67%	68%	70%	70%
	Persentase Pemanfaatan Alat Teknologi Tepat Guna	70%	75%	77%	80%	83%	85%	85%
	Usulan Sarana Prasarana Kelurahan yang Terakomodir	92%	93%	94%	95%	96%	97%	97%
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	Laju Pertumbuhan Penduduk	N/A	1,05	1,05	1,03	1,01	1,01	1,01
	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	N/A	96,23%	96,46%	96,69%	96,92%	97,15%	97,15%
	PERHUBUNGAN							
	Capaian ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan	65%	65%	74%	84%	91%	100%	100%
	Cakupan yang terlayani angkutan umum	33.89%	41.39%	54.75%	70.19%	85.09%	100%	100%
	Pengurangan Jumlah Titik Kemacetan	60 Titik	41 Titik	36 Titik	28 Titik	20 Titik	0 Titik	0 Titik
	Persentase Pelayanan Perparkiran	68.17%	74.76%	80.74%	88.99%	94.58%	100%	100%
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,33	2,33	2,44	2,55	2,66	2,77	2,77
	Persentase Peningkatan ekosistem TIK	20%	30%	45%	60%	70%	80%	80%
	Cakupan akses dan kualitas informasi publik	30%	40%	60%	70%	80%	90%	90%
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7,61%	8,08%	8,54%	9,01%	9,47%	9,94%	10,00%
	Persentase koperasi berkualitas	13%	16,06%	19,27%	23,85%	29,82%	36,70%	37,00%
	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	48,31%	49%	49,69%	50,38%	51,07%	51,76%	51,76%
	Persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT	41,28%	48,16%	57,33%	68,8%	82,56%	98,62%	98,62%
	PENANAMAN MODAL							
	Realisasi Investasi	410 M	430.5 M	430.5 M	474.62 M	498.35 M	523.37 M	523.37 M

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	50	50,5	51	51,5	52	52
	Persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam organisasi	30%	40%	50%	60%	70%	80%	80%
	Persentase pembinaan cabang olahraga prestasi	68,89%	71,11%	73,33%	75,56%	77,78%	80%	80%
STATISTIK								
	Tingkat ketersediaan data/informasi/statistik daerah	5%	10%	20%	39%	40%	50%	50%
PERSANDIAN								
	Rasio Jumlah Informasi Milik Pemerintah yang diamankan	15%	20%	35%	50%	55%	65%	65%
KEBUDAYAAN								
	Jumlah pelestarian, penyelenggaraan even seni dan budaya	5	5	5	6	6	6	6
PERPUSTAKAAN								
	Jumlah Rata - Rata pengunjung Perpustakaan Pertahun	32.092 Pengunjung	35.173 Pengunjung	37.836 Pengunjung	42.836 Pengunjung	47.836 Pengunjung	52.836 Pengunjung	52.836 Pengunjung
KEARSIPAN								
	Jumlah arsip yang terselamatkan	46.019	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	52.019
	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	-	20	36	36	36	36	164
LAYANAN URUSAN PILIHAN								
PARIWISATA								
	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,36%	2,37%	2,38%	2,39%	2,40%	2,41%	2,41%

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah kunjungan wisatawan	400.000	450.000	500.000	600.000	650.000	700.000	700.000
	PAD sektor pariwisata	43 M	43,5 M	45,5 M	47 M	48 M	50 M	50 M
	Lama Kunjungan wisata	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
	PERTANIAN							
	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (gram/ kapita/ hari)	2.944	2.944	2,989	3.080	3.180	3.200	3.200
		76,24	76,24	79	82	85	88	88
	PERDAGANGAN							
	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	20	36	52	68	84	100	100
	Cakupan Bina Perdagangan	88%	90%	92,25%	95,25%	97,50%	100%	100%
	PERINDUSTRIAN							
	Persentase Daya Saing Produk IKM	4,3	4,3	5,35	6,5	7,5	8,3	8,3
	Cakupan Bina IKM	4,3	4,3	5,35	6,5	7,5	8,3	8,3
	PENUNJANG URUSAN							
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	KEUANGAN							
	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4%	8%	9%	9%	9%	9%	9%
	Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pengendalian Keuangan Daerah Tepat Waktu dan sesuai aturan	33 OPD	33 OPD	35 OPD	37 OPD	38 OPD	40 OPD	40 OPD
	Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja	75%	75%	80%	85%	95%	100%	100%
	Jumlah OPD dan BLUD yang mneyajikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dan SAK	37 OPD	37 OPD	40 OPD dan 11 BLUD	40 OPD dan 21 BLUD	40 OPD dan 21 BLUD	40 OPD dan 22 BLUD	40 OPD dan 22 BLUD

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Data Barang Milik Daerah yang Akurat dan Tepat waktu	20 PD	20 PD	20 PD	30 PD	40 PD	40 PD	40 PD
	Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Keakuratan Basis Data dan Pelaporan Pajak	60%	60%	63%	65%	68%	70%	70%
	Persentase Penyelesaian Piutang Pajak	10%	10%	15%	20%	25%	30%	30%
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
	Indeks Profesionalitas ASN	55%	56%	57,5%	59%	60,5%	62%	62%
	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan	93,23%	93,23%	96%	97%	98%	100%	100%
	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	85%	85%	89%	91%	93%	95%	95%
	Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan pengendalian	72%	72%	83%	88%	94%	100%	100%
	Persentase Penilaian Kinerja ASN	85%	85%	87%	87%	87%	87%	87%
	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	32%	32%	46%	53%	60%	67%	67%
	Persentase Pengembangan Kualifikasi ASN			27%	52%	84%	100%	100%
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
	Persentase Dokumen hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PENGAWASAN							
	Indeks persepsi anti Korupsi	n/a	3,65	3,69	3,73	3,75	3,8	3,8
	Cakupan pelaksanaan pembinaan internal dan pengendalian kebijakan KDH	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	SETWAN							
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	1 dok	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran untuk mengkomodir Program- program kerja DPRD	9 dok	9 dok	9 dok	9dok	9dok	9dok	9dok

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SEKRETARIAT DAERAH								
	Meningkatnya kinerja layanan keprotokolan	70%	70%	80%	90%	100%	100%	100%
	Jumlah telaah/rekomendasi staf ahli walikota terhadap kebijakan pemerintah daerah	1 Telaah/rekomendasi	1 Telaah/rek omendasi	2 Telaah/ rekomen dasi	3 Telaah rekomen dasi	3 Telaah rekomen dasi	3 Telaah rekomen dasi	3 Telaah rekomen dasi
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah jabatan dan kantor Sekretariat Daerah	32,08%	32,08%	17,3%	17,07%	17,07%	17,07%	17,07%
	Ketepatan waktu Penyampaian LPPD	48%	48%	61%	74%	87%	100%	100%
	Persentase Ketersediaan Lahan Tanah Untuk Pelayanan Masyarakat	13%	13%	16%	20%	23%	32%	32%
	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	N/A	3 Kec	6 Kec	9 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec
	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diselesaikan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Persentase penyelesaian perkara Pemerintah Daerah	27,27%	27,27%	27,27%	27,27%	27,27%	27,27%	27,27%
	Persentase Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Kesepakatan bersama yang di tindaklanjuti	66,67%	66,67%	76,92%	85,71%	93,33%	100%	100%
	Persentase Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan Monitoring Bidang perekonomian	45%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
	Rata-rata indeks pelayanan publik	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Persentase meningkatnya kualitas anjab dan ABK sesuai dengan peraturan yang berlaku	21%	16%	30%	50%	75%	100%	100%
	Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja	100%	15%	38%	59%	79%	100%	100%
	Persentase meningkatnya kualitas anjab dan ABK sesuai dengan peraturan yang berlaku	16%	16%	38%	59%	79%	100%	100%
	Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja	15%	15%	30%	50%	75%	100%	100%
	Rata-rata indeks pelayanan publik	B	B	B	A	A	A	A
	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kepemudaan	66,67%	66,67%	75%	80%	100%	100%	100%
	Persentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	71,43%	71,43%	72,23%	73,68%	75%	76,19%	76,19%

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase tertib administrasi pembangunan	50%	70%	75%	80%	85%	100%	100%
	Persentase Kinerja pengadaan barang/jasa	19,13%	19,13%	37,81%	30,44%	65,00%	69,06%	69,06%
PEMERINTAHAN UMUM								
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN	83%	85%	89%	92%	95%	98%	98%
	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan	40%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir	50%	50%	50%	60%	70%	80%	80%
	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditigkat kelurahan	40%	45%	50%	60%	70%	80%	80%

ASPEK DAYA SAING								
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Kemampuan Ekonomi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi		N/A	BB	BB	A	A	A
1.2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		N/A	2,33	2,44	2,55	2,66	2,77
1.3	Nilai SAKIP		B	B	BB	BB	BB	A
2.	Pertanian							
2.1	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (gram/ kapita/ hari)	Energi	2.944	2.944	2,989	3.080	3.180	3.200
		Protein	76,24	76,24	79	82	85	88

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Jambi
(Setelah Perubahan)

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun					
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian							
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,26	5,28	5,39	2,75-3,25	3,25-4,25	4,25-5,25	4,25-5,25
	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,36%	2,37%	2,38%	2,39%	2,40%	2,41%	2,41%
	Laju Inflasi	3,02	3,02	3,00	3,00-3,75	3,00-4,10	3,10-4,20	3,10-4,20
	PDRB Perkapita	48,47 Juta	50,1 juta	52,9 Juta	54,3 Juta	56 juta	57,6 Juta	57,6 Juta
	Indeks Gini	0,375	0,37	0,36	0,32	0,315	0,31	0,31
	Kemiskinan	8,49	8,09	7,69	9,02	9,0	8,9	8,8
	Indeks Pembangunan Masyarakat	76,74	77,14	77,54	78,39	78,41	78,45	78,45
	Angka melek huruf	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,68	10,68	10,69	10,93	11,21	11,22	11,22
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,25	14,60	14,61	15,11	15,38	15,39	15,39
	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	21,32	21,32	17,32	12,32	8,32	4,32	4,32
	Umur Harapan Hidup (UHH)	72,34	72,35	72,35	72,73	72,81	72,89	72,97
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,96%	65%	65,25%	65,50%	65,75%	66%	66%
	Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	N/A	96,23%	96,46%	96,69%	96,92%	97,15%	97,15%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,28%	85,5%	86%	86%	87%	88%	89%
	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4%	8%	9%	9%	9%	9%	9%
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Skor Pola Pangan Harapan	87,9	88,2	88,6	88,8	91	93,1	93,1

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun					
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ASPEK DAYA SAING							
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Urusan Wajib							
	Terkait Pelayanan Dasar							
	PEDIDIKAN							
	Pendidikan dasar							
	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD dan PNF	- APK PAUD usia 5-6 tahun 75 %, usia 3-5 50 %, usia 0-3 20%	'APK PAUD usia 5-6 tahun 90 %, usia 3-5 55 %, usia 0-3 30%	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 60%, usia 0-3 35%	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 65%, usia 0-3 40%	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 70%, usia 0-3 45%	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 75%, usia 0-3 50%	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 75%, usia 0-3 50%
	Angka partisipasi kasar (APK) SD	114,3%	114,4%	114,5%	114,6%	114,7%	114,8%	114,8%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	97,6%	97,8%	97,9%	98%	98,1%	98,2%	98,2%
	Angka Partisipasi SD	100,48%	100,62%	100,70%	100,80%	100,85%	100,88%	100,88%
	Rerata UAS SD	60,25%	60,50%	60,65%	60,73%	60,79%	60,82%	60,82%
	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	98,8%	99,0%	99,3%	99,5%	99,6%	'99,8%	'99,8%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	71,7%	72,0%	72,3%	72,5%	72,6%	72,8%	72,8%
	Angka Partisipasi SMP	83%	83,5%	83,8%	84%	84,2%	84,4%	84,4%
	Rerata UN SMP	50,93%	51,20%	51,40%	51,50%	51,60%	51,65%	51,65%
	Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah							
	KESEHATAN							
	Meningkatkan status puskesmas yang terakreditasi	5 Puskesmas utama dan 0 Puskemas PAripurna	3 Puskesmas Utama	8 Puskesmas Utama	6 Puskesmas Utama	3 Puskesmas Paripurna	2 Puskesmas Paripurna	2 Puskesmas Paripurna
	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah memenuhi kelengkapan Sarana, Prasarana dan alat kesehatan sesuai standar minimal 85%.	20%	20%	30%	40%	50%	60%	60%
	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	93,37%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Pelayanan Kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kesehatan rujukan	B	B	B	A	A	A	A
	Persentase pelayanan penyakit menular dan tidak menular	76,50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perubahan RPJMD Kota Jambi 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun					
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase Rumah Sakit pemerintah yang ter akreditasi	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Puskesmas yang menjalankan pelayanan kesehatan tradisional	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelayanan Imunisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pelayanan gizi masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan pelayanan kesehatan remaja	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan pelayanan kesehatan lansia	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian Keluarga berPHBS	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
	Cakupan Kelurahan yang Melaksanakan STBM	40%	60%	70%	75%	80%	85%	85%
	Persentase pelayanan Kesehatan olah raga dan kesehatan kerja di puskesmas	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Ketenagaan kesehatan sesuai dengan kompetensi	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Peningkatan pelayanan kefarmasian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan Pasien masyarakat miskin	24.282 org	30.000 org	30.000 org	30.000 org	30.000 org	30.000 org	30.000 org
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	N/A	5,1	5,67	7,47	7,5	7,7	7,7
	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	50,59%	53,07%	60,77%	56,38%	63,31%	67,09%	67,09%
	Cakupan Pelayanan Air Minum	66,39%	67,39%	69,39%	71,39%	73,39%	75,39%	75,39%
	Cakupan Pelayanan Air Limbah	0,39%	0,97%	1,56%	2,16%	2,77%	3,38%	3,38%
	Cakupan jalan status kota dalam Kondisi Baik	86,32%	89,06%	91,79%	94,53%	97,26%	100%	100%
	Cakupan Bangunan dalam kondisi baik	37,20%	53,37%	61,46%	69,54%	77,63%	85,18%	85,18%
	Cakupan Kesesuaian Ruang	94,46%	95%	95,2%	95,5%	95,7%	95,9%	95,9%
	Cakupan jembatan dalam Kondisi Baik	94,59%	94,59%	97,3%	97,3%	100%	100%	100%
	Sistem Cakupan Jaringan Drainase/sungai dalam Kondisi Baik	n/a	5,26	15,79%	47,37%	57,89%	68,42%	68,42%
	Cakupan dokumen perencanaan yang diimplementasikan	76%	80%	84%	90%	94%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun					
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	Persentase penanganan Luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	78,79%	78,79%	83%	87%	87%	87%	87%
	Persentase Pemenuhan Rumah bagi MBR	12,5%	12,5%	25%	50%	75%	100%	100%
	Persentase Permukiman yang dilayani Utilitas Umum	70%	76%	82%	88%	94%	100%	100%
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MSAYARAKAT							
	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan	-	-	-	81%	84%	96%	100%
	Cakupan pelayanan kebakaran dan kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Petugas perlindungan masyarakat	45%	54%	68%	72%	80%	85%	85%
	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	60%	75%	85%	90%	90%	98%	98%
	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Jambi	55%	69%	74%	79%	84%	98%	98%
	Cakupan pelayanan kesiagaan dini	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Peningkatan Pelayanan kebakaran Dan Penyelamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan kondisi daerah yang kondusif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase peningkatan peran forum kemasyarakatan dalam mengantisipasi sumber potensi konflik di daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	SOSIAL							
	Persentase PMKS yang tertangani	65%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
	Persentase pelayanan bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pemberdayaan sosial potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menangani PMKS	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase peningkatan penangan jumlah keluarga miskin	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun					
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	LAYANAN WAJIB NON DASAR							
	TENAGA KERJA							
	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.56	6.56	6.42	10.37	9.8	9.3	9.3
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	Indeks Pembangunan Gender	94.89	94.90	94.91	94.95	94.05	95.0	95.0
	Indeks Pemberdayaan Gender	68.07	68.10	68.20	68.30	68.40	68.50	68.50
	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	50%	70%	80%	70%	80%	80%	80%
	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60.23%	60.23%	61.43%	87.0%	88%	89%	89%
	Penurunan Ratio KDRT	0,025%	0,023%	0,021%	0,02%	0,019%	0,017%	0,017%
	Rasio Penurunan Kekerasan Terhadap Anak	0,0247	0,02371	0,0227	0.054	0.052	0.05	0.05
	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	75%	80%	82%	85%	87%	90%	90%
	PANGAN							
	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (gram/ kapita/ hari)	2.944	2.944	2,989	3.080	3.180	3.200	3.200
		76,24	76,24	79	82	85	88	88
	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	88,5	88,5	89	89,5	90	90,5	90,5
	Penurunan Pangan segar yang Tercemar	7	7	6	5	4	3	3
	PERTANAHAN							
	Persentase luas lahan yang bersertifikat							
	LINGKUNGAN HIDUP							
	Indeks Kualitas Air	32,11	37,75	38,30	39.75	39.9	40.05	40.05
	Indeks Kualitas Udara	80,68	80,70	80,72	80,74	80,76	80,78	80,78
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	39,33	41,30	41,70	44.85	44.87	44.9	44.9

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun					
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase Jumlah Sampah yang ditangani	79,16%	78,66%	78,16%	77,66%	77,16%	76,66%	76,66%
	Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	11,73%	12,23%	12,73%	13,23%	13,73%	14,23%	14,23%
	Jumlah Kegiatan Usaha yang Sudah Mengelola Lingkungan sesuai dengan Dokumen Lingkungan	136	145	153	160	170	180	180
	Persentase Kecukupan Ruang Terbuka Hijau Publik	11,79%	12%	14%	16%	18%	20%	20%
	ADMINISTRASI PECATATAN SIPIL							
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	93%	93%	96%	99%	100%	100%	100%
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	82%	82%	86,5%	99%	100%	100%	100%
	Validitas Database Kependudukan	87%	87%	89%	91%	93%	95%	95%
	Cakupan Pemanfaatan data Kependudukan	-	26,8%	33,3%	53,26%	80,4%	53,26%	53,26%
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							
	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23%	60,23%	61,43%	87,0%	88%	89%	89%
	Persentase Kelompok UEM yang Aktif	73%	75%	77%	79%	81%	83%	83%
	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	63%	65%	66%	67%	68%	70%	70%
	Persentase Pemanfaatan Alat Teknologi Tepat Guna	70%	75%	77%	80%	83%	85%	85%
	Usulan Sarana Prasarana Kelurahan yang Terakomodir	92%	93%	94%	95%	96%	97%	97%
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	Laju Pertumbuhan Penduduk	N/A	1,05	1,05	1,03	1,01	1,01	1,01
	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	N/A	96,23%	96,46%	96,69%	96,92%	97,15%	97,15%
	PERHUBUNGAN							
	Capaian ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan	65%	65%	74%	84%	91%	100%	100%
	Cakupan yang terlayani angkutan umum	33,89%	41,39%	54,75%	70,19%	85,09%	100%	100%
	Pengurangan Jumlah Titik Kemacetan	60 Titik	41 Titik	36 Titik	28 Titik	20 Titik	0 Titik	0 Titik
	Persentase Pelayanan Perparkiran	68,17%	74,76%	80,74%	88,99%	94,58%	100%	100%
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun					
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,33	2.44	2.55	2.9	3	3.1	3.1
	Persentase Peningkatan ekosistem TIK	20%	30%	45%	60%	70%	80%	80%
	Cakupan akses dan kualitas informasi publik	30%	40%	60%	70%	80%	90%	90%
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7,61%	8,08%	8,54%	9,01%	9,47%	9,94%	10,00%
	Persentase koperasi berkualitas	13%	16,06%	19,27%	23,85%	29,82%	36,70%	37,00%
	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	48,31%	49%	49,69%	50,38%	51,07%	51,76%	51,76%
	Persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT	41,28%	48,16%	57,33%	68,8%	82,56%	98,62%	98,62%
	PENANAMAN MODAL							
	Realisasi Investasi	410 M	430.5 M	430.5 M	474.62 M	498.35 M	523.37 M	523.37 M
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	50	50,5	57.9	57.95	58	58
	Persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam organisasi	30%	40%	50%	60%	70%	80%	80%
	Persentase pembinaan cabang olahraga prestasi	68,89%	71,11%	73,33%	78%	80%	82%	82%
	STATISTIK							
	Tingkat ketersediaan data/informasi/statistik daerah	5%	10%	20%	39%	40%	50%	50%
	PERSANDIAN							
	Rasio Jumlah Informasi Milik Pemerintah yang diamankan	15%	20%	35%	50%	55%	65%	65%
	KEBUDAYAAN							
	Jumlah pelestarian, penyelenggaraan even seni dan budaya	5	5	5	6	6	6	6

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun					
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PERPUSTAKAAN							
	Jumlah Rata - Rata pengunjung Perpustakaan Pertahun	32.092 Pengunjung	35.173 Pengunjung	37.836 Pengunjung	42.836 Pengunjung	47.836 Pengunjung	52.836 Pengunjung	52.836 Pengunjung
	KEARSIPAN							
	Jumlah arsip yang terselamatkan	46.019	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	52.019
	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	-	20	36	36	36	36	164
	LAYANAN URUSAN PILIHAN							
	PARIWISATA							
	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,36%	2,37%	2,38%	2,39%	2,40%	2,41%	2,41%
	Jumlah kunjungan wisatawan	400.000	450.000	500.000	600.000	650.000	700.000	700.000
	PAD sektor pariwisata	43 M	43,5 M	45,5 M	47 M	48 M	50 M	50 M
	Lama Kunjungan wisata	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
	PERTANIAN							
	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (gram/ kapita/ hari)	2.944	2.944	2.989	3.080	3.180	3.200	3.200
		76,24	76,24	79	82	85	88	88
	PERDAGANGAN							
	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	20	36	52	68	84	100	100
	Cakupan Bina Perdagangan	88%	90%	92,25%	95,25%	97,50%	100%	100%
	PERINDUSTRIAN							
	Persentase Daya Saing Produk IKM	4,3	4,3	5,35	6,5	7,5	8,3	8,3
	Cakupan Bina IKM	4,3	4,3	5,35	6,5	7,5	8,3	8,3

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun					
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PENUNJANG URUSAN							
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	KEUANGAN							
	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4%	8%	9%	9%	9%	9%	9%
	Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pengendalian Keuangan Daerah Tepat Waktu dan sesuai aturan	33 OPD	33 OPD	35 OPD	37 OPD	38 OPD	40 OPD	40 OPD
	Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja	75%	75%	80%	85%	95%	100%	100%
	Jumlah OPD dan BLUD yang mneyajikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dan SAK	37 OPD	37 OPD	40 OPD dan 11 BLUD	40 OPD dan 21 BLUD	40 OPD dan 21 BLUD	40 OPD dan 22 BLUD	40 OPD dan 22 BLUD
	Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Data Barang Milik Daerah yang Akurat dan Tepat waktu	20 PD	20 PD	20 PD	30 PD	40 PD	40 PD	40 PD
	Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Keakuratan Basis Data dan Pelaporan Pajak	60%	60%	63%	65%	68%	70%	70%
	Persentase Penyelesaian Piutang Pajak	10%	10%	15%	20%	25%	30%	30%
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
	Indeks Profesionalitas ASN	55%	56%	57,5%	59%	60,5%	62%	62%
	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan	93,23%	93,23%	96%	97%	98%	100%	100%
	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	85%	85%	89%	91%	93%	95%	95%
	Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan pengendalian	72%	72%	83%	88%	94%	100%	100%
	Persentase Penilaian Kinerja ASN	85%	85%	87%	87%	87%	87%	87%
	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	32%	32%	46%	53%	60%	67%	67%
	Persentase Pengembangan Kualifikasi ASN			27%	52%	84%	100%	100%
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
	Persentase Dokumen hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun					
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PENGAWASAN							
	Indeks persepsi anti Korupsi	n/a	3,65	3,69	3,73	3,75	3,8	3,8
	Cakupan pelaksanaan pembinaan internal dan pengendalian kebijakan KDH	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	SETWAN							
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	1 dok	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran untuk mengakomodir Program- program kerja DPRD	9 dok	9 dok	9 dok	9dok	9dok	9dok	9dok
	SEKRETARIAT DAERAH							
	Meningkatnya kinerja layanan keprotokolan	70%	70%	80%	90%	100%	100%	100%
	Jumlah telaah/rekomendasi staf ahli walikota terhadap kebijakan pemerintah daerah	1 Telaah/rekomendasi	1 Telaah/rekomendasi	2 Telaah/ rekomendasi	3 Telaah rekomendasi	3 Telaah rekomendasi	3 Telaah rekomendasi	3 Telaah rekomendasi
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah jabatan dan kantor Sekretariat Daerah	32,08%	32,08%	17,3%	17,07%	17,07%	17,07%	17,07%
	Ketepatan waktu Penyampaian LPPD	48%	48%	61%	74%	87%	100%	100%
	Persentase Ketersediaan Lahan Tanah Untuk Pelayanan Masyarakat	13%	13%	16%	20%	23%	32%	32%
	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	N/A	3 Kec	6 Kec	9 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec
	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diselesaikan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Presentase penyelesaian perkara Pemerintah Daerah	27,27%	27,27%	27,27%	27,27%	27,27%	27,27%	27,27%
	Persentase Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Kesepakatan bersama yang di tindaklanjuti	66,67%	66,67%	76,92%	85,71%	93,33%	100%	100%
	Persentase Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan Monitoring Bidang perekonomian	45%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
	Rata-rata indeks pelayanan publik	B	B	B	3.97 (B)	3.99 (B)	4.02 (B)	4.02 (B)
	Persentase meningkatnya kualitas anjab dan ABK sesuai dengan peraturan yang berlaku	21%	16%	30%	50%	75%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun						
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja	100%	15%	38%	59%	79%	100%	100%	
	Persentase meningkatnya kualitas anjab dan ABK sesuai dengan peraturan yang berlaku	16%	16%	38%	59%	79%	100%	100%	
	Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja	15%	15%	30%	50%	75%	100%	100%	
	Rata-rata indeks pelayanan publik	B	B	B	A	A	A	A	
	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kepemudaan	66,67%	66,67%	75%	80%	100%	100%	100%	
	Persentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	71,43%	71,43%	72,23%	73,68%	75%	76,19%	76,19%	
	Persentase tertib administrasi pembangunan	50%	70%	75%	80%	85%	100%	100%	
	Persentase Kinerja pengadaan barang/jasa	19,13%	19,13%	37,81%	30,44%	65,00%	69,06%	69,06%	
	PEMERINTAHAN UMUM								
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN	83%	85%	89%	92%	95%	98%	98%	
	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan	40%	70%	75%	80%	85%	90%	90%	
	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir	50%	50%	50%	60%	70%	80%	80%	
	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditigkat kelurahan	40%	45%	50%	60%	70%	80%	80%	
	ASPEK DAYA SAING								
	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
	Kemampuan Ekonomi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	B	B	BB	BB	BB	BB	
1.2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	N/A	2,44	2,55	2,9	3	3,1	3,1	
1.3	Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	
2.	Pertanian								
2.1	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (gram/ kapita/ hari)	Energi	2.944	2.944	2.989	3.080	3.180	3.200	3.200
		Protein	76,24	76,24	79	82	85	88	88

BAB IX PENUTUP

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Jambi agar terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Jambi dan pembangunan nasional selama sisa periode pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 sangat ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kota Jambi dengan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, komitmen dan dukungan DPRD Kota Jambi, kerjasama dengan *stakeholders* pembangunan lainnya, serta partisipasi penuh dari seluruh masyarakat Kota Jambi.

Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi agar dokumen RPJMD benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh perangkat daerah dalam koordinasi bersama Bappeda Kota Jambi.

9.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kota Jambi, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/ kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/ kota dengan pembangunan Daerah provinsi.

- b. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya;
- c. RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada huruf a antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode berikutnya;
- d. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023 ini disusun dengan target sampai dengan Tahun 2024, sehingga Perubahan RPJMD ini dapat menjadi pedoman penyusunan RKPD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dan mengacu pada RPJPD Kota Jambi serta RPJMD Provinsi Jambi yang berlaku.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan Perubahan Atas RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Jambi agar melaksanakan program-program dalam Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program,

Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan Atas RPJMD ini;

3. Penjabaran lebih lanjut Perubahan Atas RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi;
4. Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan yang disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan Walikota;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda Kota Jambi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penjabaran Perubahan Atas RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 ke dalam Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
6. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).